



BAPPEDA KALTIM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berani Untuk Kaltim Berdaulat



kaltimprov.go.id



pemprov kaltim



pemprov_kaltim



EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2022



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta yang terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana

pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, oleh karena Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dan pelantikannya pada tanggal 1 Oktober 2018, sehingga periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjabarkan visi dan misi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2023, dengan 5 (lima) misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tadi; selanjutnya tujuan dan sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berupa capaian dari Indikator Kinerja dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program serta dampak (impact) dari sasaran dan tujuan yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Keterkaitan antara visi dan misi dengan perumusan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan menjadi dasar dalam penilaian Indikator Kinerja Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran dampak (Impact) dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, kemudian menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat hasil (outcome) dari program perangkat daerah dengan aspek pelayanan umum berdasarkan Renstra perangkat daerah Tahun 2019-2023 dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional maupun daerah dilakukan koordinasi teknis pembangunan tahunan pada tahapan perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), pengendalian dan evaluasi (ex-post).

Berkaitan dengan ketentuan ini, maka harus dilakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; namun yang perlu diperhatikan bahwa evaluasi ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan tahun berkenaan; mengingat evaluasi pada saat ini sudah memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2021 yang merupakan kelanjutan dari evaluasi tahun 2019 dan 2020, dengan memperhatikan hasil yang telah dicapai (capaian) pada tahun 2019 dan 2020 tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN

mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dalam

RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 (tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan RKPD tahun 2020 pelaksanaan kebijakan RPJMD dilakukan pengendalian dan evaluasi yang antara lain memberikan rekomendasi agar dilakukan perubahan atas RPJMD. Sebagaimana dipahami bersama, sesuai pasal 342 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor. Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar. Terjadinya perubahan mendasar dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen perencanaan adalah berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya telah mengakomodir keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang mana hal dimaksud belum tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan nasional lain adalah amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuatannya. Mulai tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19 atau dalam kondisi terakhir ini adanya resesi global dan nasional berupa antara lain pembatasan aktivitas sosial dan berkurangnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan

kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara masif. Respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara nasional dan daerah telah direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya realokasi dan refocussing APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Hasil evaluasi kebijakan jangka menengah daerah sampai dengan tahun 2020 menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan yang telah atau sedang dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023, dengan memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang didukung melalui misi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada periode Tahun 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

a. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023, yaitu :

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Berani

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan diwujudkan dalam pemerintahan yang memiliki keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk menyejahterakan masyarakat.

2. Kalimantan Timur yang Berdaulat

Pokok dari pernyataan visi “Kalimantan Timur yang Berdaulat” terdapat pada kata “Berdaulat”. Istilah berdaulat yang dimaksud akan dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut :

- a) Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;

- b) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- c) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- d) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

b. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas diuraikan sebagai berikut :

- a) **Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;**

Misi pertama berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang

berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

b) **Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;**

Misi kedua merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan di bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan daerah untuk pendanaan pembangunan Kalimantan Timur yang selama ini masih rendah dibanding potensinya. Sumber ekonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu ekonomi berbasis ekspor yang didukung oleh sektor industri dan ekonomi berbasis kerakyatan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian diharapkan dapat menopang dua basis ekonomi di atas. Untuk itu, diharapkan, upaya untuk mendatangkan investasi pada sektor-sektor unggulan, khususnya pada hilirisasi menjadi salah satu sasaran penting misi kedua. Di luar itu, sektor UKM dan pariwisata menjadi andalan ekonomi Kalimantan Timur berikutnya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah dan kerakyatan, Kalimantan Timur menyandarkan kepada kekuatan daerah dengan menciptakan persaingan yang adil dalam kepastian berusaha melalui dukungan modal, teknologi, usaha pertanian rakyat, BUMDES dan koperasi.

c) **Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;**

Misi ketiga merupakan kebijakan untuk mencapai kedaulatan di bidang infrastruktur kewilayahan dengan tujuan utama mencapai keseimbangan antara konektivitas dan kebutuhan infrastruktur wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang daerahnya tertinggal guna mendukung pengurangan ketimpangan pembangunan. Dalam kerangka itu, disamping untuk meningkatkan jumlah arus barang dan penumpang dari dan ke Kalimantan Timur dan pengembangan kawasan ekonomi, dukungan infrastruktur prioritas juga diwujudkan pada ketersediaan air minum layak, dukungan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penurunan kawasan kumuh, pengurangan dampak banjir, kebutuhan listrik masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan tata ruang.

d) **Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;**

Misi keempat merupakan amanat penting dari pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon, agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan (sustainability) secara keseluruhan melalui aspek pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau.

e) **Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Misi kelima ini merupakan kebijakan pengungkit bagi keberhasilan misi-misi yang lain pada umumnya berupa hadirnya pemerintahan yang berdaulat, yaitu birokrasi yang bersih, jujur, mandiri, berwibawa, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang mendukung daya saing daerah serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, perlu diwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kinerja dengan citra birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dinamika dan tuntutan layanan hadirnya sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik bersifat mendesak.

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selama masa jabatan berlangsung. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator makro ini merupakan petunjuk atas pencapaian impact pembangunan lokal, regional, dan nasional.

Tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator makro pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		2018	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	6,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,41	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,5±1
5.	Indeks Gini	0,342	0,308
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,68	76,15
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,02)	B (72,00)

c. Tujuan dan Sasaran







Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian visi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Tujuan RPJMD juga menggambarkan capaian visi dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.












Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun akan diletakkan beriringan dengan setiap tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun 6 (enam) tujuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

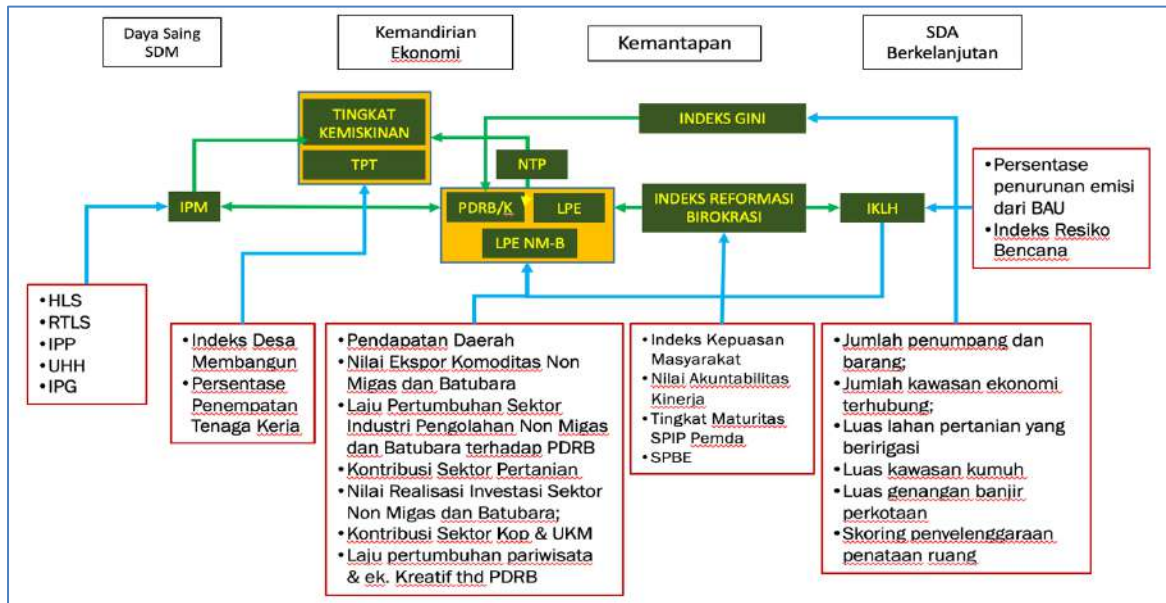
Keenam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Keselarasn RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs)

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Kehidupan sehat dan Sejahtera		Pendidikan Berkualitas
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tanpa Kemiskinan		Kesetaraan Gender
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Tanpa Kelaparan		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
			Konsumsi & Produksi yang Bertanggung jawab		Kemitraan untuk mencapai Tujuan
4	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Energi Bersih dan terjangkau		Industri, Inovasi dan Infrastruktur
			Berkurangnya Kesenjangan		
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Air Bersih dan Sanitasi Layak		Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
			Penanganan Perubahan Iklim		Ekosistem Lautan
			Ekosistem Daratan		
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh		

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SGDs di atas, menunjukkan komprehensivitas tujuan pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan di dalam sasaran-sasaran, dengan *casecading* indikator sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.1.
Casecading Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan *refocusing* Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Perubahan jumlah tujuan dari yang semula 7 tujuan menjadi 6 tujuan. Selanjutnya perubahan Sasaran dari yang semula 28 sasaran menjadi 19 sasaran. Perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian terhadap indikator yang digunakan. Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Tujuan dan Sasaran
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,75	77,25	77,75
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,69	13,72	13,91	14,02	14,13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,70	9,77	9,91	10,04	10,17
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	0,61	0,85	1,09
Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,33	74,45	74,60	74,75

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,65	65,54	65,63	65,64	65,70
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6.05	6.00	5.90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,09	6,87	6.81	6.75	6.50
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa)	20	25	30	35	45
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29,41	-0,27	33,14	35,00	40,00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN						
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	-2,85	-1,00	3,5±1	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	167,5	170	175
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	1,50	2,00	2,50
	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	112,00	113,00	114,00

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.775	10.132	9.590	11.038	12.122
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,04	2,23	1,57	1,72	1,89
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,46	8,24	9,44	9,64	9,86
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,56	0,63	0,64	0,65	0,65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,36	0,36	0,37	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,33	4,94	5,00	5,20	5,30
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,67	1,68	1,70	1,72

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,04	15,04	12,92	13,00	13,50
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,03	1,06	9,52	9,67	9,91
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	14,93	15,23	15,68
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN						
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,328	0,313	0,313	0,308

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	2	2	4	5	7
	Capaian akses air minum layak (%)	54,59	64,53	66,53	68,53	70,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.728,50	13.878,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.525,47	1.371,21	1.237,82	1.187,82	1.137,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	641	477	420	374	329
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	66,46	75,94	76,74	83,10
	Rasio elektrifikasi (%)	88,93	90,21	91,50	93,00	95,00
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN						

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,81	75,50	75,95	76,05	76,15
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	25,18	50,72	27,75	28,50	29,33
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK						
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	B (71,00)	B (71,50)	B (72,00)
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	82,00	82,30	82,50	83,00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04	3,14	3,20	3,25	3,30
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

1.3 Agenda Pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur

Sebagai penerjemahan terhadap visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan utama gubernur tersebut merupakan target kinerja dedikatif pada akhir masa jabatan Gubernur/Wakil dalam mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa dalam 5 tahun);
3. 250.000 penyerapan tenaga kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan direktif/arahan utama Gubernur tersebut, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penerjemahan visi, misi, direktif/arahan utama Gubernur dan agenda pembangunan dapat dilihat sebagaimana keterkaitannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2
Keterkaitan Misi, Arahan Gubernur, dan Agenda Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

1.4 Arahan Target Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten/kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh.

Salah satu upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah melihat bagaimana target indikator makro pembangunan yang merupakan rapor kinerja kepala daerah mampu selaras dan saling mendukung antar daerah. Target indikator makro yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019, adalah alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik pada aspek ekonomi, sosial maupun urusan pembangunan lainnya. Untuk lebih rinci dalam melihat arahan target pembangunan indikator makro, maka ditampilkan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.4
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

No	KAB /KOTA	IPM			Tingkat Kemiskinan (%)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Indeks Gini		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Paser	73,15	73,03	73,40	7,50	8,00	7,30	3,60	3,45	3,17	4,72	1,32	2,32	0,250	0,330	0,330
2	KUBAR	71,50	73,30	72,00	9,00	8,50	13,47	5,87	4,35	4,86	2,00	5,37	6,41	0,320	0,313	0,308
3	KUKAR	74,84	75,34	75,85	7,35	6,90	6,50	5,20	4,94	4,65	2,5±1	1,06	1,38	0,290	0,290	0,290
4	KUTIM	75,08	75,76	76,48	8,45	8,95	8,69	5,45	5,38	5,01	3±1	7,84	8,10	0,300	0,300	0,290
5	Berau	75,00	75,10	75,50	4,60	5,07	5,01	5,00	4,84	4,73	3,90	3,5±1	3,00	0,300	0,300	0,290
6	PPU	71,84	73,36	72,70	7,12	6,92	5,60	6,09	4,52	6,50	3,02	3,52	4,03	0,320	0,300	0,280
7	MAHULU	68,96	69,60	70,29	9,50	10,02	9,90	3,00	4,60	3,50	5±1	6,30	6,75	0,320	0,320	0,310
8	Balikpapan	79,53	80,00	80,11	2,30	2,3-2,5	2,40	4,55	8,70	7,30	4,5-5,0	5,00	5,5-6,0	0,300	0,300	0,300
9	Samarinda	80,34	80,20	81,83	4,50	4,75	4,21	3-3,5	5,85	5,36	2-4	5,00	5,60	0,290	0,290	0,290
10	Bontang	81,00	81,00	81,00	4,50	4,03	4,03	9,00	8,70	8,70	1,0-2,0	2,50	3,50	0,330	0,330	0,300
	KALTIM	76,75	77,75	77,75	6,05	6,27	5,90	6,81	5,31	6,50	-1,00	3,5±1	3,5±1	0,328	0,313	0,308

1.5 Perkembangan Keadaan dan Telaahan Kebijakan Nasional

Sejarah Coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dispnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sekuensing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pada 12 Februari 2020. Pada tanggal 2 Maret 2021, tepat satu tahun kasus pertama virus corona (Covid-19) ditemukan di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit virus corona. Keduanya merupakan warga Depok, di Provinsi Jawa Barat

Sejak merebaknya pandemic Covid 19 pada awal tahun 2020 secara global terjadi bencana yang melanda dunia yaitu munculnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 14 Juli 2020, tercatat sebanyak 78.572 terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang sembuh adalah 37.636 dan meninggal sebanyak 3.710 orang. Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
 - c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak Covid-19, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian/perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada

Rancangan Awal RKP Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021. Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperlukan keseimbangan dari kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi, agar keduanya dapat berjalan beriringan dan dapat mengungkit satu sama lain.

Kementerian Perekonomian mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu, Pemerintah senantiasa menargetkan penjagaan keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Hal ini diibaratkan menjaga keseimbangan “gas” (pemulihan ekonomi) dan “rem” (penanganan kesehatan). Pada akhir tahun lalu, sudah diprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit kembali sejak awal 2021 ini. Namun, terjadi guncangan kembali dengan hadirnya varian Delta yang menyebabkan harus diberlakukannya PPKM Darurat untuk mengatasi kenaikan jumlah kasus aktif yang sangat signifikan. Pemerintah mengatakan bahwa dinamika kondisi pandemi Covid-19 ini memang luar biasa (extraordinary), sehingga apapun yang terjadi harus dapat segera diantisipasi dengan mengambil alternatif kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Presiden selalu menyampaikan terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan ketika mendesain kebijakan (PC-PEN), yaitu pertama dinamika kasus yang berubah cepat sekali, dan kedua adalah ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga kadang perencanaan atau desain strategi ke depan, apapun kejadiannya, sudah harus menyiapkan ruang yang setiap saat bisa berubah. Kebijakan extraordinary menjadi pilihan yang harus diambil oleh pejabat publik dengan tetap dijaga selalu berada dalam koridor aturan.

Kebijakan pengendalian yang dikeluarkan Pemerintah terkait pandemi COVID-19 menitikberatkan upaya mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya, secara sederhana kebijakan Pemerintah dalam mencegah peluang penularan menjadi tiga bagian yaitu di sekitar tempat tinggal, di perjalanan, dan saat beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, agar dapat mengatur aspek kehidupan dan jumlah masyarakat yang tidak sedikit, maka diperlukan kebijakan khusus yang dijadikan pedoman, dan dinamika pembaharuan secara berkala. Adapun 3 bagian dimaksud ialah, pertama, untuk dapat meminimalisir peluang penularan di hulu atau di sekitar tempat tinggal

masyarakat. Pengaturan dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) terbaru maupun Surat Edaran (SE) Satgas diperlukan pembentukan Pusat Komando (Posko) COVID-19 Desa/Kelurahan. Posko ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menentukan skenario pengendalian yang tepat sampai ke tingkat RT maupun RW.

Satgas beserta Posko di tingkat Desa/Kelurahan memiliki 4 fungsi pengendalian COVID-19. Keempatnya yaitu melakukan upaya pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintahan maupun militer. Hal ini mengingat permasalahan yang kompleks dan khas di tiap daerahnya. Kedua, selama dalam perjalanan ke tempat tujuan beraktivitas. Tidak bisa pungkiri bahwa selama melakukan mobilisasi dengan berbagai pilihan moda transportasi, peluang penularan tetap ada. Sampai saat ini persyaratan kepemilikan surat tanda negatif COVID-19, kartu vaksinasi, maupun Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) masih diberlakukan untuk perjalanan dalam negeri. Sedangkan protokol yang harus dijalani oleh pelaku perjalanan internasional yang hendak masuk ke wilayah Indonesia ialah skrining kesehatan, penunjukan dokumen wajib seperti surat tanda negatif COVID-19 dan kartu vaksinasi, karantina, tes ulang RT PCR sebanyak dua kali, dan vaksinasi bagi mereka yang belum tervaksin.

Dan yang ketiga, ialah mencakup aspek aktivitas selama di luar rumah. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sedemikian rupa dirancang pemerintah dan mencakup lintas sektor. Bahkan dibedakan rincian aturan pengetat-longgarannya sesuai kondisi kasus yang ada di setiap kab/kota. Dan disesuaikan hasil levelling yang di update per minggunya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali serta per dua minggu untuk wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

1.6 Kondisi Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur

Perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur merupakan salah satu yang tertinggi di luar Pulau Jawa sehingga sangat menjadi perhatian khusus baik bagi

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Penduduk yang meninggal karena covid di provinsi Kalimantan Timur secara klinis memiliki penyakit bawaan yang menjadi kondisi penyerta saat pemeriksaan. Pasien Meninggal dengan Status covid-19 secara persentase yakni mereka dengan kondisi 46.6 persen sedang menderita diabetes melitus, 26.1 persen hipertensi, 19.3 persen ada riwayat penyakit jantung, 10.2 persen memiliki riwayat penyakit ginjal dan 1.7 persen sakit kanker. Sedangkan dalam diagnosis awal, mereka yang terkena covid melaporkan gejala utama seperti sesak napas, batuk, demam, lemas dan riwayat demam. Statistik harian untuk data penambahan harian meninggal di Kalimantan Timur dalam seminggu terakhir sudah mulai turun. Dibandingkan provinsi lain, dari nilai yang terbesar, Kalimantan Timur berada di urutan 4. Kemarin provinsi ini mencatatkan jumlah penambahan penduduk yang meninggal karena covid meningkat dibandingkan sebelumnya dengan selisih enam orang.

Informasi lain dari provinsi Kalimantan Timur adalah, tingkat kesembuhan yang termasuk tinggi mencapai 83,81 persen (sebanyak 114,5 ribu jiwa telah dinyatakan sembuh). Sedangkan untuk angka kematian di tempat ini tercatat 4243 jiwa (tiga persen). Mereka yang berhasil sembuh di antaranya memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit ginjal dan hamil. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur, mereka secara persentase jumlah kasus covid-19 menurut kelompok umur dari urutan yang terbesar adalah penduduk dengan usia 31-45 tahun sebanyak 32.4 persen, 27.3 persen golongan pemuda umur 19-30 tahun, 19.3 persen umur antara 46-59 tahun, 10.2 persen umur antara 6-18 tahun, 7.5 persen dengan umur lebih dari 60 tahun dan 3.2 persen umur antara 0-5 tahun. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, mereka yang terkonfirmasi positif covid-19 di Kalimantan Timur lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Secara total kasus COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun tracking, data distribusi kasus berdasarkan kasus Suspek, Konfirmasi, Discarded, Probable, dan dalam Proses Pemeriksaan per Kabupaten/Kota dapat terlihat di Tabel 1.5 di bawah ini

Tabel 1.5
Data distribusi kasus berdasarkan kasus Suspek, Konfirmasi, Discarded, Probable, dan dalam Proses Pemeriksaan per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kab/Kota	Suspek	Total Suspek	Discarded (Suspek Negatif)	Total Discarded	Konfirmasi	Total Konfirmasi	Probable	Proses
1	Berau	945	60184	1041	46261	11	12989	0	934
2	Kutai Barat	217	28326	192	17712	9	10405	1	208
3	Kutai Kartanegara	1072	72716	1321	45759	10	25890	5	1062
4	Kutai Timur	306	44959	619	26869	9	17793	0	297
5	Mahakam Ulu	5	2302	11	707	3	1593	0	2
6	Paser	86	20280	219	11972	6	8228	0	80
7	Penajam Paser Utara	42	8237	263	3815	4	4384	0	38
8	Balikpapan	3078	230165	4020	189239	28	37873	3	3050
9	Bontang	427	37470	624	22135	41	14949	0	386
10	Samarinda	1782	143340	3132	119427	9	22119	21	1773
Total		7960	647979	11442	483896	130	156223	30	7830

Sedangkan total penderita dan korban pandemic COVID-19 di Kalimantan Timur yang dikumpulkan datanya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Data Perkembangan kasus Konfirmasi, Sembuh, dan Meninggal per Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kab/Kota	Konfirmasi	Sembuh	Total Sembuh	Meninggal	Total Meninggal	Dirawat
1	Berau	12989	25	12350	0	393	246
2	Kutai Barat	10405	20	10107	0	260	38
3	Kutai Kartanegara	25890	10	24791	0	832	267
4	Kutai Timur	17793	34	17214	0	428	151
5	Mahakam Ulu	1593	4	1555	0	27	11
6	Paser	8228	10	7899	0	264	65

No	Kab/Kota	Konfirmasi	Sembuh	Total Sembuh	Meninggal	Total Meninggal	Dirawat
7	Penajam Paser Utara	4384	9	4097	1	228	59
8	Balikpapan	37873	40	35735	1	1863	275
9	Bontang	14949	40	14111	0	348	490
10	Samarinda	22119	23	21275	0	714	130
Total		156223	215	149134	2	5357	1732

1.7 Perkembangan Dampak Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur secara Makro tahun 2021

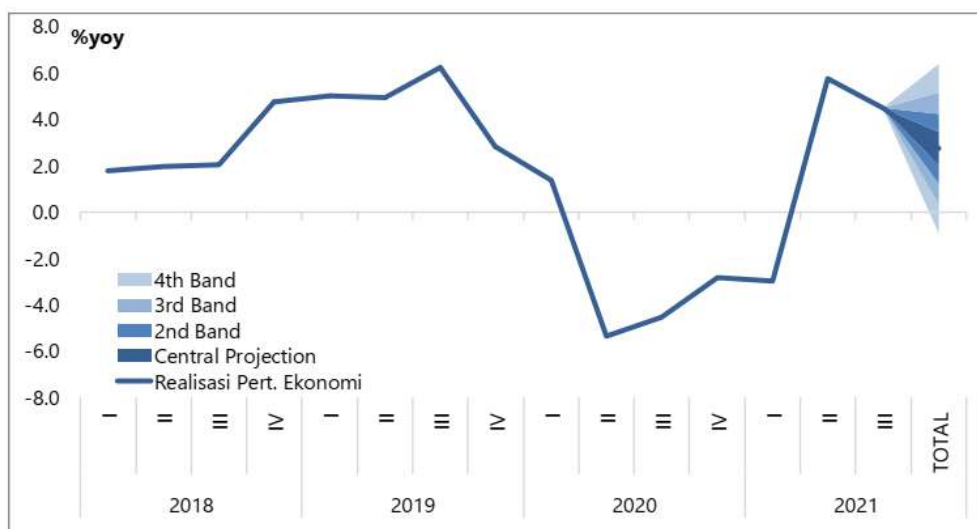
Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Kaltim tahun 2021 diperkirakan akan kembali pada jalur pertumbuhan positif dan mampu tumbuh pada rentang 2.30% – 3.10% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama didorong oleh membaiknya permintaan dari negara tujuan ekspor maupun domestik yang juga turut didukung oleh kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat dan lebih kondusifnya iklim investasi. Solidnya permintaan dari negara tujuan utama ekspor Kaltim seperti Tiongkok, Taiwan, ASEAN, dan India didorong oleh mulai normalnya aktivitas industri dan kegiatan usaha di berbagai negara tersebut, sebagaimana terkonfirmasi dari prospek perekonomian negara-negara tersebut di tahun 2021 yang diperkirakan akan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, tingginya permintaan terutama untuk komoditas batu bara secara langsung mendorong kinerja lapangan usaha pertambangan terlebih di tengah momentum harga batu bara yang berada di level tinggi. Sementara itu, kinerja industri juga diperkirakan kembali berada di jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam akibat temporary shutdown kilang minyak karena efek pandemi COVID-19. Menggeliatnya aktivitas masyarakat di tahun ini secara langsung meningkatkan permintaan BBM dan berpengaruh positif terhadap kinerja industri pengolahan migas di Kaltim.

Laju lapangan usaha industri pengolahan turut didorong oleh peningkatan kinerja industri pengolahan CPO maupun industri petrokimia seiring dengan permintaan domestik maupun ekspor yang solid di tengah level harga yang juga tinggi. Sementara itu, lapangan usaha konstruksi diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kembali berlangsungnya proyek- proyek strategis Kaltim yang pada tahun sebelumnya sempat terkendala karena adanya pembatasan mobilitas tenaga kerja maupun barang. Perbaikan kinerja lapangan usaha konstruksi juga didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi di Kaltim baik dari sisi PMA, PMDN, maupun belanja modal pemerintah.

Positifnya laju perekonomian Kaltim juga turut ditopang oleh perbaikan lapangan usaha tersier karena mulai dilonggarkannya mobilitas dan aktivitas masyarakat, fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan terjangkau, serta masifnya pelaksanaan vaksinasi di Kaltim. Lebih lanjut, tingkat vaksinasi di Kaltim sendiri tercatat merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia baik untuk vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua sehingga hal tersebut secara langsung bisa meningkatkan mobilitas masyarakat terutama di sektor-sektor produktif.

Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim 2021 yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa risiko baik dari sisi domestik maupun eksternal. Di sisi domestik, curah hujan yang sangat tinggi terutama pada triwulan I 2021 dan diperkirakan akan terjadi lagi pada triwulan IV menyebabkan lapangan usaha pertambangan relatif terhambat di sisi produksi dimana sebagian besar perusahaan pertambangan di Kaltim bersifat open pit sehingga cukup terkendala apabila datang hujan. Selain itu, pertumbuhan kinerja lapangan usaha pertambangan lebih lanjut juga tertahan oleh isu keterbatasan pasokan alat berat dan suku cadangnya secara nasional yang cukup menjadi kendala bagi sejumlah perusahaan pertambangan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih lanjut diperkirakan akan tertahan seiring dengan langkah pembatasan yang kembali dilakukan pemerintah untuk menekan risiko gelombang ketiga COVID-19 dan penyebaran mutasi COVID-19 varian terbaru terutama pada periode HBKN Natal dan liburan akhir tahun. Di sisi eksternal, semenjak paruh akhir 2021 Tiongkok terus menaikkan produksi batu bara domestiknya secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestiknya melalui ekspansi puluhan tambang batu bara di kawasan Inner Mongolia, sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan

permintaan batu bara Kaltim terutama pada triwulan IV 2021. Hal serupa juga terjadi di India, sejalan dengan Coal India Limited (BUMN batu bara India) yang diminta untuk terus meningkatkan produksi domestiknya. Selain itu, beberapa negara tujuan utama ekspor Kaltim seperti India dan sejumlah negara di ASEAN diperkirakan akan menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang secara langsung akan menurunkan permintaan komoditas ekspor Kaltim karena aktivitas industri dan konsumsinya yang kian terbatas.



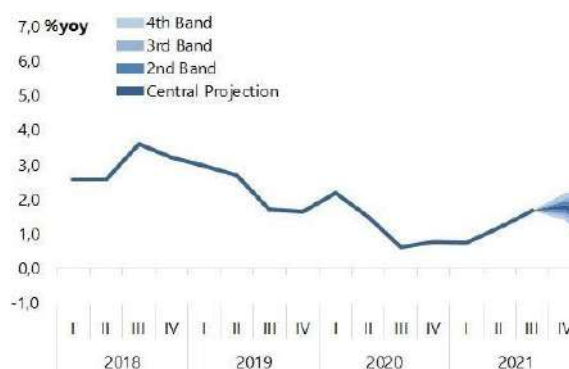
Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia.

Gambar 1.3.
Grafik Realisasi dan Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2021 (% yoy)

Perekonomian Kaltim 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya terutama didorong oleh semakin pulihnya aktivitas masyarakat di Kaltim seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi serta peningkatan kinerja industri pengolahan dan konstruksi. Sektor tersier diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong utama ekonomi Kaltim di tahun 2022 setelah pada tahun sebelumnya terkendala akibat adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan COVID-19. Lebih masifnya cakupan vaksinasi, terlebih dengan rencana vaksin booster, juga diperkirakan mampu mendorong optimisme masyarakat maupun dunia

usaha di Kaltim sehingga aktivitas jual beli tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga akan menjadi engine of growth pertumbuhan ekonomi Kaltim terutama di industri pengolahan CPO. Beroperasinya pabrik baru pengolahan CPO di Kaltim serta penambahan kapasitas pabrik eksisting di tengah permintaan yang solid baik dari domestik (berlanjutnya program B30) maupun dari ekspor (kebutuhan industri maupun konsumsi negara tujuan utama) secara langsung akan meningkatkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan Kaltim. Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga akan turut ditopang oleh prospek industri pengolahan migas yang diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya karena aktivitas masyarakat yang lebih tinggi serta industri petrokimia yang diperkirakan kinerjanya akan tetap positif.

Di sisi lain, lapangan usaha terbesar Kaltim yakni lapangan usaha pertambangan diperkirakan tumbuh relatif terbatas pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi seiring dengan prakiraan permintaan negara tujuan utama dan harga komoditas yang secara berangsur melandai. Pasca the 26th UN Climate Change Conference of The Parties (COP 26) yang dilaksanakan pada triwulan IV 2021, banyak negara termasuk Tiongkok berkomitmen untuk membatasi penggunaan batu bara dan segera beralih ke sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal tersebut secara langsung berpotensi membuat permintaan batu bara Kaltim tidak akan setinggi tahun sebelumnya terlebih proyeksi harga yang diperkirakan melandai, bahkan menurun di tahun 2022. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga berencana untuk melakukan capping harga batu bara domestiknya yang selama ini tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan harga batu bara Kaltim sehingga berpotensi menurunkan competitive advantage batu bara Kaltim. Selain itu dari sisi internal, produksi batu bara Kaltim juga diperkirakan akan terkendala seiring dengan masih berlangsungnya fenomena La Nina hingga Februari 2022.



Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia

Gambar 1.4.

Grafik Realisasi dan Prakiraan Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2021 (% yoy)

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan tetap rendah walau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kaltim yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan diprakirakan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi Kaltim. Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga akan berasal dari sektor pangan yang diprakirakan dapat berasal dari pricing behavior pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi Kaltim juga diprakirakan berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga diprakirakan didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% yang mulai berlaku 1 Februari 2021, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

1.8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.



Gambar 1.5
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (major project). Adapun major project yang belokasi di Provinsi Kalimantan Timur disajikan sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor	Lokasi
Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Jalan dan Jembatan	Kalimantan Timur
Jalan Tol Samarinda Bontang	Jalan dan Jembatan	Kalimantan Timur
Bendungan Marangkayu	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Bendungan Sepaku Semoi	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Kilang Minyak Bontang	Energi	Kalimantan Timur
Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>deepwater Development Project/IDD</i>)	Energi	Kalimantan Timur

Gambar 1.6
Daftar Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur Tahun 2020-2021

1.9 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat</p>	<p>Peningkatan akses dan mutu pendidikan</p>	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
<p>Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan</p>	<p>Peningkatan daya saing generasi muda</p>	1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
2. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga		
<p>Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat</p>	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</p>	1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya
		4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa 2. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja 2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah 2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah 2. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor 3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu 3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan 4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara 2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik 3. Pemantauan komitmen perizinan 4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM 2. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital 3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM 4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim 2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim 3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	Pengembangan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim 2. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang		
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	1. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan.

Tema pembangunan tahunan merupakan garis besar kebijakan yang spesifik guna menggambarkan puncak prioritas pembangunan tahunan. Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan setiap tahun telah dirumuskan dengan mengacu pada rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang di dalam gambar berikut.



Gambar 1.7
Tema Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD pertahun, identifikasi isu strategis, dan permasalahan dengan urgensi tinggi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap tema RKPD memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini :

- a. **Tema RKPD Tahun 2019: “Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 1. Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
 2. Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
 3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan;
 4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas sentra produksi, kawasan industri dan outlet; dan
 5. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan publik.
- b. **Tema RKPD Tahun 2020, “Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi;
 3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan;
 4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi;
 5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
 6. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.
- c. **Tema RKPD Tahun 2021, “Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi COVID-19.

d. Tema RKPD Tahun 2022, *Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN*" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;
4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN; dan
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

e. Tema RKPD Tahun 2023, *"Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"* dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan

6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

1.10 Program Unggulan Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program unggulan RPJMD tahun 2019-2023 merupakan amanat gubernur terpilih sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya; (Dinas Pendidikan)
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur; (Badan Penghubung)
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama; (Dinas Kesehatan)
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School); (Dinas Pendidikan)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan; (Dinas Pendidikan)
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA; (Dinas Pendidikan)
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal; (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas; (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Sosial)

9. Peningkatan perlindungan anak; (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun; (Dinas Pemuda Olahraga)
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional; (Dinas Pemuda Olahraga)
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan; (Disperindagkop)
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah; (Dinas Pariwisata)
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa; (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera; (DPUPR)
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan; (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat; (Dinas Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan)
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas; (DPMPTSP)
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat; (Dinas Perikanan)
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur; (Disperindagkop)
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal; (DESDM)
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa; (Diskominfo)
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda; (DPUPR)
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang; (DPUPR)
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur; (DPUPR)

26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor; (DPMPTSP, DISHUB, Disperindagkop)
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang; (DPUPR)
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis; (DPUPR)
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat; (DPUPR, DESDM)
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata; (DPUPR)
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan; (DISHUT)
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara; (DLH)
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (INSPEKTORAT)
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis; (SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA)
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN); (BKD)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah; (BAPENDA)
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan; (DPMPTSP)
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. (INSPEKTORAT)

1.11 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan urutan waktu. Arah kebijakan juga menjadi instrumen untuk memetakan kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan agar tetap dalam koridor untuk memecahkan berbagai akar permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Di tingkat provinsi, di samping

akan dioperasionalkan oleh perangkat daerah, arah kebijakan juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta pencapaian target makro ekonomi kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
1.	Paser	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang berdekatan pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur air bersih, peningkatan kualitas kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan,-telekomunikasi, dan jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Layanan Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan vokasi
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro dan Pangan
2.	KUBAR	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan Nilai Tambah Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan, utamanya di kawasan 3 (tiga) danau
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan layanan infrastruktur	Peningkatan layanan jaringan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, Perluasan infrastruktur air bersih dan jalan produksi
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Layanan Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan vokasi
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro dan Aneka
3.	KUKAR	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, utamanya di kawasan 3 (tiga) danau
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
			Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, Perluasan infrastruktur air bersih, peningkatan kualitas kawasan kumuh, jalan provinsi, dan jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka dan Pangan
4.	KUTIM	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	peningkatan & perluasan infrastruktur air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, pengendalian banjir, jalan provinsi, jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri Maloy sebagai kawasan industri hulu agro, industri berbasis oleochemical dan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
			pengolahan hasil tambang serta industri aneka
5.	Berau	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan telekomunikasi, jalan provinsi, jalan produksi, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia, utamanya untuk mendukung pengembangan industri pariwisata Kepulauan Derawan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro
6.	PPU	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Pengembangan Agroindustri	Pengembangan kawasan industri Buluminung sebagai pusat industri pengolahan produk pertanian
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka dan Pangan di Kawasan Industri Buluminung
7.	MAHULU	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten	Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan telekomunikasi, jalan akses perbatasan, jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Aneka
8.	Balikpapan	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
9.	Samarinda	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Peningkatan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka, Kimia Dasar dan Pangan
		Pengendalian perluasan kawasan pertambangan	Pembatasan wilayah kerja konsesi pertambangan pada kawasan permukiman
		Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
10.	Bontang	Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk Perikanan Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Peningkatan dan perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri petrokimia berbasis gas dan kondensat

1.12 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-clusteran wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016-2036, dan berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pengembangan kawasan untuk lima tahun kedepan pada Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Tabel 1.8
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

No	Kawasan Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
1.	Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.
2.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan <i>oleochemical</i> berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, <i>oleo chemical</i> , dan industri turunannya.
3.	Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

1.13 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS								
	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia								
	Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK	77%	927.170.386.251	82%	935.553.720.692	85%	1.047.619.357.662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	7%	2.253.800.000	9%	2.366.889.475	11%	2.366.889.475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	67%	104.683.770.000	0%	51.945.295.523	0%	52.556.558.610	Dinas Pemuda dan Olah Raga
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1%	2.296.260.000	1%	1.139.430.728	1%	1.152.838.910	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Presentase Stunting 2. Jumlah Kematian Ibu 3. Jumlah Kematian Bayi	26,5% 80 jiwa 533 Jiwa	145.084.420.617	26% 75 Jiwa 509 Jiwa	168.863.281.218	25,5% 70 jiwa 484 jiwa	141.354.549.834	Dinas Kesehatan

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	75%	4.125.227.393	60%	15.874.352.856	70%	16.445.659.505	Dinas Kesehatan
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	1.790.115.000	3 Kab/Kota	1.843.190.185	3 Kab/Kota	1.974.160.828	Dinas Kesehatan
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	999.325.201	1 Kebijakan	1.016.080.817	1 Kebijakan	946.947.708	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	3.019.466.000	30 Desa	3.535.597.003	30 Desa	3.186.589.573	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85%	3.436.148.964	85%	3.336.148.964	85%	2.323.984.402	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja (UPTD BLKI Bontang)	85%	2.036.148.964	85%	1.993.275.200	85%	675.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	749.867.742	20%	2.584.213.000	20%	7.357.875.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85%	3.436.148.964	85%	3.336.148.964	85%	2.323.984.402	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85%	2.136.148.964	85%	2.052.851.912	85%	2.558.934.193	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	204.132.915	70%	204.132.915	70%	204.132.915	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	31%	2.378.629.500	31%	2.303.151.097	31%	2.094.755.588	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN									
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas									
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah									
KEUANGAN									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100%; 93.519 wajib pajak	1.145.950.000	100%; 108.243 wajib pajak	1.633.400.000	100%; 124.295 wajib pajak	1.633.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%;	10.043.125.000	100%;	11.471.100.000	100%;	11.471.100.000	Badan Pendapatan Daerah

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	1.000.000.000	5%	1.097.068.680	5%	1.736.027.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 industri	2.000.000.000	2 industri	3.022.500.000	2 industri	2.984.344.373	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 unit	80.203.000	1 unit	513.766.446	1 unit	513.766.446	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi 2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7100 Ha 6 Unit	6.189.757.500	8000 Ha 7 Unit	4.716.890.000	8500 Ha 7 Unit	4.716.890.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	271356 ton 273070 ton	24.520.588.200	279681ton 283592 ton	25.533.110.000	289846 ton 292383 ton	14.715.122.948	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina / Jumlah Kelembagaan	85 orang 4 Lembaga	6.149.929.725	330 orang 4 Lembaga	3.693.331.700	441 orang 4 Lembaga	3.693.331.700	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Petani berbasis Korporasi yang dibina							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	24 Unit	9.385.337.500	49 Unit	10.087.388.200	30 Unit	5.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	20.5 %	11.316.262.500	21%	7.387.968.000	22%	10.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079 Juta Ton CO2eq	1.219.000.000	4,067 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000	4,044 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000	Dinas Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30 kelompok 1.425.580/Ha	7.995.000.000	30 kelompok 1.462.645 Ha	6.722.948.500	30 Kelompok 1.500.674 Ha	7.222.948.500	Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15 ton	6.005.000.000	18.126.490,20 ton	6.465.557.600	18.313.874,25 ton	6.965.557.600	Dinas Perkebunan
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	3.850.000.000	1 lembaga	3.734.806.900	1 lembaga	4.234.806.900	Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	784.000.000	35 Perusahaan	750.000.000	35 Perusahaan	750.000.000	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata	289.048 Ha	3.629.995.000	297.805,90 Ha	4.057.100.000	297.805,90 Ha	4.057.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	menuju pengelolaan yang efektif							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938 ton	21.616.945.000	162593 ton	19.425.875.000	166170 ton	19.425.875.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161216 ton	5.280.000.000	164441 ton	5.306.947.000	167730 ton	5.306.947.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	2 Jenis	1.198.000.000	3 Jenis	1.463.750.000	4 Jenis	1.463.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha	20.264.352.500	32000 Ha	25.209.625.775	32000 Ha	25.209.625.775	Dinas Kehutanan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu	4950000 M3 7 ton	262.140.098.102	5000000 M3 7,5 ton	179.984.157.525	5050000 M3 8 ton	189.508.477.419	Dinas Kehutanan
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
02:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	12 Hari	1.760.000.000	11 Hari	3.700.000.000	10 Hari	3.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100%	2.030.000.000	100%	1.500.000.000	100%	2.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM									

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
02:17:08	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	500.000.000	1%	946.405.900	1%	1.008.402.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10%	-	10%	576.519.240	10%	1.625.103.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	500.000.000	3%	1.226.724.100	3%	541.701.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2 Destinasi	4.674.685.000	3 Destinasi	7.602.445.000	3 Destinasi	6.310.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53%	-	23,53%	2.794.999.500	23,53%	2.000.000.000	Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN									
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar									

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85%	12.124.942.825	87%	5.005.777.515	88,00%	5.988.493.918	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	512 kasus	17.307.675.541	427 kasus	18.601.404.483	342 kasus	29.422.023.979	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75,02%	765.958.058.272	76,15%	656.550.082.427	78,27%	838.395.197.395	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64	44.981.874.700	66,64	148.692.890.000	68,64	200.207.378.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73.69 %	107.790.286.992	76,00%	92.696.210.016	78.91 %	165.779.820.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71.781	43.282.908.990	70.781	47.763.345.840	69.681	63.122.084.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	2785 meter	24.276.456.494	3020 meter	31.387.530.016	3455 meter	34.020.180.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								Perumahan Rakyat
1.03.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77,10%	7.492.280.000	87,00%	8.000.000.000	87,00%	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08%	2.219.129.000	7,34%	2.920.731.000	8,40%	3.160.127.332	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000 KK	46.921.080.638	1165000 KK	54.200.364.300	1200000 KK	54.220.087.800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN									
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56 Indeks/Indeks	4.840.000.000	53,80/89,16/79,86/83,61 Indeks/Indeks	6.767.500.000	53,85/89,21/79,91/83,66 Indeks/Indeks	4.625.485.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67%	3.013.732.010	82,67%	3.235.585.084	100%	3.364.509.632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK									
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik									

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya implementasi e-government	3,04 indeks	5.035.579.830	3,10 indeks	5.136.725.291	3,15 indeks	3.952.701.863	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien									
SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71%	2.346.684.167	79%	1.707.069.721	89%	1.574.593.312	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77%	1.947.315.881	79%	2.302.775.000	81%	2.533.052.500	Sekretariat Daerah
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel									
INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85%	10.104.090.400	90%	10.066.217.161	95%	10.324.325.294	Inspektorat

BAB II. METODELOGI EVALUASI

2.1 Metodologi Evaluasi

Metologi evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun pertama ini menggunakan 2 (dua) metode evaluasi yaitu

1. Metode Kuantitatif.

a. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target RPJMD Tahun Ketiga (2021)

1) Tipe I

$$\text{Performance Achievements} = \frac{\text{Realization}}{\text{Plan}} \times 100\%$$

Dimana:

Performance Achievements : Capaian kinerja (%)

Realization : Realisasi / Capaian (%)


Plan : Rencana / Target (%)





Keterangan:

Semakin tinggi persentase capaian kinerja (*performance achievements*) menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (*positif*).

Tabel 2.1. Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tipe 1

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

No	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Deskripsi	Simbol	Keterangan
1	Sangat tinggi	Persentase capaian kinerja s/d tahun ketiga (2021-triwulan 4) dibandingkan		Dasar perhitungan yang digunakan adalah

No	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Deskripsi	Simbol	Keterangan
		dengan target akhir RPJMD (2023) antara 91 % s/d 100 %		persentase capaian kinerja tahun 2021 di triwulan 4
2	Tinggi	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 76% s/d 90%		dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023)
3	Sedang	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 66 % s/d 75 %		
4	Rendah	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 51% s/d 65 %		
5	Sangat Rendah	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) kurang dari s/d 50%		

2) Tipe II

$$\text{Performance Achievements} = \frac{\text{Plan} - (\text{Realization} - \text{Plan})}{\text{Plan}} \times 100\%$$

Dimana:

Performance Achievements : Capaian kinerja (%)

Realization : Realisasi / Capaian (%)



Plan : Rencana / Target (%)




Keterangan:

Semakin tinggi persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif).

Tabel 2.2. Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tipe 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≤ 50 %	Sangat Tinggi
2	51 % ≤ 65 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	76 % ≤ 90%	Rendah
5	91 % ≤ 100 %	Sangat Rendah

No	Kriteria Penilaian Kinerja	Deskripsi	Simbol	Keterangan
1	Sangat tinggi	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) kurang dari s/d 50 %		Dasar perhitungan yang digunakan adalah persentase capaian kinerja tahun 2021 di triwulan 4 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023)
2	Tinggi	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 51% s/d 65 %		

No	Kriteria Penilaian Kinerja	Deskripsi	Simbol	Keterangan
3	Sedang	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 66 % s/d 75 %		
4	Rendah	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 76% s/d 90%		
5	Sangat Rendah	Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2021-triwulan 4) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 91 % s/d 100 %		

b. Evaluasi Proyeksi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD

1) Tipe I



$$\text{Proyeksi Kinerja} = \frac{\text{Realization (Rataan 3 Tahun Kinerja)}}{\text{Plan (Target Akhir RPJMD Tahun 2023)}} \times 100\%$$

Dimana:

Proyeksi Kinerja Program : Capaian kinerja Program Prioritas (%)

Realization : Rataan capaian realisasi 3 tahun (%)

Plan : Rencana / Target Pada Akhir Tahun 2023 (%)

No	Kriteria	Deskripsi	Simbol	Keterangan
1	Tercapai/ Melampaui	Persentase capaian kinerja s/d tahun ketiga (2019, 2020, dan 2021) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) lebih dari atau sama dengan 100%		Dasar perhitungan yang digunakan adalah persentase capaian kinerja rata-rata tahun I, II dan III dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023)
2	Akan Tercapai	Persentase capaian kinerja s/d tahun ketiga (2019, 2020 dan 2021) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 75% s/d kurang dari 100%		
3	Perlu Upaya Keras	Persentase capaian kinerja s/d tahun ketiga (2019, 2020 dan 2021) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) kurang dari 75%		

2) Tipe II

Proyeksi Kinerja

$$= \frac{\text{Target Akhir 2023} - \text{Realisasi (Rataan 3 Thn)} - \text{Target Akhir 2023}}{\text{Plan (Target Akhir 2023)}} \times 100\%$$

Dimana:

Proyeksi Kinerja Program : Capaian kinerja Program Prioritas (%)

Realization : Rataan capaian realisasi 3 tahun (%)

Plan : Rencana / Target Pada Akhir Tahun 2023 (%)

c. Evaluasi Kinerja Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi Kinerja Program

$$\text{KPR} = [\text{Realisasi (2021)} - \text{Realisasi (2020)}] - [(\text{Target (2021)} - \text{Realisasi (2020)})]$$

Nilai	Kinerja
≤ 0 - 99	Penetapan Indikator Pada saat Perencanaan Terhadap Realisasi Kinerja Program belum menunjukkan hal non measureable
100 - 200	Penetapan Indikator Pada saat Perencanaan Terhadap Realisasi Kinerja Program sudah menggunakan hal measureable dan teknokratik
>200	Penetapan Indikator Pada saat Perencanaan Terhadap Realisasi Kinerja Program belum mengacu pada arah permasalahan pencapaian target pada Tujuan dan Sasaran sehingga Penetapan Nilai terlalu tinggi

d. Evaluasi Terhadap Indeks Kinerja Program Kerja Prioritas RPJMD

$$IKP = (BI * RI) + (BK * RK) + (BF * RF)$$

Keterangan :

IKP = Indeks Kinerja Program (%)

BI = Bobot Capaian Indikator (40%)

BK = Bobot Capaian Keuangan (30%)

BF = Bobot Capaian Fisik (30%)

RI = Realisasi Capaian Indikator (%)

RK = Realisasi Capaian Keuangan (%)

RF = realisasi Bobot Capaian Fisik (%)

Nilai	Kriteria
<50	Buruk
50 ≤ - <60	Kurang
60 ≤ - <75	Cukup
75 ≤ - <90	Baik
90 ≤ - <100	Sangat Baik
100	Sangat Baik Sekali

2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif ini digunakan untuk memfokuskan proses evaluasi. Sda beberapa hal yang dilakukan dalam menerapkan metode ini antara lain wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (focus group discussion), pengamatan (observation) dan pemetaan masyarakat (mapping community).

2.2 Sistematika Evaluasi

Evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun ketiga ini dilakukan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun pada tahap paska pelaksanaan berdasarkan progress pelaporan SKPD. Berikut sistematika evaluasi yang dilakukan terhadap evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun ketiga:

Tabel 2.3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun Ketiga

Tahapan Perencanaan	Tahapan Pelaksanaan	Tahapan Pasca Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan pada saat penyelarasan rencana pembangunan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pada saat pelaksanaan RPJMD, RKPD, dan Renja perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan setelah pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renja perangkat daerah (triwulan 4) setiap tahun anggaran
<ul style="list-style-type: none"> Penentuan program prioritas dari berbagai alternatif dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kaltim 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renja perangkat daerah dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mereview apakah pencapaian (Keluaran/hasil/dampak) program mampu pencapaian Visi dan Misi dan mengatasi masalah pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk menilai efisiensi (Keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (Hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (Dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program prioritas yang telah terdokumentasi di RPJMD

Tabel 2.4. Outline Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun Ketiga

No	Substansi	Uraian Pembahasan	Identifikasi Masalah
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KETIGA			
A	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA		
	RPJMD dan RKPD	Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi	
		a. Capaian target makro pembangunan daerah	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
		b. capaian target prioritas daerah yang terkait dengan capaian program prioritas daerah	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
		c. Capaian target Program (outcome) dan kegiatan (Output) serta keterkaitan /korelasi output dengan outcome	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
	RKPD dan APBD	a. Realisasi penyerapan anggaran	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target (Penyebab terjadinya (SILPA))
		b. Kesesuaian Program, kegiatan indikator kinerja dan target kinerja	Identifikasi faktor penyebab inkonsistensi
		c. capaian target Program (outcome)	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam

No	Substansi	Uraian Pembahasan	Identifikasi Masalah
		dan kegiatan (Output) serta keterkaitan /korelasi output dengan outcome	pencapaian target (Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD)
	CAPAIAN EVALUASI RPJMD TAHUN KETIGA	a. Capaian Kinerja Program Prioritas Pada Tahun Kedua Pelaksanaan RPJMD 2019-2023 dan pelaksanaan P-RPJMD 2019-2023	Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program yang dilaksanakan pada Tahun berjalan (2021)
		b. Kesesuaian Rencana target dan capaian dari kinerja Program Prioritas Pelaksanaan RPJMD Tahun Ketiga	Identifikasi terhadap kesesuaian rencana target dan capaian kinerja program prioritas
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN KETIGA DIBANDINGKAN CAPAIAN TAHUN PERTAMA DAN KEDUA			
A.	EVALUASI KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN		
	RPJMD dan P-RPJMD vs RKPD	Kesesuaian nomenklatur program, indikator kinerja program dan target kinerja program	Identifikasi faktor penyebab inkonsistensi
		Kesesuaian nomenklatur kegiatan berkenaan program, indikator kinerja dan target kinerja kegiatan (output) apakah mendukung pencapaian kinerja program (Outcome)	Identifikasi faktor penyebab inkonsistensi
		Kesesuaian tematik tahapan RPJMD	Identifikasi faktor penyebab inkonsistensi

No	Substansi	Uraian Pembahasan	Identifikasi Masalah
		dengan program kegiatan RKPD	
B.	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA		
	RPJMD/RKPD dan P-RPJMD vs. RPJMN/RKP	realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dan P-RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN :	
		a. Capaian target makro pembangunan daerah di banding nasional	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
		b. capaian target prioritas daerah yang terkait dengan capaian target prioritas nasional	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
	RPJMD/P-RPJMD vs RKPD	Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi	
		a. Capaian target makro pembangunan daerah	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
		b. capaian target prioritas daerah yang terkait dengan capaian program prioritas daerah	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target

No	Substansi	Uraian Pembahasan	Identifikasi Masalah
		c. capaian target Program (outcome) dan kegiatan (Output) serta keterkaitan /korelasi output dengan outcome	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
	RKPD vs APBD	a. Realisasi penyerapan anggaran	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target
		b. Kesesuaian indikator kinerja dan target kinerja	Identifikasi faktor penyebab inkonsistensi
	Evaluasi Kesesuaian Capaian Program Prioritas Tahun Ketiga RPJMD dan P-RPJMD	Evaluasi capaian kinerja Tahun Ketiga berdasarkan evaluasi capaian kinerja	Identifikasi dan Membandingkan capaian kinerja Program Prioritas yang dilaksanakan Pada Tahun Ketiga dengan hasil capaian kinerja pada target di RPJMD dan P-RPJMD

Dalam pelaksanaan evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun Ketiga ini dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) aspek :

- 1) Menentukan tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan terutama terhadap program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi dan untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program RPJMD dan P-RPJMD perangkat daerah
- 2) Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Desain evaluasi yang dilakukan melalui metode pengumpulan data secara makro dan mikro, kemudian dilanjutkan dengan telaah dokumen RPJMD dan P-RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 disertai dengan membandingkan parameter dan variabel dari program yang tertuang.
- 3) Mendiskusikan rencana evaluasi. Evaluasi disiapkan dan disepakati dengan tahapan pelaksanaan evaluasi terutama dalam hal evaluasi RPJMD dan P-RPJMD 2019-2023 Tahun ketiga disertai dengan time frame yang tersedia, tahap yang harus dilaksanakan, metode evaluasi yang digunakan, sumber data evaluasi program di dokumen tersebut, pembiayaan evaluasi, tenaga ahli yang mengevaluasi dan proses desiminasi hasil evaluasi disertai dengan pemberian rekomendasi perbaikan.
- 4) Menentukan pelaku evaluasi. Pelaku evaluasi atau evaluator yang melakukan evaluasi

RPJMD dan P-RPJMD 2019-2023 tahun ketiga adalah akademisi yang berasal dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

- 5) Melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada triwulan ke-4 (periode bulan Oktober – Desember)
- 6) Mendesiminasikan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan disertai dengan rekomendasi dan usulan perbaikan kebijakan untuk penyempurnaan program RPJMD 2019-2023 dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 7) Menggunakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah disertai dengan program usulan dan rekomendasi pencapaian visi dan misi dan telah didesiminasikan sebaiknya menjadi masukan perangkat daerah untuk bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan agar program prioritas dapat mencapai visi dan misi sesuai dengan alokasi tahun anggaran.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk seperti yang terdapat pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.5. Sistematika Evaluasi Perencanaan RPJMD 2019-2023.

		Efisiensi, Realisasi keuangan (%)	
		< 80%	≥ 80%
Efektifitas capaian, Indikator f(%)	≥ 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Target Efektif, namun Realisasi Anggaran Tidak Efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Target Efektif, dengan Realisasi Anggaran Efisien
	< 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Target Tidak Efektif, dan Realisasi Anggaran Tidak Efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Target Efektif, namun Realisasi Anggaran Tidak Efisien

BAB III. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Konseptualisasi pembangunan secara umum merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Gambaran umum pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2021 memberikan informasi terhadap dampak sosial, ekonomi dan penduduk bagi masyarakat di Kalimantan Timur.

3.1 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator Makro Pembangunan Kalimantan Timur

Secara umum, kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2021 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walau tidak tumbuh setinggi pada triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 2,91% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,51% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan yang menyebabkan ekspor tumbuh terbatas di tengah masih solidnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan serta konstruksi. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Kaltim mampu tumbuh positif sebesar 2,48% (yoy) setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,87% (yoy). Kembalinya perekonomian Kaltim ke jalur pertumbuhan positif utamanya bersumber dari mulai membaiknya kinerja lapangan usaha utama serta meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama Kaltim di tengah konsumsi masyarakat yang kembali menggeliat dikarenakan gencarnya upaya vaksinasi.

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan IV 2021 melanjutkan tren perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat terbatasnya kinerja

ekspor yang menyebabkan melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Perlambatan tersebut utamanya terjadi karena permintaan negara tujuan ekspor yang melemah akibat upaya peningkatan produksi domestik yang dilakukan di negara tujuan. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2021 tercatat 2,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,51% (yoy). Dari sisi global, permintaan terhadap batu bara dan CPO mengalami penurunan di tengah momentum harga yang masih tinggi. Sementara itu dari sisi domestik, kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat maupun dunia usaha mampu mendorong kinerja konsumsi serta investasi yang menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Di tengah lapangan usaha pertambangan yang mengalami perlambatan, mayoritas lapangan usaha lainnya tetap melanjutkan tren kenaikan. Lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami perlambatan yang bersumber dari penurunan produksi Kaltim baik dari perusahaan PKP2B maupun IUP. Selain permintaan dari negara tujuan utama yang terbatas, perlambatan kinerja pertambangan juga bersumber dari kurang kondusifnya kegiatan produksi sejalan dengan curah hujan yang meningkat. Di sisi lain, lapangan usaha utama lainnya seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi terus melanjutkan tren kenaikan. Lebih menggeliatnya aktivitas masyarakat menjadi faktor pendorong peningkatan industri pengolahan migas seiring dengan kenaikan kebutuhan BBM. Sementara itu, pelonggaran pembatasan pada triwulan berjalan mendorong akselerasi pengerjaan proyek konstruksi yang juga diiringi oleh peningkatan investasi maupun belanja modal pemerintah.

Pada sisi pengeluaran, perlambatan lebih lanjut kinerja ekspor tertahan oleh positifnya kinerja komponen lainnya terutama dari kinerja investasi (PMTB). Tingginya produksi domestik di negara tujuan utama, menyebabkan kinerja ekspor Kaltim menjadi tumbuh terbatas walaupun momentum harga masih berada di level yang tinggi. Di sisi lain, kinerja investasi dan konsumsi mampu tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 pada triwulan berjalan. Secara khusus, kinerja investasi mampu tumbuh cukup tinggi dimana hal tersebut tercermin dari kenaikan penyaluran PMA maupun PMDN di Kaltim. Sementara itu, konsumsi masyarakat juga tercatat tumbuh lebih baik walaupun masih relatif moderat. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh tinggi sejalan dengan upaya realisasi anggaran belanja di akhir tahun.

Kinerja ekonomi Provinsi Kaltim pada tahun 2021 kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat permintaan maupun produksi yang terganggu akibat COVID-19 outbreak. Perekonomian Kaltim tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,48% (yoy) setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,87% (yoy). Faktor utama yang membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim pada jalur positif adalah membaiknya kinerja dunia usaha seiring lebih sigapnya penanganan COVID-19 dikarenakan upaya vaksinasi dan juga 3T (Testing, Tracing, & Treatment) yang semakin gencar. Secara spesifik, pertumbuhan positif tahun ini bersumber dari lapangan usaha utama Kaltim yakni Pertambangan dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi cukup dalam. Solidnya permintaan dari negara tujuan di tengah momentum harga yang mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir menjadi upside factor pertumbuhan pada dua lapangan usaha utama tersebut

Inflasi Kaltim pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 2,15% (yoy), tetap rendah meski mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang sebesar 1,68% (yoy). Secara keseluruhan tahun, inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,78% (yoy) dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 1,87% (yoy) pada tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, inflasi Kaltim tetap terkendali dan berada dalam rentang target inflasi nasional ($3\pm 1\%$) serta menempati urutan kedua terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.

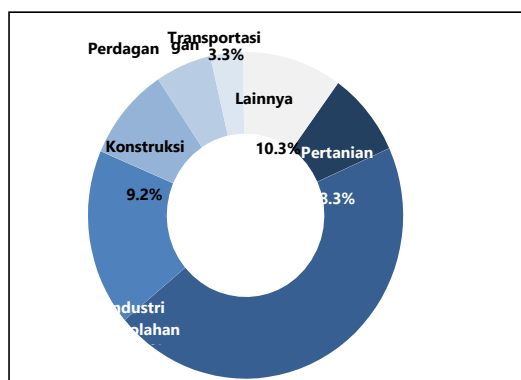
Laju inflasi selama triwulan IV 2021 secara umum cukup terkendali, meskipun terdapat tekanan yang berasal dari beberapa kelompok pengeluaran. Dari 11 jenis kelompok pengeluaran, inflasi terbesar pada triwulan ini terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,58% (yoy), kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,11% (yoy), kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,34% (yoy), serta kelompok transportasi sebesar 2,21% (yoy). Peningkatan laju inflasi pada triwulan IV 2021 tertahan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 1,03% (yoy).

Berdasarkan kota Pembentuk IHK di Kaltim, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan IV 2021. Pada periode ini, Kota Samarinda tercatat mengalami inflasi sebesar 2,05% (yoy) atau meningkat dari triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,66% (yoy). Sama halnya dengan yang terjadi pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan juga mengalami inflasi sebesar 2,28% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,71% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, peningkatan inflasi di dua kota tersebut didorong oleh tiga kelompok pengeluaran utama yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Inflasi Kaltim pada triwulan I 2022 diperkirakan meningkat secara terbatas, namun masih berada dalam rentang target sasaran inflasi nasional ($3\pm 1\%$). Pada triwulan I 2022, inflasi Kaltim diperkirakan berada pada rentang 2,70% (yoy) – 3,50% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 2,15% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi utamanya didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, kenaikan cukai rokok, pemberlakuan tarif pajak baru yaitu PPN dan PPh, peningkatan harga LPG nonsubsidi. Namun laju inflasi lebih lanjut diperkirakan akan tertahan oleh terbatasnya mobilitas masyarakat akibat kembali tingginya kasus COVID-19.

Perekonomian Kaltim yang masih mampu meneruskan tren positif di triwulan IV 2021 masih ditopang oleh kinerja lapangan usaha utama pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Lapangan usaha pertambangan tercatat masih mampu tumbuh positif walau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu lapangan usaha utama ekonomi lainnya seperti industri pengolahan dan konstruksi tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 3.1). Berdasarkan pangsaanya, ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. Lapangan usaha pertambangan mempunyai pangsa sebesar 45,60%. Sementara itu, industri pengolahan mempunyai pangsa sebesar 17,50% (Gambar 3.1)



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.1. Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha*)

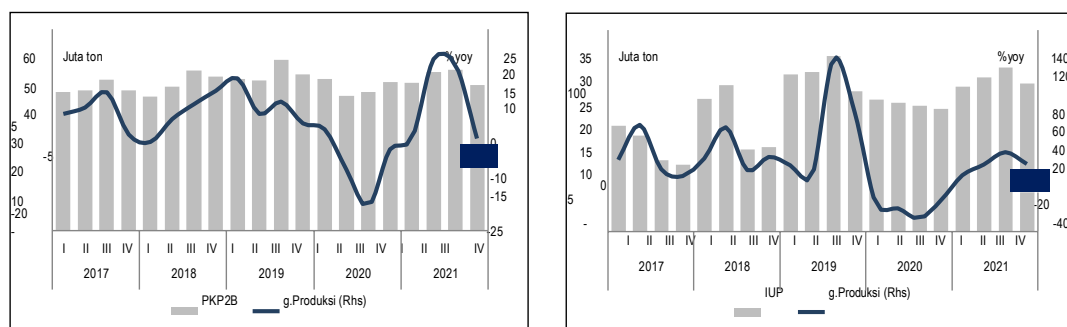
*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan IV 2021

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Komponen PDRB	2018 (% y o y)	2019 (% y o y)	2020 (% y o y)	2021 (% y o y)
PDRB Total Berdasarkan Lapangan Usaha	4,74	2,79	-2,88	2,91
Pertanian	5,48	2,35	-1,50	-0,56
Pertambangan	5,47	3,00	-4,32	1,71
Industri Pengolahan	0,42	0,22	-2,17	2,90
Listrik dan Gas	6,52	9,29	12,19	5,84
Air	3,35	1,92	6,82	5,82
Konstruksi	13,68	1,56	-4,04	10,86
Perdagangan	3,90	6,65	-0,18	4,80
Transportasi dan Pergudangan	2,35	3,19	-3,53	2,16
Akomodasi dan Makan Minum	7,19	7,27	-7,51	4,75
Informasi dan Komunikasi	3,78	5,16	10,09	9,40
Jasa dan Keuangan	5,67	9,09	0,67	0,75
Real estate	2,35	2,57	-1,63	1,12
Jasa Perusahaan	1,64	7,40	-5,87	4,71
Adm. Pemerintahan	3,85	7,96	-9,40	8,79
Jasa Pendidikan	4,43	4,46	4,80	-2,23
Jasa Kesehatan dan Sosial	6,63	5,83	27,66	5,44
Jasa lainnya	10,45	6,55	-4,51	2,54

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim pada triwulan IV 2021 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan menjadi faktor utama perlambatan ekonomi Kaltim. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,29% (yoy). Dengan pangsa sebesar 45,63%, lapangan usaha pertambangan memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,71% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim triwulan IV 2021. Perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan tersebut bersumber dari produksi batu bara Kaltim yang terbatas seiring dengan masih kurang kondusifnya cuaca serta peningkatan produksi batu bara domestik di negara tujuan. Produksi batu bara Kaltim pada triwulan IV 2021 mencapai 68,9 juta ton atau tumbuh 5,06% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 21,27% (yoy) atau 76,3 juta ton. Berdasarkan karakteristik perusahaannya, lebih rendahnya volume produksi terjadi baik untuk perusahaan PKP2B maupun IUP dimana pada triwulan berjalan, produksi PKP2B dan IUP tercatat masing-masing tumbuh sebesar -2,22% (yoy) dan 20,16% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,31% (yoy) dan 30,67% (yoy).



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Gambar 3.2. Produksi Batu Bara Kaltim PKP2B dan Produksi Batu Bara IUP Kaltim

Penurunan kinerja lapangan usaha pertambangan lebih dalam tertahan oleh kinerja pertambangan migas yang mengalami perbaikan. Pada triwulan IV 2021 kinerja *lifting* minyak Kaltim tercatat membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi 13,68% (yoy) menjadi kontraksi 4,92% (yoy). Sementara itu kinerja *lifting* gas Kaltim tercatat tumbuh positif sebesar 1,22% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi

22,37% (yoy). *Lifting* migas masih didominasi oleh *lifting* dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkontribusi masing-masing 62,07% (minyak bumi) dan 48,97% (gas) terhadap total *lifting* migas Kaltim selama triwulan IV 2021.

Secara keseluruhan tahun 2021, lapangan usaha pertambangan kembali kepada jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi seiring dengan permintaan negara tujuan yang lebih solid di tengah tingginya momen harga komoditas. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertambangan pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 2,26% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,58% (yoy). Hal tersebut utamanya bersumber dari aktivitas negara tujuan utama yang semakin menggeliat seiring dengan lebih terkendalinya COVID-19 karena gencarnya upaya vaksinasi. Selain itu, momen harga batu bara yang berada pada titik tertingginya di tahun 2021 menjadi faktor pendorong beberapa perusahaan untuk mengejar momen tersebut utamanya untuk melakukan *set-off* harga batu bara tahun sebelumnya yang berada pada level rendah.

Kinerja industri pengolahan Kaltim pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan aktivitas pengolahan migas yang meningkat sejalan dengan aktivitas masyarakat maupun industri yang kembali menggeliat. Pada triwulan IV 2021 industri pengolahan mencatat pertumbuhan 2,90% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,35% (yoy) (Grafik I.15). Kenaikan tersebut utamanya bersumber dari peningkatan industri pengolahan migas seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali menggeliat sehingga permintaan BBM menjadi lebih tinggi. Peningkatan industri pengolahan migas bisa dilihat dari peningkatan volume impor minyak mentah Kaltim yang mengalami pertumbuhan sebesar 317,09% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 30,81% (yoy). Peningkatan permintaan BBM juga terkonfirmasi dari peningkatan aktivitas masyarakat yang terlihat dari data *Google Mobility Report* Kaltim dan juga hasil survei pedagang eceran (SPE) Kaltim. Terlihat bahwa aktivitas masyarakat secara umum tumbuh sebesar 3,32% dari *baseline* setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 10,43% (Grafik I.17). Secara khusus, aktivitas masyarakat di *transit stations* yang bisa menunjukkan frekuensi masyarakat bepergian mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 30,98% menjadi kontraksi

8,37%. Sementara itu, hasil SPE menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) BBM di wilayah Kaltim mengalami peningkatan menjadi 44,7 dari triwulan sebelumnya sebesar 37,4. Adapun jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan tahunnya, IPR BBM di Wilayah Kaltim tercatat membaik dari sebelumnya terkontraksi 25,8% (yoy) menjadi kontraksi 7,1% (yoy). Lebih lanjut, pergerakan pada sektor pengolahan migas cukup signifikan mempengaruhi pergerakan kinerja lapangan usaha industri pengolahan mengingat porsi sektor pengolahan migas memiliki porsi cukup besar mencapai 56.4%.



Sumber: Publikasi Tahunan BPS, 2020

Gambar 3.3 Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori.

Pertumbuhan kinerja industri pengolahan lebih lanjut tertahan oleh kontraksi kinerja CPO di tengah tren harga yang melambat. Penurunan kinerja CPO tercermin dari volume ekspor CPO Kaltim ke negara tujuan utama yang mengalami penurunan di triwulan berjalan. Tercatat volume ekspor CPO Kaltim mengalami kontraksi sebesar 8,51% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi mencapai 88,30% (yoy). Sementara itu, harga CPO Kaltim juga tercatat mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 45,95% (yoy) menjadi 15,27% (yoy). Lebih lanjut, berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dan *liaison* yang dilakukan oleh KPw BI Kaltim kepada stakeholder terkait, penurunan kinerja CPO merupakan dampak dari hasil panen yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya akibat efek cuaca buruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan tahun 2021, lapangan usaha industri pengolahan kembali kepada jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi

cukup dalam seiring dengan kembali berproduksinya sektor industri pengolahan migas yang memiliki pangsa tertinggi. Laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 2,29% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,77% (yoy). Hal tersebut utamanya bersumber dari industri pengolahan migas yang kembali beroperasi secara normal pasca tahun lalu dilakukan *temporary shutdown* pada awal triwulan II 2020 yang menyebabkan lapangan usaha industri pengolahan mengalami kontraksi cukup dalam. Selain bersumber dari industri pengolahan migas, solidnya lapangan usaha industri pengolahan juga ditopang oleh kinerja pengolahan CPO seiring permintaan dan momentum harga yang tinggi.

Kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim triwulan IV 2021 terus melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan kembali meningkatnya intensitas konstruksi, terutama proyek-proyek pemerintah seiring dengan aktivitas belanja modal yang tinggi. Secara tahunan kinerja lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh sebesar 10,86% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 6,76% (yoy) (Grafik I.23). Positifnya kinerja lapangan usaha konstruksi didorong oleh terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis seperti *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan, Bendungan Sepaku Semoi, berbagai preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, akselerasi kinerja konstruksi Kaltim juga turut bersumber dari pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang tercermin dari peningkatan belanja modal pemprov Kaltim dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 54,90% (yoy) menjadi 194,00% (yoy) (Grafik I.24). Di sisi lain pembangunan proyek-proyek dari pihak swasta utamanya industri juga terus dilakukan, dimana hal tersebut terlihat dari tingginya pertumbuhan PMA dan PMDN Industri Kaltim di triwulan berjalan.

Kinerja lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan Kaltim tercatat mengalami kontraksi akibat produksi yang terbatas. Secara tahunan kinerja lapangan usaha pertanian tercatat kontraksi sebesar 0,56% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh positif sebesar 2,63% (yoy). Menurunnya kinerja lapangan usaha pertanian tersebut utamanya bersumber dari terbatasnya kinerja produksi sawit mengingat sub sektor perkebunan utamanya komoditas sawit memiliki pangsa yang cukup besar terhadap lapangan usaha pertanian. Tercatat sektor tanaman perkebunan memiliki pangsa sebesar

56,26% terhadap total lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun penurunan tersebut utamanya disebabkan realisasi panen yang berada di bawah perkiraan sebagai dampak dari anomali cuaca di tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, harga TBS Kaltim pun tercatat mengalami perlambatan dimana pada triwulan berjalan harga TBS Kaltim hanya mampu tumbuh 17,42% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 48,27% (yoy) .

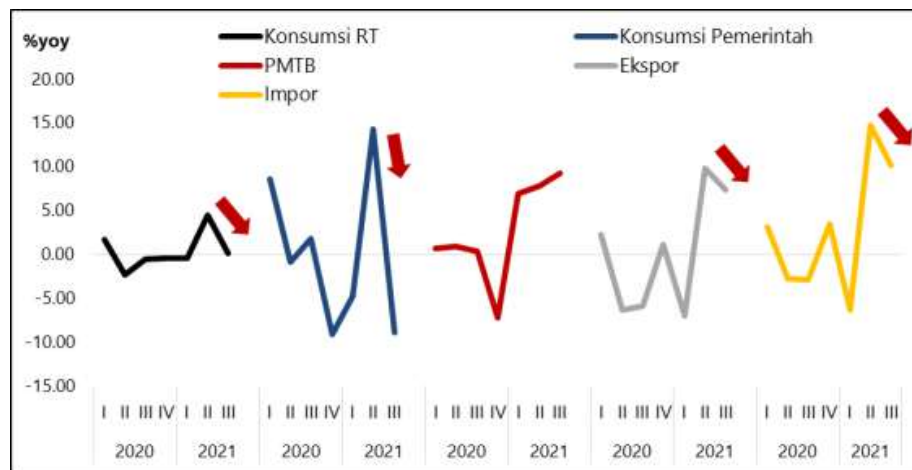
Namun di sisi lain, kontraksi lebih dalam tertahan oleh kinerja kehutanan dan perikanan yang mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari volume ekspor kayu lapis dan udang yang membaik di tahun ini. Tercatat ekspor kedua komoditas tersebut masing-masing mengalami kontraksi sebesar 4,61% (yoy) dan 2,87% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,24% (yoy) dan 17,54% (yoy). Membaiknya ekspor tersebut secara langsung berkaitan dengan produksi komoditas kehutanan dan perikanan di sektor hulu. **Di sisi kinerja keuangan, penyaluran kredit di sektor pertanian & kehutanan maupun sektor perikanan masih tumbuh positif dan solid dengan tingkat risiko yang terkendali.** Kredit sektor pertanian & kehutanan tercatat tumbuh 51,41% (yoy) pada triwulan IV 2021, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,13% (yoy). Capaian tersebut juga diiringi oleh risiko kredit yang menurun. Rasio NPL lapangan usaha pertanian tercatat mengalami penurunan dari 1,47% pada triwulan sebelumnya, menjadi 1,13%. Sementara itu, Kredit sektor perikanan tercatat tumbuh positif mencapai 28,34% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 31,32% (yoy). Lebih lanjut, rasio NPL sektor perikanan tercatat sebesar 4,26% masih berada dibawah *threshold* walaupun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,85%.

Secara keseluruhan tahun 2021, lapangan usaha pertanian masih mengalami kontraksi walaupun relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh lebih baiknya kinerja perkebunan sawit. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian pada tahun 2021 tercatat terkontraksi sebesar 0,26% (yoy) lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,12% (yoy). Masih terkontraksinya lapangan usaha pertanian utamanya dikarenakan oleh cuaca yang masih kurang kondusif, terlebih adanya La Nina yang terjadi di Kaltim pada Semester II 2021. Di sisi lain, penurunan lebih dalam tertahan oleh kinerja perkebunan sawit yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya seiring

dengan tingginya harga TBS serta solidnya permintaan CPO baik dari luar negeri maupun domestik.

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan mobilitas masyarakat yang kembali menggeliat. Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat 4,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 4,46% (yoy). Peningkatan tersebut juga tercermin dari hasil SPE yang memperlihatkan perlambatan pertumbuhan Indeks Penjualan Eceran (IPE). IPE Kaltim triwulan IV 2021 mencatat pertumbuhan 7,2% (yoy), dimana pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,4% (yoy). Berdasarkan komponen utamanya, peningkatan tersebut bersumber darimembaiknya kinerja sub komponen makanan, minuman, & tembakau serta bahan bakar kendaraan bermotor setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi lebih dalam. Selain itu, sub sektor kendaraan tetap tumbuh tinggi walaupun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan tahun 2021, lapangan usaha perdagangan besar & eceran tercatat tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh terbatas seiring dengan kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat dan membaiknya dunia usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,77% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,93% (yoy). Aktivitas masyarakat yang kembali menggeliat seiring dengan gencarnya upaya vaksinasi dan lebih tanggapnya penanganan COVID-19 adalah faktor utama tumbuh positifnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Selain itu, membaiknya dunia usaha membuat kemampuan ekonomi masyarakat pun turut pulih yang secara langsung meningkatkan frekuensi perdagangan terutama di sub sektor perdagangan eceran.



Gambar 3.4.
Grafik Neraca Perekonomian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

3.2 Kondisi Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur

Perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur merupakan salah satu yang tertinggi di luar Pulau Jawa sehingga sangat menjadi perhatian khusus baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Penduduk yang meninggal karena covid di provinsi Kalimantan Timur secara klinis memiliki penyakit bawaan yang menjadi kondisi penyerta saat pemeriksaan. Pasien Meninggal dengan Status covid-19 secara persentase yakni mereka dengan kondisi 46.6 persen sedang menderita diabetes melitus, 26.1 persen hipertensi, 19.3 persen ada riwayat penyakit jantung, 10.2 persen memiliki riwayat penyakit ginjal dan 1.7 persen sakit kanker. Sedangkan dalam diagnosis awal, mereka yang terkena covid melaporkan gejala utama seperti sesak napas, batuk, demam, lemas dan riwayat demam. Statistik harian untuk data penambahan harian meninggal di Kalimantan Timur dalam seminggu terakhir sudah mulai turun. Dibandingkan provinsi lain, dari nilai yang terbesar, Kalimantan Timur berada di urutan 4. Kemarin provinsi ini mencatatkan jumlah penambahan penduduk yang meninggal karena covid meningkat dibandingkan sebelumnya dengan selisih enam orang.

Informasi lain dari provinsi Kalimantan Timur adalah, tingkat kesembuhan yang termasuk tinggi mencapai 83,81 persen (sebanyak 114,5 ribu jiwa telah dinyatakan sembuh). Sedangkan untuk angka kematian di tempat ini tercatat 4243 jiwa (tiga persen). Mereka yang

berhasil sembuh di antaranya memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit ginjal dan hamil. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur, mereka secara persentase jumlah kasus covid-19 menurut kelompok umur dari urutan yang terbesar adalah penduduk dengan usia 31-45 tahun sebanyak 32.4 persen, 27.3 persen golongan pemuda umur 19-30 tahun, 19.3 persen umur antara 46-59 tahun, 10.2 persen umur antara 6-18 tahun, 7.5 persen dengan umur lebih dari 60 tahun dan 3.2 persen umur antara 0-5 tahun. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, mereka yang terkonfirmasi positif covid-19 di Kalimantan Timur lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Secara total kasus COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun tracking, data distribusi kasus berdasarkan kasus Suspek, Konfirmasi, Discarded, Probable, dan dalam Proses Pemeriksaan per Kabupaten/Kota dapat terlihat di Tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.3
Data distribusi kasus berdasarkan kasus Suspek, Konfirmasi, Discarded, Probable, dan dalam Proses Pemeriksaan per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kab/Kota	Suspek	Total Suspek	Discarded (Suspek Negatif)	Total Discarded	Konfirmasi	Total Konfirmasi	Probable	Proses
1	Berau	945	60184	1041	46261	11	12989	0	934
2	Kutai Barat	217	28326	192	17712	9	10405	1	208
3	Kutai Kartanegara	1072	72716	1321	45759	10	25890	5	1062
4	Kutai Timur	306	44959	619	26869	9	17793	0	297
5	Mahakam Ulu	5	2302	11	707	3	1593	0	2
6	Paser	86	20280	219	11972	6	8228	0	80
7	Penajam Paser Utara	42	8237	263	3815	4	4384	0	38
8	Balikpapan	3078	230165	4020	189239	28	37873	3	3050
9	Bontang	427	37470	624	22135	41	14949	0	386
10	Samarinda	1782	143340	3132	119427	9	22119	21	1773
Total		7960	647979	11442	483896	130	156223	30	7830

Sedangkan total penderita dan korban pandemic COVID-19 di Kalimantan Timur yang dikumpulkan datanya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Data Perkembangan kasus Konfirmasi, Sembuh, dan Meninggal per Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kab/Kota	Konfirmasi	Sembuh	Total Sembuh	Meninggal	Total Meninggal	Dirawat
1	Berau	12989	25	12350	0	393	246
2	Kutai Barat	10405	20	10107	0	260	38
3	Kutai Kartanegara	25890	10	24791	0	832	267
4	Kutai Timur	17793	34	17214	0	428	151
5	Mahakam Ulu	1593	4	1555	0	27	11
6	Paser	8228	10	7899	0	264	65
7	Penajam Paser Utara	4384	9	4097	1	228	59
8	Balikpapan	37873	40	35735	1	1863	275
9	Bontang	14949	40	14111	0	348	490
10	Samarinda	22119	23	21275	0	714	130
Total		156223	215	149134	2	5357	1732

3.3 Perkembangan Program Pembangunan di Kalimantan Timur Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi faktor utama perlambatan ekonomi Kaltim di tengah kinerja komponen lainnya yang mampu tumbuh lebih tinggi. Lebih rendahnya kinerja ekspor utamanya disebabkan oleh volume ekspor komoditas utama Kaltim seperti batu bara yang mengalami kontraksi. Secara spesifik, turunnya volume ekspor batu bara disebabkan oleh permintaan yang tidak setinggi triwulan sebelumnya di tengah produksi domestik di negara tujuan turut mengalami peningkatan. Sementara itu, turunnya produksi CPO Kaltim juga turut

menyebabkan volume ekspor menjadi terbatas. Di sisi lain, kinerja investasi (PMTB) tumbuh tinggi dan solid sehingga mampu menahan laju perlambatan ekonomi lebih lanjut. Kinerja investasi (PMTB) yang tinggi tercermin dari positifnya kinerja PMA dan PMDN. Selain Investasi (PMTB), kinerja konsumsi baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah tercatat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan kondisi yang lebih kondusif. Berdasarkan pangasanya, net ekspor dan investasi masih menjadi komponen terbesar PDRB Kaltim, masing-masing sebesar 47,51% dan 30,38% (Tabel 3.5 dan Gambar 3.5).

Tabel 3.5. **Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)**

Komponen PDRB	2018	2019	2020	2021
PDRB Total Berdasarkan Pengeluaran	4,74	2,79	-2,88	2,91
Konsumsi Rumah Tangga	3,71	2,09	-0,61	0,86
Konsumsi LNPRT	8,56	3,32	4,37	0,92
Konsumsi Pemerintah	8,04	14,36	-9,16	5,63
PMTB	6,83	5,21	-5,82	9,81
Perubahan inventori	24,06	-79,18	204,09	-92,77
Ekspor*	-	2,56	-0,83	1,32
Impor*	-	3,92	-0,13	2,48

Sumber: BPS, diolah

*Nilai ekspor- impor yang digunakan mencakup ekspor-impor antar daerah dan luar negeri.

Kinerja ekspor Kaltim pada triwulan IV 2021 masih berada dalam jalur pertumbuhan positif walau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan permintaan negara tujuan ekspor batu bara yang terbatas. Pada triwulan IV 2021, kinerja ekspor Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,32% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,07% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor tersebut didorong utamanya oleh kinerja volume ekspor batu bara yang mengalami kontraksi karena terbatasnya permintaan dari negara tujuan utama. Volume ekspor LN batu bara Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 13,53% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh positif sebesar 19,56% (yoy). Berdasarkan negara atau kawasan tujuan utama, volume ekspor batu bara Kaltim ke Tiongkok, India, dan ASEAN tercatat masing-masing tumbuh sebesar 35,90% (yoy), -60,62% (yoy), dan -15,97% (yoy) lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 135,97% (yoy), -44,98% (yoy), dan 4,05% (yoy). Secara umum, terbatasnya

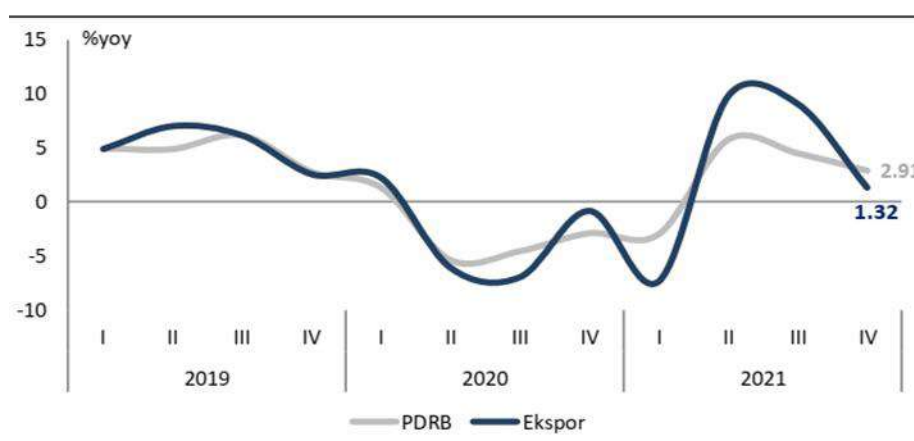
permintaan batu bara dari negara tujuan utama disebabkan oleh upaya optimalisasi produksi batu bara domestik di negara tersebut.



Gambar

3.5.

Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2021 Berdasarkan Pengeluaran.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.6. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Ekspor.

Kinerja ekspor yang melambat juga didorong oleh terkontraksinya ekspor LN CPO setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh tinggi. Volume ekspor LN CPO Kaltim pada triwulan laporan tercatat 663 ribu ton atau terkontraksi sebesar 8,51% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh tinggi mencapai 88,30% (yoy). Terkontraksinya volume ekspor LN CPO tersebut utamanya bersumber dari terkontraksinya ekspor CPO ke Tiongkok yang memiliki pangsa tertinggi terhadap volume total ekspor CPO Kaltim mencapai 55%. Pada triwulan IV 2021, volume ekspor CPO Kaltim ke Tiongkok tercatat mengalami kontraksi 10,6% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh tinggi mencapai 48,7% (yoy). Selain Tiongkok, kontraksinya ekspor LN CPO Kaltim juga disebabkan oleh lebih rendahnya volume ekspor ke Malaysia dan Bangladesh. Pada triwulan IV 2021, volume ekspor CPO Kaltim ke Malaysia dan Bangladesh tercatat tumbuh masing-masing -94,9% (yoy) dan -45,4% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 441,7% (yoy) dan -39,5% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2021, ekspor Kaltim tercatat mampu kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi seiring dengan permintaan dari negara tujuan utama yang mulai kembali pulih dan juga turut didukung momentum harga yang berada di level tinggi. Laju pertumbuhan komponen ekspor pada tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 2,96% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,20% (yoy). Pulihnya permintaan dari negara tujuan utama seperti Tiongkok dan India akan komoditas Kaltim seperti Batu Bara dan CPO seiring dengan aktivitas industri dan masyarakatnya yang kembali menggeliat adalah faktor utama kinerja ekspor Kaltim kembali positif. Momentum harga Batu Bara dan CPO yang juga berada di dalam titik tertingginya semenjak beberapa tahun terakhir juga turut menjadi stimulus kinerja ekspor Kaltim. Laju pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh kendala produksi yang pada umumnya disebabkan oleh faktor cuaca.

Kinerja impor Kaltim pada triwulan IV 2021 tetap mampu tumbuh positif walaupun **relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang utamanya bersumber dari komponen impor non migas.** Pada triwulan IV 2021 impor Kaltim tercatat tumbuh sebesar 2,48% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,72% (yoy). Melambatnya kinerja impor Kaltim tersebut terkonfirmasi dari lebih dalamnya kontraksi volume impor barang modal non-migas serta melambatnya volume impor bahan baku non-migas di tengah tumbuhnya volume impor barang konsumsi. Pada triwulan IV 2021, volume impor barang modal dan bahan baku non-migas tercatat tumbuh masing-masing sebesar -

36,05% (yoy) dan 64,02% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -35,45% (yoy) dan 110,22% (yoy). Di sisi lain, volume impor barang konsumsi tercatat mampu tumbuh sebesar 35,94% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 25,28% (yoy)

Secara keseluruhan tahun 2021, Impor Kaltim tercatat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sejalan dengan aktivitas industri, masyarakat, maupun konstruksi yang juga membaik. Laju pertumbuhan komponen impor pada tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 5,43% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,24% (yoy). Kembali normalnya kinerja pengilangan migas di Kaltim setelah pada tahun sebelumnya mengalami *terminary shutdown* menjadi faktor utama tumbuhnya kinerja impor di tahun ini. Selain itu, kembali pulihnya aktivitas industri di tengah momentum harga komoditas yang tinggi serta berlanjutnya konstruksi proyek juga turut mendorong kinerja impor barang modal. Lebih lanjut, aktivitas masyarakat yang kembali menggeliat dan adanya peningkatan kinerja konsumsi juga turut meningkatkan kinerja impor Kaltim utamanya untuk sub komponen impor barang konsumsi.

Kinerja PMTB (investasi) Kaltim pada triwulan IV 2021 terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang bersumber dari peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kinerja PMTB (Investasi) Kaltim triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 9,81% (yoy), menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,85% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari kenaikan PMA dan PMDN pada triwulan ini yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi PMA Kaltim pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 233,8 juta USD atau tumbuh 261,45% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 81,10% (yoy). Sementara itu, realisasi PMDN Kaltim tercatat sebesar Rp 12,95 Triliun atau mengalami pertumbuhan positif mencapai 77,53% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 20,73% (yoy). Dengan pangsa sebesar 30,38% dari PDRB Kaltim, investasi memberikan andil 2,63% (yoy) terhadap pertumbuhan PDRB Kaltim triwulan IV 2021 dan menjadi komponen yang terbesar diantara komponen pengeluaran lainnya.

Solidnya kinerja penyaluran PMA di Kaltim triwulan IV 2021 secara umum bersumber dari tingginya pertumbuhan investasi di seluruh sektor. Berdasarkan disagregasinya, pangsa PMA Kaltim didominasi oleh sektor sekunder yang mencapai 53,98% terhadap total pangsa PMA Kaltim diikuti oleh sektor primer dan tersier yang masing-masing

tercatat 40,10% dan 5,92%. Lebih lanjut, pada triwulan IV 2021, PMA pada sektor primer, sekunder, tersier tercatat masing-masing tumbuh sebesar 125,4% (yoy); 664,6% (yoy); dan 110,14% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 92,60% (yoy); 100,36% (yoy); dan 10,84% (yoy). Secara khusus, tingginya pertumbuhan PMA pada sektor sekunder bersumber dari Industri Makanan (CPO); Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi; serta Industri Mineral Non Logam yang tercatat tumbuh tinggi pada triwulan berjalan. Adapun lebih lanjut, tingginya investasi di sektor sekunder tersebut lebih dari 50%nya berasal dari investasi industri makanan (CPO) yang berfokus kepada industri pengolahan CPO bernilai tambah.

Sementara itu, kembali positifnya kinerja penyaluran PMDN Kaltim bersumber utamanya dari tingginya pertumbuhan PMDN sektor sekunder di tengah perlambatan sektor primer dan berlanjutnya kontraksi di sektor tersier. Berdasarkan disagregasinya, pangsa PMDN Kaltim didominasi oleh sektor sekunder yang mencapai 73,37% terhadap total pangsa PMDN Kaltim diikuti oleh sektor primer dan tersier yang masing-masing tercatat 23,23% dan 3,40% (Grafik I.54). Pada triwulan IV 2021, PMDN di sektor sekunder mampu menjadi sumber pertumbuhan utama dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 98,46% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 29,91% (yoy). Di sisi lain, PMDN sektor primer tercatat mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 223,40% (yoy) menjadi 64,32% (yoy). Sementara itu, PMDN sektor tersier juga menahan pertumbuhan kinerja PMDN lebih lanjut seiring dengan masih berlanjutnya tren kontraksi. Tercatat pada triwulan berjalan, PMDN sektor tersier terkontraksi sebesar 34,91% (yoy) walaupun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 72,35% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2021, kinerja investasi (PMTB) Kaltim mampu kembali ke jalur positif dan juga mampu tumbuh tinggi, seiring dengan lebih terkendalinya COVID-19 sehingga mampu meningkatkan optimisme industri dan dunia usaha untuk melakukan investasi. Laju pertumbuhan komponen investasi pada tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,03% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,54% (yoy). Penanganan COVID-19 yang lebih terkendali dan telah gencarnya pemberian vaksinasi kepada masyarakat adalah sumber utama optimisme industri dan dunia usaha untuk melakukan investasi. Hal tersebut juga turut terkonfirmasi dengan telah membaiknya kinerja lapangan usaha utama dan lebih baiknya prospek perekonomian ke depan. Selain itu, berlanjutnya proyek-proyek strategis *multi years contract* (MYC) juga berkontribusi positif terhadap kinerja investasi. Lebih lanjut, adanya momentum

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim juga turut menstimulus kinerja investasi untuk tumbuh lebih tinggi lagi.

Konsumsi rumah tangga (RT) pada triwulan IV 2021 kembali tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan lebih meredanya kasus COVID-19 sehingga mobilitas masyarakat kembali menggeliat. Konsumsi Rumah Tangga (RT) mencatat pertumbuhan sebesar 0,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy). Kenaikan kinerja konsumsi RT tersebut bersumber dari kenaikan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terkonfirmasi dari data *Google Mobility Report* di Kaltim seiring dengan pengetetan yang mulai dilonggarkan karena lebih terkendalinya COVID-19. Secara umum seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah terutama di pusat perbelanjaan dan keramaian mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sementara aktivitas masyarakat di perumahan (*residential*) mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata aktivitas masyarakat di Kaltim pada triwulan IV 2021 tumbuh 3,32% setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 10,42%.

Kinerja konsumsi RT yang mengalami kenaikan pada triwulan IV 2021 juga terkonfirmasi oleh keyakinan konsumen yang meningkat walaupun di sisi lain penyaluran kreditnya mengalami perlambatan. Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kaltim pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 121,50 lebih tinggi dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 97,72. Peningkatan keyakinan konsumen ini bersumber dari kenaikan dua indeks penyusunnya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 105,94 lebih tinggi dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 79,50. Sementara itu, IEK pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 137,05, meningkat dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 115,94. Secara umum angka IKE dan IEK yang berada di atas 100 menandakan bahwa konsumen berada pada level optimis. Di sisi keuangan, kredit konsumsi tercatat mengalami kontraksi 0,22% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,45% (yoy). Namun penurunan kinerja kredit konsumsi tersebut diiringi oleh tingkat risiko yang lebih terkendali. Tercatat NPL kredit konsumsi Kaltim pada triwulan IV 2021 mengalami penurunan dari 3,07% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,87%.

Secara keseluruhan tahun 2021, kinerja konsumsi RT Kaltim mampu kembali jalur pertumbuhan positif, seiring dengan kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat

yang bersumber dari COVID-19 yang lebih terkendali dan percepatan vaksinasi. Laju pertumbuhan komponen konsumsi RT pada tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,20% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 0,44% (yoy). COVID-19 yang lebih terkendali dan tingginya tingkat vaksinasi di Kaltim membuat optimisme baik dari sisi masyarakat maupun pelaku usaha meningkat. Selain itu, kemampuan konsumsi masyarakat Kaltim di tahun juga lebih baik dibandingkan lalu sejalan dengan mulai kembali *on-board* para pekerja di Kaltim setelah pada tahun sebelumnya banyak yang dirumahkan akibat tempat usaha yang terpaksa ditutup karena pembatasan-pembatasan darurat.

Kinerja Konsumsi Pemerintah di Kaltim pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan positif setelah sebelumnya berkontraksi sejalan dengan upaya percepatan realisasi anggaran di akhir tahun. Pada triwulan IV 2021 konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,63% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat kontraksi sebesar 8,95% (yoy). Berdasarkan pangannya terhadap perekonomian Kaltim, komponen konsumsi pemerintah berkontribusi 5,65% terhadap pembentukan PDRB Kaltim serta memberikan andil sebesar 0,26% (yoy) terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2021. Pertumbuhan kinerja konsumsi pemerintah secara umum didorong oleh seluruh komponen belanjanya. Belanja seluruh APBD Kab/Kot dan APBD Provinsi masing-masing tercatat tumbuh sebesar 11,60% (yoy) dan 106,10% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -18,37% (yoy) dan 21,63% (yoy). Sementara itu belanja APBN di Kaltim tercatat mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya berkontraksi cukup dalam sebesar 55,15% (yoy) menjadi kontraksi 11,76% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja konsumsi pemerintah tercatat mampu tumbuh positif setelah tahun sebelumnya berkontraksi sejalan dengan mulai membaiknya kendala-kendala realisasi anggaran yang terjadi di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,03% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 2,02% (yoy). Hal tersebut utamanya bersumber dari telah berlalunya kendala-kendala realisasi anggaran seperti penghentian proses pengadaan barang/jasa akibat adanya *refocusing* untuk penanganan COVID-19 dan terkendalanya realisasi pengerjaan proyek

3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.



Gambar 3.7

Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (major project). Adapun major project yang belokasi di Provinsi Kalimantan Timur disajikan sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor	Lokasi
Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Jalan dan Jembatan	Kalimantan Timur
Jalan Tol Samarinda Bontang	Jalan dan Jembatan	Kalimantan Timur
Bendungan Marangkayu	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Bendungan Sepaku Semoi	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	Bendungan dan Irigasi	Kalimantan Timur
Kilang Minyak Bontang	Energi	Kalimantan Timur
Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>deepwater Development Project</i> (IDD))	Energi	Kalimantan Timur

Gambar 3.8

Daftar Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur Tahun 2020-2021

3.5 Program Unggulan Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program unggulan RPJMD tahun 2019-2023 merupakan amanat gubernur terpilih sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya;
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur;
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama;
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School);
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan;

6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA;
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal;
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas;
9. Peningkatan perlindungan anak;
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun;
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional;
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan;
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah;
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa;
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera;
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan;
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat;
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas;
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat;
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis;
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat;

30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata;
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan;
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara;
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya;
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis;
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN);
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah;
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan; dan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BAB IV. EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN IKK DAN PROGRAM DEDIKASI KALTIM 2021 DAN PROYEKSI 2023

4.3. Evaluasi Terhadap Capaian Pembangunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Indikator Makro dalam RPJMD 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur memberikan deskripsi tentang kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, PDRB per Kapita, laju Pertumbuhan Rkonomi Non Migas dan batubara, Nilai Tukar Petani, Indeks Gini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 4.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Indikator	Capaian 2021		Kinerja Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (2021)	Ket Kinerja Capaian (2021)
	Rencana	Realisasi		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.75	76.88	100.17	Sangat Tinggi
Tingkat Kemiskinan (%)	6.05	6.54	91.90	Sangat Rendah
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.81	6.83	99.71	Sangat Rendah
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1.5	2.48	165.33	Sangat Tinggi
PDRB per Kapita (Juta Rp)	170	182.54	107.38	Sangat Tinggi
Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	1.5	2.69	179.33	Sangat Tinggi
Nilai Tukar Petani	118	120.94	102.49	Sangat Tinggi
Indeks Gini	0.328	0.334	98.17	Sangat Rendah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.95	75.06	98.83	Sangat Tinggi
Indeks Reformasi Birokrasi	71	68.1	95.92	Sangat Tinggi

Capaian indikator makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 menunjukkan nilai setiap indikator secara berurutan : 100.17% ; 91.90% ; 99.71% ; 165.33% ; 107.38% ; 179.33% ; 102.49% ; 98.17% ; 98.83% ; dan 95.92%, dengan nilai rata-ran sebesar **113.92 % (SANGAT TINGGI)**. Keseluruhan indikator (10 indikator) memiliki capaian 50 persen atau 5 indikator melampaui target (>100 persen) dan 50% (5 indikator) belum mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup manusia di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan terus mengalami kemajuan, hal ini didukung juga sebagai langkah kesiapan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Kualitas hidup manusia ini ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan target 2021, IPM ditargetkan mencapai 76,75 sedangkan realisasi yang baru didapatkan masih bernilai 76,88. Namun nilai IPM ini merupakan nilai IPM **di atas** rata-ran nasional (72, 29) dan merupakan tertinggi di Pulau Kalimantan. Hasil juga menunjukkan bahwa kinerja pencapaian IPM di Kalimantan Timur **sangat tinggi**.
- b. Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro, dikarenakan dampak pembangunan sangat berpengaruh terhadap pencapaian nilai ini. Kalimantan Timur sebagai salah satu yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar menjadikan hal tersebut dalam menopang kegiatan perekonomian masyarakatnya. Tahun 2021, target menurunkan tingkat Kemiskinan masyarakat di Kalimantan Timur berada di nilai 6,05 dengan realisasi pada tahun 2020 (sebelumnya) 6,10 %. Hasil realisasi pada tahun 2021, upaya untuk menekan angka tingkat kemiskinan masih mencapai 6,54%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian untuk menekan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur masih **sangat rendah**.
- c. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kaltim Tahun 2021 memiliki target 6,81% Realisasi pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 baru mampu mencapai 6,83%. Berdasarkan capaian kinerja, masih terlihat bahwa Angka Tingkat Pengangguran di Kalimantan Timur belum bisa ditekan sehingga capaian kinerja pada indikator ini masih bersifat **sangat rendah**.
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Target RPJMD Tahun 2021 sebesar 1,5 %, namun berdasarkan informasi dari neraca ekonomi daerah Kalimantan Timur, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2021 melanjutkan tren perbaikan dengan nilai capaian sebesar 2,48. Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021

Kalimantan Timur bernilai **Sangat Tinggi** dikarenakan capaiannya melampaui dari nilai target yang direncanakan.

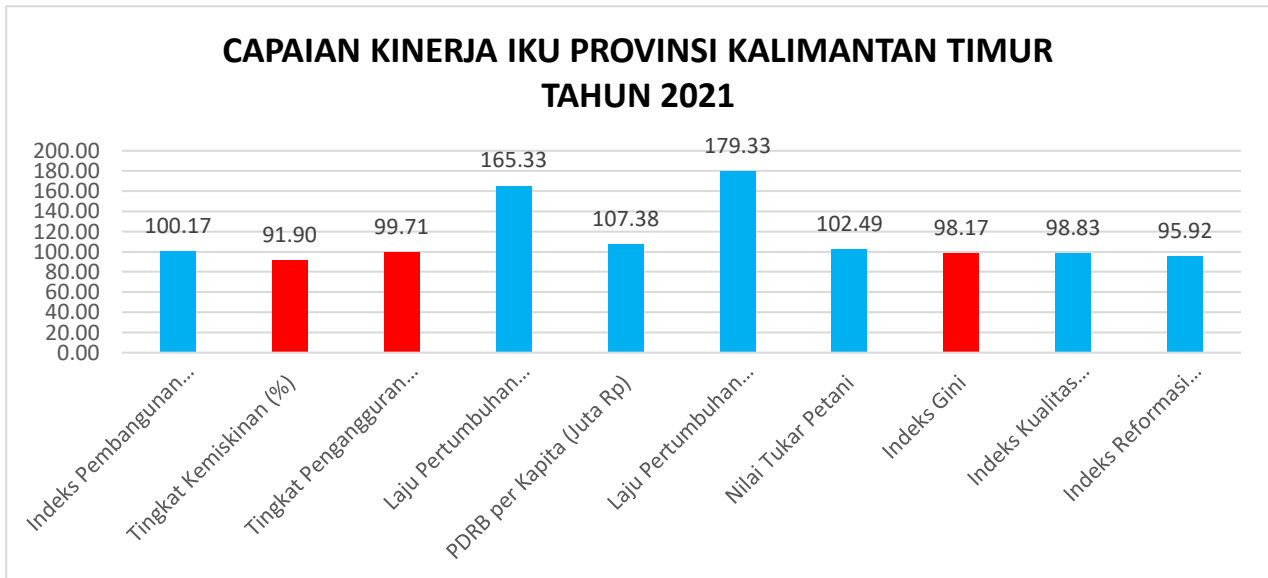
- e. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Target nilai PDRB per kapita Kalimantan Timur adalah 167,5 (juta Rp), dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 182,54 (Juta Rp). Kinerja Nilai PDRB sesuai target terjadi pelampauan sehingga indikator kinerja PDRB Kalimantan Timur Tahun 2021 bernilai **Sangat Tinggi**.
- f. Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara Tahun 2021 di dalam RPJMD ditargetkan sebesar 1,5 %, dengan capaian pada Tahun 2021 adalah **melampaui** menjadi 2,69 %. Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara ini mencapai kriteria yang **Sangat Tinggi**.
- g. Kondisi kesejahteraan Kaltim pada 2021 secara umum juga menunjukkan perbaikan terutama jika berkaitan dengan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur. Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2021 sebesar 120,90 atau **lebih tinggi** dibandingkan dengan target di RPJMD Kaltim 2019-2023 sebesar 118. Capaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tahun 2021 memiliki kinerja **Sangat Tinggi** yang menjadi acuan bahwa perkembangan perekonomian sektor pertanian memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
- h. Gambaran ketimpangan pendapatan dan pembangunan di Kalimantan Timur diwakili oleh indikator indeks gini. Selain itu koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Berdasarkan data capaian Tahun 2021, indeks gini Kalimantan Timur mencapai 0,334 Angka ini **sudah** mencapai target indeks gini di RPJMD dan RKPDP Tahun 2021 yakni sebesar 0,313. Capaian kinerja indikator pembangunan Indeks Gini Kalimantan Timur Tahun 2021 bernilai **Sangat Rendah**, hal ini ditunjukkan dari belum mampunya nilai indeks pemerataan mencapai target yang direncanakan sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur.
- i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum

dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Nilai IKLH menjadi acuan terkait kondisi lingkungan di suatu daerah dampak dari pembangunan. Nilai IKLH Kaltim pada tahun 2021 mencapai 75,06 dengan target yang tertuang di RPJMD Tahun 2021 sebesar 75,95. Capaian Kinerja Indikator IKLH di Kalimantan Timur Tahun 2021 bernilai **Sangat Tinggi** yang menyatakan pembangunan di Kalimantan Timur masih berorientasi terhadap aspek keamanan kondisi lingkungan hidup

- j. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Secara kriteria kinerja, indikator IRB memiliki nilai kinerja yang **Sangat Tinggi**, namun capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 154,02 **belum** melampaui capaian target yang terdapat di dokumen RPJMD yaitu 152,49 merupakan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat, serta memberikan dampak pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Pemerintahan.

Selain capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini juga disajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat terlihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4.1. Capaian Kinerja IKU Kalimantan Timur Tahun 2021

Terdapat 5 IKU yang melampaui target di RPJMD (50 %) yaitu IPM, LPE, PDRB Per Kapita, LPE Non Migas dan Batubara, dan NTP. Sedangkan terdapat 5 IKU (50%) yang mencapai target di RPJMD yaitu Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, IKLH dan IRB. Namun secara keseluruhan berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, maka dapat diberikan gambaran kinerja IKU seperti Gambar di bawah ini.



Gambar 4.2. Total Kinerja IKU Kalimantan Timur tahun 2021

4.1.1. Faktor Pendorong dalam tercapainya target Indeks Kinerja Utama (IKU).

Faktor pendorong terbagi menjadi 2 (dua) secara eksternal maupun internal, yang merupakan pendukung tercapainya target indicator pembangunan dari indeks kinerja utama rata-rata 113% pada RPJMD tahun 2021 adalah sebagai berikut ini :

1. Faktor Pendorong Eksternal :

- i. Secara spesifik, pertumbuhan positif tahun ini bersumber dari lapangan usaha utama Kaltim yakni Pertambangan dan Industri Pengolahan (*non renewable resource and renewable resource*) yang mampu tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi cukup dalam.
- ii. Solidnya permintaan dari negara tujuan di tengah momentum harga yang mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir menjadi upside faktor pertumbuhan pada dua lapangan usaha utama tersebut.
- iii. Dampak pertumbuhan ekonomi memberikan multiple effect kinerja pada hampir seluruh lapangan usaha yang berada dalam tren perbaikan sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja kembali meningkat guna mengimbangi permintaan.
- iv. Lebih terkendalinya COVID-19 di tahun ini membuat pengerjaan proyek bisa lebih kondusif karena lalu lintas barang modal maupun pekerja bisa lebih lancar, mengingat tahun lalu sempat terkendala. seiring lebih sigapnya penanganan COVID-19 dikarenakan upaya vaksinasi dan juga 3T (Testing, Tracing, & Treatment) yang semakin gencar.
- v. Tren pertumbuhan positif sejalan dengan kembali meningkatnya intensitas konstruksi, terutama proyek-proyek pemerintah seiring dengan aktivitas belanja modal yang tinggi yang memberikan dampak terhadap pengeluaran masyarakat di Kalimantan Timur.

2. Faktor Pendorong Eksternal :

- i. Tugas wajib pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh karena itu hal tersebut didukung oleh undang-undang dan peraturan dibawahnya. Adapun undang-undang yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diantaranya sebagai berikut : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs); [Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

- ii. Adanya dukungan dana APBD dan APBN untuk mendukung kinerja pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang merupakan dampak dari terkendalinya ekonomi Indonesia.
- iii. Sarana dan prasarana yang telah terbangun baik fisik maupun non fisik diantaranya adalah jalan, listrik, sumber air bersih, gedung, pelabuhan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- iv. Sumberdaya Manusia baik kuantitas dan kualitas yang dapat menunjang kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel yang merupakan perwujudan Aparatur yang Profesional dalam Pelayanan Publik
- v. Sistem digitalisasi data dan informasi yang terkoneksi, yang didukung kualitas jaringan maupun jangkauan wilayah terkoneksi sangat membantu kinerja dalam mensiasati kondisi pandemi yang mewajibkan untuk menaati protokol kesehatan diantaranya adalah kerja dari rumah (*Work from Home*) maupun sistem pendidikan yang melalui dalam jaringan (daring).
- vi. Keberhasilan adaptasi kinerja secara Online dengan menggunakan aplikasi yang dapat memudahkan komunikasi ke semua pihak dapat membantu OPD dalam mencapai kinerjanya bahkan dapat menghemat anggaran dalam pelaksanaannya terutama dalam koordinasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- vii. Kondisi ketahanan pangan dan kebutuhan hidup utama masih dapat dikendalikan.
- viii. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memudahkan pemerintah pada lokus pembangunan dalam pada perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pembangunan.
- ix. Pemilihan lokasi Ibukota Negara Indonesia di propinsi Kalimantan Timur sesuai undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan salah satu pendorong semangat pembangunan di wilayah ini.
- x. Difungsikan pelayanan perizinan elektronik terpadu secara nasional (OSS-RBA) dan Provinsi Kaltim (e-PTSP) merupakan strategi mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

4.1.2. Faktor Penghambat dalam tercapainya target Indeks Kinerja Utama (IKU).

Faktor penghambat secara umum juga terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu secara internal dan eksternal, dalam mencapai kinerja utama adalah sebagai berikut:

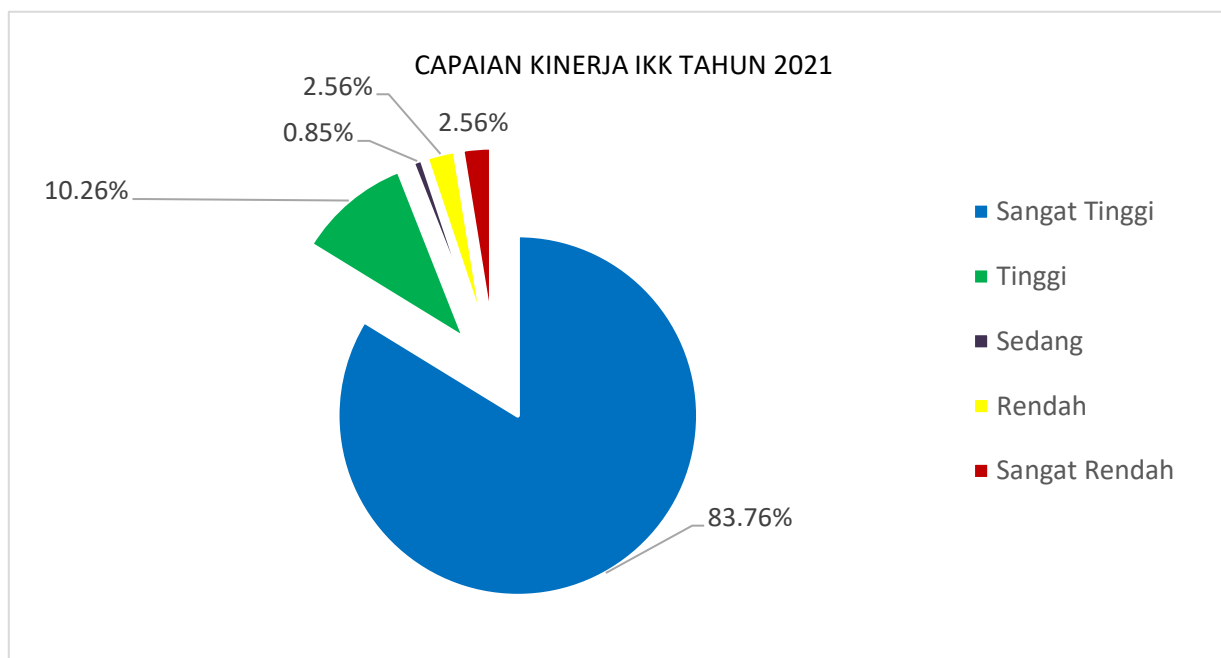
1. Faktor Eksternal :
 - i. diterapkannya system lockdown oleh beberapa negara yang menyebabkan belum membuka atau menerima kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) sehingga aktivitas perdagangan terutama pada sector pertambangan masih belum normal seperti yang dulu yang berdampak pada aktivitas ekonomi .
 - ii. Turunnya volume ekspor batu bara disebabkan oleh permintaan yang tidak setinggi sebelumnya di tengah produksi domestik di negara tujuan turut mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap permintaan ekspor batubara.
 - iii. Menurunnya produksi CPO di Kalimantan Timur yang menyebabkan terdapatnya terbatas volume ekspor sehingga mempengaruhi perdagangan internasional produk sumberdaya alam Kalimantan Timur
 - iv. Pembatasan Kegiatan (Pemberlakuan PPKM level 3-4) yang diterapkan sampai dengan pertengahan tahun (Triwulan Ke-II) yang menyebabkan aktivitas perdagangan, konstruksi, social dan pemerintahan yang melambat.
 - v. Meningkatnya program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh lapangan usaha industri pengolahan sehingga menyebabkan jalur pertumbuhan negatif dan meningkatnya angka tingkat pengangguran pada masyarakat Kalimantan Timur
 - vi. Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk (kedatangan warga dari luar daerah Kalimantan Timur/masuknya jumlah penduduk pendatang baru) yang tinggi dengan disertai tidak berimbangnya tersedia lapangan kerja dampak dari penetapannya daerah di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN).
 - vii. Ekonomi Kalimantan Timur masih tergantung pada aktivitas ekonomi dari sumberdaya alam *non renewable* (batubara dan migas) sehingga kinerja lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan Kaltim tercatat mengalami kontraksi akibat produksi yang terbatas.
2. Faktor Internal :
 - a. Adaptasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pembangunan yang tertuang pada PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga ada beberapa

program kegiatan yang mengalami perubahan di RPJMD yang telah disusun yang pada akhirnya tidak dilaksanakan karena membutuhkan waktu adaptasi yang tidak cukup dalam pelaksanaannya.

- b. Adaptasi pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (IKD) Tahun Anggaran 2021 melalui SIPD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan SIPD sampai dengan tahap Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, namun pada saat pelaksanaan tahap Penatausahaan masih banyak dijumpai hambatan dan kendala sehingga tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tidak berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan karena OPD diminta untuk dapat mengimplementasikan SIPD dengan SIMDA Keuangan secara paralel.
- c. Adaptasi terhadap kebijakan refofusing atau penyesuaian terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021 anggaran penyesuaian dikembalikan untuk dapat dibelanjakan sesuai perencanaan sebelumnya yang mengakibatkan terhambatnya adaptasi yang oleh OPD dalam melaksanakan program kegiatannya.
- d. Adaptasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Diperketat untuk pengendalian penyebaran Covid 19 di Kaltim. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program kegiatan di Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- e. Masih terdapatnya beberapa program pemerintahan daerah Kalimantan Timur yang bersifat Business as Usual dan penetapan indikator program tersebut belum berbasis untuk mampu meningkatkan potensi dan kemampuan sumberdaya alam sehingga masih terdapat produksi sumberdaya alam yang belum maksimal produktivitasnya
- f. Program – program kerja pembangunan daerah Kalimantan Timur masih bergantung terhadap aktivitas ekonomi sektor industri/swasta.
- g. Harmonisasi dan sinergitas antara organisasi pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam keterpaduan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program kegiatan pembangunan.

4.3. Evaluasi Terhadap Capaian Pembangunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome di RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi IKK yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) Tahun 2021 berdasarkan tingkat capaiannya dapat terlihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 4.2. Rekap Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pemerintahan (IKK) Kalimantan Timur Tahun 2021



Gambar 4.3
Capaian Kinerja IKK Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur
Tahun 2021

Berdasarkan Gambar-Gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja IKK Pemerintahan daerah Kalimantan Timur, dari 117 IKK Tahun 2021, terdapat 98 IKK(83,76%) yang capaiannya Sangat Tinggi atau melampaui dari Target yang sudah didokumentasikan di dalam RPJMD kaltim 2019-2023, 12 IKK (10,26%) capaiannya Tinggi, 1 IKK (0,85 %) capaiannya Sedang, 3 IKK (2,56 %) capaiannya Rendah, dan 3 IKK (2,56%) capaiannya Sangat Rendah.

Capaian IKK tingkat impact Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 menunjukkan masih perlu upaya dan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya target Indikator makro, IKU Pemerintahan Daerah, dan IKU perangkat daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara rinci realisasi dan tingkat capaian masing-masing IKK tingkat impact disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 4.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (Impact)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						2	
Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15.07	15.04	12.92	15.13	117.11%	Sangat Tinggi	221.00%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1.03	1.06	9.52	10.47	109.98%	Sangat Tinggi	95.00%
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	0	0	14.93	16.34	109.44%	Sangat Tinggi	141.00%
Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7.46	8.24	9.44	8.24	87.29%	Tinggi	-120.00%
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.56	0.63	0.64	0.54	84.38%	Tinggi	-10.00%
Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.33	0.36	0.36	0.32	88.89%	Tinggi	-4.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4.33	4.94	5	4.97	99.40%	Sangat Tinggi	-3.00%
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.52	1.67	1.68	1.56	92.86%	Sangat Tinggi	-12.00%
Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.12	1.13	1.06	1.04	98.11%	Sangat Tinggi	-2.00%
Fokus Kesejahteraan Sosial					%	0	
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.70	9.77	9.60	9.84	102.50%	Sangat Tinggi	24.00%
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.69	13.72	14.34	13.81	96.30%	Sangat Tinggi	-53.00%
Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.72	74.33	73.76	74.61	101.15%	Sangat Tinggi	85.00%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga				0		0	
Jumlah sekolah mengembangk- kan budaya lokal	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	0	0	60	60	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	0	0	66.6	20.59	30.92%	Sangat Rendah	-4601.00%
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Pendidikan						0	
Persentase /Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	80	100	150	205	136.67%	Sangat Tinggi	5500.00%
Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	45	55	70	70	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	68.55	69.00	77	78.15	101.49%	Sangat Tinggi	115.00%
Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	Indikator dilakukan Perubahan						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	0	0	95	95.74	100.78%	Sangat Tinggi	74.00%
Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	9125	28235	19500	48085	246.59%	Sangat Tinggi	2858500.00%
Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	4207	2196	2500	3369	134.76%	Sangat Tinggi	86900.00%
Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	85	85	95	85	89.47%	Tinggi	-1000.00%
Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	66.26	65	75	60	80.00%	Tinggi	-1500.00%
Kesehatan						0	
Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	0	0	30	60	200.00%	Sangat Tinggi	3000.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (Rumah Sakit)	0	0	88.2	87.66	99.39%	Tinggi	-54.00%
Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	23.5	23.5	23.50	23.50	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	0	0	90000	88707	98.56%	Sangat Tinggi	-129300.00%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						2	
Kapasitas Air Baku (L/detik)	Indikator Dilakukan Perubahan						
Persentase Capaian Layanan SDA (%)	0	0	73.69	67.99	92.26%	Sangat Tinggi	-570.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	54.59	62.64	64.64	67.48	104.39%	Sangat Tinggi	284.00%
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Indi	72,881	71,781	72,010	100.32%	Sangat Tinggi	22900.00%
Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0	0.87	0.87	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat						1	
Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	61.38	50	67.5	67.5	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	61.33	66.67	66.67	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Sosial						0	
Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	2961	2498	2500	23350	934.00%	Sangat Tinggi	2085000.00%
Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Tenaga Kerja						0	
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29.41	-0.27	33.14	26.04	78.58%	Tinggi	-710.00%
Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	80	70	70	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase Wirausahawan Baru dari Pencari Kerja (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						0	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65.65	65.54	65.63	65.54	99.86%	Sangat Tinggi	-9.00%
Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	82	88	90	102.27%	Sangat Tinggi	200.00%
Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	37	62	50	47.98	95.96%	Sangat Tinggi	-202.00%
Rasio KDRT	18.16	27.2	0.048	0.029	139.58%	Sangat Tinggi	-1.90%
Kampung KB	160	175	299	299	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Lingkungan Hidup						0	
Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	Indikator dilakukan Perubahan						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Indeks Pencemaran Lingkungan	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	25.18	50.72	27.75	41.96	151.21%	Sangat Tinggi	1421.00%
Indeks Kualitas Air Sungai	77.09	53.7	53.75	51.92	96.60%	Sangat Tinggi	-183.00%
Indeks Kualitas Udara	89.42	89.06	89.11	88.09	98.86%	Sangat Tinggi	-102.00%
Indeks Kualitas Air Laut	0	83.51	83.56	84.58	101.22%	Sangat Tinggi	102.00%
Indeks Kualitas Lahan	72.12	79.76	79.81	80.86	101.32%	Sangat Tinggi	105.00%
Indeks Risiko Bencana	154.49	153.49	152.49	141.42	107.26%	Sangat Tinggi	-1107.00%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						0	
Indeks Desa Membangun	0.6238	0.6752	0.6770	0.7071	104.45%	Sangat Tinggi	3.01%
Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	285	128	78	78	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Meningkatkan Jumlah Bumdesa Aktif (Bumdes)	335	360	390	390	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Desa Berkembang (Desa)	15	329	30	27	90.00%	Tinggi	-300.00%
Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	15	25	30	30	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah Kampung Iklim	0	30	35	35	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Perhubungan						0	
Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10,721,656	3,570,750	4,500,000	3,949,683.00	87.77%	Tinggi	-55031700.00%
Jumlah barang (ton)	341,529,897	294,478,397	307,000,000	313,784,306.00	102.21%	Sangat Tinggi	678430600.00%
Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (84%)	11 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	84	98.82%	Sangat Tinggi	-100.00%
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	570	448	512	369	127.93%	Sangat Tinggi	-14300.00%
Komunikasi dan Informatika						0	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.04	3.14	3.2	2.22	69.38%	Sedang	-98.00%
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						1	
Jumlah UKM naik kelas	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	0	0	1	1	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	0	0	0	NA tidak dilaksanakan thn 2021	0.00%	Sangat Rendah	0.00%
Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	0	0	3	2.75	91.67%	Sangat Tinggi	-25.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Kepemudaan dan Olahraga						2	
Indeks Pembangunan Pemuda	56.74	57.23	57.82	54.83	94.83%	Sangat Tinggi	-299.00%
Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan	0	0	0.22	0.13	59.09%	Rendah	-9.00%
Kebudayaan							
Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	0	0	45	45	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	0	0	80	80	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Perpustakaan							
Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	469,997	199,772	206,600	110,802	53.63%	Rendah	-9579800.00%
Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan							
Pariwisata						0	
Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	3	3	2	2	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)	0	0	0	- tidak dilaksanakan di thn 2021	0.00%	Sangat Rendah	0.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Pertanian						0	
Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	0	0	7100	7100	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura (unit)	0	0	6	6	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah produksi padi (ton)	253820	262430	271356	240641	88.68%	Tinggi	-3071500.00%
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	0	0	273070	313431	114.78%	Sangat Tinggi	4036100.00%
Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina (orang)	0	0	85	91	107.06%	Sangat Tinggi	600.00%
Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina (unit lembaga)	0	0	4	4	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	5	12	24	24	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Angka Kelahiran Sapi (%)	17.49%	20.10%	20.50%	19.00%	92.68%	Sangat Tinggi	-1.50%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta Ton CO2eq)	0	2.916	4.079	6.02	147.59%	Sangat Tinggi	194.10%
Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok Tani)	0	0	30	34	113.33%	Sangat Tinggi	400.00%
Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1,389,845	1,389,078	1,425,580	1,540,488	108.06%	Sangat Tinggi	11490800.00%
Produksi komoditas perkebunan (ton)	18,416,921	16,809,560	17,136,849.15	17,792,792	103.83%	Sangat Tinggi	65594285.00%
Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	0	0	1	1	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Jumlah Perusahaan)	0	18	35	41	117.14%	Sangat Tinggi	600.00%
Kehutanan						0	
Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	31368	38490	32000	19178	59.93%	Rendah	-1282200.00%
Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	5200737.85	4828401.15	4,950,000.00	4,104,271.21	82.91%	Tinggi	-84572879.00%
Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	457.015	1246.69	670	1,175.38	175.43%	Sangat Tinggi	50538.20%
Energi dan Sumber Daya Mineral						0	
Persentase pemanfaatan EBT (%)	4.40	4.80	6.08	6.53	107.40%	Sangat Tinggi	45.00%
Jumlah KK Berlistrik (KK)	1,032,475	1,105,227	1,135,000	1,143,533	100.75%	Sangat Tinggi	853300.00%
Perdagangan						0	
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2.04	2.23	1.57	4.75	302.55%	Sangat Tinggi	318.00%
Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	0	0	5	116.56	2331.20%	Sangat Tinggi	11156.00%
Perindustrian						0	
Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	Indikator dilakukan Perubahan						
Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	0	0	2	2	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Kelautan dan Perikanan						0	
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	148,197	155,000	161,216	158,086	98.06%	Sangat Tinggi	-313000.00%
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	176,049	158,709	158,938	168,964	106.31%	Sangat Tinggi	1002600.00%
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)	Indikator dilakukan Perubahan						
Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	Indikator dilakukan Perubahan						
Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	0	0	289,048	289,048	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	0	0	20	36	180.00%	Sangat Tinggi	1600.00%
Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	0	0	40	36	90.00%	Tinggi	-400.00%
Fokus : Urusan Penunjang							
Perencanaan						1	
Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi. Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (%)	0	0	75	78.5	104.67%	Sangat Tinggi	350.00%
Keuangan						0	
Jumlah objek/sumber pendapatan baru	Indikator dilakukan Perubahan						
Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11,775	10,132	9,590	10,090	105.21%	Sangat Tinggi	50000.00%
Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	0	0	100	92.98	92.98%	Sangat Tinggi	-702.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	0	0	100	114.69	114.69%	Sangat Tinggi	1469.00%
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	824	793	685	692	101.02%	Sangat Tinggi	700.00%
Pengawasan						1	
Hasil Penilaian Integritas	65	66.67	75	66.35	88.47%	Tinggi	-865.00%
Level Kapasitas APIP	Indikator dilakukan Perubahan						
Umum/Sekretariat						0	
Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	73.68	74	77	75.67	98.27%	Sangat Tinggi	-133.00%
Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	84	87	92	92	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	13.16	61	71	83.44	117.52%	Sangat Tinggi	1244.00%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	Indikator dilakukan Perubahan						
ASPEK DAYA SAING							
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						0	
Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	61.45	69.77	75.02	75.02	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan)	2	2	4	4	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Capaian akses Air Minum Layak (%)	56.84	64.53	66.53	70.78	106.39%	Sangat Tinggi	425.00%
Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13,728.50	13878.50	14,028.50	14,078.50	100.36%	Sangat Tinggi	5000.00%
Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	641	477	420	406	103.33%	Sangat Tinggi	-1400.00%
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1,525.47	1,287.82	1,237.82	1,190.14	103.85%	Sangat Tinggi	-4768.00%
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66.46	66.46	75.94	75.44	99.34%	Sangat Tinggi	-50.00%
Rasio elektrifikasi (%)	88.93	90.21	91.50	91	99.45%	Sangat Tinggi	-50.00%
Fokus iklim berinvestasi						0	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Pertama (2019)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun Kedua (2020)	Capaian IKK Tahun 2021		Capaian Kinerja IKK Tahun 2021	Indikator Capaian Kinerja	Kesesuaian Perencanaan Terhadap Realisasi (2020-2021)
			Target	Realisasi			
-2		-3	-4	-5			
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22.31	25.14	32.53	31.05	95.45%	Sangat Tinggi	-148.00%
Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	14	12	12	5	158.33%	Sangat Tinggi	-700.00%
Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	0	0	100	100	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%
Fokus Sumber Daya Manusia						0	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.55	76.6	76.65	77.67	101.33%	Sangat Tinggi	102.00%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	82	82.3	82.57	100.33%	Sangat Tinggi	27.00%
Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%	Sangat Tinggi	0.00%

Hasil evaluasi capaian Target pada Indikator Indeks Kinerja Kunci terlihat didominasi oleh pencapaian target IKK katagori sangat tinggi dengan indeks sebesar 83,76%, diikuti katagori tinggi sebesar 10,26%, katagori sedang sebesar 0,85%, katagori rendah sebesar 2,56% dan 2,56% sangat rendah. Adapun faktor pendorong dan penghambat secara umum untuk mencapai target IKK.

4.2.1 Faktor Pendorong Tercapainya Target IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

1. Faktor Eksternal

- a) Membaiknya iklim usaha dan industri pasca pandemic Covid-19 digambarkan dengan lapangan usaha industri pengolahan kembali kepada jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi cukup dalam seiring dengan kembali berproduksinya sektor industri pengolahan migas yang memiliki pangsa tertinggi
- b) Kinerja lapangan usaha utama lainnya yakni lapangan usaha konstruksi juga tercatat mampu tumbuh cukup tinggi di tahun ini sejalan dengan kinerja investasi (PMTB) yang turut tumbuh positif.
- c) Lebih terkendalinya COVID-19 di tahun ini membuat pengerjaan proyek bisa lebih kondusif karena lalu lintas barang modal maupun pekerja bisa lebih lancar.
- d) Pelonggaran kegiatan masyarakat atau penurunan status PPKM (Level 4 – level 2) sehingga aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kehidupan mulai aktif kembali
- e) Aktifnya sektor kehutanan dan perikanan terutama dalam mendukung perdagangan ekspor sehingga meningkatkan produktivitas Kawasan dan aktifitas masyarakat yang berada di Kawasan tersebut.

2. Faktor Internal

- a) Tugas wajib pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh karena itu hal tersebut didukung oleh undang-undang dan peraturan

dibawahnya. Adapun undang-undang yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diantaranya sebagai berikut : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs); [Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

- b) Adanya dukungan dana APBD dan APBN untuk mendukung kinerja pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang merupakan dampak dari terkendalinya ekonomi indonesia.
- c) Adanya perubahan beberapa Indikator Kinerja yang terdapat di dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang disesuaikan dengan RPJMP Nasional sehingga berdampak capaian kinerja dapat disesuaikan dengan kondisi dari program perencanaan daerah terutama pasca pandemic Covid-19.
- d) Dukungan Sarana dan prasarana yang telah terbangun baik fisik maupun non fisik diantaranya adalah jalan, listrik, sumber air bersih, gedung, pelabuhan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- e) Sumberdaya Manusia baik kuantitas dan kualitas yang dapat menunjang kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel yang merupakan perwujudan Aparatur yang Profesional dalam Pelayanan Publik
- f) Sistem digitalisasi data dan informasi yang terkoneksi, yang didukung kualitas jaringan maupun jangkauan wilayah terkoneksi sangat membantu kinerja dalam mensiasati kondisi pandemi yang mewajibkan untuk menaati protokol kesehatan diantaranya adalah kerja dari rumah (*Work from Home*) maupun sistem pendidikan yang melalui dalam jaringan (daring).
- g) Keberhasilan adaptasi kinerja secara Online dengan menggunakan aplikasi yang dapat memudahkan komunikasi ke semua pihak dapat membantu OPD dalam mencapai kinerjanya bahkan dapat menghemat anggaran dalam pelaksanaannya terutama dalam koordinasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- h) Kondisi ketahanan pangan dan kebutuhan hidup utama masih dapat dikendalikan.

- i) Keberhasilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu menurunkan tingkat penularan covid-19 sehingga membuat bangkitnya kembali semangat dalam pemulihan perekonomian dan pembangunan oleh masyarakat dan pemerintah.
- j) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memudahkan pemerintah pada lokus pembangunan dalam pada perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pembangunan.
- k) Pemilihan lokasi Ibukota Negara Indonesia di propinsi Kalimantan Timur sesuai undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan salah satu pendorong semangat pembangunan di wilayah ini.
- l) Difungsikan pelayanan perizinan elektronik terpadu secara nasional (OSS-RBA) dan Provinsi Kaltim (e-PTSP) merupakan strategi mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2 Faktor Penghambat Tercapainya Target IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

1. Faktor Eksternal

- a) Kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah di Kalimantan Timur masih dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sektor industri/swasta terutama pada sektor pertambangan migas dan batubara.
- b) Masih terdapat beberapa daerah yang diberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM Level 3 – 4) di Kalimantan Timur yang disebabkan tingginya kasus penyebaran Covid-19.
- c) Terjadinya pertumbuhan peningkatan penduduk di Kalimantan Timur yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk pendatang di kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
- d) Kondisi geografi dan luasnya wilayah Kalimantan Timur yang menyebabkan masih terbatasnya pembangunan Menara telekomunikasi untuk memenuhi jangkauan komunikasi dan internet bagi masyarakat Kalimantan Timur
- e) Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana

teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai.

- f) Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja
- g) Belum ada penyusunan desain data dan mapping (peta jalan) peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja di Kaltim (link and match SDM dan DUDI)
- h) Pada fase pembuatan indikator kinerja, kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang menguasai teknologi framework perencanaan, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan stakeholder mengenai penggunaan aplikasi. Pada fase pengembangan kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadap basis data aplikasi.

2. Faktor Internal

- a. Adaptasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pembangunan yang tertuang pada PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga ada beberapa program kegiatan yang mengalami perubahan di RPJMD yang telah disusun yang pada akhirnya tidak dilaksanakan karena membutuhkan waktu adaptasi yang tidak cukup dalam pelaksanaannya.
- b. Adaptasi pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (IKD) Tahun Anggaran 2021 melalui SIPD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan SIPD sampai dengan tahap Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, namun pada saat pelaksanaan tahap Penatausahaan masih banyak dijumpai hambatan dan kendala sehingga tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tidak berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan karena OPD diminta untuk dapat mengimplementasikan SIPD dengan SIMDA Keuangan secara paralel.
- c. Adaptasi terhadap kebijakan refofusing atau penyesuaian terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021 anggaran penyesuaian dikembalikan untuk dapat

dibelanjakan sesuai perencanaan sebelumnya yang mengakibatkan terhambatnya adaptasi yang oleh OPD dalam melaksanakan program kegiatannya.

- d. Adaptasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Diperketat untuk pengendalian penyebaran Covid 19 di Kaltim. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program kegiatan di Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- e. Harmonisasi dan sinergitas antara organisasi pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam keterpaduan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program kegiatan pembangunan.

4.2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap Capaian Target Berdasarkan Aspek dan Fokus IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Berdasarkan Aspek dan Fokus Pembangunan Daerah ditunjukkan Pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.3. Capaian Aspek dan Fokus Pembangunan pada Indikator Kinerja Kunci Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian IKK Tahun 2021 (%)	Indikator Capaian Kinerja
	Rataan	
-1	-2	-3
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	78.17	Tinggi
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	98.61	Sangat Tinggi
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	57.73	Rendah
ASPEK PELAYANAN UMUM	184.72	Sangat Tinggi
Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar	276.29	Sangat Tinggi
Pendidikan	123.72	Sangat Tinggi
Kesehatan	124.49	Sangat Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.24	Sangat Tinggi
Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	100	Sangat Tinggi
Sosial	934	Sangat Tinggi
Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	90.92	Tinggi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian IKK Tahun 2021 (%)	Indikator Capaian Kinerja
	Rataan	
-1	-2	-3
Tenaga Kerja	89.29	Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.54	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup	109.41	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.07	Sangat Tinggi
Perhubungan	104.18	Sangat Tinggi
Komunikasi dan Informatika	69.38	Sedang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63.89	Rendah
Kepemudaan dan Olahraga	76.96	Tinggi
Kebudayaan	100	Sangat Tinggi
Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan	271.22	Sangat Tinggi
Pariwisata	50	Sangat Rendah
Pertanian	106.65	Sangat Tinggi
Kehutanan	106.09	Sangat Tinggi
Energi dan Sumber Daya Mineral	104.08	Sangat Tinggi
Perdagangan	1316.87	Sangat Tinggi
Perindustrian	100	Sangat Tinggi
Kelautan dan Perikanan	114.87	Sangat Tinggi
Fokus : Urusan Penunjang	100.47	Sangat Tinggi
Perencanaan	104.67	Sangat Tinggi
Keuangan	103.48	Sangat Tinggi
Pengawasan	88.47	Tinggi
Umum/Sekretariat	105.26	Sangat Tinggi
ASPEK DAYA SAING	106.69	Sangat Tinggi
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	101.59	Sangat Tinggi
Fokus iklim berinvestasi	117.93	Sangat Tinggi
Fokus Sumber Daya Manusia	100.55	Sangat Tinggi

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada aspek ini terdapat tiga target bidang pembangunan yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan social serta focus seni budaya dan olahraga. Adapun rata-rata capaian target indeks kinerja kunci pada **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga** tinggi yaitu sebesar 78,17% ditahun 2021. Hasil realisasi kinerja berdasarkan fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi mencapai kinerja 98,61% (**sangat tinggi**) , sedangkan proyeksi capaian termasuk kategori **akan tercapai** (81,39%) akan tercapai pada target pembangunan di akhir tahun 2023 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendongkrak realisasi target capaian menjadi maksimal ada dua indikator yang memerlukan upaya keras yaitu kontribusi dari sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB yang masih memerlukan **Perlu Upaya Keras**.

Adapun faktor pendorong dari hasil positif ini yaitu usaha perluasan pemasaran dan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM, Penetapan RTRW Provinsi termasuk pembangunan industri, meningkatnya volume ekspor komoditi perikanan, Kenaikan produksi hasil hutan alam, hutan kayu dan hutan tanaman, karena kenaikan harga dari komoditi ekspor, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Pada **fokus seni budaya dan olahraga** memperoleh hasil evaluasi sangat rendah dalam pencapaian target dengan rata-rata 57,73%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya target pada indikator jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal dan persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi. Kondisi tersebut diakibatkan oleh faktor penghambat yaitu adanya pembatalan event nasional prapopnas untuk Indonesia wilayah timur, serta jumlah kontingen yang mengikuti PON tidak sebanyak perhitungan awal hanya 50% sebanyak 300 orang karena masih dalam kondisi pandemic covid-19. Oleh karena itu **perlu kinerja yang sangat keras** (8,58%) untuk mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMD di tahun 2023.

2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada aspek pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terdapat empat focus bidang target indikator program pembangunan yaitu

1. Fokus urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat serta sosial.

Kinerja pada aspek pelayanan umum rata-rata capaian target kinerja kunci sangat tinggi yaitu sebesar 184,72%. Hasil realisasi kinerja paling tinggi diperlihatkan kinerja pelayanan social sebesar 934,00% sedangkan yang paling rendah ditunjukkan pada layanan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 99,24%, untuk kinerja layanan capaian realisasi $\geq 100\%$ terhadap target yaitu pelayanan focus pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sedangkan kinerja $< 100\%$ terhadap target yaitu layanan kesehatan dan pekerjaan umum serta penataan ruang.

Hasil analisa proyeksi terhadap target pembangunan di akhir tahun 2023 RPJMD propinsi Kalimantan Timur pada pelayanan dasar dengan indicator penilaian $\geq 100\%$ terhadap target atau tercapai yaitu pendidikan (123,72%), kesehatan (124,49%), pekerjaan umum dan penataan ruang (99,24%), Ketentraman. Ketertiban Umum. Dan Perlindungan Masyarakat (100%) dan sosial (934%). Upaya untuk mendongkrak realisasi target maka dukungan masyarakat dan pemerintah melalui kesepakatan bersama dalam perencanaan pembangunan dan anggaran APBN dan APBD merupakan factor pendorong terhadap layanan dasar pendidikan dan sosial yang diberikan sehingga peningkatan sumberdaya manusia baik terhadap siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik melalui beasiswa, selain itu sarana dan prasarana terus dibangun dan dilengkapi untuk menunjang pembangunan. Disamping itu ada beberapa faktor penghambat dalam jaminan pelayanan kesehatan termasuk pendidikan yang diperoleh oleh penduduk miskin dan kurang mampu terhambat dikarenakan data kependudukan termasuk nomor induk kependudukan (NIK) masih bermasalah. Selanjutnya sekitar 50 unit puskesmas yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terkecil dan Tertinggal) sangat minim tenaga pelayan serta kondisi sarana dan prasarana masih tidak memadai. Selain itu semua program kegiatan sangat terpengaruh akibat pandemic covid-19 sehingga terhambat didalam pelaksanaanya. Pada pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang terlihat belum tercapai target realisasi selain pandemic pada indicator akses air minum perpipaan terhambat dikarenakan belum tersediannya air baku yang baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya, selain itu adanya pemasangan pipa yang melintasi diantara dua kabupaten atau kota yang rumpit dalam perizinan.

Hasil analisis capaian kinerja terhadap indeks kinerja kunci antara relisasi dan target tahun 2020-2021 diperoleh hasil kinerja yang positif pada urusan pelayanan

dasar untuk pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial akan tetapi hanya indicator ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang memiliki kinerja yang sesuai dengan perencanaan yang ada. Selanjutnya pelayanan dasar untuk kesehatan memiliki proyeksi kinerja yang sangat rendah sehingga perlu dorongan yang besar untuk mencapai target. Hasil ini memperlihatkan adanya perhitungan dalam penentuan target yang tidak tepat sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara realisasi dengan target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya sudut pandang yang sama dalam penentuan target selanjutnya. selain

2. Fokus urusan wajib non pelayanan dasar antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan.

Kinerja pada aspek pelayanan wajib non pelayanan dasar terlihat rata-rata capaian target kinerja kunci ditingkatan tinggi yaitu sebesar 87,19%. Hasil realisasi kinerja paling tinggi diperlihatkan kinerja lingkungan hidup sebesar 109,41% dan terendah adalah kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar 63,89% , secara umum hasil kinerja non pelayanan dasar capaian ≥ 100 terhadap target yaitu pelayanan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perhubungan, lingkungan hidup dan kebudayaan, sedangkan kinerja $< 100\%$ terhadap target yaitu tenaga kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, layanan perpustakaan, dan kepemudaan dan olahraga .

Bidang terhadap tenaga kerja realisasi masih rata-rata rendah (89,29%) diakibatkan dari 3 indikator kinerja ada satu yang tidak dilaksanakan yaitu persentase wirausahawan baru dan pencari kerja dikarenakan perubahan indikator akibat pemberlakuan Permendagri no.90, selanjutnya pengaruh dari belum tercapainya target indicator persentase penyerapan tenaga kerja (78,58%), hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang membatasi semua kegiatan. Optimisme terlihat pada indicator persentase lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja sangat tinggi sehingga terlihat upaya pemerintah dalam penyiapan tenaga kerja untuk dunia kerja di daerah ini sudah tercapai Secara keseluruhan dari analisis proyeksi untuk mencapai target tenaga kerja dibutuhkan upaya yang sangat keras (45,98%) untuk mengejar target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berhasil memenuhi target (97,59%). Terdapat ada dua indikator yang membutuhkan upaya keras untuk mencapai target pada akhir RPJMD yaitu persentase pelaku ekonomi perempuan dan kampong KB, hal ini terjadi akibat tidak dapat terlaksana dikarenakan masih dominannya budaya yang memberikan posisi pelaku urusan domestik terkait ekonomi kepada lelaki dan kurang optimalnya koordinasi dengan institusi program KB.

Bidang lingkungan hidup dengan capaian realisasi rata-rata 109,41% masuk katagori tinggi. Hasil evaluasi keseluruhan dari analisis proyeksi untuk mencapai target kinerja untuk lingkungan hidup tercapai (101,71%) pada akhir RPJMD tahun 2023, walaupun didalam analisis perencanaan dalam penetapan target masih optimis hal ini terlihat rata-rata prestasi tiap tahun sampai RPJMD berakhir. Terdapat 1 (satu) indikator yang memerlukan upaya keras dalam pencapaian target pada akhir RPJMD yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Selain itu, yang harus menjadi perhatian pada bidang lingkungan hidup ini adalah adanya persentase pencapaian Indeks Kualitas Air Sungai dan Indeks Kualitas Udara. Kedua indikator ini menjadi *critical point* yang harus diberikan solusi agar dampak positif pembangunan tidak memberikan citra negative bagi kondisi lingkungan.

Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan capaian realisasi target rata-rata 99,07 % yang berarti target belum tercapai, diakibatkan terdapat indicator kinerja yang belum tercapai yaitu desa berkembang (90%). Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai, dilihat dari rata-rata capaian semua indicator kinerja IKK sebesar 112,68% akan tetapi prestasi kinerja di beberapa indicator perlu upaya yang keras dalam mencapai target di akhir RPJMD hal ini terlihat pada indicator jumlah desa tertinggal, desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal dan jumlah kampung iklim sehingga perlu upaya yang sangat keras dalam pencapaian target, melihat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja, diperoleh hasil -49,50% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis walaupun masih < 100%. Adapun faktor penghambatnya adalah minimnya dukungan anggaran pada peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga belum adanya sosialisasi dan pembinaan tata cara pengisian IDM, minimnya akses ke desa sasaran dan peran BUMDES.

Bidang perhubungan memberikan capaian realisasi target rata-rata 104,18 % yang berarti capaian sangat tinggi. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD

akan tercapai, dilihat dari rata-rata capaian semua indikator kinerja IKK sebesar 80,13% hal ini dikarenakan indikator jumlah kecelakaan lalu lintas (kasus) belum tercapai (64,81%) sehingga perlu upaya yang keras dalam mencapai target di akhir RPJMD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pencapaian indikator ini adalah melaksanakan sosialisasi keselamatan berkendara serta menambahkan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas yang baik dan aman. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 155.846.125% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Adapun faktor penghambatnya adalah belum memiliki master plan dalam pengembangan bidang perhubungan apalagi menuju pelayanan prima dan terpadu serta terintegrasi terhadap pembangunan Ibukota Negara Indonesia .

Bidang komunikasi dan informatika memberikan capaian realisasi target rata-rata 69,38 % yang berarti capaian bernilai sedang atau target belum tercapai. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai, dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja IKK akan tercapai (84,85%), hal ini dikarenakan beberapa elemen perhitungan tidak tercapai sesuai PERPRES no.95 tahun 80. perlu upaya dalam mencapai target di akhir RPJMD. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -30,75% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis walaupun masih < 100%. Salah satu penyebab dari masih belum maksimal capaian kinerja bidang ini salah satunya adalah adanya perubahan metode perhitungan dalam penetapan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga diperlukan upaya dan waktu dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi terhadap indeks ini antar perangkat daerah Kalimantan Timur.

Bidang koperasi dan usaha kecil menengah memberikan capaian realisasi terhadap target rata-rata 63,89 % yang berarti capaian bernilai rendah atau target belum tercapai. Capaian ini diakibatkan adanya indikator yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%). Sedangkan proyeksi akhir capaian bernilai 63,89 % yang artinya perlu upaya keras dalam upaya capaian akhir bisa terlampaui pada akhir target Tahun 2021. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam pencapaian pada akhir RPJMD adalah Persentase tercapainya target Koperasi sehat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan indikator terkait dengan Koperasi Sehat tersebut adalah belum adanya data inventarisir dan

identifikasi terhadap jumlah koperasi yang dikelola oleh masyarakat. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -8,33% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis walaupun masih < 100%.

Bidang kepemudaan dan olahraga memberikan capaian realisasi terhadap target rata-rata 76,96 % yang berarti target belum tercapai diakibatkan dari indikator persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan target capaiannya rendah 59,09%, hal ini dikarenakan dibatalkannya jamboree pemuda Indonesia dan penilaian Indeks Pembangunan Pemuda akibat Covid-19. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja IKK akan tercapai (49,78%). Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -154,00% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis.

Bidang kebudayaan memberikan capaian realisasi terhadap target rata-rata 100 % yang berarti target telah tercapai pada tahun 2021. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja IKK akan tercapai (26,69%). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi pada nomenklatur pemangku kewenangan atas kebudayaan di tingkat daerah dan belum adanya petunjuk terhadap hal tersebut sehingga sangat rendah capaian target diakhir tahun RPJMD. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 0% yang berarti penentuan target sudah tepat.

Bidang perpustakaan memberikan capaian realisasi terhadap target rendah rata-rata 53,63 % yang berarti target belum tercapai, hal diakibatkan perpustakaan baru dapat dibuka pada bulan oktober karena pandemic covid-19. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD telah tercapai (124%). Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -9.579.800% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis.

3. Fokus urusan pelayanan pilihan yaitu pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan.

Kinerja pada fokus pelayanan pilihan terlihat pada rata-rata capaian target kinerja kunci ditingkatkan tinggi yaitu sebesar 271,22 %. Hasil realisasi kinerja paling

tinggi diperlihatkan kinerja bidang perdagangan rata-rata sebesar 1316,87% dan terendah adalah indikator kinerja sektor pariwisata rata-rata sebesar 50%. Secara umum hasil kinerja pelayanan dasar $\geq 100\%$ terhadap target yaitu bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan kelautan dan perikanan, , sedangkan kinerja $< 100\%$ terhadap target hanya pada pariwisata.

Bidang pariwisata memberikan capaian realisasi terhadap target sangat rendah rata-rata 50,00 % yang berarti target belum tercapai diakibatkan dari indikator subsector ekraf yang dikembangkan tidak dilaksanakan karena PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga ada beberapa program kegiatan yang mengalami perubahan di RPJMD yang telah disusun yang pada akhirnya diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kinerja tersebut pada RKPD. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 44,44%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 0% yang berarti penentuan target sudah tepat.

Bidang pertanian memberikan capaian realisasi sangat tinggi rata-rata 106,65 % pada tahun 2021. Hal ini didorong atas faktor komitmen yang kuat dalam menjalankan program yang sudah disusun. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD tahun 2023 perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 48,19%, hal ini dikarenakan faktor cuaca terlalu tinggi curah hujan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan bulir padi dan banjir yang selalu membahayakan, selain itu keterbatasan luas lahan dan status pinjam pakai terhadap lahan garapan. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 155.846.125% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Pada bidang pertanian 50% penetapan nilai indikator kinerja kunci (IKK) pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur masih bersifat pesimis atau tidak optimis, hal ini dikarenakan nilai penetapan indikator tersebut belum berdasarkan hasil analisis perhitungan yang menetapkan potensi kawasan sebagai base data, sehingga capaian kinerja setiap tahun akan dapat terealisasi namun impact belum mampu mendongkrak ekonomi Kawasan secara optimal, serta nilai proyeksi capaian di akhir juga memerlukan Upaya Keras. Hasil analisis evaluasi Tahun ke-3 ini menjadi "**lampu**

sinyal alarm” bahwa diperlukan kreatifitas dan inovasi dari perangkat daerah Sektor Pertanian pada IKK untuk berupaya lebih dalam merencanakan Program Kerja yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bidang kehutanan memberikan capaian realisasi sangat tinggi rata-rata 106,09 %. Terdapat beberapa indikator yang berubah seperti indikator Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan, Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan, Persentase meningkatnya tutupan lahan tidak dilaksanakan karena PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga ada beberapa program kegiatan yang mengalami perubahan di RPJMD yang telah disusun yang pada akhirnya tidak dilaksanakan. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 61,95%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil - 28.601.513,60% yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi Indikator pada bidang Kehutanan bahwa nilai indikator yang ditetapkan pada IKK masih belum berbasis nilai potensi Kawasan secara menyeluruh serta nilai yang ditetapkan belum berasal dari hasil analisis perhitungan yang valid.

Bidang energi dan sumber daya mineral memberikan capaian realisasi terhadap target sangat tinggi rata-rata 104,08 % pada tahun 2021. Hal ini didorong atas faktor komitmen yang kuat dalam menjalankan program yang sudah disusun. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD tahun 2023 perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 76,78%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga nilai pada indikator bidang energi dan sumber daya mineral masih memerlukan upaya keras dalam pencapaian akhir RPJMD antara lain dikarenakan Pandemi covid-19 sehingga koordinasi dengan K/L terhambat, Harga jual EBT ke PLN belum ekonomis sehingga investor enggan berinvestasi, Masih mahal biaya infrastruktur EBT karna belum adanya produsen komponen solar cell dalam negeri, tumpang tindih regulasi. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 426.672,50% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis.

Bidang perdagangan memberikan capaian realisasi terhadap target sangat tinggi rata-rata 1316,87 % pada tahun 2021. Hal ini didorong atas faktor komitmen yang kuat dalam menjalankan program yang sudah disusun dan terlihat pula keberhasilan ini pada analisis hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD tahun 2023 tercapai (468,07%). Capaian pada bidang perdagangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan CPO dunia yang berdampak pada produksi dan aktivitas ekspor CPO secara global akan meningkat, selain itu terdapat faktor tren positif permintaan ekspor batubara yang mulai aktif pasca berakhirnya lockdown di beberapa negara sehingga membuka produksi ekspor dari Indonesia. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 5.737 % yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Nilai penetapan pada indikator di bidang perdagangan belum memiliki atau berasal dari hasil analisis yang bisa menjadi acuan, selain itu, realisasi capaian indikator bidang perdagangan sangat bergantung pada aktifitas yang dijalankan oleh sektor industri atau swasta, yang menjadikan catatan bahwa belum bisa diperhitungkan peran pemerintah dalam menggerakkan bidang perdagangan di Kalimantan Timur.

Bidang perindustrian memberikan capaian realisasi terhadap target sangat tinggi sebesar 100%. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras terhadap target agar tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 33,33 Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 0% yang berarti penentuan target sudah tepat. Secara perencanaan penetapan nilai pada indikator sudah tepat dan relevan, namun yang harus menjadi catatan kinerja pada bidang perindustrian adalah peran pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang belum bisa diukur sehingga aktifitas capaian indikator ini masih bergantung pada capaian sektor Industri.

Bidang kelautan dan perikanan memberikan capaian realisasi terhadap target sangat tinggi sebesar 114,87 % yang berarti target sudah tercapai. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD optimis akan tercapai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 77,16%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 1.002.600% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Penetapan nilai indikator kinerja pada bidang

perikanan seperti halnya juga pada bidang Pertanian dan Kehutanan, masih belum memaksimalkan potensi produksi Kawasan sehingga nilai indikator dianggap pesimis atau setiap tahun dapat tercapai namun belum mampu mendongkrak aktifitas pembangunan Kawasan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu hasil capaian indikator kinerja sangat bergantung pada aktifitas produksi dari sektor swasta.

4. Fokus urusan penunjang antara lain adalah perencanaan, keuangan, pengawasan, umum/ sekretariat.

Kinerja pada fokus urusan penunjang terlihat pada rata-rata capaian target kinerja kunci ditingkatkan sedang yaitu sebesar 100,47%. Hasil realisasi kinerja paling tinggi diperlihatkan kinerja bidang Umum/Sekretariat sebesar 105,26% dan terendah adalah bidang pengawasan rata-rata sebesar 88,47%. Secara umum hasil kinerja urusan penunjang yang memiliki capaian kinerja < 100% hanya pada bidang pengawasan. Hasil menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengawasan terutama pada indikator penilaian integritas yang terdapat pada perangkat daerah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Bidang perencanaan memberikan capaian realisasi sangat tinggi 104,67% yang berarti target tercapai. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 32,71%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 350% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Beberapa hal yang menjadi temuan pada saat evaluasi kinerja RPJMD Tahun ke-3 ini terhadap bidang perencanaan antara lain adalah masih ditemukan penetapan nilai indikator yang dilakukan oleh perangkat daerah belum berasal dari hasil analisis yang valid dan *realable* sehingga beberapa nilai bersifat pesimis dalam capaian atau nilainya masih terlalu rendah dari nilai potensi secara real di lapangan, selain itu beberapa penetapan nilai indikator belum menangkap potensi produksi Kawasan serta beberapa nilai indikator masih sangat bergantung terhadap aktifitas swasta atau industry dalam pencapaiannya sehingga belum menunjukkan peran pemerintah dalam menggerakkan bidang tersebut. Hal ini menjadi "PR" bagi perangkat bidang perencanaan secara menyeluruh dikarenakan akan mempengaruhi capaian akhir Visi dan Misi Pemerintah daerah pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Bidang keuangan memberikan capaian realisasi terhadap target sangat tinggi rata-rata 103,48 % yang berarti target tercapai. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD perlu upaya keras dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 64,07%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 12.866,75% yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Penetapan nilai indikator kinerja pada bidang keuangan masih belum menunjukkan hasil dari suatu analisis ataupun perhitungan yang valid dan *realable* sehingga secara kinerja per tahun akan dapat tercapai, namun jika diproyeksikan pada akhir RPJMD akan terlihat perlu upaya keras.

Bidang pengawasan memberikan capaian realisasi tinggi sebesar 88,47 %. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 77.65%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil – 865 %, yang berarti penentuan target terlihat lebih tinggi atau terlalu optimis. Penetapan nilai indikator pada bidang pengawasan juga menunjukkan bahwa nilai bukan berasal dari hasil analisis perhitungan yang valid dan *realable* sehingga nilai masih belum maksimal. Hasil ini juga menunjukkan masih perlunya kinerja peningkatan bidang pengawasan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terutama kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan integritas perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja di perangkat daerah.

Bidang umum/sekretariat memberikan capaian realisasi terhadap target katagori sangat tinggi rata-rata 105,26% yang berarti target tercapai. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 80,44%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil 370,33 %, yang berarti penentuan target terlihat terlalu rendah sehingga keberhasilan yang dicapai dari realisasi sangat tinggi atau dalam penentuan target terlalu pesimis. Secara capaian kinerja per tahun, bidang umum/sekretariat bernilai sangat tinggi, namun berdasarkan nilai proyeksi capaian pada akhir RPJMD, masih diperlukan kinerja agar target di akhir bisa tercapai. Selain itu, berdasarkan hasil penetapan nilai indikator belum berbasis hasil analisis yang valid sehingga nilai target akhir dibandingkan dengan capaian masih terdapat nilai yang memerlukan upaya yang keras dalam pencapaian di akhir RPJMD.

3. ASPEK DAYA SAING

Indeks kinerja kunci pada aspek daya saing terlihat rata-rata capaian sangat tinggi sebesar 106,69%. Ada tiga fokus bidang pada aspek daya saing yaitu fasilitas wilayah/infrastruktur, bidang iklim berinvestasi serta bidang sumberdaya manusia. Hasil realisasi kinerja paling tinggi diperlihatkan kinerja bidang iklim berinvestasi rata-rata sebesar 117,93% dan terendah adalah bidang sumberdaya manusia rata-rata sebesar 100,55% , secara umum hasil aspek daya saing semua > 100% terhadap target.

Bidang fasilitas wilayah / infrastruktur memberikan capaian realisasi terhadap target katagori sangat tinggi rata-rata 101,59% berarti target telah tercapai, keberhasilan ini didorong atas capaian sumua indikator terhadap target sangat tinggi. hal ini didorong atas komitmen pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap bidang ini. Selanjutnya perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian yang berhasil dilaksanakan dalam bidang ini. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 80,98%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -105 %, yang berarti penentuan target lebih tinggi atau terlalu optimis. Penetapan nilai indikator bersifat optimis dikarenakan sifat indikator yang berbentuk fisik atau pemenuhan infrastruktur sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran. *Critical point* dalam bidang ini adalah Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan), dikarenakan keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Timur, indikator ini seharusnya sangat bisa memberikan dampak terhadap ekonomi dan pemerataan pembangunan, namun pada saat hasil evaluasi tahun ke-3, indikator ini memerlukan upaya yang keras dalam pencapaian hal tersebut. Dampaknya adalah masih tingginya nilai indeks gini yang ada di Kalimantan Timur.

Bidang iklim berinvestasi capaian realisasi terhadap target katagori sangat tinggi rata-rata 117,93% berarti target telah tercapai, keberhasilan ini didorong atas capaian sumua indicator terhadap target sangat tinggi. hal ini didorong atas komitmen pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan dukungan masyarakat, sistem pelayanan elektronik terpadu telah berjalan yaitu OSS-RBA dan E-PTSP, serta ditunjuknya salah satu wilayah propinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota Negara. Selanjutnya perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian yang berhasil dilaksanakan dalam bidang ini. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai dalam

mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 107,79%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -282,67 %, yang berarti penentuan target lebih tinggi atau terlalu optimis. Penetapan nilai indikator menunjukkan bahwa nilai indikator ditetapkan belum berdasarkan hasil perhitungan yang valid ataupun realable, sehingga penetapan target terlalu optimis. Selain capaian kinerja indikator ini juga sangat dipengaruhi dengan adanya aktifitas dari investasi pihak swasta atau industri.

Bidang sumberdaya manusia capaian realisasi terhadap target katagori sangat tinggi rata-rata 100,55% berarti target telah tercapai, keberhasilan ini didorong atas capaian sumua indicator terhadap target sangat tinggi. hal ini didorong atas komitmen pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan dukungan masyarakat, serta ditunjuknya salah satu wilayah propinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota Negara memacu pemerintah untuk mempersiapkan sumberdaya manusia lokal untuk berperan dalam pembangunannya. Selanjutnya perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian yang berhasil dilaksanakan dalam bidang ini. Hasil proyeksi capaian bidang ini diakhir RPJMD akan tercapai dalam mewujudkannya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian proyeksi 99,15%. Tingkat penentuan dan penetapan target terhadap realisasi kinerja diperoleh hasil -282,67 %, yang berarti penentuan target lebih tinggi atau terlalu optimis. Pada indikator kinerja sumberdaya merupakan indikator yang pencapaian kinerja paling rendah dibandingkan indikator kinerja pada indikator yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu problematika pembangunan daerah ditentukan oleh faktor sumberdaya manusia, dan ini diperlihatkan pada hasil evaluasi RPJMD Kalimantan Timur tahun ke-3 yang berdasarkan pengamatan data masih belum maksimal dan masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan upaya keras untuk bisa dicapai pada akhir RPJMD.

4.3. Proyeksi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Pada Akhir RPJMD 2019-2023

Proyeksi Capaian IKU Perangkat Daerah sebagaimana telah dibahas di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Hasil pengolahan data terhadap proyeksi capaian kinerja IKU terhadap 34 perangkat daerah memiliki nilai rata-rata tingkat

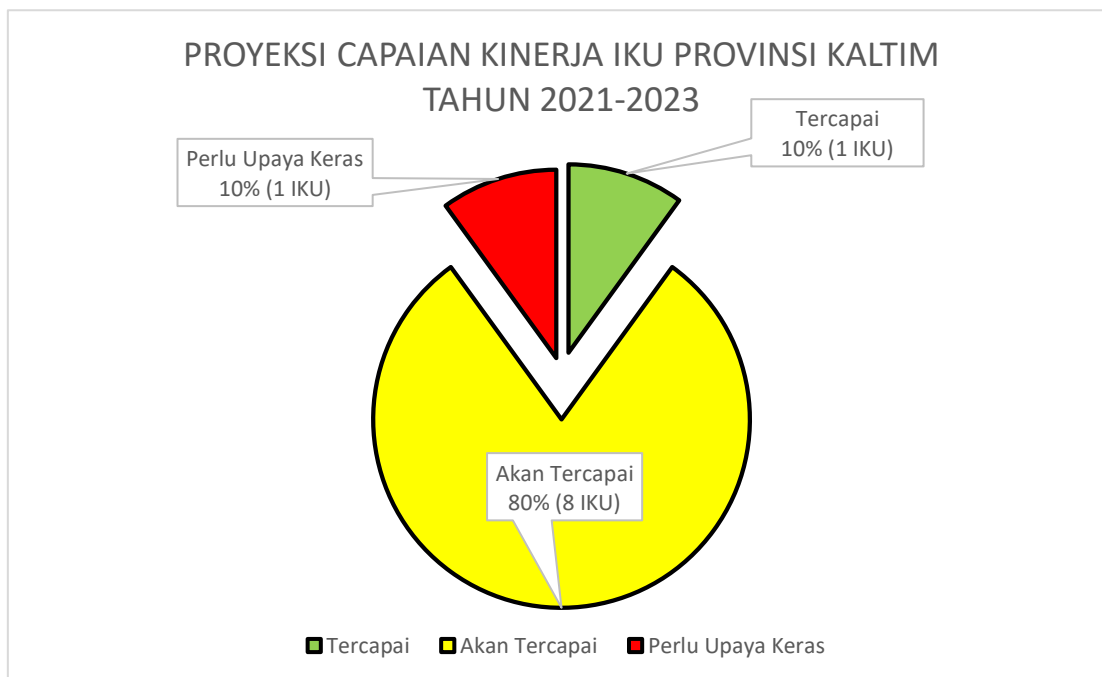
capaian kinerja program terbesar adalah akan tercapai sebesar 97,01 %, sementara tercapai 100,29 % dan Perlu Upaya Keras 41,43 %. Hasil proyeksi capaian dapat terlihat pada tabel 4.4 dan Gambar 4.4 di bawah.

Tabel 4.4.
Proyeksi Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Pada Akhir RPJMD

No.	Indikator	Rataan Capaian Kinerja IKU Selama 3 Tahun (2019-2021)	Target Akhir RPJMD (2023)	Kinerja Proyeksi Capaian Berdasarkan Indikator Utama (2023)	Ket Proyeksi Capaian di Akhir RPJMD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.58	77.75	98.49	Akan Tercapai
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6.19	5.90	95.03	Akan Tercapai
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.60	6.50	98.51	Akan Tercapai
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1.45	3.50	41.43	Perlu Upaya Keras
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	174.85	175.00	99.92	Akan Tercapai
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	2.40	2.50	96.13	Akan Tercapai
7	Nilai Tukar Petani	112.66	114.00	98.82	Akan Tercapai
8	Indeks Gini	0.33	0.31	92.64	Akan Tercapai
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76.37	76.15	100.29	Tercapai
10	Indeks Reformasi Birokrasi	69.53	72.00	96.57	Akan Tercapai
Nilai Rataan Capaian Proyeksi RPJMD				91.78	Akan Tercapai



Gambar 4.4. Grafik Proyeksi Capaian IKU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Pada Akhir RPJMD 2019-2023



Gambar 4.5
Proyeksi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kalimantan Timur
Tahun 2021 Pada Akhir RPJMD 2019-2023

Tabel 4.5.
Proyeksi Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Pada Akhir RPJMD

No.	Indikator	Target (Rencana)					Kinerja IKU (Capaian)			Capaian 2021		Kinerja Capaian Berdasarkan Indikator Utama (2021)	Ket Kinerja Capaian (2021)	Capaian Target-Rencana (2021)	Ket Capaian Target - Rencana (2021)	Rataan Capaian Kinerja IKU Selama 3 Tahun (2019-2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	Rencana	Realisasi					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.30	75.43	76.75	77.25	77.75	76.61	76.24	76.88	76.75	76.88	100.17	Sangat Tinggi	0.17	Target Tercapai	76.58
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6.00	5.94	6.05	6	5.9	5.94	6.10	6.54	6.05	6.54	91.90	Sangat Rendah	-8.10	Target Belum Tercapai	6.19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			6.81	6.75	6.5	6.09	6.87	6.83	6.81	6.83	99.71	Sangat Rendah	-0.29	Target Belum Tercapai	6.60
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.5 ± 1	3.5	1.5	3.5	3.5	4.74	-2.87	2.48	1.5	2.48	165.33	Sangat Tinggi	65.33	Target Tercapai	1.45
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)			170	172	175	180.26	161.76	182.54	170	182.54	107.38	Sangat Tinggi	7.38	Target Tercapai	174.85
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	6 ± 1	6	1.5	2	2.5	5.08	-0.56	2.69	1.5	2.69	179.33	Sangat Tinggi	79.33	Target Tercapai	2.40
7	Nilai Tukar Petani			118	113	114	105.38	111.65	120.94	118	120.94	102.49	Sangat Tinggi	2.49	Target Tercapai	112.66
8	Indeks Gini	0.330	0.329	0.328	0.313	0.308	0.33	0.328	0.334	0.328	0.334	98.17	Sangat Rendah	-1.83	Target Belum Tercapai	0.33
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15	78.81	75.25	75.06	75.95	75.06	98.83	Sangat Tinggi	-1.17	Target Belum Tercapai	76.37
10	Indeks Reformasi Birokrasi	69.50	70.50	71.00	71.50	72.00	70	70.5	68.1	71	68.1	95.92	Sangat Tinggi	-4.08	Target Belum Tercapai	69.53

Hasil analisis terhadap Indeks Kinerja Utama (IKU) propinsi Kalimantan Timur terhadap 10 indeks pembangunan yang ditelaah dengan menggunakan analisis proyeksi kinerja maka diperoleh hasil yang terbagi tiga kriteria yaitu

1. Kriteria tercapai ditunjukkan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memiliki arti bahwa capaian kinerja pada target yang ditetapkan telah tercapai sebelum waktu RPJMD berakhir.
2. Kriteria akan tercapai ditunjukkan pada delapan indeks pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (%), PDRB per Kapita (Juta Rp), Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%), Nilai Tukar Petani, Indeks Gini, Indeks Reformasi Birokrasi. Kriteria akan tercapai memiliki arti bahwa diakhir waktu RPJMD semua program kegiatan akan tercapai.

Kriteria perlu Upaya Keras terlihat pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) hal ini memperlihatkan bahwa perlu adanya upaya yang keras dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditentukan pada masa akhir RPJMD 2023, hal ini dilihat dari rataan prestasi kinerja tiap tahunnya yang belum tercapai targetnya.

4.4. Proyeksi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Pemerintah (IKK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Pada Akhir RPJMD 2019-2023

Proyeksi Capaian IKK Perangkat Daerah sebagaimana telah dibahas di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Hasil pengolahan data terhadap proyeksi capaian kinerja IKU terhadap 34 perangkat daerah memiliki nilai rata-rata tingkat capaian kinerja program terbesar adalah akan tercapai sebesar 10 %, sementara tercapai 10 % dan Perlu Upaya Keras 80 %. Hasil proyeksi capaian dapat terlihat pada tabel 4.5 dan Gambar 4.6 di bawah.

Tabel 4.4.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (IKK) Tahun 2021 Pada Akhir RPJMD 2019-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15.08	13.50	111.70%	Tercapai
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	4.19	9.91	42.25%	Perlu Upaya Keras
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	5.45	15.68	34.74%	Perlu Upaya Keras
Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7.98	9.86	80.93%	Akan Tercapai
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.59	0.65	88.72%	Akan Tercapai
Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.34	0.37	90.99%	Akan Tercapai
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4.75	5.3	89.56%	Akan Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.58	1.72	92.05%	Akan Tercapai
Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.10	1.08	101.54%	Tercapai
Fokus Kesejahteraan Sosial	0			0
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.77	9.8	99.69%	Akan Tercapai
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.74	14.96	91.84%	Akan Tercapai
Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.55	73.8	101.02%	Tercapai
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	0			0
Jumlah sekolah mengembangk-an budaya lokal	76	233	32.47%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	60	70	85.71%	Akan Tercapai
Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	28.33	60	47.22%	Perlu Upaya Keras
Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	6.86	80	8.58%	Perlu Upaya Keras
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan	0			0
Persentase /Jumlah sekolah yang mengembangk-an ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	128.33	233	55.08%	Perlu Upaya Keras
Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	56.67	86	65.89%	Perlu Upaya Keras
Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	71.90	85	84.59%	Akan Tercapai
Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	64.67	100	64.67%	Akan Tercapai
Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	31.91	100	31.91%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	85,445	31,709	269.47%	Tercapai
Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	9,772	2,500	390.88%	Tercapai
Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	85.00	100	85.00%	Akan Tercapai
Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	63.75	85	75.00%	Akan Tercapai
Kesehatan	0			0
Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	0.00	100	0.00%	Perlu Upaya Keras
Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	20.00	50	40.00%	Perlu Upaya Keras
Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	83.33	0	#DIV/0!	Akan Tercapai
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (Rumah Sakit)	29.22	88.7	32.94%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	23.50	60	39.17%	Perlu Upaya Keras
Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)				
Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	29569.00	90000	32.85%	Perlu Upaya Keras
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2			2
Kapasitas Air Baku (L/detik)		-	0.00%	NA
Persentase Capaian Layanan SDA (%)	22.66	78.91	28.72%	Perlu Upaya Keras
Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	61.57	68.64	89.70%	Akan Tercapai
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	72,791	69,681	104.46%	Tercapai
Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	47.27	-	0.00%	NA
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.29	1	29.00%	Perlu Upaya Keras
Ketentraman. Ketertiban Umum. Dan Perlindungan Masyarakat	1			1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	59.63	75.5	78.98%	Akan Tercapai
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	62.67	100	62.67%	Perlu Upaya Keras
Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	51.67	91	NA	NA
Sosial	0			0
Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	9603	3500	274.37%	Tercapai
Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja	0			0
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	27.73	40	69.31%	Perlu Upaya Keras
Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	76.67	70	109.52%	Tercapai
Persentase Wirausahawan Baru dari Pencari Kerja (%)	20.65	45	45.89%	Perlu Upaya Keras
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0			0

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65.58	65.70	99.81%	Akan Tercapai
Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	80.67	90	89.63%	Akan Tercapai
Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	48.99	70	69.99%	Perlu Upaya Keras
Rasio KDRT	15.13	0.038	39814.91%	Tercapai
Kampung KB	211.33	330	64.04%	Perlu Upaya Keras
Lingkungan Hidup	0			0
Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	25.30	29.33	86.26%	Tercapai
Indeks Pencemaran Lingkungan				

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	39.29	29.33	133.95%	Tercapai
Indeks Kualitas Air Sungai	60.90	53.85	113.10%	Tercapai
Indeks Kualitas Udara	88.86	89.21	99.60%	Akan Tercapai
Indeks Kualitas Air Laut	56.03	83.66	66.97%	Perlu Upaya Keras
Indeks Kualitas Lahan	77.58	79.91	97.08%	Akan Tercapai
Indeks Risiko Bencana	149.8	150.49	99.54%	Akan Tercapai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0			0
Indeks Desa Membangun	0.6687	0.6900	96.91%	Akan Tercapai
Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	78.00	0	#DIV/0!	Perlu Upaya Keras
Meningkatkan Jumlah Bumdesa Aktif (Bumdes)	361.67	470	76.95%	Akan Tercapai
Desa Berkembang (Desa)	123.67	30	412.22%	Tercapai
Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	70.00	150	46.67%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Jumlah Kampung Iklim	65.00	150	43.33%	Perlu Upaya Keras
Perhubungan	0			0
Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	6,080,696	8,100,000.00	75.07%	Akan Tercapai
Jumlah barang (ton)	316,597,533	370,000,000.00	85.57%	Akan Tercapai
Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	83.67	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)	95.08%	Akan Tercapai
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	462.33	342	64.81%	Perlu Upaya Keras
Komunikasi dan Informatika	0			0
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.8	3.3	84.85%	Akan Tercapai
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1			1
Jumlah UKM naik kelas	0	1	0.00%	Perlu Upaya Keras
Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1	1	100.00%	Akan Tercapai
Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	0	10	0.00%	Perlu Upaya Keras
Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	2.75	3	91.67%	Akan Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Kepemudaan dan Olahraga	1			1
Indeks Pembangunan Pemuda	56.27	58.86	95.59%	Akan Tercapai
Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan	0.04	1.09	3.98%	Perlu Upaya Keras
Kebudayaan				
Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	15	65	23.08%	Perlu Upaya Keras
Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	26.67	88	30.30%	Perlu Upaya Keras
Perpustakaan				0
Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	260,190	209,500	124.20%	Tercapai
Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan				
Pariwisata	1			1
Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2.67	3	88.89%	Akan Tercapai
Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)	0	23.53	0.00%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Pertanian	0			NA
Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	2366.67	8700	27.20%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura (unit)	6	20	30.00%	Perlu Upaya Keras
Jumlah produksi padi (ton)	252,297.00	289,846.00	87.05%	Akan Tercapai
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	104477	292383	35.73%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina (orang)	30.33	441	6.88%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi yang dibina (unit lembaga)	4.00	12	33.33%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	41.00	120	34.17%	Perlu Upaya Keras
Angka Kelahiran Sapi (%)	18.86%	22%	85.74%	Akan Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta Ton CO ₂ eq)	2.979	4.044	73.66%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok Tani)	11.33	120	9.44%	Perlu Upaya Keras
Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1,439,804	1,500,674	95.94%	Akan Tercapai
Produksi komoditas perkebunan (ton)	17,673,091	18,313,874.25	96.50%	Akan Tercapai
Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	0.33	3	11.11%	Perlu Upaya Keras
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Jumlah Perusahaan)	59	123	47.97%	Perlu Upaya Keras
Kehutanan	0			0
Realisasi penerimaan PNBPN sektor kehutanan (Rp. Miliar)				
Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)				

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)				
Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	89036.00	165858	53.68%	Perlu Upaya Keras
Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	14,133,410.21	25029139	56.47%	Perlu Upaya Keras
Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	2,879.09	3,803.71	75.69%	Akan Tercapai
Energi dan Sumber Daya Mineral	0			0
Persentase pemanfaatan EBT (%)	5.24	8.40	62.42%	Perlu Upaya Keras
Jumlah KK Berlistrik (KK)	1,093,745	1,200,000	91.15%	Akan Tercapai
Perdagangan	0			0
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	3.01	1.89	159.08%	Tercapai

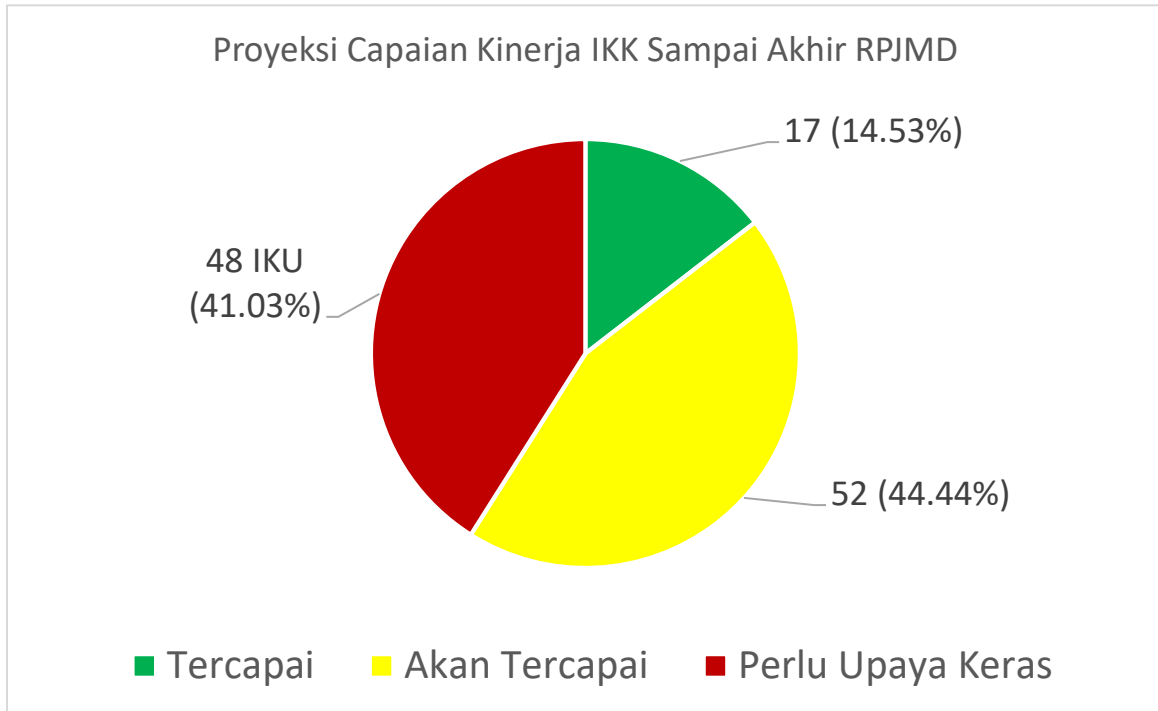
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	38.85	5	777.07%	Tercapai
Perindustrian	0			0
Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)				
Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)				
Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	0.67	2	33.33%	Perlu Upaya Keras
Kelautan dan Perikanan	0			0
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	153,761	167,730	91.67%	Akan Tercapai
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	167,907	166170	101.05%	Tercapai
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)				
Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)				
Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289,048	297,805.90	97.06%	Akan Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	36	60	60.00%	Perlu Upaya Keras
Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	36	100	36.00%	Perlu Upaya Keras
Fokus : Urusan Penunjang				
Perencanaan	1			1
Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi. Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	NA	96	0.00%	NA
Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (%)	26.17	80	32.71%	Perlu Upaya Keras
Keuangan	0			0
Jumlah objek/sumber pendapatan baru	1	12,122	0.01%	Akan Tercapai
Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10,666	12,122	87.99%	Akan Tercapai
Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	30.99	100	30.99%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	38.23	100	38.23%	Perlu Upaya Keras
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	770	777	99.06%	Akan Tercapai
Pengawasan	1			1
Hasil Penilaian Integritas	66.01	85	77.65%	Akan Tercapai
Level Kapasitas APIP				
Umum/Sekretariat	1			0
Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	74.45	81	91.91%	Akan Tercapai
Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	87.67	97	90.38%	Akan Tercapai
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	52.53	89	59.03%	Perlu Upaya Keras
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	61.37	92	66.70%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
ASPEK DAYA SAING				
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	0			0
Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	68.75	78.27	87.83%	Akan Tercapai
Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan)	3	7	38.10%	Perlu Upaya Keras
Capaian akses Air Minum Layak (%)	64.05	70.53	90.81%	Akan Tercapai
Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13,895.17	14,778.50	94.02%	Akan Tercapai
Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	406.00	329	76.60%	Akan Tercapai
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1,190.14	1137.82	82.14%	Akan Tercapai
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69.45	83.1	83.58%	Akan Tercapai
Rasio elektrifikasi (%)	90.05	95	94.79%	Akan Tercapai
Fokus iklim berinvestasi	2			0
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	26.17	35.67	73.36%	Perlu Upaya Keras

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja IKK Tahun Ketiga	Kondisi Kinerja IKK pada akhir periode RPJMD (Target Akhir)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir IKK RPJMD	Indikator Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	5	10	150.00%	Tercapai
Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	400	100	100.00%	Akan Tercapai
Fokus Sumber Daya Manusia	0			0
Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.94	78	98.64%	Akan Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.02	83	98.82%	Akan Tercapai
Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	100	Level 4	100.00%	Akan Tercapai



Gambar 4.6
Proyeksi Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Pemerintah Kalimantan Timur (IKK) Pada Akhir RPJMD

Hasil analisis proyeksi terhadap indikator indeks Kinerja Kunci (IKK) propinsi Kalimantan Timur maka diperoleh hasil yang menjadi tiga kriteria yaitu

1. Target tercapai ditunjukkan sebanyak 14, 53% dari seluruh indikator indeks kinerja utama, target tercapai memiliki arti bahwa capaian kinerja pada target yang ditetapkan telah tercapai sebelum waktu RPJMD berakhir.
2. Target akan tercapai sebanyak 44, 44% dari seluruh indikator indeks kinerja utama, target akan tercapai memiliki arti bahwa proyeksi diakhir waktu RPJMD semua program kegiatan akan tercapai.
3. Pencapaian target perlu Upaya Keras sebanyak 41,03% dari seluruh indikator indeks kinerja utama, proyeksi pencapaian target perlu usaha keras dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditentukan pada masa akhir RPJMD 2023, hal ini dilihat dari rata-rata prestasi kinerja tiap tahunnya yang belum tercapai targetnya.

4.3. Keterkaitan Capaian IKU dan IKK dengan Program Dedikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

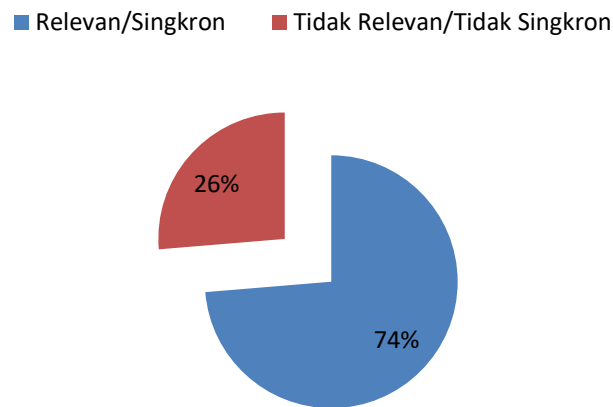
Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya; (Dinas Pendidikan)
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur; (Badan Penghubung)
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama; (Dinas Kesehatan)
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School); (Dinas Pendidikan)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan; (Dinas Pendidikan)
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA; (Dinas Pendidikan)
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal; (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas; (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Sosial)
9. Peningkatan perlindungan anak; (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun; (Dinas Pemuda Olahraga)
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional; (Dinas Pemuda Olahraga)
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan; (Disperindagkop)
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah; (Dinas Pariwisata)
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa; (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)

15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera; (DPUPR)
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan; (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat; (Dinas Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan)
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas; (DPMPTSP)
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat; (Dinas Perikanan)
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur; (Disperindagkop)
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal; (DESDM)
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa; (Diskominfo)
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda; (DPUPR)
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang; (DPUPR)
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur; (DPUPR)
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor; (DPMPTSP, DISHUB, Disperindagkop)
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang; (DPUPR)
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis; (DPUPR)
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat; (DPUPR, DESDM)
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata; (DPUPR)
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan; (DISHUT)
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara; (DLH)
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (INSPEKTORAT)

34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis; (SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA)
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN); (BKD)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah; (BAPENDA)
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan; (DPMPTSP)
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. (INSPEKTORAT)

Hasil analisis sinkronisasi program prioritas RPJMD propinsi Kalimantan Timur dengan program dedikasi Gubernur propinsi Kalimantan Timur diperoleh hasil sebanyak 28 program (78%) yang sinkron atau relevan dan program yang tidak sinkron atau relevan sebanyak 10 program (26%),



Gambar 4.7. Grafik persentase sinkronisasi program prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan program dedikasi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun program Gubernur Kalimantan Timur yang belum sinkron dengan program RPJMD yaitu:

1. program pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur.
2. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
3. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School).

4. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA.
5. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional.
6. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa.
7. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan.
8. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
9. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa.
10. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang.

Tabel sinkronisasi dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel 4.6. Analisis Kinerja Program Dedikasi Gubernur Kalimantan Timur dengan Program Prioritas RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
1	Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya	Dinas Pendidikan	Ada	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
2	Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur	Badan Penghubung	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
3	Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama	Dinas Kesehatan	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
4	Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
5	Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan		Ada	Dikelola Dewan Pendidikan Propinsi
6	Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
7	Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
8	Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Sosial	Ada	Program Perlindungan Perempuan,
		Dinas Pemuda dan Olahraga		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
9	Peningkatan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pemenuhan hak anak
10	Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun	Dinas Pemuda Olahraga	Ada	Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
11	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional	Dinas Pemuda Olahraga	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
12	Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan;	Disperindagkop	Ada	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
13	Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah	Dinas Pariwisata	Ada	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif
14	Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Dinas Pemberdayaan	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
		Masyarakat dan Pemerintah Desa		Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
15	Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera	DPUPR	Ada	Program Pengembangan permukiman
16	Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
17	Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat	Dinas Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan	Ada	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
18	Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas	DPMPTSP	Ada	Program pelayanan penanaman modal, salah satu indikator penyelesaian izin dari 12 hari menjadi 5 pada realisasinya.
19	Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat	Dinas Perikanan	Ada	Program pengelolaan perikanan budidaya dan tangkap
20	Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur	Disperindagkop	Tidak ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
21	Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal	DESDM	Ada	Program Pengelolaan ketenagalistrikan (jumlah kk berlistrik target) 90,44%
22	Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa	iskominfo	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
23	Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk	DPUPR	Ada	Program pengelolaan dan pengembangan

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
	Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda			sistem penyediaan air minum (tidak ada lokus)
		DESDM	Ada	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
24	Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang	DPUPR	Ada	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (tidak ada lokus)
25	Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur	DPUPR	Ada	program penyelenggaraan jalan, tingkat kemantapan jalan provinsi
26	Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor	DPMPTSP, DISHUB, Disperindagkop		Program pengelolaan pelayaran, Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (Dishub)
27	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang	DPUPR	Tidak Ada	Belum bisa terdeskripsikan dan teranalisis antara Program Dedikasi dengan Program di RPJMD
28	Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis	DPUPR	Ada	Program penyelenggaraan penataan ruang, Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
29	Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat	DPUPR, DESDM	Ada	Program pengelolaan mineral dan batubara, penataan izin wilayah laut dan darat
30	Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata	DPUPR	Ada	Program pengelolaan sumberdaya air, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
31	Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan	DISHUT	Ada	Program pengelolaan hutan, Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
32	Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara	DLH	Ada	Program Ppengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
33	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEKTORAT	Ada	Program penyelenggaraan pengawasan, Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
34	Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis	SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA	Ada	Program pemerintahan dan otonomi daerah, Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
35	Peningkatan kinerja aparatur sipil negara	BKD	Ada	Program kepegawaian daerah perlu ada pengembangan kompetensi ASN
36	Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah	BAPENDA	Ada	Program pengelolaan pendapatan daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
37	Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan	DPMPSTP	Ada	Program pelayanan penanaman modal,
38	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	INSPEKTORAT	Ada	Program perumusan kebijakan,

No	Program Gubernur	Pelaksana	Realisasi	Keterangan
				pendampingan dan asistensi, Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Berdasarkan tabel di atas, dari total 38 Program dedikasi Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019-2023 yang disinkronisasikan dengan Program Prioritas RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 10 Program (26,32%) yang tidak bisa dideskripsikan dan dianalisis untuk sinkron dengan Program Prioritas di RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakjalan program dedikasi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, serta masih belum mampunya perangkat daerah memdeskripsikan program dedikasi tersebut ke dalam program pembangunan yang menjadi bagian kinerja pemerintahan daerah dan perangkat daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perangkat daerah belum mampu menterjemahkan program dedikasi menjadi program pelaksanaan pembangunan, padahal program dedikasi ini bagian dari janji-janji gubernur kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan “Kalimantan Timur Berdaulat”.

BAB V
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS TAHUN KETIGA
RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

5.1. Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

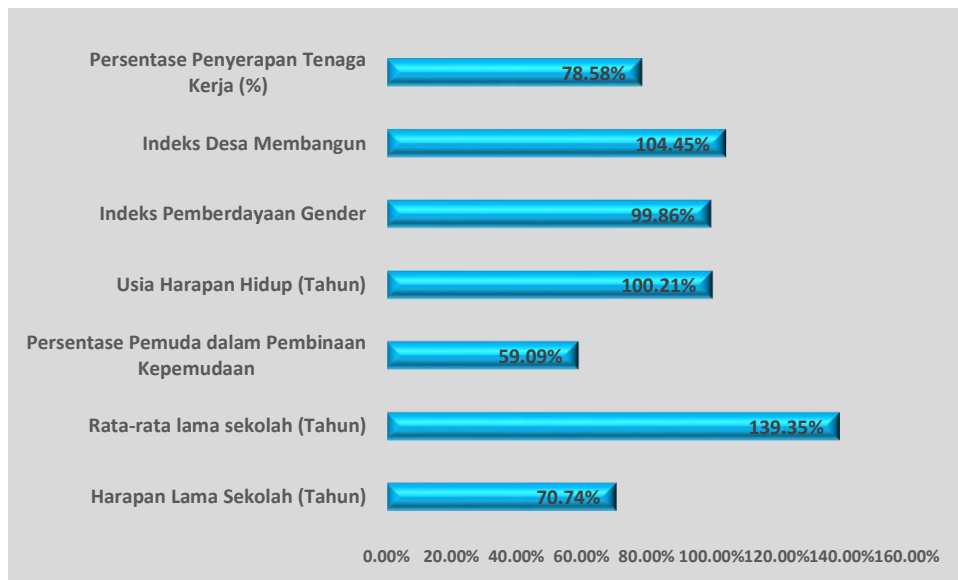
Misi 1 RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi tersebut kemudian terjabarkan dalam 2 Tujuan (3 indikator), 6 Sasaran (7 indikator), dan 44 Program (56 indikator). Indikator kinerja pada tujuan 1 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian kinerja sangat tinggi (100,17%); indikator kinerja pada Tujuan 2 meliputi tingkat kemiskinan dengan capaian indikator kinerja sangat tinggi (91,90%) dan tingkat pengangguran terbuka dengan capaian indikator kinerja sangat tinggi (99,71%).

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tujuan 1 yang sangat tinggi karena dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja pada beberapa sasaran yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tersebut, diantaranya pada sasaran 1 (indikator kinerja rata-rata lama sekolah); sasaran 3 (indikator kinerja usia harapan hidup); dan sasaran 4 (indikator kinerja indeks pemberdayaan gender), sedangkan sasaran 2 (indikator kinerja persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan) dan juga termasuk indikator kinerja harapan lama sekolah di sasaran 1 memiliki daya ungkit yang rendah pada pencapaian tujuan 1 di misi 1.

Selanjutnya, tujuan 2 pada misi 1 dengan dua indikator kinerja yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka juga memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi, dimana indikator kinerja indeks desa membangun yang ada di sasaran 6 dan indikator kinerja persentase penyerapan tenaga di sasaran 7 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tujuan 2.

Rata-rata capaian kinerja terhadap 7 indikator untuk sasaran pada Misi 1 meliputi: kinerja sangat tinggi sebanyak 4 indikator (57,14%); kinerja tinggi sebanyak 1 indikator (14,29%); kinerja sedang sebanyak 1 indikator (14,29%); dan kinerja rendah sebanyak 1

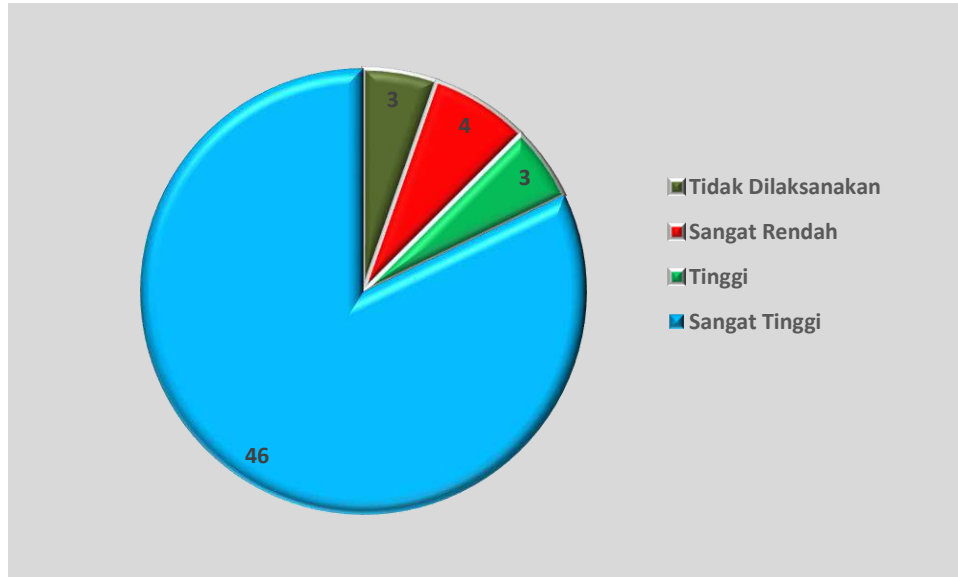
indikator (14,29%). Secara umum program yang ada pada di misi 1 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tiap-tiap sasaran. Namun terdapat beberapa program memiliki daya ungkit yang rendah terhadap sasaran, yang tercermin pada rendahnya capaian indikator kinerja pada program tersebut. Beberapa program tersebut meliputi: program pengembangan daya saing keolahragaan; program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan; dan program pengembangan kapasitas kepramukaan. Ketiga program tersebut memiliki daya ungkit yang sangat rendah yang tergambar dengan rendahnya capaian indikator kinerja, sehingga berdampak pula pada rendahnya capaian indikator kinerja pada sasaran 2 (meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan). Selain itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan indikator kinerja persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada) memberikan daya ungkit yang rendah terhadap capaian indikator kinerja pada sasaran 3 (meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat). Lebih lanjut mengenai rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Misi 1

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja terhadap 56 indikator pada 44 program, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 46 indikator (82,14%) dengan capaian kinerja sangat tinggi; 3 indikator (5,36%) dengan capaian kinerja tinggi; 4 indikator (7,14%) dengan

capaian kinerja sangat rendah, dan 3 indikator (5,36%) program tidak dilaksanakan. Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud tergambar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.2. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Misi 1

Terdapat 8 (delapan) OPD yang memiliki program yang ada di Misi 1, yaitu: 1) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 5) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Program Sangat Tinggi dan Tinggi

Indikator kinerja program dengan capaian yang sangat tinggi sebanyak 46 indikator kinerja program atau 82,14% dari keseluruhan indikator kinerja program pada Misi 1. Selanjutnya, terdapat 3 indikator kinerja program (5,36%) yang memiliki capaian yang tinggi. 46 indikator kinerja program yang sangat tinggi terdiri dari: 1) Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan; 2) Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi; 3) Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina; 4) Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK; 4) Persentase Pengelolaan Permuseuman; 5) Presentase

Kebudayaan yang dikembangkan; 6) Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan; 7) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; 8) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS; 9) Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota; 10) Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS); 11) Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso); 12) Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada); 13) Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (RS. Korpri); 14) Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan; 15) Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS); 16) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan; 17) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada); 18) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso); 19) Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial; 20) Penguatan Pemenuhan Hak Anak; 21) Kebijakan terkait pencatatan sipil; 22) Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk; 23) Implementasi Kelembagaan PUG; 24) Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan; 25) Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah; 26) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak; 27) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak; 28) Kebijakan Perlindungan Perempuan; 29) Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 30) Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; 31) Kebijakan tentang pengendalian penduduk; 32) Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal; 33) Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK MHA KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan; 34) Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa; 35) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa; 36) Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (orang); 37) Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 38) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang); 39) Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja; 40) Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri; 41) Persentase Penempatan Tenaga Kerja; 42) Perusahaan yang dibina dan diawasi; 43)

Kesepakatan bersama dengan provinsi lain; 44) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga; 45) Kerja dan Transmigrasi; dan 46) Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya, 3 indikator kinerja program yang memiliki capaian tinggi adalah: 1) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS); 2) Desa Berkembang; 3) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan).

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja yang sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah ketersediaan SDM yang kompeten, ketersediaan anggaran yang cukup serta ketersediaan data dan informasi. Hampir semua yang memiliki program di misi 1 menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut cukup memberi pengaruh positif terhadap capaian indikator program.

Selanjutnya pelonggaran terhadap pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan program perangkat daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam jaringan (*online*) juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi OPD dalam pencapaian target indikator kinerja program mereka, dimana aplikasi berbasis dalam jaringan yang diaplikasikan ke dalam program mampu menghasilkan konektivitas dan komunikasi ke masyarakat atau pengguna layanan yang baik dan lebih mudah. Beberapa indikator program yang terdorong capaiannya oleh karena kegiatannya dapat dilaksanakan dalam jaringan adalah persentase angka partisipasi murni SMA/SMK, persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selanjutnya perluasan jangkauan layanan digitalisasi dan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta sistem informasi yang sudah mulai terintegrasi menjadi faktor pendorong bagi perangkat daerah dalam pencapaian target indikator kinerja, khususnya terhadap indikator persentase peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan persentase pengembangan pengembangan daya saing keolahragaan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Dukungan dan sinergi dari berbagai stakeholder, mitra dan masyarakat (pelaku usaha) menjadi faktor pendorong pencapaian target indikator kinerja pada Dinas Kesehatan,

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak tersebut, perangkat daerah dapat melaksanakan program secara lebih maksimal sehingga memberi pengaruh positif terhadap capaian indikator kinerja pada perangkat daerah tersebut.

Terakhir, diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di level pusat maupun daerah menjadi faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja persentase angka partisipasi murni SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; presentase pengembangan daya saing keolahragaan pada Dinas Pemda dan Olahraga; kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; serta persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b) Capaian Indikator Kinerja Program Sedang, rendah, dan Sangat Rendah

Terdapat 4 indikator kinerja program pada Misi 1 yang memiliki capaian yang sangat rendah. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; 2) Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan; 3) Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; 4) Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada).

Beberapa faktor penghambat atas capaian indikator kinerja program tersebut diantaranya masih adanya pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemik Covid 19 yang mengakibatkan dibatalkannya kegiatan kepemudaan berskala nasional dan mengakibatkan kegiatan kepramukaan menjadi tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini praktis membuat capaian indikator program persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan indikator program persentase pengembangan kapasitas kepramukaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga menjadi sangat rendah. Selain itu, pembatasan aktivitas masyarakat juga mengakibatkan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan secara tatap muka langsung tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga mengakibatkan capaian indikator persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada) pada dinas Kesehatan menjadi sangat rendah.

c) Indikator Kinerja Program yang Tidak Dilaksanakan

Indikator kinerja program di Misi 1 terdapat 3 indikator yang tidak dilaksanakan. Ketiga indikator tersebut adalah: 1) Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana; 2) Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan); dan 3) Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja. Beberapa faktor yang mengakibatkan program tidak dilaksanakan diantaranya dialami oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan terkait tidak berjalannya komunikasi yang baik antara dinas dan sekolah-sekolah yang ada dibawa naungan dinas terkait jangka waktu kegiatan program yang akan dilaksanakan, khususnya di bidang pembinaan ketenagaan. Selain itu masih adanya pembatasan aktivitas terkait pandemic Covid 19 yang berakibat pembatasan kegiatan oleh perusahaan berdampak pada tidak dilaksanakannya program yang ada di Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, dan Program pada Misi 1 RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1. Mewujudkan Sdm Yang Berdaya Saing, Berkarakter Dan Berakhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	76,88	100,17%		Sangat Tinggi
Sasaran 1. Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	9,60	9,84	102,50%		Sangat Tinggi
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,34	13,81	96,30%		Sangat Tinggi
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	45%	45,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	6,89%	8,10%	117,56%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	70%	70%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	0%	0%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Dilaksanakan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	77%	78,15%	101,49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	27%	27%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	80%	80%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	60%	60%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kurikulum	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	70%	70%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi
Sasaran 2. Meningkatkan Peran Pemuda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,22	0,13	59,09%		Rendah

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Dalam Pembangunan						
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	66,60%	20,59%	30,92%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	0,80%	0,13%	16,25%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	6,15%	0,79%	12,85%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sangat Rendah
Sasaran 3. Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,76	74,61	101,15%		Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	3	100,00%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80%	81%	101,25%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1	1	100,00%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	90%	95%	105,50%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	85%	40,11%	47,19%	Dinas Kesehatan	Sangat Rendah
	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (RS. Korpri)	20%	57,81%	289,05%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	30%	60%	200,00%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85%	89%	104,71%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	80%	85%	105,89%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	85,67%	86%	100,39%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100%	90%	90,00%	Dinas Kesehatan	Tinggi
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	79%	87%	110,13%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi
Program Sediaan Farmasi, Alat	Presentasi puskesmas dengan	90%	99%	110,00%	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Kesehatan Dan Makanan Minuman	ketersediaan obat esensial					
Sasaran 4. Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,63	65,54	99,86%		Sangat Tinggi
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3	4	133,33%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pencatatan Sipil	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6	6	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pendaftaran Penduduk	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6	6	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi Kelembagaan PUG	1	1	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5	5	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	65%	70%	107,69%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	90%	90%	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
[Program] Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	88,00%	90%	102,27%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Perempuan	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4	4	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	33%	33%	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Penduduk	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1	1	100,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Tinggi
Tujuan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,54	91,90%		Sangat Rendah
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,83	99,71%		Sangat Rendah
Sasaran 5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,677	0,7071	104,45%		Sangat Tinggi
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	30	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK MHA KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	30	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sangat Tinggi
Program Penataan Desa	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7	7	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Berkembang	30	27	90,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100%	100%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sangat Tinggi
Sasaran 6. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	33,14	26,04	78,58%		Tinggi
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (orang)	35.989	32.901	91,42%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20%	75,00%	375,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85%	73,75%	86,76%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tinggi
	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85%	80%	94,12%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	75%	107,14%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1	1	100,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	79,07%	255,06%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang dibina dan diawasi	150	224	149,33%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
	Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan)	20	0	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Dilaksanakan
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1	1	100,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76%	81%	106,58%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	1	1	100,00%	Dinas Tenaga Kerja dan	Sangat Tinggi

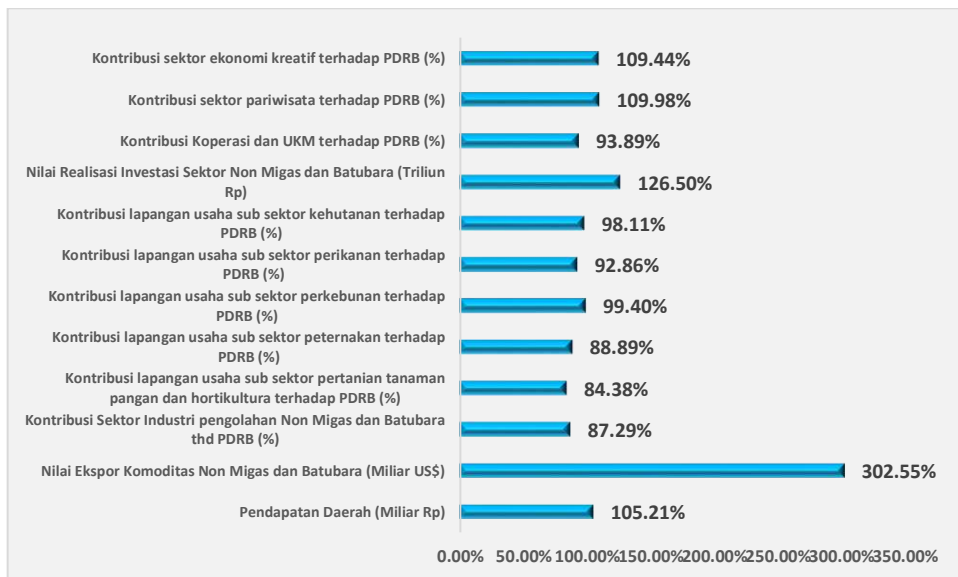
Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
					Transmigrasi	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	70%	0	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Dilaksanakan

5.2. Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Misi 2 RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan. Misi tersebut kemudian terjabarkan dalam 1 Tujuan (4 indikator), 7 Sasaran (12 indikator), dan 53 Program (69 indikator). Indikator kinerja pada Tujuan meliputi meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja sangat tinggi (248%), PDRB per Kapita (Juta Rp) dengan capaian kinerja sangat tinggi (108,98%), Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara dengan capaian kinerja sangat tinggi (179, 33%), dan Nilai Tukar Petani dengan capaian kinerja sangat tinggi (102,49%). Perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan misi 2 yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata.

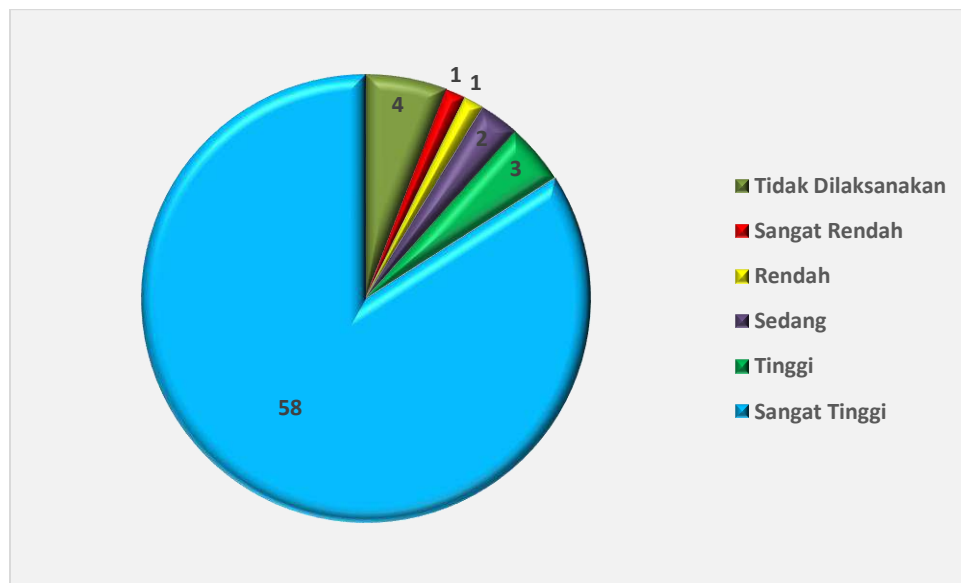
Capaian indikator kinerja untuk seluruh indikator pada tujuan 3 di misi 2 ini sangat tinggi, dimana seluruh sasaran mampu memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja tujuan. Hal ini tergambar pada capaian 12 indikator kinerja pada 7 sasaran yang memiliki kinerja yang sangat tinggi.

Rata-rata capaian kinerja terhadap 12 indikator untuk sasaran pada misi 2 meliputi: kinerja sangat tinggi sebanyak 9 indikator (75%); dan kinerja tinggi sebanyak 3 indikator (25%). Secara umum program yang ada pada di misi 2 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tiap-tiap sasaran. Namun terdapat beberapa program memiliki daya ungkit yang rendah terhadap sasaran, yang tercemin pada rendahnya capaian indikator kinerja pada program tersebut. Beberapa program tersebut diantaranya adalah program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat; dan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator kinerja jumlah benih yang beredar yang memiliki daya ungkit yang rendah terhadap capaian indikator kinerja pada sasaran 4 (meningkatkan Peran Sektor Pertanian). Selain itu, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan tidak mampu memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja pada sasaran 5 (meningkatkan realisasi investasi sektor non migas dan non batu bara). Lebih lanjut mengenai rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Misi 2

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja terhadap 69 indikator pada 53 program, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 58 indikator (84,06%) dengan capaian kinerja sangat tinggi; 3 indikator (4,35%) dengan capaian kinerja tinggi; 2 indikator (2,90%) dengan capaian kinerja sedang; 1 indikator (1,45%) dengan capaian kinerja rendah; 1 indikator (1,45%) dengan capaian kinerja sangat rendah; dan 4 indikator (5,80%) program tidak dilaksanakan. Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud tergambar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.4. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Misi 2

Terdapat 11 (sebelas) OPD yang memiliki program yang ada di Misi 2, yaitu: 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) Badan Pendapatan Daerah; 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4) Dinas Kehutanan; 5) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6) Dinas Kelautan Dan Perikanan; 7) Dinas Perkebunan; 8) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 11) Dinas Pariwisata.

a) Capaian Indikator Kinerja Program Sangat Tinggi dan Tinggi

Indikator program dengan capaian sangat tinggi sebanyak 58 indikator kinerja program atau 84,06% dari keseluruhan indikator kinerja program pada misi 2. Selanjutnya,

terdapat 3 indikator kinerja program (4,35%) yang memiliki capaian yang tinggi. 58 indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi meliputi: 1) Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik; 2) Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak); 3) Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu; 4) Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak); 5) Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah; 6) Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara; 7) Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran; 8) Persentase stabilitas harga bapakting (%); 9) persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi; 10) persentase capaian target sertifikat mutu barang (%); 11) Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya; 12) Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata; 13) Persentase tercapainya target UKM naik kelas; 14) Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (unit); 15) Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital; 16) Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan; 17) Persentase Tutupan Lahan Meningkat; 18) Produksi Hasil Hutan Kayu dan Produksi Hasil Hutan Non Kayu (karet); 19) Jumlah Desa Rawan Pangan; 20) Persentase pangan aman di kalimantan timur; 21) Luas Penanganan OPT DPI (ha); 22) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan; dan Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi; 23) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi; dan Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura; 24) Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara; 25) Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya; 26) Jumlah produksi padi; dan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura; 27) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat; 28) Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (jumlah); 29) Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (kali); 30) Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina; dan Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina; 31) Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan; 32) Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif

(ha); 33) Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (ekor); 34) Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor); 35) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton); 36) Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan; 37) Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis); 38) Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Ton CO₂eq); 39) Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp); 40) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan; dan Luas Kebun yang dibangun; 41) Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia; 42) Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat; 43) Produksi komoditas perkebunan (ton); 44) Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk; 45) Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP); 46) Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV); 47) Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular; 48) Jumlah Miniranch yang teregister (unit); 49) Angka Kelahiran Sapi; 50) Cakupan binaan kelompok ternak; 51) Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha; 52) Waktu penyelesaian proses perizinan (hari); 53) Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal (dokumen); 54) Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM; 55) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi (laporan); 56) Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus) (orang); 57) Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi; 58) Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi).

Selanjutnya 3 indikator kinerja program yang memiliki capaian tinggi adalah: 1) Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri; 2) Jumlah Koperasi berkualitas (koperasi); 3) Jumlah Koperasi dan UKM yang terlatih (DAK).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja sangat tinggi dan tinggi, diantaranya yakni dukungan lintas perangkat daerah dalam koordinasi dan sinkronisasi data. Faktor tersebut menjadi pendukung atas capaian indikator program Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik serta indikator program perda dan pergub tentang APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam hal indikator program persentase pencaipaan target pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah, dukungan penuh pemerintah provinsi dalam bentuk kebijakan relaksasi pajak dan pemberian *reward* kepada yang taat pajak serta peningkatan pelayanan melalui digitalisasi menjadi faktor yang mendorong pencapaian target indikator sehingga berstatus sangat tinggi. Kebijakan ini berhasil menjadi stimulus positif untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga membantu dalam menggaungkan kebijakan yang ada.

Pada indikator program persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kejasama perdagangan yang dilakukan dengan provinsi lain dan peluang diversifikasi komoditi potensial ekspor yang cukup tinggi memberi andil terhadap capaian indikator program sangat tinggi. Sementara koordinasi dan sinergi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan lembaga pembiayaan menjadi faktor yang mendorong capaian sangat tinggi pada indikator program peningkatan jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi pemasaran.

Terhadap indikator program persentase stabilitas harga bapakting, capaian indikator program tinggi karena terbangunnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah melalui peningkatan kelancaran distribusi. Faktor lain, yakni pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan diluar daerah sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan kembali memberi pengaruh terhadap capaian sangat tinggi pada indikator program persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi dan persentase capaian target sertifikasi mutu barang.

Lebih lanjut berkenaan dengan capaian indikator program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terhadap capaian tinggi pada indikator program jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya didorong oleh kemudahan dalam penyampaian data/informasi melalui SIINas. Tidak hanya itu, ada pula sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan/peraturan. Sanksi tersebut mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Terhadap program indikator persentase pengenalian izin usaha sektor industri terdapat

jumlah industri yang terdata, capaian indikator tinggi karena pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan perizinan berusaha.

Pada Dinas Kehutanan, indikator program kerusakan hutan di dalam kawasan hutan menunjukkan capaian sangat tinggi. Faktor yang mendorong hal tersebut selain ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta personel Dalkarhutla di UPTD, tetapi juga faktor cuaca/curah hujan tinggi sehingga tidak terjadi kebakaran hutan. Terhadap indikator program persentase tutupan lahan meningkat, capaian sangat tinggi karena terdapat kerjasama data multi pihak dalam pencapaian realisasi penanaman sehingga target program tercapai. Terhadap produksi hutan kayu dan produksi hutan non kayu, peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi faktor pendorong capaian indikator program.

Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, indikator program jumlah desa rawan pangan capaian sangat tinggi karena terpenuhinya pangan dari daerah sendiri (pemanfaatan pekarangan). Indikator program persentase pangan aman di Kalimantan Timur juga menunjukkan capaian sangat tinggi karena terdapat kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman. Luas Penanganan OPT DPI capaian sangat tinggi karena pembinaan dan pengawasan oleh petugas POPT dilakukan secara berkesinambungan. Terhadap indikator program skor pola pangan harapan ketersediaan dan skor pola pangan harapan konsumsi, capaiannya sangat tinggi karna gencarnya sosialisasi dan promosi pelaku olahan pangan local non beras non terigu serta pola hidup masyarakat yang lebih sehat. Terhadap indikator program jumlah bangunan yang dibangun/dipelihara, capaiannya sangat tinggi karna tersedianya dana renovasi bangunan dan pemeliharaan lahan pertanian.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, indikator luasan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif menunjukan capaian cangat tinggi. Faktor yang mendorong capaian tersebut salah satunya adalah percepatan terbentuknya satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi dan percepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut. Indikator program jumlah produksi perikanan tanggap juga mencapat capaian sangat tinggi. Faktor yang mendorong capaian tersebut diantaranya jumlah SDM nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang terggabungd alam KUB relatif banyak, potensi SDI Kaltim dan PUD

serta jumlah ikan ekonomis penting pun masih cukup melimpah. Sinergi antar kementerian, lembaga dan OPD Teknis juga turut memberi andil atas capaian tersebut.

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, indikator program Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) memiliki capaian sangat tinggi. Faktor yang mendorong capaian tersebut adalah ketersediaan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengawsasan terhadap lalu lintas produk hewan yang masuk ke wilayah kaltim. Selain itu, terdapat pula laboratorium veteriner yang terakreditasi dalam mendukung capaian tersebut. Faktor ketersediaan peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor pendorong atas capaian sangat tinggi pada indikator program rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular. Lebih lanjut berkenaan dengan indikator program angka kelahiran sapi, dukungan dana APBD dan APBD dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak, tingginya minat petani/peternak untuk mengembangkan ternak serta tingginya harga produk ternak menjadi faktor pendorong tingginya capaian indikator program tersebut.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ditetapkannya pelayanan perizinan elektronik terpadu secara nasional (OSS-RBA) dan Provinsi kaltim (e-PTSP) membuat capaian target indikator waktu penyelesaian proses perizinan menjadi sangat tinggi. Tidak hanya itu, hal ini juga di dorong dengan meningkatnya kesadaran masyarakat unruk memiliki izin dalam melakukan usaha. Pada indikator program jumlah dokumen kajian dan kebijakan penanaman modal, capaian juga sangat tinggi karena adanya komitmen pimpinan dalam program pengembangan iklim penanaman modal. Terlebih dengan ditetapkannya Kaltim sebagai wilayah IKN baru, praktis membuat iklim penanaman modal menjadi lebih baik.

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, indikator program jumlah koperasi berkualitas berada pada capaian tinggi karena didukung dengan terlaksananya diklat RAT, sosialisasi dan bimtek terkait perkoperasian. Indikator program persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital berada pada capaian tinggi. Hal ini didukung oleh karena tersedianya akses permodalan, akses pelatihan, akses bantuan dan akses bahan baku dalam pelaksanaan program tersebut.

Terakhir pada Dinas Pariwisata, indikator program jumlah kunjungan wisatawan berada pada capaian yang sangat tinggi karena terjalannya komunikasi baik dengan mitra pariwisata, khususnya komunitas. Hal tersebut membuat kegiatan promosi pariwisata pada akhirnya dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terhadap indikator program persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi, capaian indikator program juga sangat tinggi diakibatkan oleh tingginya antusiasme para pelaku usaha pariwisata, ekraf sebagai peserta kegiatan sehingga mendorong kegiatan dapat terlaksana. Tidak hanya itu, koordinasi, konsultasi dan komunikasi yang berjalan baik antara dinas pariwisata dengan para komunitas mitra pariwisata juga turut memberi andil atas capaian indikator program tersebut. Dalam hal jumlah destinasi dalam kawasan pariwisata yang dikembangkan, capaian indikator juga sangat tinggi oleh karena adanya komitmen untuk melaksanakan dedicated program yang menjadi prioritas gubernur.

b) Capaian Indikator Kinerja Program Sedang, rendah, dan Sangat Rendah

Terdapat 2 indikator kinerja program (2,90%) pada misi 2 yang memiliki capaian sedang. Kedua indikator tersebut adalah 1) Jumlah benih yang beredar (ekor); dan 2) Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan (kegiatan). Terdapat 1 indikator kinerja program (1,45%) yang memiliki capaian kinerja rendah, yaitu luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha). Selanjutnya terdapat pula 1 indikator kinerja program (1,45%) yang memiliki capaian kinerja sangat rendah, yaitu jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an.

Beberapa faktor penghambat atas capaian indikator kinerja sedang dan rendah adalah pandemic covid 19 yang memberi dampak terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan. Tidak hanya itu, keterbatasan SDM dan refocusing anggaran juga turut andil sebagai faktor penghambat ketercapaian indikator program. Sementara terhadap 1 indikator program dengan capaian sangat rendah, yakni kawasan hutan yang dikelola masyarakat, faktor yang menjadi penghambat capaian indikator yakni jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an, faktor yang menjadi penghambat capaian indikator program tersebut adalah belum banyaknya koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi

SKKNI, manager, simpan pinjam, belum memadainya SDM pengelola dan pengurus koperasi KSP/USP dan masih banyak anggota koperasi belum mengerti tentang seluk beluk perkoperasian.

c) Indikator Kinerja Program yang Tidak Dilaksanakan

Indikator kinerja program di misi 2 terdapat 4 indikator (5,80) yang tidak dilaksanakan. Keempat indikator tersebut adalah 1) Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA; 2) Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK); 3) Persentase tercapainya target Koperasi sehat; 4) Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan. Beberapa faktor yang mengakibatkan program tidak dilaksanakan diantaranya terjadi perubahan nomenklatur mengenai program dan kegiatan yang disesuaikan Permendagri Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta terjadi perubahan sistem informasi program kegiatan SIMDA menjadi SIPD.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, dan Program pada Misi 2 RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,5±1	2,48	165,33%		Sangat Tinggi
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	170	182,54	107,38%		Sangat Tinggi
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	1,5	2,69	179,33%		Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Petani	118	120,94	102,49%		Sangat Tinggi
Sasaran 1. Meningkatkan pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	9.590	10.090	105,21%		Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	60%	60%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100%; 685 Wajib Pajak	92,98% ; 692 wajib pajak	97,00%	Badan Pendapatan Daerah	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	114,69%	114,69%	Badan Pendapatan Daerah	Sangat Tinggi
Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,57	4,75	302,55%		Sangat Tinggi
Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	116,56%	2331,20%	Dinas Perindustri an, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5	10	200,00%	Dinas Perindustri an, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Ekspertir yang aktif menggunakan SKA	0	0	0,00%	Dinas Perindustri an, Perdagangan, Koperasi	Tidak Dilaksanakan

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
					dan Usaha Kecil Menengah	
	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	0; 0	0	0,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tidak Dilaksanakan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga bapokting (%)	80	73,8	92,25%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15%	21,05%	140,33%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
	persentase capaian target sertifikat mutu barang (%)	85%	105%	123,08%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Sasaran 3. Meningkatnya kontribusi kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,44	8,24	87,29%		Tinggi
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10	10	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
					Kecil Menengah	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5%	4,50%	90,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tinggi
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	2	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Sasaran 4. Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,64	0,54	84,38%		Tinggi
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,32	88,89%		Tinggi
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5	4,97	99,40%		Sangat Tinggi
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,68	1,56	92,86%		Sangat Tinggi
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan	1,06	1,04	98,11%		Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
	terhadap PDRB (%)					
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1,5 %	0,120%	100,00%	Dinas Kehutanan	Sangat Tinggi
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	39	39	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	19.178	59,93%	Dinas Kehutanan	Rendah
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman di kalimantan timur	90%	90%	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	40,74%	40,75%	100,02%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	8%	14,40%	180,00%	Dinas Kehutanan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Hutan (Apbd + Dbh-Dr)	1. Produksi Hasil Hutan Kayu ; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (karet)	4.950.000 M3/670 ton	4.104.271,21/1.175,38	97,79%	Dinas Kehutanan	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (ha)	289.048	289.048	100,00%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (ekor)	1.232.000	1.377.500	111,81%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)	2,8	2,8	100,00%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	161.216	158.086	98,06%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.938	168.964	106,31%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Penanganan OPT DPI (ha)	15.000	15.000	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Ton CO2eq)	4,079	6,02	147,59%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	1.047.138.860	1.044.792.912	99,78%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	12%	12,00%	100,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	50%	50%	100,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	220	239	108,64%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis)	2	2	100,00%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; 2. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	94 Skor/89 Skor	94 / 85,91	98,26%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7.100 Ha/6 unit	7.100 / 6	99,30%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1	1	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
	Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya	1	1	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30/1.425.580	34 / 1.540.488	104,88%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
	Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia	2	2	100,00%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	24	24	100,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	271.356 Ton/273.070 Ton	240.641 / 313.431	123,43%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82	82	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (jumlah)	193	193	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (kali)	30	30	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Penyediaan Dan	Jumlah benih yang beredar (ekor)	6.000.000	4.158.600	69,31%	Dinas Perkebunan	Sedang

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	75%	92,32%	123,09%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15	17.792.792	103,83%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	20,50%	19,00%	92,68%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Program Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	85 / 4	91 / 4	103,53%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	1	100,00%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan binaan kelompok ternak	43%	43%	100,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	41	117,14%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	25%	25%	100,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Sasaran 5. Meningkatnya realisasi	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan	32,53	31,05	95,45%		Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Batubara (Triliun Rp)					
Program Pelayanan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	12	5	158,33%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan (kegiatan)	4	3	75,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal (dokumen)	4	4	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100%	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi (laporan)	9	9	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi
Sasaran 6. Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,92	15,13	117,11%		Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas (koperasi)	10	9	90,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	1%	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (unit)	300	300	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
	Jumlah Koperasi dan UKM yang terlatih (DAK)	600	500	83,33%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tinggi
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	0,00%	0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tidak Dilaksanakan
Program Pengembangan Umkm	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	2,75%	91,67%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an	50	15	30,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Rendah
Sasaran 7. Meningkatnya kontribusi	Kontribusi sektor pariwisata	9,52	10,47	109,98%		Sangat Tinggi

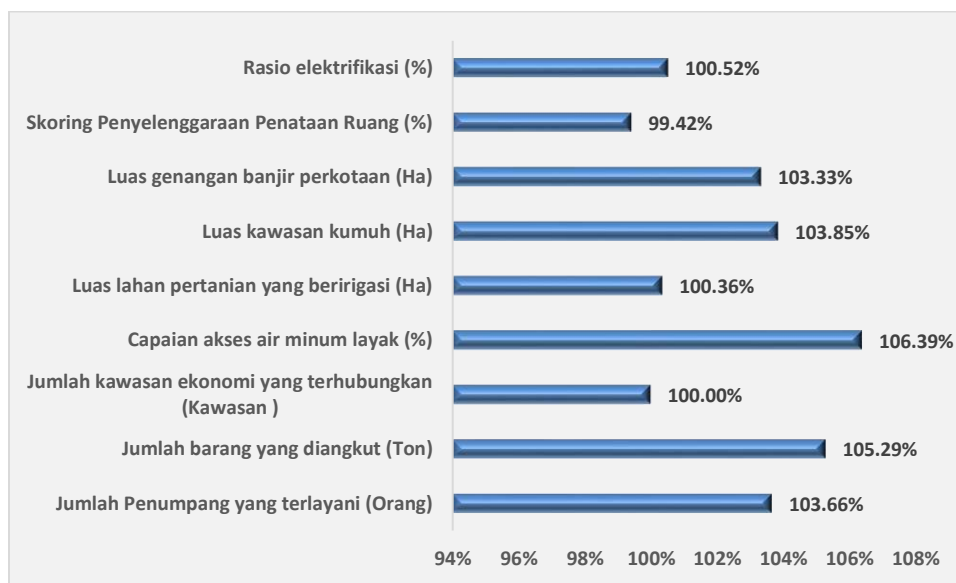
Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	terhadap PDRB (%)					
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	14,93	16,34	109,44%		Sangat Tinggi
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus) (orang)	2.015.000	2.536.345	125,87%	Dinas Pariwisata	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	0,00%	0,00%	0,00%	Dinas Pariwisata	Tidak Dilaksanakan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	90%	106,52%	118,36%	Dinas Pariwisata	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi)	2	2	100,00%	Dinas Pariwisata	Sangat Tinggi

5.3. Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

Misi 3 RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan. Misi tersebut kemudian terjabarkan dalam 1 Tujuan (1 indikator), 1 Sasaran (9 indikator), dan 18 Program (18 indikator). Indikator kinerja pada Tujuan adalah indikator Indeks Gini dengan capaian kinerja sangat tinggi (93,29%). Capaian indikator kinerja untuk seluruh indikator pada tujuan 4 di misi 3 ini sangat tinggi, dimana

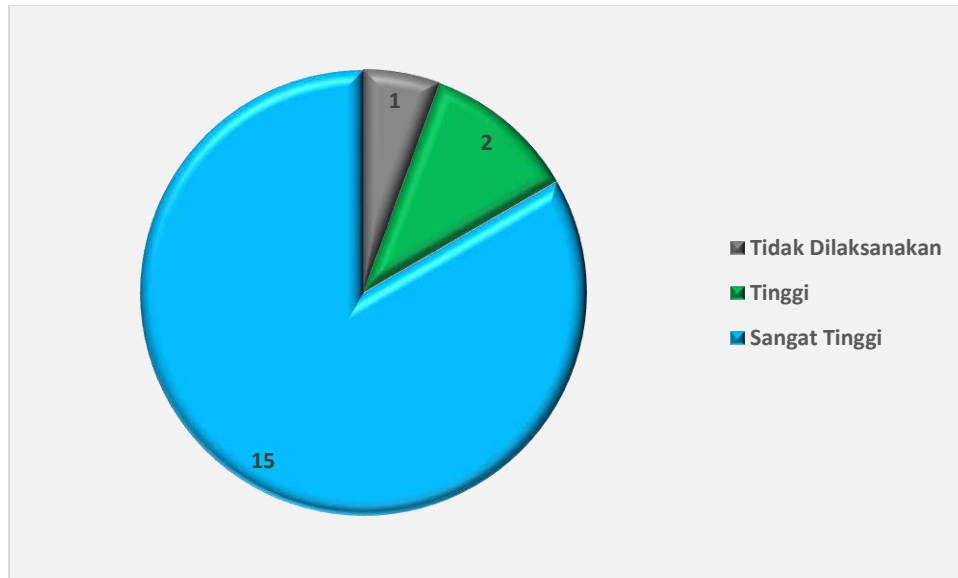
sasaran mampu memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja tujuan. Hal ini tergambar pada capaian 9 indikator kinerja pada sasaran yang memiliki kinerja yang sangat tinggi.

Rata-rata capaian kinerja terhadap 9 indikator untuk sasaran pada Misi 3 seluruhnya memiliki kinerja sangat tinggi (100%). Secara umum program yang ada pada di misi 3 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja sasaran. Lebih lanjut mengenai rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Misi 3

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja terhadap 18 indikator pada 18 program, dapat diketahui bahwa sebanyak 15 indikator (83,33%) dengan capaian kinerja sangat tinggi; 2 indikator (11,11%) dengan capaian kinerja tinggi; dan 1 indikator (5,56%) program tidak dilaksanakan. Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud tergambar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.6. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Misi 3

Terdapat OPD 3 (tiga) yang memiliki program yang ada di misi 3, yaitu: 1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3) Dinas Perhubungan.

a) Capaian Indikator Kinerja Program Sangat Tinggi dan Tinggi

Indikator kinerja program dengan capaian sangat tinggi sebanyak 15 indikator kinerja program atau 83,33% dari keseluruhan indikator kinerja program pada misi 3. Selanjutnya terdapat 2 indikator (11,11%) yang memiliki capaian yang tinggi. 15 indikator kinerja program yang sangat tinggi terdiri dari: 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit); Persentase Capaian akses limbah domestik layak; 3) Persentase Capaian akses Air Minum Layak Perpipaian; 4) Pemanfaatan EBT; 5) Jumlah KK Berlistrik; 6) Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 7) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP; 8) Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian; 9) Persentase Capaian Layanan SDA; 10) Penyelenggaraan infrastruktur permukiman; 11) Capaian akses penanganan sampah domestik; 12) Penyelenggaraan PSU permukiman; 13) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi; 14) Jumlah Lakalantas; dan 15) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Indeks).

Selanjutnya, 2 indikator kinerja program yang capaiannya tinggi adalah: 1) Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan, dan 2) Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter).

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja program yang sangat tinggi dan tinggi terkait “Jumlah Rumah Tidak Layak Huni” bersumber dari dukungan masyarakat dan Pemerintah melalui sharing dana dari APBN, APBD kab/kota, serta adanya sumber dana lainnya. Faktor pendukung terkait capaian kinerja sangat tinggi terhadap Persentase Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan bersumber dari peningkatan penerimaan penyediaan data penggunaan EBT dari Steakholder, dan Peningkatan penggunaan Biogasoil (B30) di tahun 2021.

Faktor pendukung Jumlah KK Berlistrik, antara lain: meningkatnya Jumlah KK berlistrik dari rumah tangga (KK) sektor perkotaan dan listrik PLN di perdesaan, serta adanya Kontribusi sambungan listrik PLN rumah tangga dari kegiatan CSR dan program pembangnunan PLTS. Pada Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, faktor pendukungnya adalah meningkatnya perusahaan yang mengajukan permohonan peningkatan dan perpanjangan IUP OP. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP mencapai kinerja sangat tinggi karena didukung oleh Kewenangan Provinsi untuk angkutan Sungai; Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi berdasarkan UU 23/2014; Kementerian Perhubungan membuka peluang kerjasama peningkatan kompetensi SDM terkait Keselamatan pelayaran; dan upaya pembuatan regulasi status Pelabuhan Pengumpan Regional dengan penyusunan DLKr dan DLKp.

Faktor pendukung capaian kinerja sangat tinggi atas Persentase kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian bersumber dari adanya upaya Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid 19 secara berkelanjutan; masterplan Jalur Kereta Api Pulau Kalimantan Timur telah disusun pada tahun 2016 dan akan direview terkait dengan adanya IKN; dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional tercantum ruang lingkup program percepatan pembangunan perkeretaapian yaitu pengembangan jaringan kereta api Trans Kalimantan (Balikpapan - Samarinda Tahun 2023) dengan target terbangun tahun 2030; telah ditetapkannya UU IKN sambil menunggu Masterplan Transportasi IKN dimana dalam

pembahasan dinyatakan bahwa backbone transportasi IKN adalah berbasis jalan rel; beberapa Pemerintah Kab/Kota telah memasukan program perkeretaapian dalam masterplan transportasi bahkan Misi Pemkab/Kota; dan penganggaran Pembangunan KA saat ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti KPBU, konsorsium Investor.

Adapun faktor pendukung Persentase Capaian Layanan SDA yaitu adanya persiapan penyiapan lahan, Koordinasi antar Instansi serta dilakukannya sosialisasi terhadap pemilik lahan. Pada aspek penyelenggaraan PSU permukiman bersumber dari dukungan masyarakat dan dari Pemerintah serta adanya Sharing dana dari APBN, APBD kab/kota juga dana lain. Selanjutnya pada persentase Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, kinerja berada pada level sangat tinggi karena mendapat dukungan dari Alokasi Dana, Kinerja Pelaksana Kegiatan/Pekerjaan dan Kinerja Pihak Eksternal (lainnya). Pada ranah kecelakaan lalu lintas (lakalantas), Dinas Perhubungan mendapatkan kinerja sangat tinggi karena mendapat dukungan dari adanya upaya peningkatan sinergitas penyelesaian infrastruktur jalan melalui forum OPD; Tingginya komitmen pimpinan dan para stakeholder terkait upaya program zero ODOL; meningkatnya jumlah unit layanan angkutan umum yang beroperasi; adanya komitmen terhadap keberlanjutan dan kesinambungan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan; serta adanya dukungan terhadap peningkatan prasarana perhubungan darat (Terminal Type B di Kaltim).

Terhadap capaian indikator program tinggi, faktor yang menjadi pendorong adalah dibukanya peluang oleh Badan Geologi Kementerian ESDM kepada pemda untuk mendapat bimbingan teknis penyusunan zona konservasi air tanah.

b) Indikator Kinerja Program yang Tidak Dilaksanakan

Terdapat 1 indikator kinerja program pada misi 3 yang tidak dilaksanakan. Satu indikator kinerja program tersebut adalah penyelenggaraan SPM perumahan. Faktor yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya program tersebut adalah terdapat batasan kewenangan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah yang beresangkutan.

Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, dan Program pada Misi 3 RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328	0,334	93,29%		Sangat Rendah
Sasaran 1. Meningkatnya Konektivitas Dan Pelayanan Infrastruktur Dasar Yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	4.500.000	3.949.683	87,77%		Tinggi
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	307.000.000	313.784.306	102,21%		Sangat Tinggi
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	4	4	100,00%		Sangat Tinggi
	Capaian akses air minum layak (%)	66,53	70,78	106,39%		Sangat Tinggi
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.028,50	14.078,50	100,36%		Sangat Tinggi
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.237,82	1.190,14	103,85%		Sangat Tinggi
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	420	406	103,33%		Sangat Tinggi
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,94	75,44	99,34%		Sangat Tinggi
	Rasio elektrifikasi (%)	91,5	91	99,45%		Sangat Tinggi
	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	71.781	72.010	99,68%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Peruma

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
					han Rakyat	
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan	33%	27,50%	83,33%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tinggi
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian akses limbah domestik layak	82,26%	79,85%	97,07%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	2.785	2.180,2	78,28%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Tinggi
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64%	67,48%	104,39%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	6,08%	6,53%	107,40%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	1.143.533	100,75%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sangat Tinggi

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	35	35	100,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sangat Tinggi
[Program] Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85%	84%	98,82%	Dinas Perhubungan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kabupaten/Kot a yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian	20	20	100,00%	Dinas Perhubungan	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	73,69	74,07	100,52%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur permukiman	100	100	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Perumahan	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3,33%	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Tidak Dilaksanakan
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Capaian akses penanganan sampah domestik	68,38%	62,52%	91,43%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Sangat Tinggi

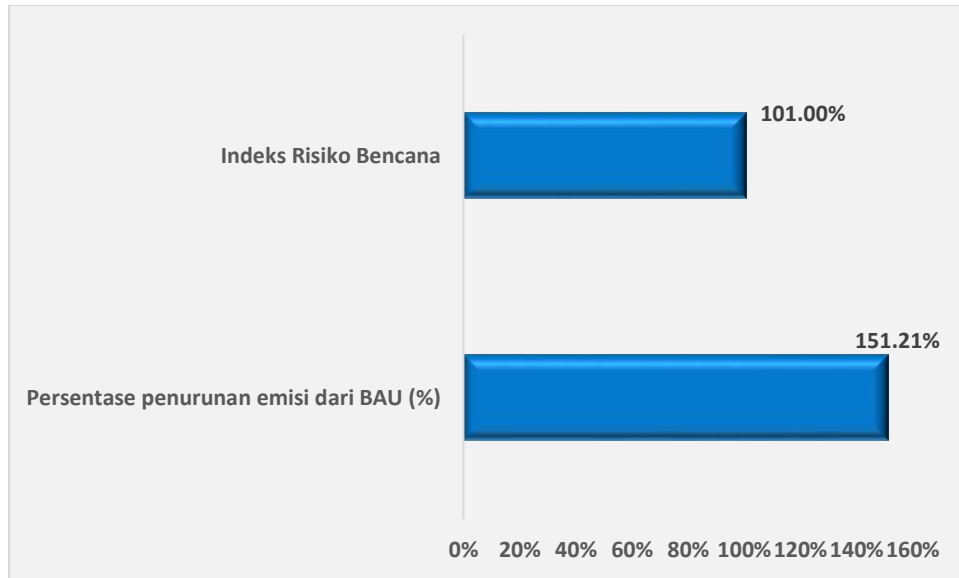
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persampahan Regional					dan Perumahan Rakyat	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Penyelenggaraan PSU permukiman	3,09%	3,09%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75,02	75,20	100,24%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Jumlah Lakalantas	512	409	120,12%	Dinas Perhubungan	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Indeks)	0,87	0,87	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi

5.4. Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

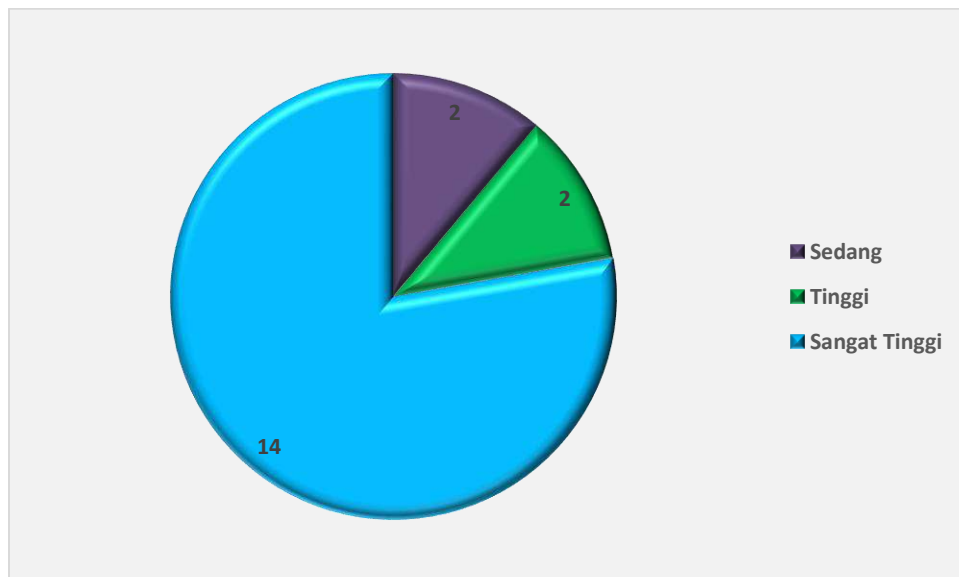
Misi 4 RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Misi tersebut kemudian terjabarkan dalam 1 Tujuan (1 indikator), 2 Sasaran (2 indikator), dan 18 Program (18 indikator). Indikator kinerja pada Tujuan adalah indikator Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan capaian kinerja sangat tinggi (98,83%). Capaian indikator kinerja pada tujuan 5 di misi 4 ini sangat tinggi, dimana kedua sasaran mampu memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja tujuan. Hal ini tergambar pada capaian 2 indikator kinerja pada 2 sasaran yang memiliki kinerja yang sangat tinggi.

Rata-rata capaian kinerja terhadap 2 indikator untuk sasaran pada Misi 4 seluruhnya memiliki kinerja sangat tinggi (100%). Secara umum program yang ada pada di misi 4 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tiap-tiap sasaran. Namun terdapat dua program yang memiliki daya ungkit yang rendah terhadap sasaran. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) dengan indikator kinerja persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi tidak mampu memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja pada sasaran 1 (menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)). Selain itu, program penanganan bencana dengan indikator kinerja korban bencana sosial dan bencana alam yang mendapatkan perlindungan sosial memiliki daya ungkit yang rendah terhadap capaian indikator kinerja pada sasaran 2 (meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana). Lebih lanjut mengenai rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Misi 4

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja terhadap 18 indikator pada 18 program, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 14 indikator (77,78%) dengan capaian kinerja sangat tinggi; 2 indikator (11,11%) dengan capaian kinerja tinggi; dan 2 indikator (11,11%) dengan capaian kinerja sedang. Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud tergambar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.8. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Misi 4

Terdapat 3 OPD yang memiliki program pada misi 4, yaitu: 1) Dinas Lingkungan Hidup; 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 3) Dinas Sosial.

a) Capaian Indikator Kinerja Program Sangat Tinggi dan Tinggi

Indikator kinerja program dengan capaian yang sangat tinggi sebanyak 14 indikator kinerja program atau 77,78% dari keseluruhan indikator kinerja program pada misi 4. Selanjutnya terdapat 2 indikator (11,11%) yang memiliki capaian yang tinggi. 14 indikator kinerja program yang sangat tinggi terdiri dari: 1) Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan; 2) Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH; 3) Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci RPJMD dan RPJPD); 4) Indeks Kualitas Air Sungai (IKA); 5) Indeks Kualitas Udara (IKU); 6) Indeks Kualitas Lahan (IKL); 7) Indeks kualitas air laut (IKAL); 8) Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan; 9) Persentase peningkatan bimbingan teknis pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup; 10) Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah; 11) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana; 12) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana; 13) TMP yang dikelola; 14) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial; 15) Keluarga Miskin Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar; 16) Meningkatnya PMKS yang dibina dilayani dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial; dan 17) Lembaga Sosial yang diberdayakan.

Selanjutnya, 2 indikator kinerja program yang memiliki capaian tinggi adalah: 1) Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada; dan 2) Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya); Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan).

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja program yang sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah ketersediaan anggaran, SDM yang kompeten dan terdapat peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk melaksanakan berbagai program, baik program pada dinas lingkungan hidup, program pada

badan penanggulangan bencana daerah maupun program pada dinas sosial. Terjalannya komunikasi antar OPD teknis dan KLHK (Balai Gakkum Wil. Kalimantan) juga menjadi faktor pendong atas capaian indikator tersebut. Selain itu dukungan dari dinas terkait, pemerintah kab/kota setempat dan perusahaan turut memberi andil terhadap capaian indikator program persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan; dan indikator program persentase peningkatan bimbingan teknis pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup.

b) Capaian Indikator Kinerja Program Sedang, rendah, dan Sangat Rendah

Terdapat 2 indikator program pada misi 4 yang memiliki capaian yang sedang. Kedua indikator tersebut adalah 1) Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi; dan 2) Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial. Beberapa hal penting yang menjadi faktor penghambat atas pencapaian tersebut yaitu jumlah pengawas LH dengan izin yang harus diawasi belum sebanding. Hal ini membuat capaian indikator program menjadi sulit terpenuhi. Tidak hanya itu, faktor ketersediaan dana yang minim juga turut menghambat. Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan tidak sebanding dengan target yang wajib diawasi.

Tabel 5.4. Tujuan, Sasaran, dan Program pada Misi 4 RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95	75,06	98,83%		Sangat Tinggi
Sasaran 1. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75	41,96	151,21%		Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100%	66,67%	66,67%	Dinas Lingkungan Hidup	Sedang
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	50%	50%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci RPJMD dan RPJPD	100%	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	74%	65,24%	88,16%	Dinas Lingkungan Hidup	Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya); 2. Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	0/40 %/0%	0%/31,56 %	78,90%	Dinas Lingkungan Hidup	Tinggi
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	51,92/88,84/82,21/85,4	100,38%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	66,66%	95,00%	142,51%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan bimbingan teknis pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52%	200,00%	384,62%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan	100%	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
	pembangunan dan wilayah					
Sasaran 2. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	152,49	141,42	107,26%		Sangat Tinggi
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67%	66,67%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95%	96,50%	101,58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sangat Tinggi
Program Penanganan Bencana	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1.518	1120	73,78%	Dinas Sosial	Sedang
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP yang dikelola	1	1	100,00%	Dinas Sosial	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90%	90,00%	100,00%	Dinas Sosial	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Keluarga Miskin Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	440	440	100,00%	Dinas Sosial	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PMKS yang dibina dilayani dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169	1169	100,00%	Dinas Sosial	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Sosial	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4	4	100,00%	Dinas Sosial	Sangat Tinggi

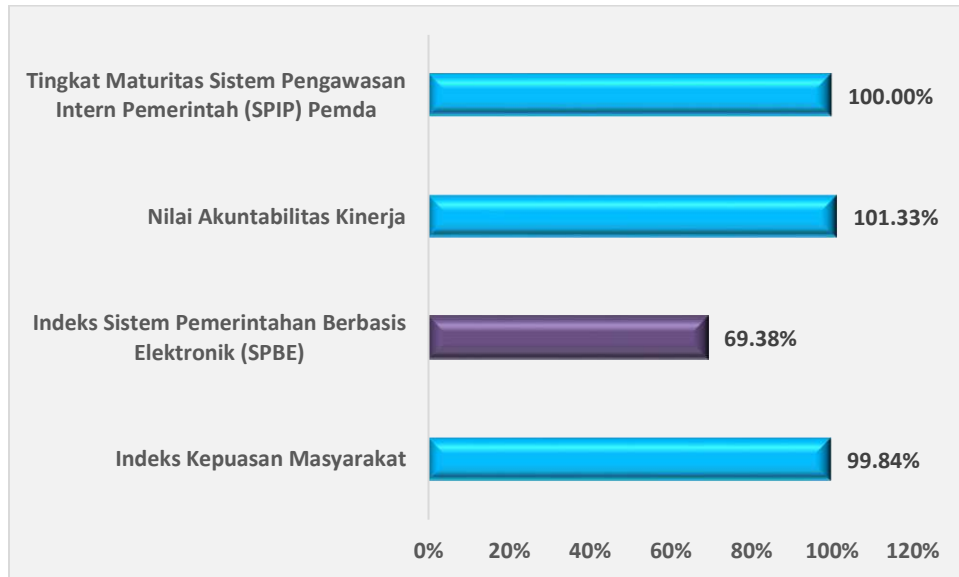
5.5. Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Misi 5 RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Misi tersebut kemudian terjabarkan dalam 1 Tujuan (1 indikator), 3 Sasaran (4 indikator), dan 61 Program (75 indikator). Indikator kinerja pada Tujuan adalah indikator Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik dengan capaian kinerja sangat tinggi (95,92%).

Capaian indikator kinerja mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik pada tujuan 6 yang sangat tinggi karena dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja pada beberapa sasaran yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tersebut, diantaranya pada sasaran 1 (indeks kepuasan masyarakat); sasaran 2 (indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja); dan sasaran 3 (indikator kinerja tingkat maturitas sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP) Pemda), sedangkan indikator kinerja indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada sasaran 1 memiliki daya ungkit yang rendah pada pencapaian tujuan 6 di misi 5.

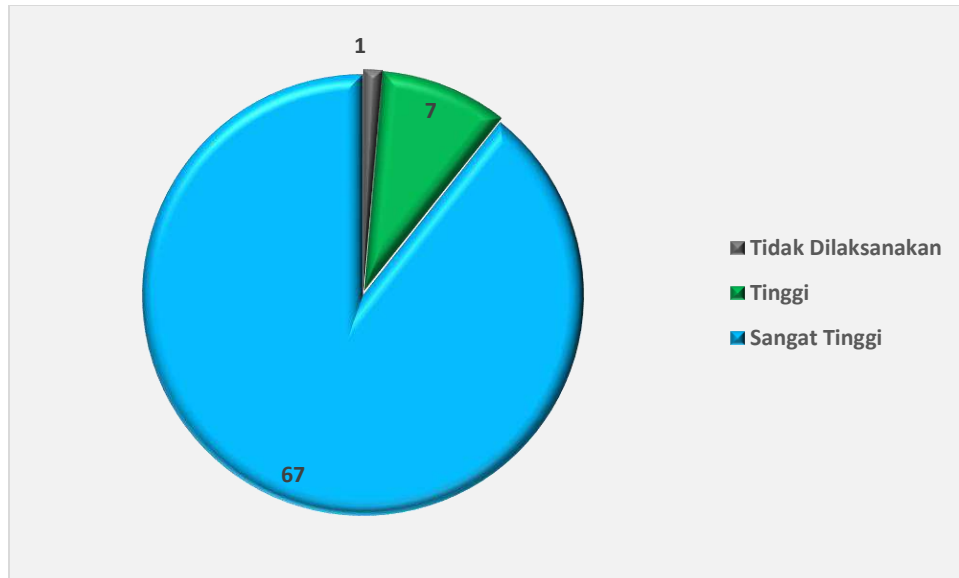
Rata-rata capaian kinerja terhadap 4 indikator untuk sasaran pada Misi 4 meliputi: sebanyak 3 indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi (75%); dan sebanyak 1 indikator dengan capaian kinerja sedang (25%). Secara umum program yang ada pada di misi 5 memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tiap-tiap sasaran. Lebih

lanjut mengenai rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Misi 5

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja terhadap 75 indikator pada 61 program, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 67 indikator (89,33%) dengan capaian kinerja sangat tinggi; 7 indikator (9,33%) dengan capaian kinerja tinggi; dan 1 indikator (1,33%) yang tidak dilaksanakan. Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud tergambar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.10. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Misi 5

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) OPD yang memiliki program yang ada di Misi 5, yaitu: 1) Sekretariat Daerah; 2) Badan Kepegawaian Daerah; 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; 4) Dinas Komunikasi dan Informatika; 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 6) Sekretariat DPRD; 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 9) Satuan Polisi Pamong Praja; 10) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 12) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; 13) Dinas Lingkungan Hidup; 14) Dinas Perhubungan; 15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Kelautan dan Perikanan; 18) Dinas Pariwisata; 19) Dinas Perkebunan; 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 21) Dinas Kehutanan; 22) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 23) Badan Penghubung Provinsi; 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 25) Inspektorat; 26) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan 27) Dinas Pemuda dan Olah Raga.

a) Capaian Indikator Kinerja Program Sangat Tinggi dan Tinggi

Indikator kinerja program dengan capaian yang sangat tinggi sebanyak 67 indikator atau 89,33% dari keseluruhan indikator program pada misi 5. Selanjutnya terdapat 7 indikator (9,33%) yang memiliki capaian yang tinggi. 67 indikator kinerja program yang sangat tinggi terdiri dari: 1) Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan

Pembangunan; 2) Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan; 3) Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); 4) Persentase Berbasis Skor Indeks Merit; 5) Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab); 6) persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi; 7) Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik; 8) Indeks keamanan informasi; 9) Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur; 10) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip; 11) Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD; 12) Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM; 13) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti: 14) Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran; 15) Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung; 16) Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; 17) Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 18) Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah; 19) Persentase Pengendalian Penerapan SPM; 20) Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata (%); 21) Bangunan gedung yang tertata (%); 22) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK); 23) Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK); 24) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 25) Persentase daerah rawan bencana; 26) Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 27) Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN); 28) Persentase Pengembangan Kompetensi ASN; 29) Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 30) Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif; 31) Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur; 32) Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat; 33) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 34) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian; 35) Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan

Urusan Bidang Lingkungan Hidup; 36) Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan; 37) Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo; 38) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM; 39) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal; 40) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan; 41) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata; 42) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan; 43) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan; 44) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan; 45) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 46) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim; 47) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum; 48) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi; 49) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD; 50) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat; 51) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian; 52) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan; 53) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa; 54) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum; 55) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 56) Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi; 57) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA; 58) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan; 59) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepagawaian Daerah; 60) Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda; 61) Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian; 62) Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan; 63) Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip; 64) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum; 65) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat; 66) Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan 67) Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selanjutnya, bahwa 7 indikator kinerja program yang memiliki capaian tinggi adalah: 1) Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim; 2) Persentase

kualitas pengelolaan tertib arsip; 3) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan; 4) Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP; 5) Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga; 6) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah; dan 7) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja program yang sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek). Hal ini juga mencakup pengembangan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, sarana dan prasarana penunjang yang memadai juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan juga menjadi pendorong atas capaian indikator program.

Umumnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berjalan dengan baik serta komitmen tinggi pimpinan dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, dan program RPJMD memberi pengaruh terhadap capaian indikator kinerja program sangat tinggi dan tinggi. Tidak hanya itu, hadirnya produk legislasi yang memadai sebagai landasan pelaksanaan kegiatanpun memberi pengaruh positif terhadap capaian indikator program.

Pelaksanaan forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Provinsi Kalimantan Timur, turut mempengaruhi peningkatan persentase elemen data statistik bidang ekonomi, sosial, sumber daya alam dan infrastruktur, kendatipun SDI ini masih dalam tahap awal, diakrenakan masih menunggu landasan hukumnya melalui Peraturan Gubernur.

Peningkatan kapasitas survei masyarakat menjadi faktor pendorong lainnya, dimana pengisian survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah didukung oleh sistem yang memadai. Dalam konteks yang lain, penunjukkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai IKN (Ibukota Negara) menarik perhatian Pemerintah Pusat untuk lebih banyak kearah kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi faktor pendorong capaian indikator program.

Tidak hanya itu, ketersediaan media online sebagai sarana pelaksanaan pendidikan politik, dan komitmen partai politik melaksanakan kaderisasi anggota membuka ruang

peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat Kalimantan Timur yang pada akhirnya membuat capaian indikator program tersebut menjadi sangat baik.

Adanya peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, yang sangat dipengaruhi oleh identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui Local Value Chain (LVC) dan Peta Jalan (Roadmap) pengendalian Inflasi menjadi pedoman dalam pengendalian inflasi daerah. Hal ini juga ditopang oleh optimisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait (stakeholder) melalui integrasi program yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi.

Pemanfaatan aplikasi *Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)* yang membantu menjaga keselarasan proses perencanaan dan penganggaran, dan hal ini diperkuat dengan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, yang menimbulkan atensi dan kehati-hatian lebih dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

Terbentuknya Satgas SPIP Pemprov dan Perangkat Daerah, termasuk kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina, serta ketersediaan Sistem Informasi Teknologi, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan; dan Pendampingan dan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah, adanya survey atas Penilaian Integritas dilakukan yang KPK-RI bekerjasama dengan BPS dan Pihak Ketiga, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemda dan Unit Kerja, pelaporan yang dilaksanakan melalui Aplikasi E-LHKPN-KPK dan Aplikasi SIHARKA Menpan-RI, dan terbentuknya Satgas Saberpongli dan Kerjasama dengan APH.

Terhadap capaian indikator tinggi, beberapa faktor yang mendorong capaian indikator tersebut diantaranya adalah dilakukannya berbagai kegiatan yang mendorong intensitas koordinasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti kegiatan Coffee Morning, kegiatan gerakan kemitraan bersama organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024, dan kegiatan mewujudkan kaltim berdaulat melalui jalin kemitraan untuk membina serta meningkatkan peran ormas dalam pembangunan di kaltim.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Prov.kaltim secara intensif melakukan pendampingan terhadap Perangkat daerah/LKD dengan melakukan kegiatan pembinaan dan advokasi mengenai pengelolaan kearsipan untuk mewujudkan Sadar dan Tertib Arsip di Kalimantan Timur. Tertibnya Administrasi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Provinsi Kalimantan Timur juga turut memberi pengaruh positif terhadap capaian indikator program. Tidak hanya itu, konsistensi pengelola kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan, dan realisasi fisik kegiatan sesuai dengan target menjadi faktor pendorong lainnya.

b) Indikator Kinerja Program yang Tidak Dilaksanakan

Indikator kinerja program di misi 5 terdapat 1 indikator (1,33%) indikator yang tidak dilaksanakan. Indikator tersebut yaitu persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum. Faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya indikator program tersebut adalah keterbatasan SDM ASN-PNS, belum maksimalnya pelaksanaan analisis beban kerja, serta sistem regulasi perencanaan dan penganggaran yang sering berubah-ubah.

Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, dan Program pada Misi 5 RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,00)	68,1*	95,92%		Sangat Tinggi
Sasaran 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,3	82,57	100,33%		Sangat Tinggi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	2,22	69,38%		Sedang
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	70%	75,00%	107,14%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100%	100%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3	3	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100%	97%	97,00%	Badan Kepegawaian Daerah	Sangat Tinggi
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	60	58,33	97,22%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	70%	92,00%	131,43%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	75%	93,88%	125,17%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi	10	10	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50%	96%	192,54%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	100%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sangat Tinggi
Sasaran 2. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,65	77,67	101,33%		Sangat Tinggi
Program Administrasi Umum	Persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum	75%	0%	0,00%	Sekretariat Daerah	Tidak Dilaksanakan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	80	78	97,50%	Sekretariat DPRD	Sangat Tinggi
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100%	100%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	85%	85%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	94,02%	110,61%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sangat Tinggi
Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	80%	94,53%	118,16%	Badan Penghubung Provinsi	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	27,25%	22,07%	80,99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tinggi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100%	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sangat Tinggi
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85%	85%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	85%	85%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Pengendalian Penerapan SPM	100%	100%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata (%)	87,18	87,18	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan gedung yang tertata (%)	78,82	78,82	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77%	75,67%	98,27%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	92%	92%	100,00%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71%	83,44%	117,52%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase daerah rawan bencana	90%	93%	96,67%	Satuan Polisi Pamong Praja	Sangat Tinggi
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	45%	43%	95,56%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	27%	27%	100,00%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Arsip	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100%	90%	90,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Tinggi
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	20%	25%	125,00%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sangat Tinggi
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,00%	5,79%	96,50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	90%	93%	103,33%	Satuan Polisi Pamong Praja	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33,66%	29,70%	111,76%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	74,50%	74,50%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	82,68%	82,68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	95%	82,75%	87,11%	Satuan Polisi Pamong Praja	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97%	97%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	80	80	100,00%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	85,3	84,08	98,57%	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	95,52%	95,52%	Dinas Perhubungan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100%	92,13%	92,13%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	88%	81,02%	92,07%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal	85%	89,69%	105,52%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga	100%	88,83%	88,83%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	82%	82,00%	100,00%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95%	88,05%	92,68%	Dinas Pariwisata	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	86%	88,81%	103,27%	Dinas Perkebunan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	80%	83,24%	104,05%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82%	82%	100,00%	Dinas Kehutanan	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	82%	82%	100,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	83	85,24	102,70%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum	82	85	103,66%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	82	84,58	103,15%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD	82	87,52	106,73%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	82	82,998	101,22%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	82	85,5	104,27%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	82	77	93,90%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	82	82,07	100,09%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	82	79,81	97,33%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan	Persentase pelayanan publik pada tugas dan	80%	93,00%	116,25%	Sekretariat DPRD	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pemerintahan Daerah Provinsi	fungsi Sekretariat DPRD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	95%	90,07%	94,81%	Badan Penghubung Provinsi	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA	86,00%	86,87%	101,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	88;100 %; %	83;58,93	76,62%	Badan Pendapatan Daerah	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	80%	80,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kependidikan Daerah	90%	83,91%	93,23%	Badan Kepegawaian Daerah	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM	100%	87,57%	87,57%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	95%	95%	100,00%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	90%	100%	111,11%	Sekretariat Daerah	Sangat Tinggi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	75%	78,50%	104,67%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100%	200%	200,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sangat Tinggi
Sasaran 3. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	100,00%		Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	89,00%	90,00%	101,12%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	95%	100%	105,26%	Inspektorat	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85%	90%	105,88%	Inspektorat	Sangat Tinggi

Uraian	Indikator	Target Indikator			OPD	Status
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	85%	82,80%	97,41%	Inspektorat	Sangat Tinggi

BAB VI. KONSISTENSI KINERJA PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023

6.1. Konsistensi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Terhadap Dokumen RPJMD Kaltim 2019-2023

Konsistensi berbagai dokumen rencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap dokumen RPJMD adalah satu dari beberapa hal penting yang cukup memberi pengaruh terhadap pencapaian penyelenggaraan RPJMD. Semakin konsisten dokumen RPJMD dipedomani dan dijabarkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan daerah, semakin baik sekiranya capaian RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi sebaliknya, semakin inkonsisten RPJMD dipedomani dan dijabarkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan daerah bukan tidak mungkin akan membawa dampak negatif terhadap capaian RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun disadari bahwa konsistensi tersebut adalah satu hal yang penting, namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih saja ditemukan berbagai bentuk inkonsistensi dokumen rencana pembangunan daerah terhadap dokumen RPJMD. Hal ini pula yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ke 3, diketahui bahwa terdapat sebanyak 159 program dalam dokumen Renstra dan 7 program dalam Dokumen Renja yang dapat dinilai inkonsisten dengan dokumen RPJMD. Tidak hanya itu, diketahui pula bahwa terdapat 8 program dalam dokumen RPJMD yang justru tidak dialokasikan dalam APBD. Berikut adalah tabel konsistensi-inkonsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dengan RPJMD:

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Perangkat Daerah	Jumlah Program					Konsistensi Program							In-Konsistensi Program						
	RPJMD	RENSTRA	RKPD	RENJA	APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RENJA	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD	RENSTRA - APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RENJA	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD	RENSTRA - APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1	8	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	1	1	7	0	0	7
Dinas Kesehatan	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1	0	0	1
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	15	11	15	15	15	11	14	14	10	15	15	10	4	2	2	6	0	0	6
Satuan Polisi Pamong Praja	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Dinas Sosial	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	0	8	8	8	0	8	8	0	8	8	0	9	1	1	8	0	0	8
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	0	12	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	0	0	12	0	0	12
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	0	8	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	0	0	8	0	0	8
Dinas Lingkungan Hidup	11	10	11	11	11	10	11	11	10	11	11	10	1	0	0	1	0	0	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	0	5
Dinas Perhubungan	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	2	0	0	2	0	0	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	0	5
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15	0	13	13	13	0	13	12	0	13	12	0	15	2	3	13	0	2	13

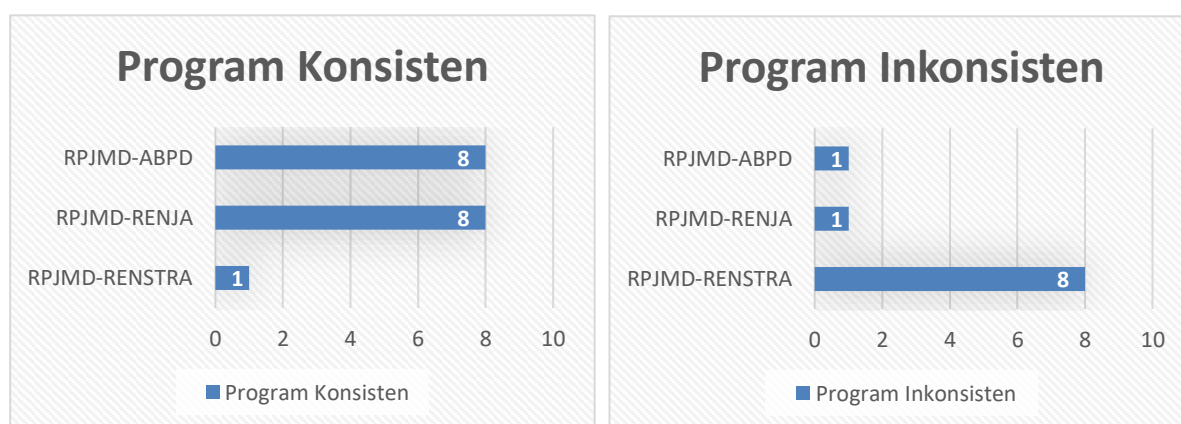
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	4	0	0	4
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	1	4	4	4	0	4	4	0	4	4	0	5	0	0	5	0	0	5
Dinas Kelautan Dan Perikanan	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Dinas Pariwisata	5	0	4	4	4	0	4	4	0	4	4	0	5	1	1	4	0	0	4
Dinas Perkebunan	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	6
Dinas Kehutanan	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1	0	0	1
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	0	5
Sekretariat Daerah	8	0	8	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	0	0	8	0	0	8
Sekretariat DPRD	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2
Badan Penghubung Provinsi	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2
Inspektorat	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3
Badan Pendapatan Daerah	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3
Badan Kepegawaian Daerah	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2
Badan Penelitian dan Pengembangan	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2
Total	192	35	187	187	187	34	186	185	33	187	186	33	159	7	8	156	0	2	156

Lebih lanjut mengenai konsistensi-inkonsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen RPJMD dijabarkan berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

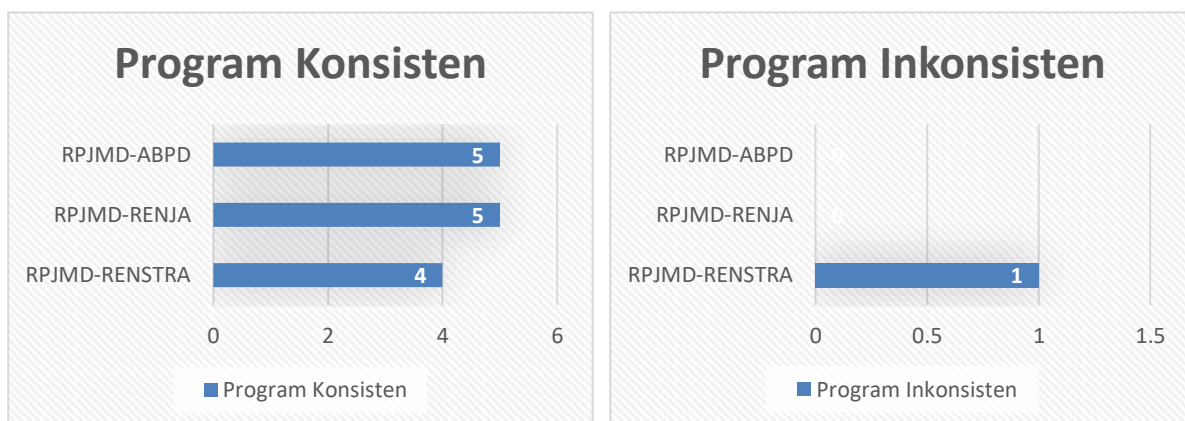
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 9 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam RPJMD, 1 program dalam Renstra, 8 program dalam Renja, dan 8 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 8 program pada Renstra dan 1 program pada Renja yang tidak konsisten terhadap RPJMD. Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 2 program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

2) Dinas Kesehatan

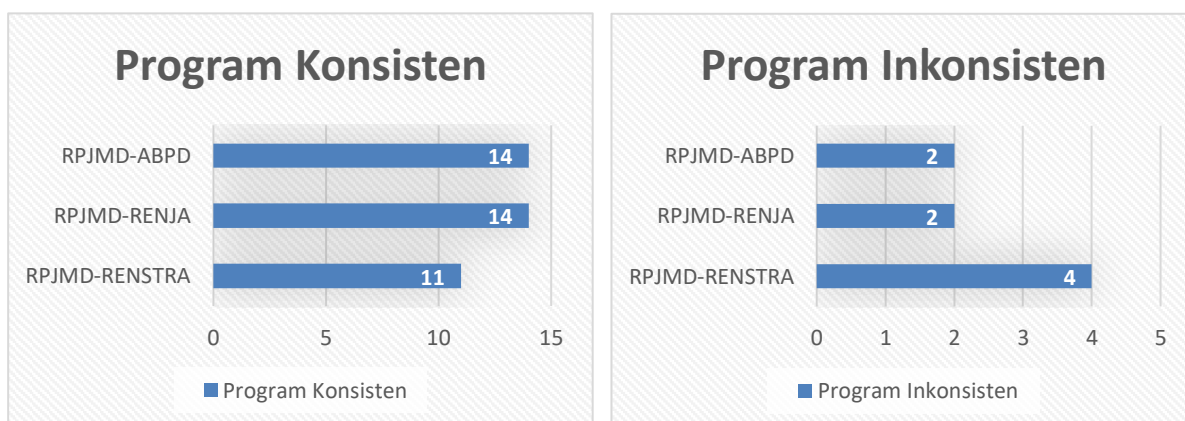
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Kesehatan dalam RPJMD, 4 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja, dan 5 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 1 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 15 program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam RPJMD, 14 program dalam Renstra, 15 program dalam Renja, dan 15 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:

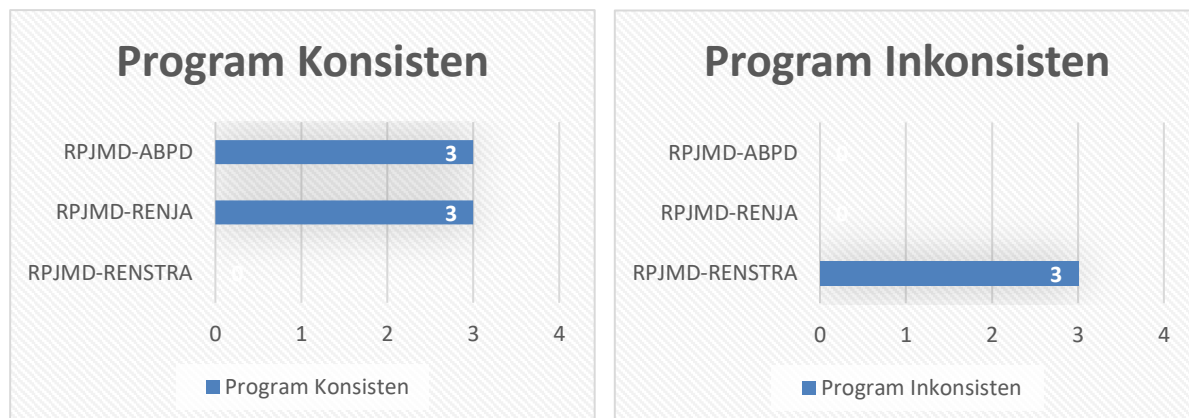


Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 4 program pada Renstra dan 2 program pada Renja yang tidak konsisten terhadap RPJMD. Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 2 program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

4) Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 3 program Satuan Pamong Praja dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 3 program

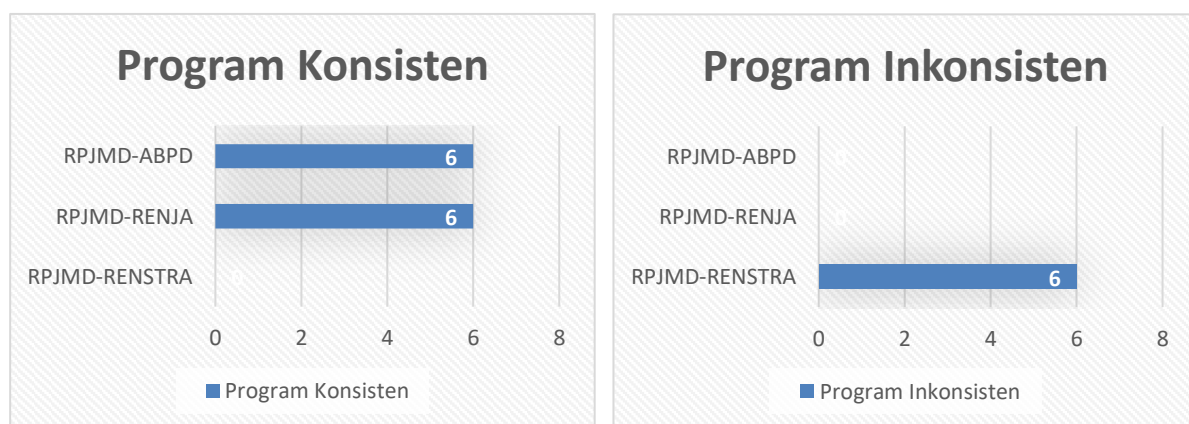
dalam Renja, dan 3 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:

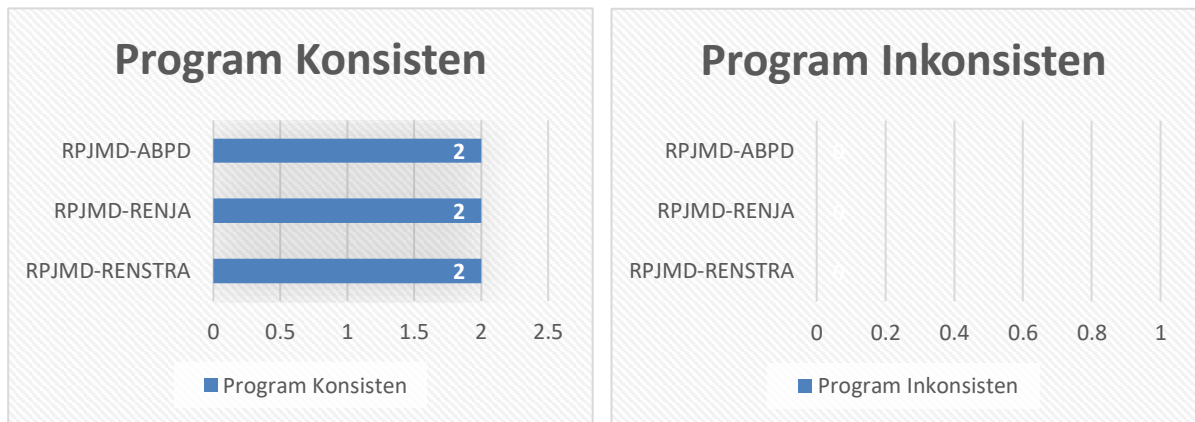


Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam RPJMD, 2 program dalam

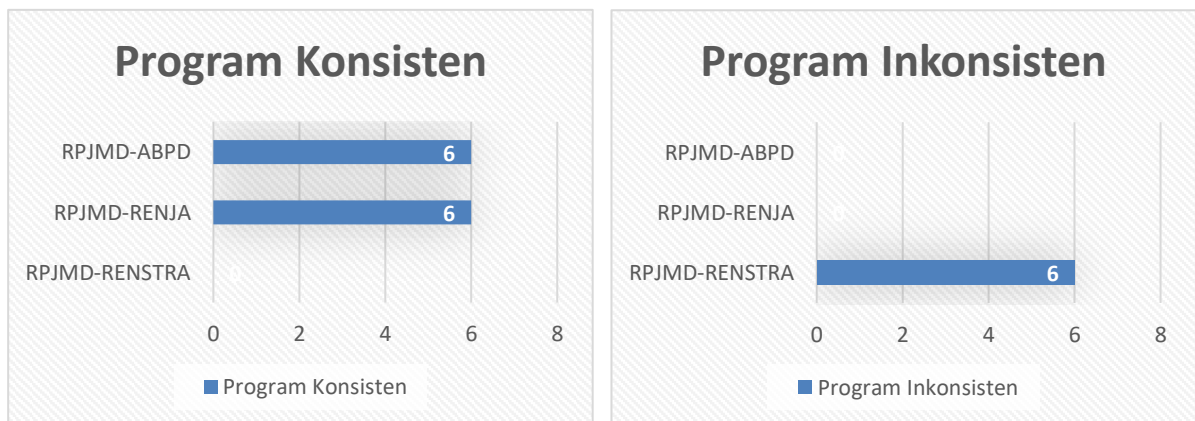
Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa semua program pada Renstra dan Renja konsisten terhadap RPJMD. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa semua program pada RPJMD di alokasikan dalam APBD.

7) Dinas Sosial

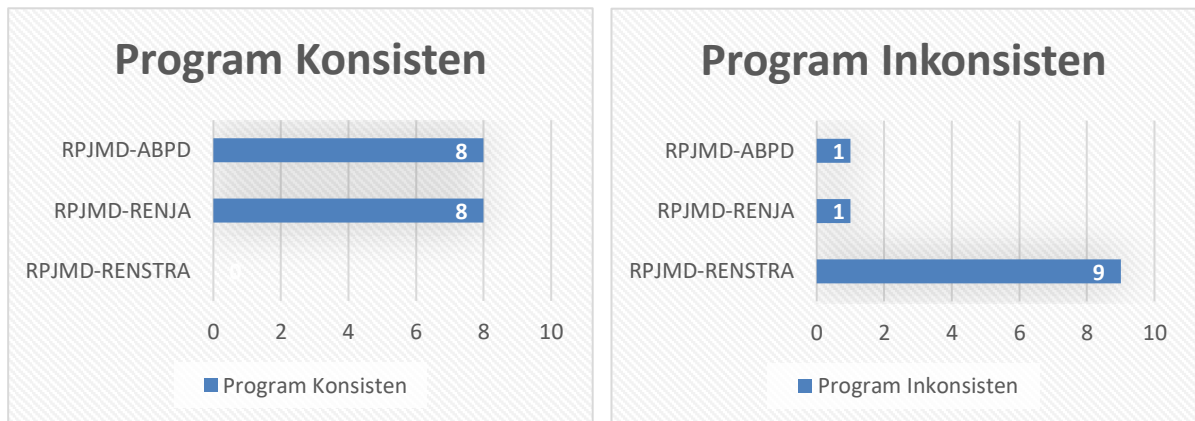
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Dinas Sosial dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

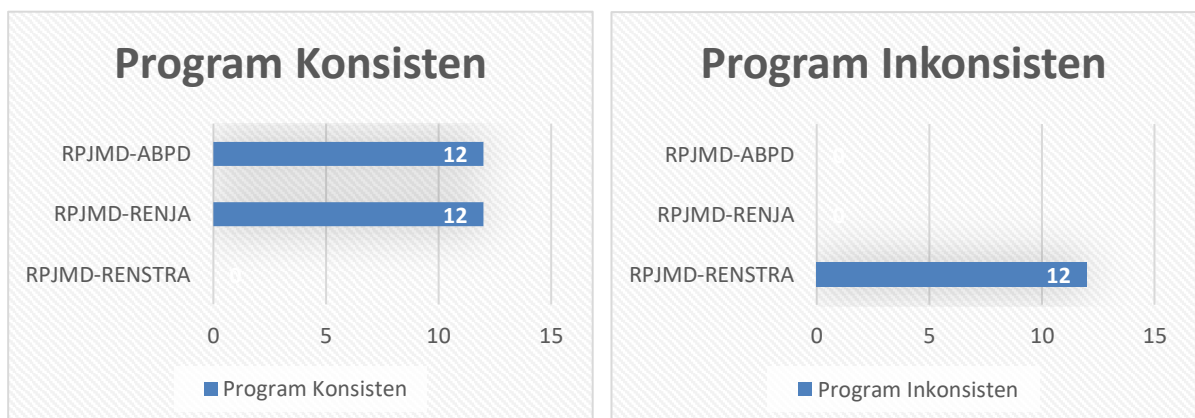
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 9 program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 8 program dalam Renja, dan 8 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 9 program pada Renstra dan 1 program pada Renja yang tidak konsisten terhadap RPJMD. Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 1 program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

9) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

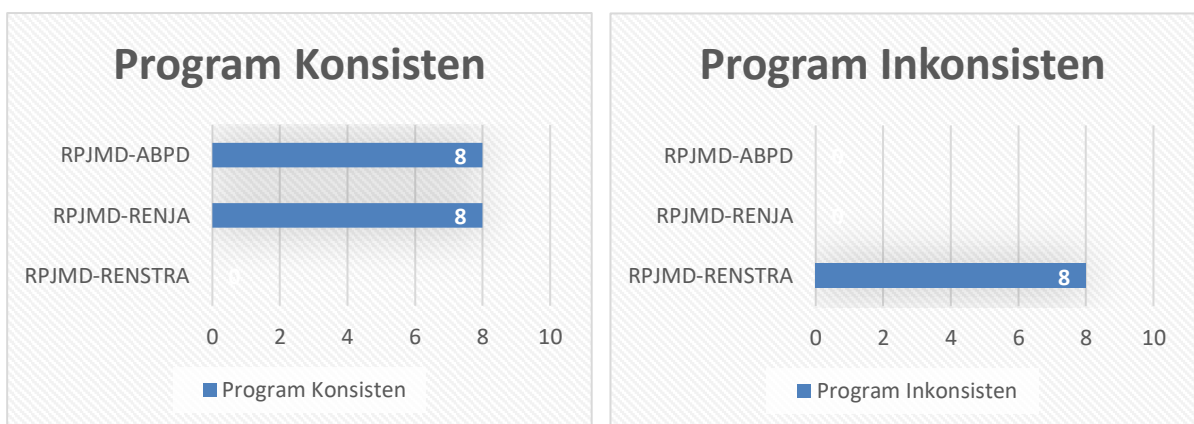
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 12 program Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 12 program dalam Renja, dan 12 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 12 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

10) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

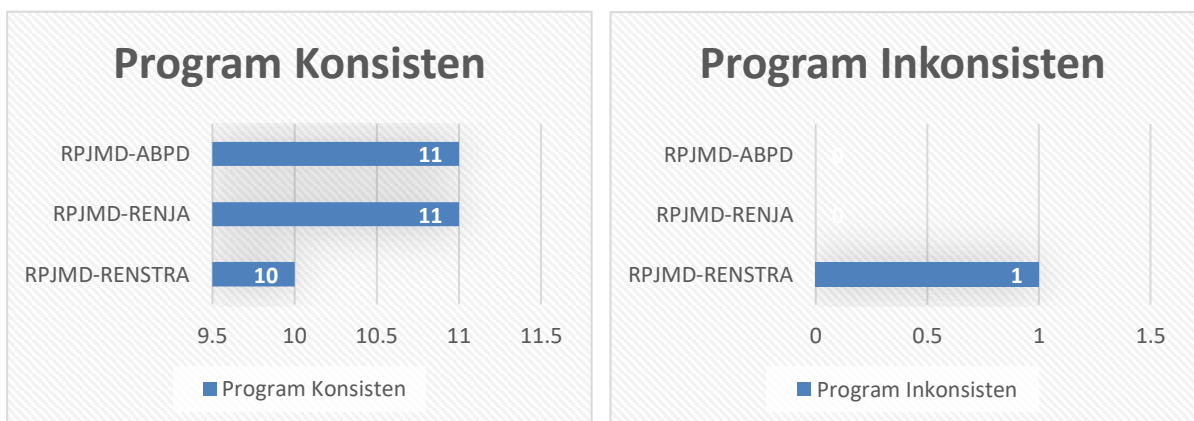
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 8 program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 8 program dalam Renja, dan 8 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 8 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

11) Dinas Lingkungan Hidup

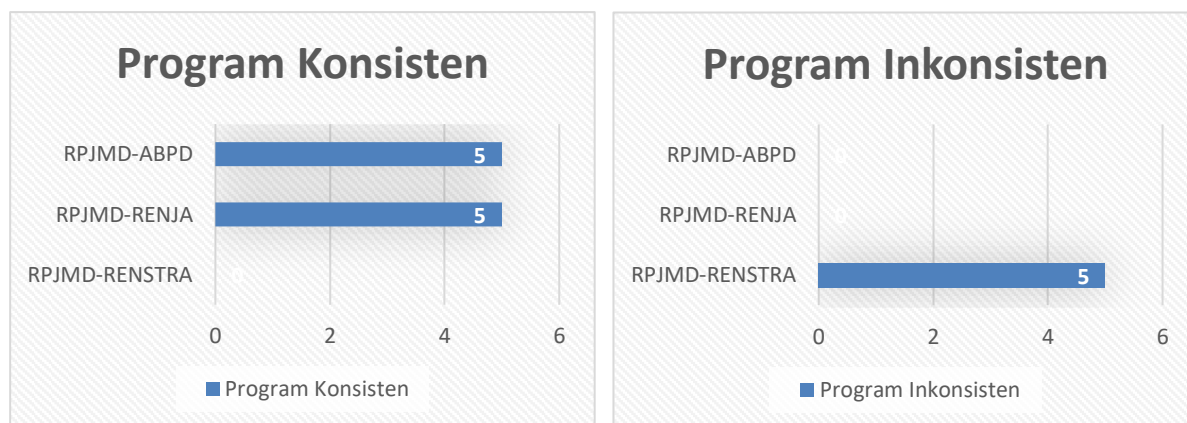
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 11 program Dinas Lingkungan Hidup dalam RPJMD, 10 program dalam Renstra, 11 program dalam Renja, dan 11 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 1 program pada Renstra tidak konsisten terhadap RPJMD.

12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

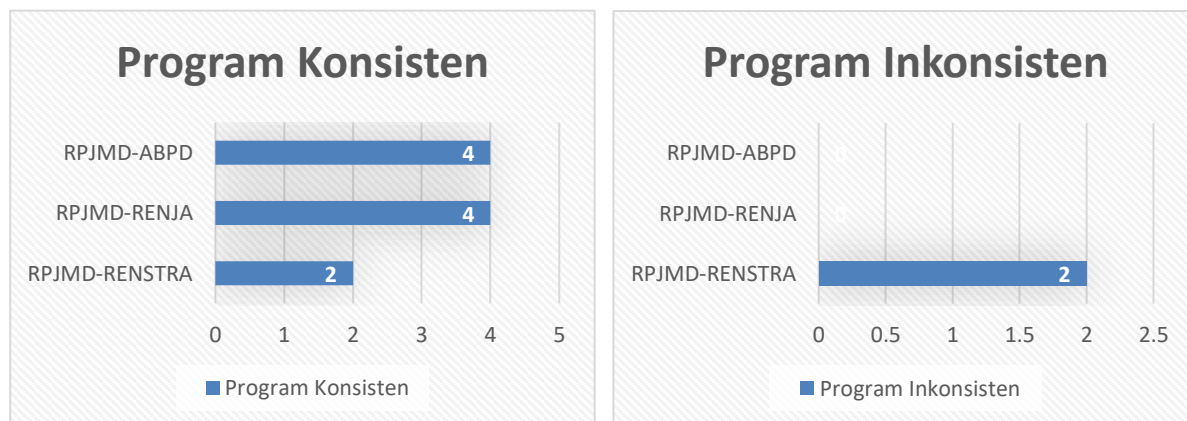
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Lingkungan Hidup dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja, dan 5 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 5 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

13) Dinas Perhubungan

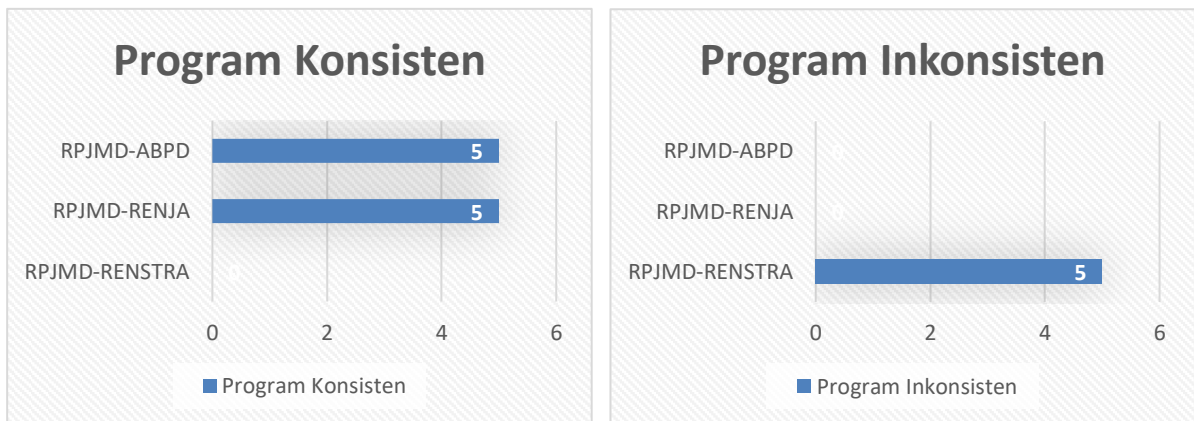
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 4 program Dinas Perhubungan dalam RPJMD, 2 program dalam Renstra, 4 program dalam Renja, dan 4 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

14) Dinas Komunikasi dan Informatika

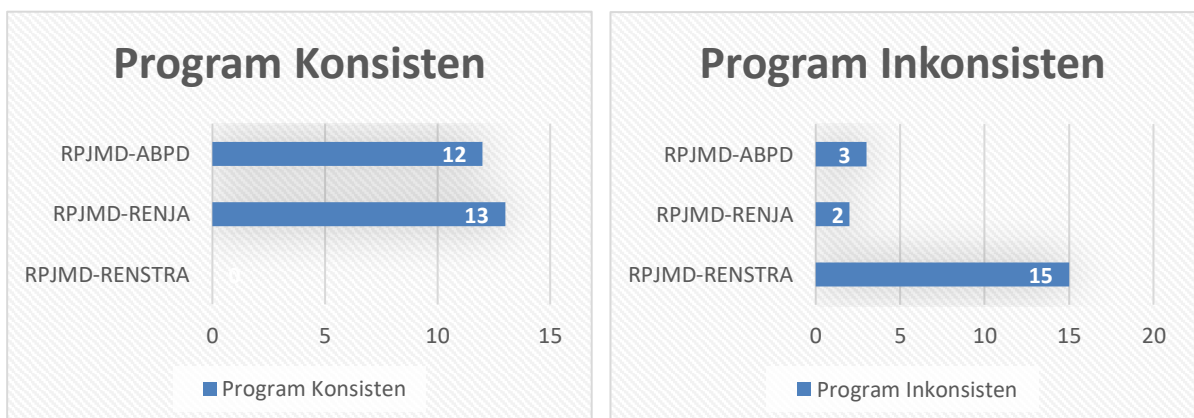
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Perhubungan dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja, dan 5 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 5 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

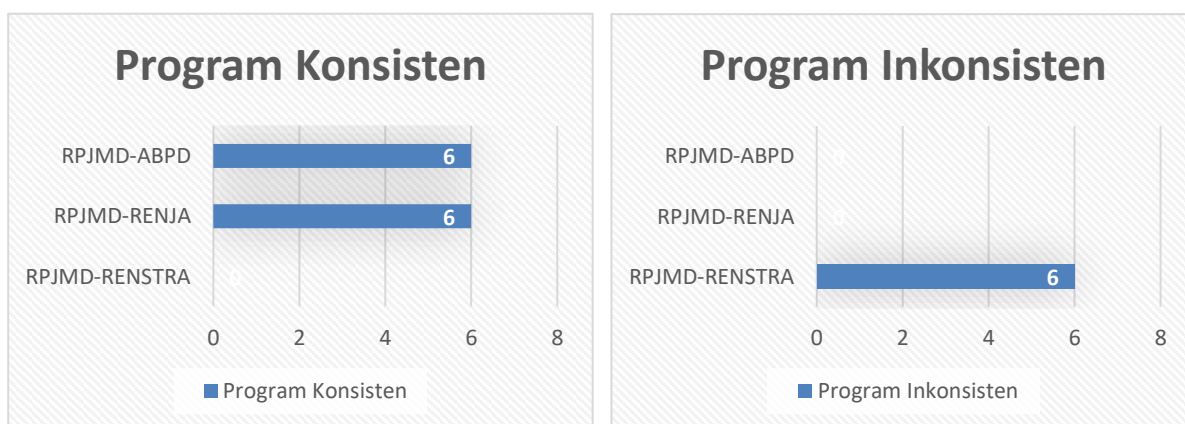
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 15 program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 13 program dalam Renja, dan 13 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 15 program pada Renstra dan 2 program pada Renja yang tidak konsisten terhadap RPJMD. Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 3 program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

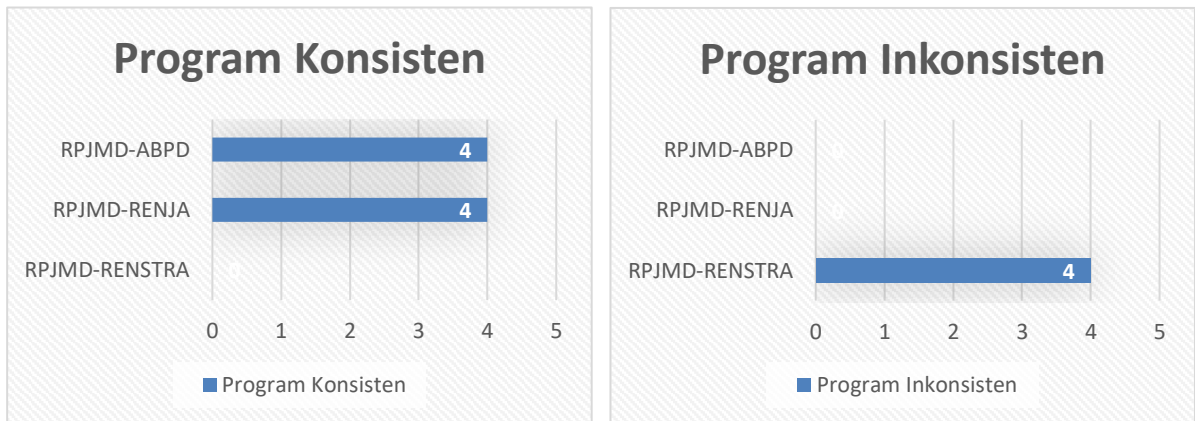
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

17) Dinas Pemuda dan Olah Raga

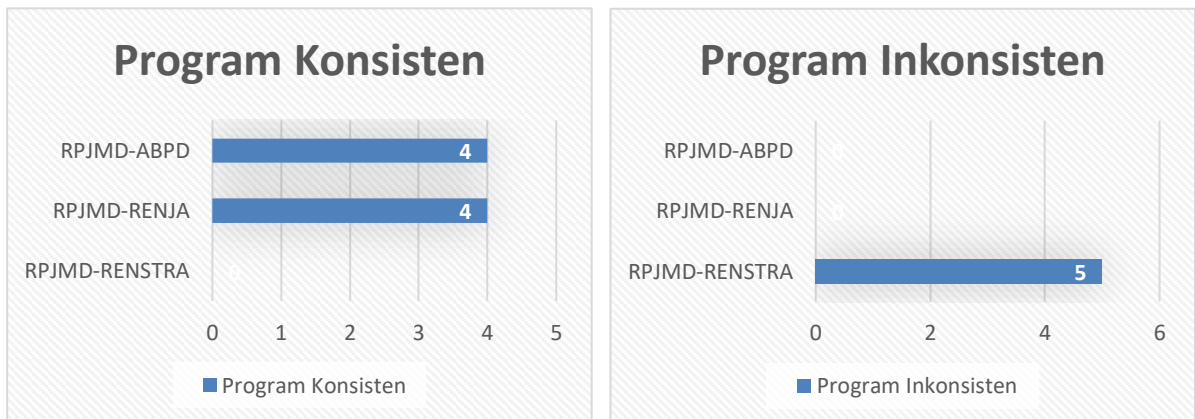
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 4 program Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 4 program dalam Renja, dan 4 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

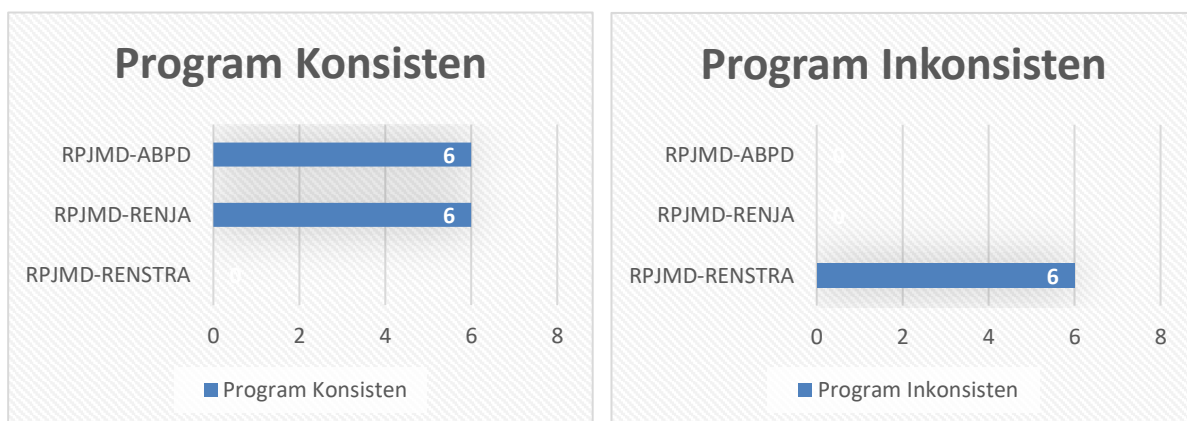
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 4 program Dinas Peprpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam RPJMD, 1 program dalam Renstra, 4 program dalam Renja, dan 4 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 5 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

19) Dinas Kelautan Dan Perikanan

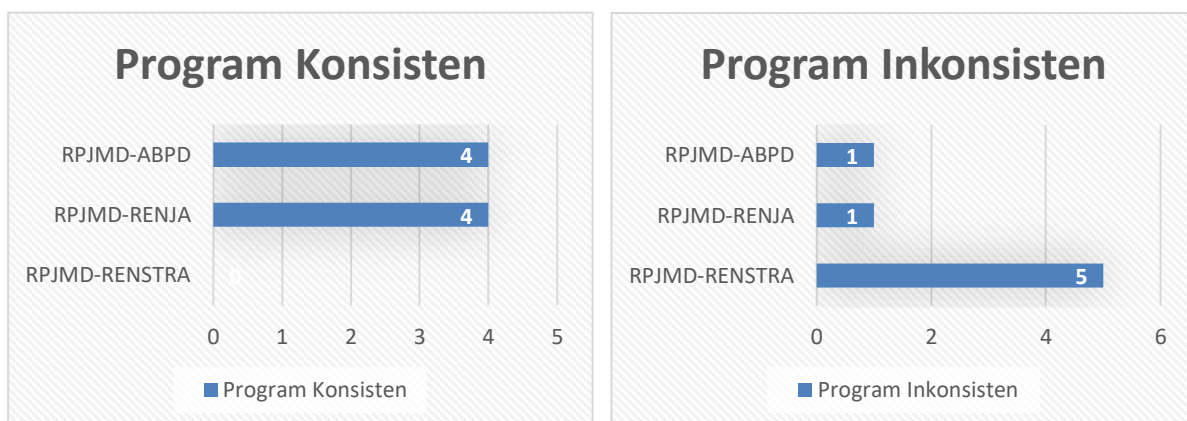
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Dinas Kelautan dan Perikanan dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

20) Dinas Pariwisata

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Pariwisata dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 4 program dalam Renja, dan 4 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:

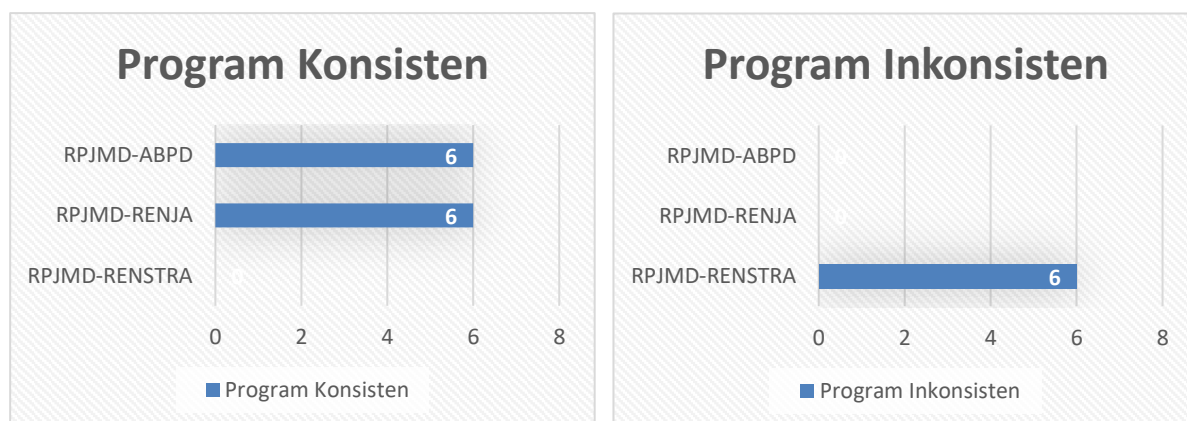


Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 5 program pada Renstra dan 1 program pada Renja yang tidak konsisten terhadap RPJMD. Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 1 program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

21) Dinas Perkebunan

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Dinas Perkebunan dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program

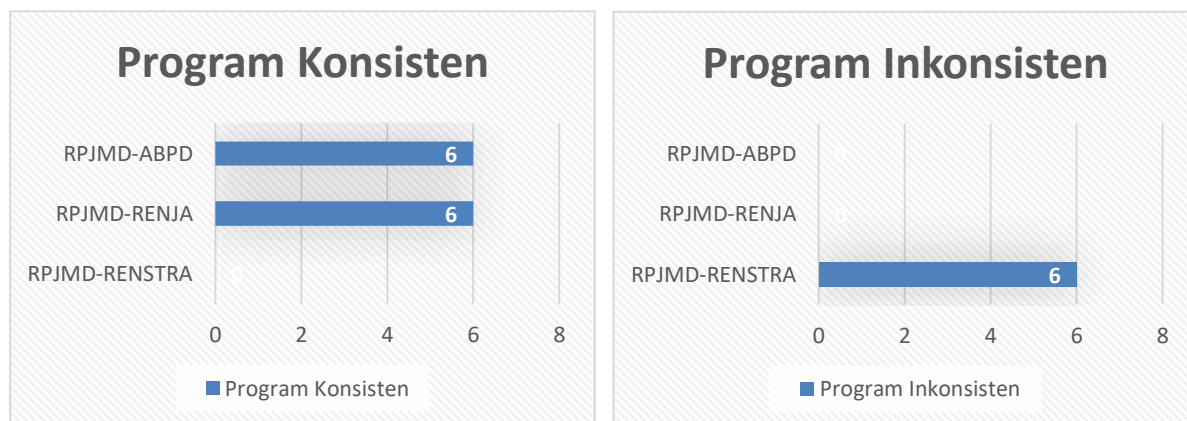
dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

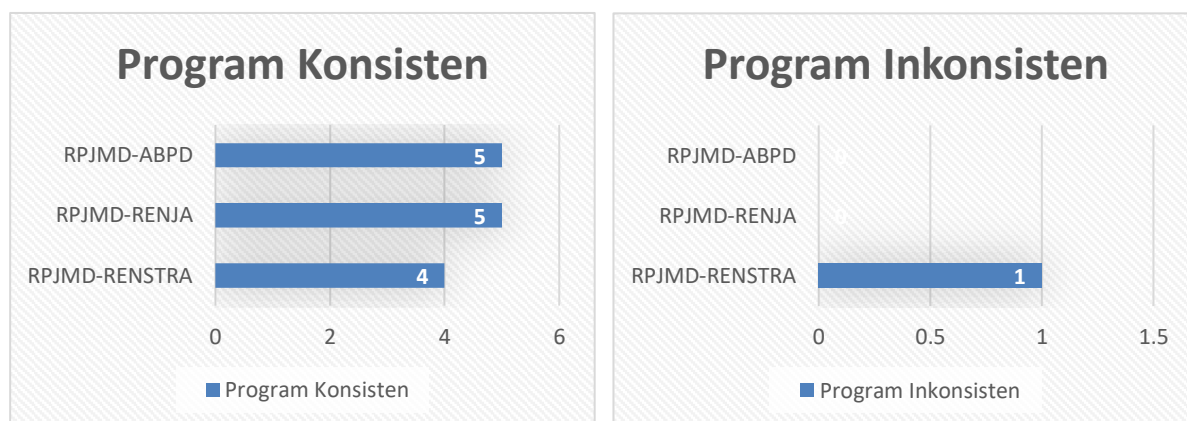
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 6 program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 6 program dalam Renja, dan 6 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

23) Dinas Kehutanan

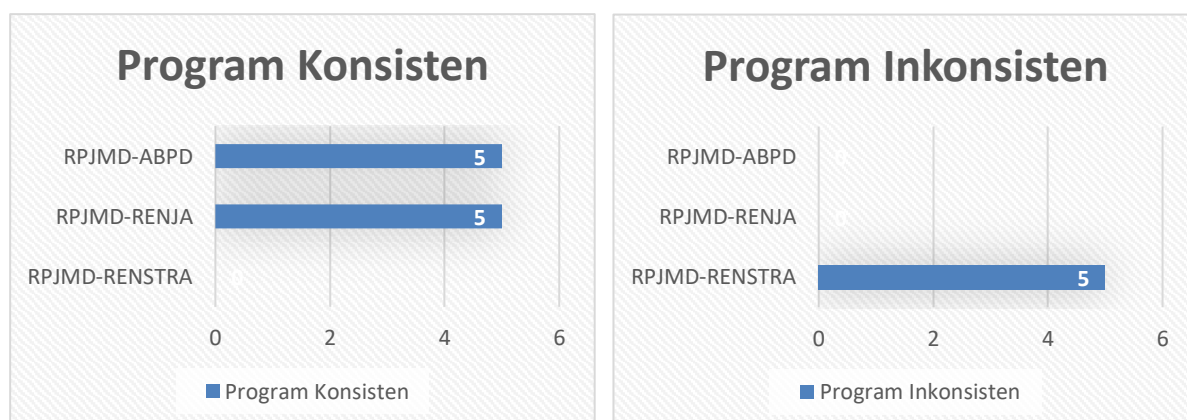
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Kehutanan dalam RPJMD, 4 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja, dan 5 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 1 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

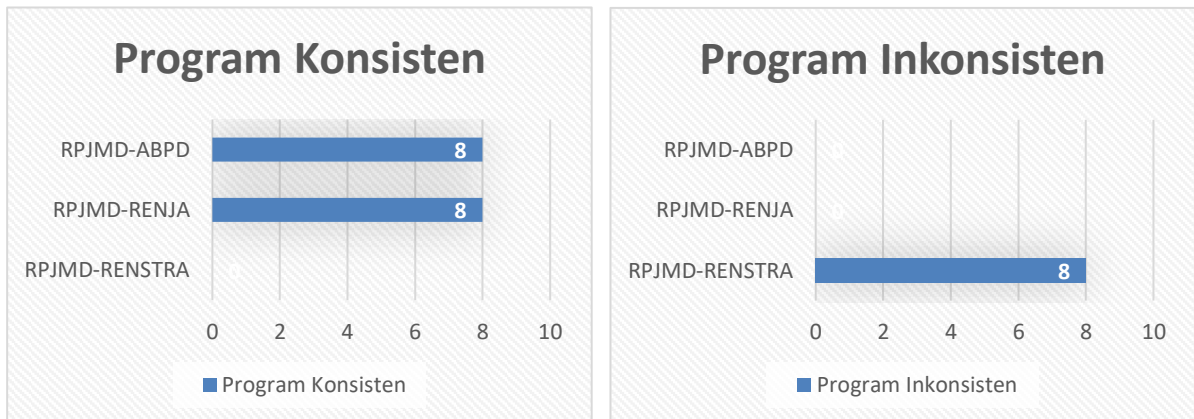
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 5 program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja, dan 5 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 5 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

25) Sekretariat Daerah

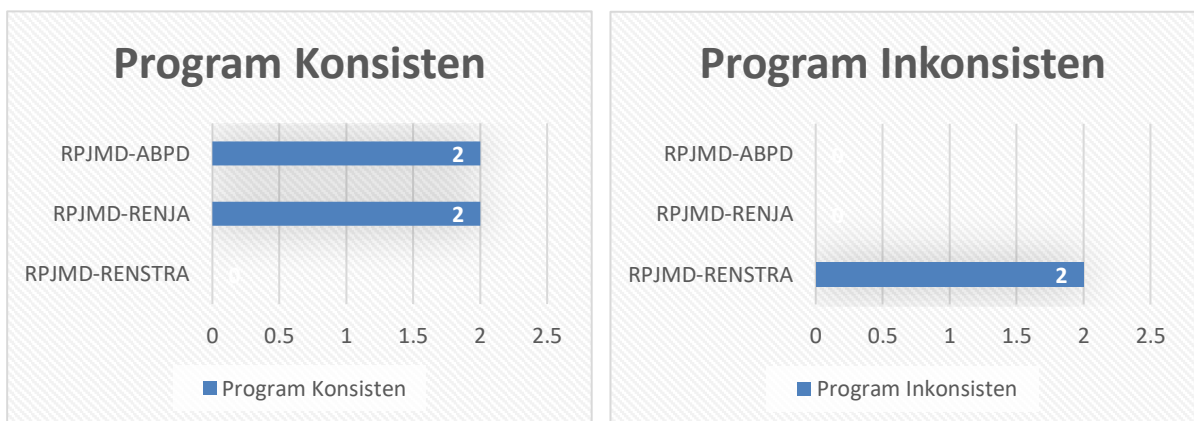
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 8 program Sekretariat Daerah dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 8 program dalam Renja, dan 8 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 8 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

26) Sekretariat DPRD

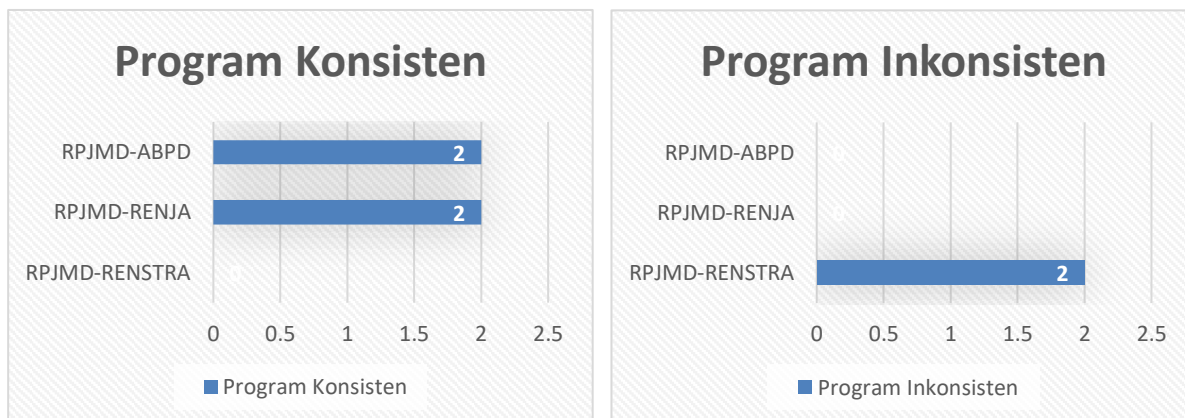
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Sekretariat DPRD dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

27) Badan Penghubung Provinsi

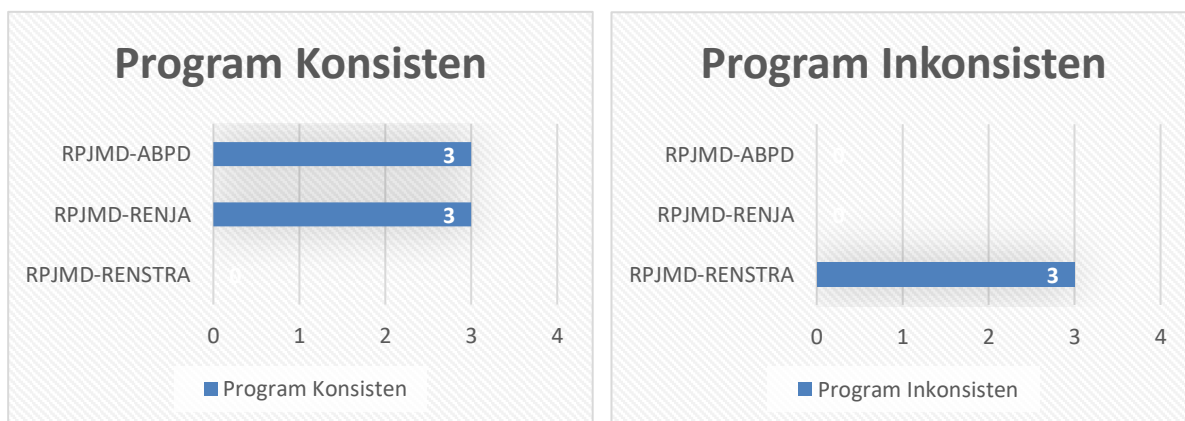
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Badan Penghubung Provinsi dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

28) Inspektorat

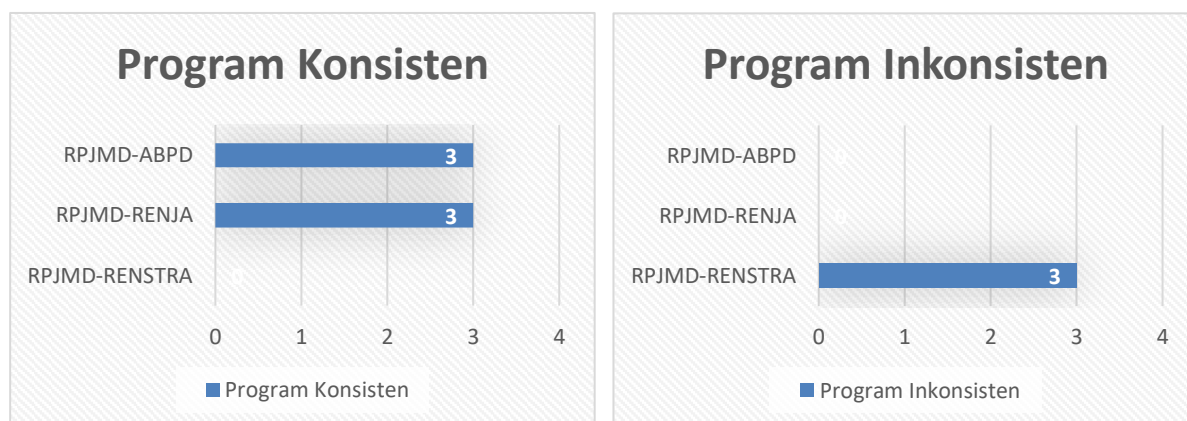
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 3 program Inspektorat dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 3 program dalam Renja, dan 3 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

29) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

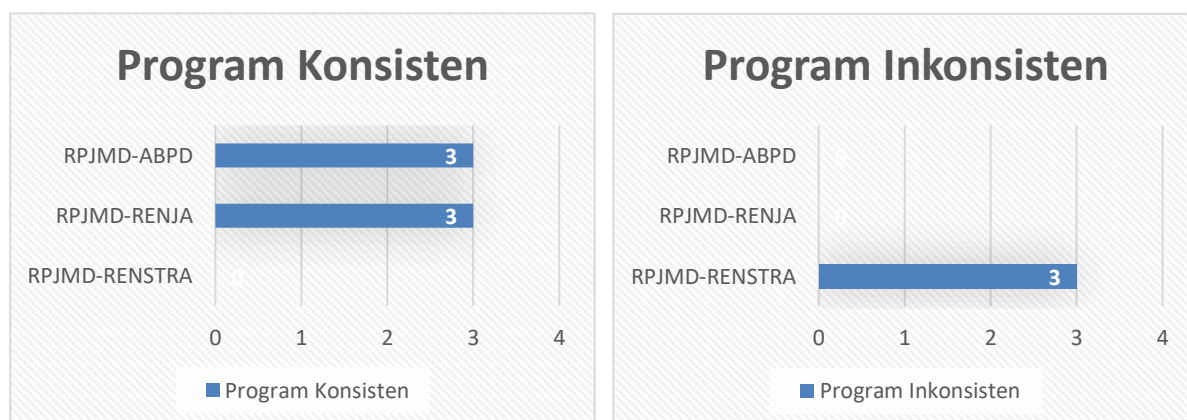
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 3 program Inspektorat dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 3 program dalam Renja, dan 3 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

30) Badan Pendapatan Daerah

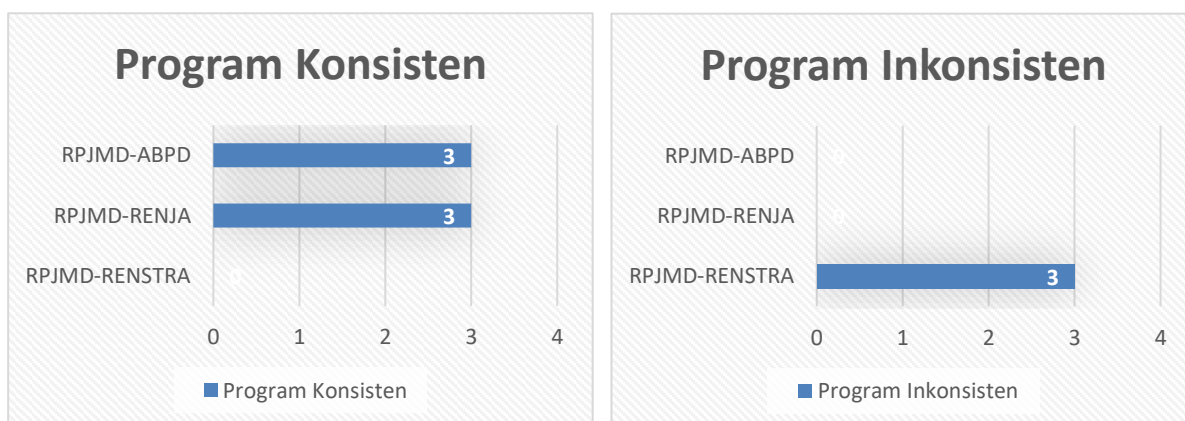
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 3 program Badan Pendapatan Daerah dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 3 program dalam Renja, dan 3 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

31) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

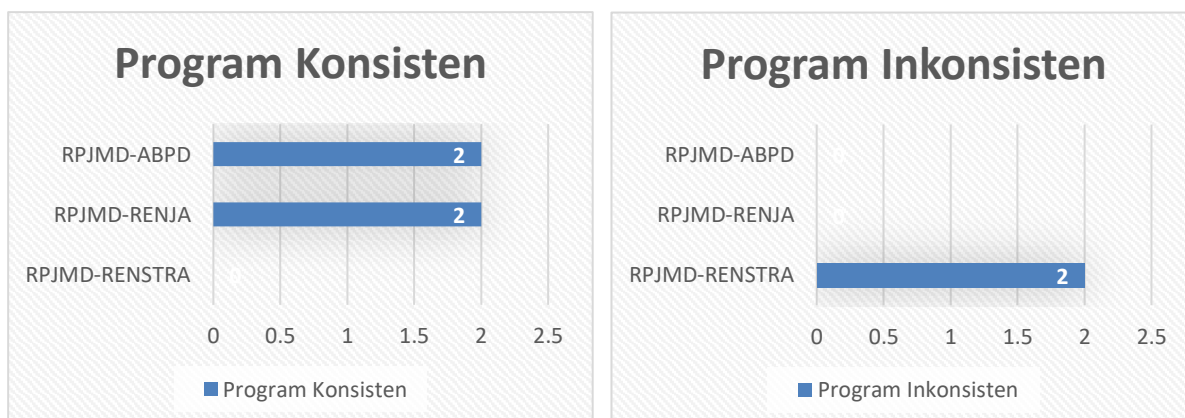
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 3 program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 3 program dalam Renja, dan 3 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

32) Badan Kepegawaian Daerah

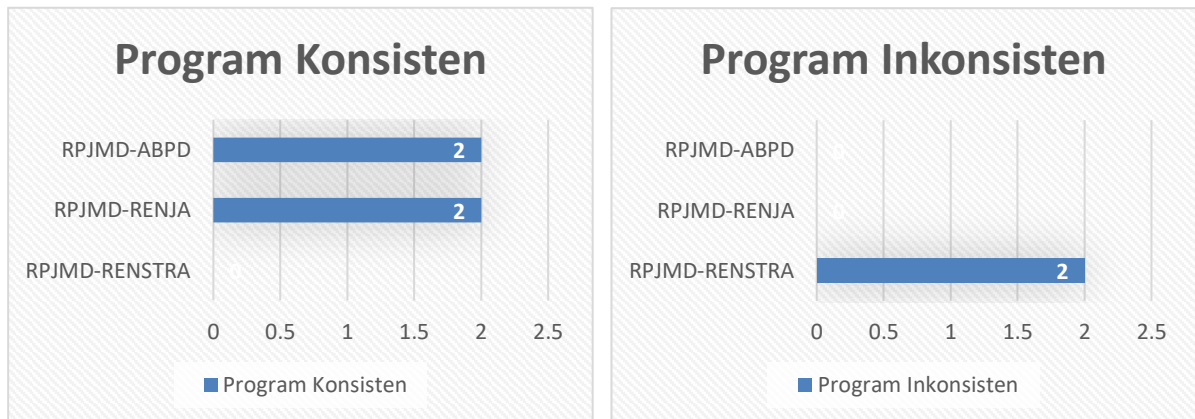
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Badan Kepegawaian Daerah dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

33) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

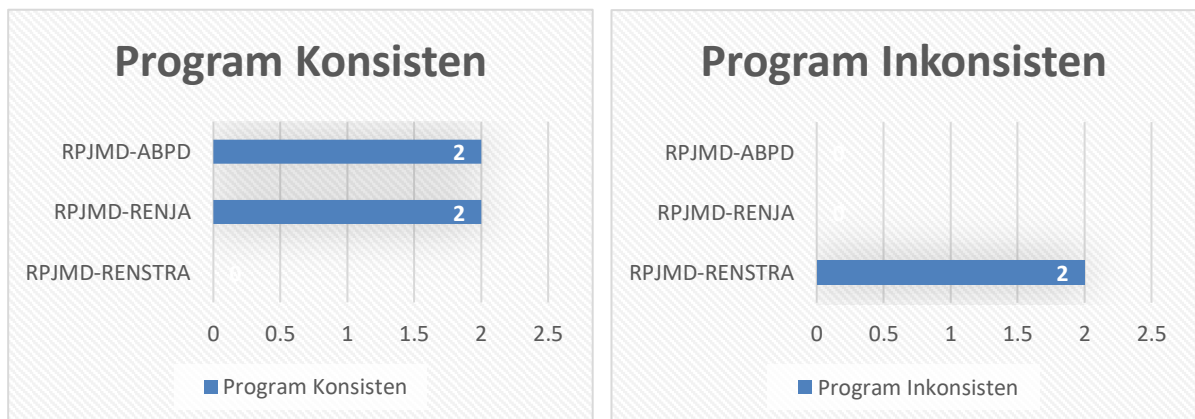
Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:



Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

34) Badan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim, dapat diketahui bahwa terdapat 2 program Badan Penelitian dan Pengembangan dalam RPJMD, 0 program dalam Renstra, 2 program dalam Renja, dan 2 program yang dialokasikan dalam APBD. Konsistensi terhadap berbagai program tersebut dapat tergambar pada chart berikut:

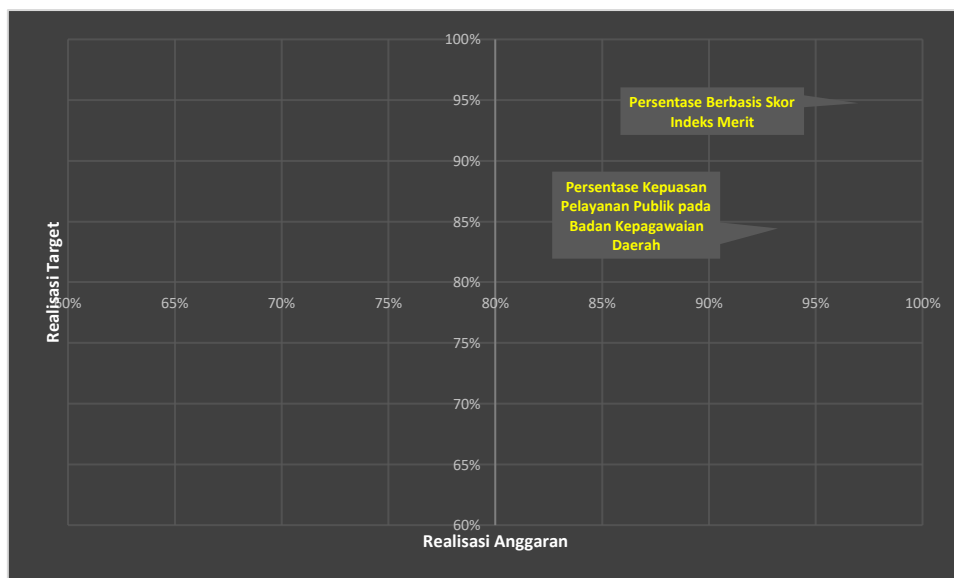


Dari chart diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2 program yang tidak konsisten antara Renstra dengan RPJMD.

6.2. Konsistensi Realisasi Anggaran dan Kinerja Program RPJMD Kaltim 2019-2023

1. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian daerah memiliki 2 program dengan 2 indikator yaitu: a) Persentase Berbasis Skor Indeks Merit; dan b) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah. Capaian realisasi kinerja dan anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.



Gambar 6.1. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Kepegawaian Daerah

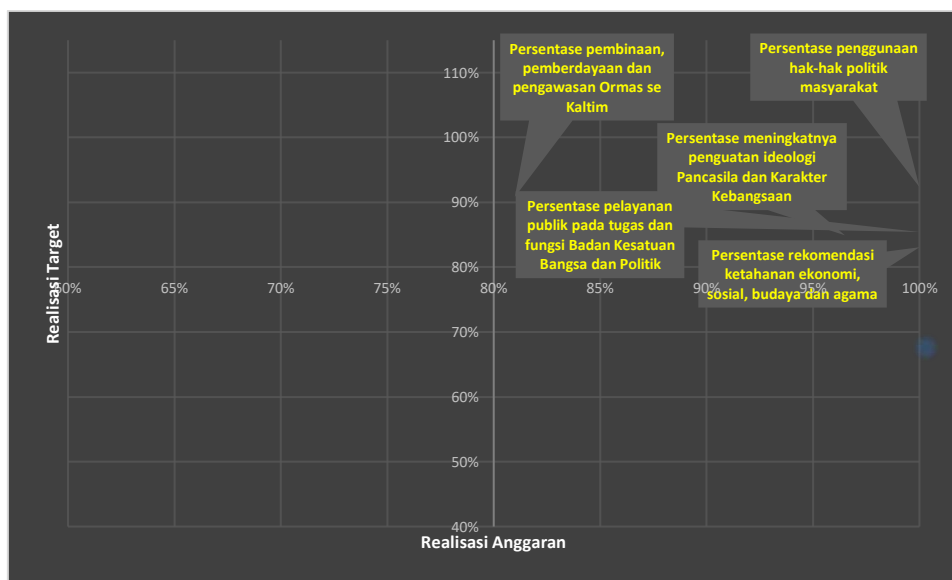
Tabel 6.1. Realisasi target dan anggaran program Badan Kepegawaian Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	97,00%	94,75%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah	93,23%	84,43%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			95,12%	89,59%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 program dengan 6 indikator yaitu: a) Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim; b) Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; c) Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; d) Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur; e) Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat; dan f) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian realisasi kinerja dan anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan terhadap target indikator dan perencanaan anggaran indikator program persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan ormas se Kaltim; persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat; dan persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Sementara terhadap indikator program persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur, meskipun perencanaan

cenderung efektif tetapi terdapat kemungkinan perencanaan target indikator terlalu rendah, dan meskipun perencanaan anggaran cenderung efisien tetapi terdapat kemungkinan penetapan anggaran kurang realistis, serta terdapat kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.2. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 6.2. Realisasi target dan anggaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	80,99%	90,83%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100,00%	83,07%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	96,50%	84,91%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

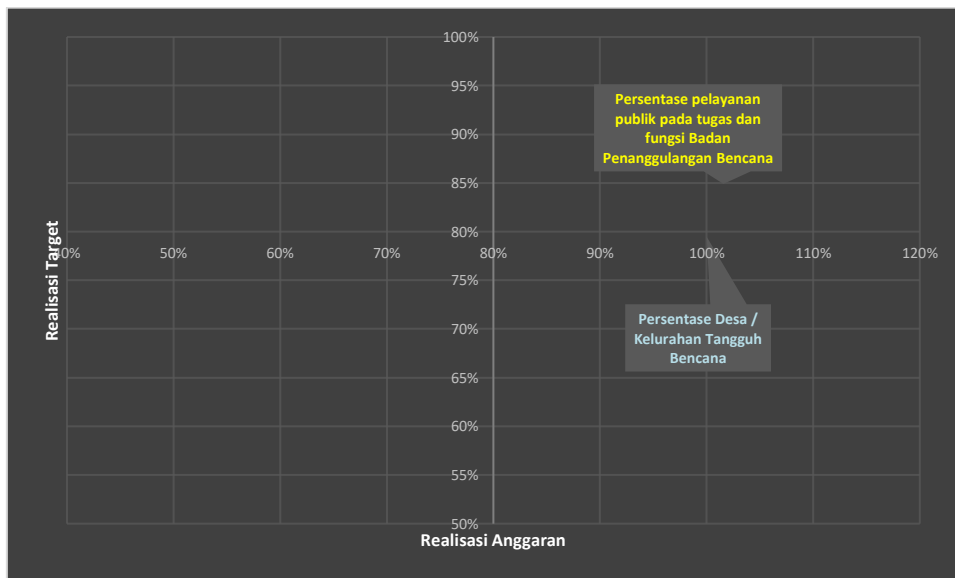
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	111,76%	92,98%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	100,00%	92,35%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00%	85,42%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			98,21%	88,26%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 program dengan 2 indikator yaitu: a) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana; dan b) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana. Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun capaian realisasi anggaran menunjukkan capaian yang tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pengembalian

anggaran yang sebelumnya di refocusing dan terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selain itu, untuk capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana menunjukkan realisasi capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.



Gambar 6.3. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 6.3. Realisasi target dan anggaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100,00%	79,50%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	101,58%	84,91%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			100,79%	82,20%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

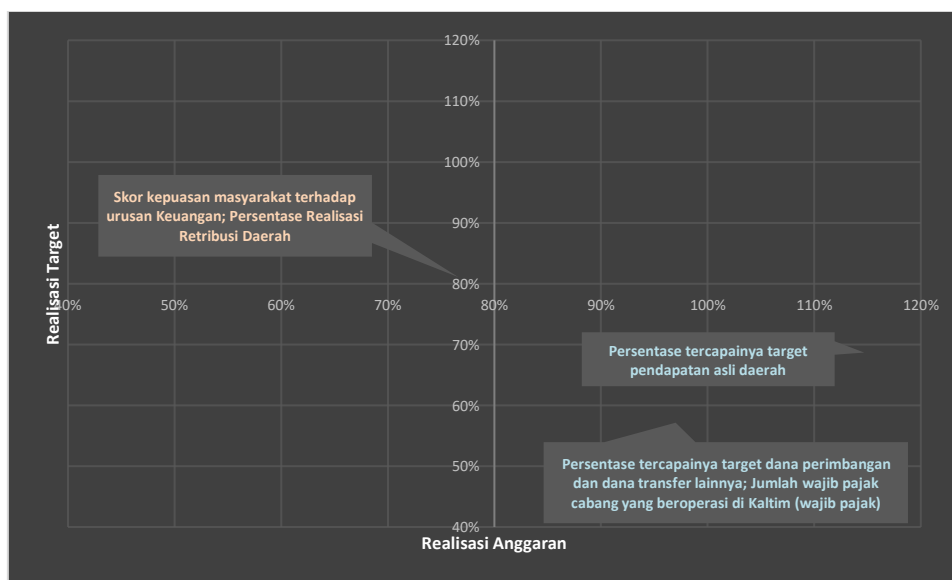
4. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki 3 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak); b) Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah; dan c) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah. Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak) menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun capaian realisasi anggaran menunjukkan capaian yang tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pengembalian anggaran yang sebelumnya di refocusing, keterlambatan ketersediaan pagu anggaran dan terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selanjutnya, untuk capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah menunjukkan realisasi capaian

target yang efektif ($\geq 80\%$), namun realisasi capaian anggaran tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator umumnya dilakukan secara efektif meskipun terdapat kemungkinan perencanaan target indikator terlalu rendah. Sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pengembalian anggaran yang sebelumnya di refocusing, keterlambatan ketersediaan pagu anggaran dan terdapat kemungkinan perencanaan anggaran sangat tidak realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selain itu, untuk capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah menunjukkan realisasi capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif oleh karena terdapat kemungkinan penetapan target indikator terlalu tinggi. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran.



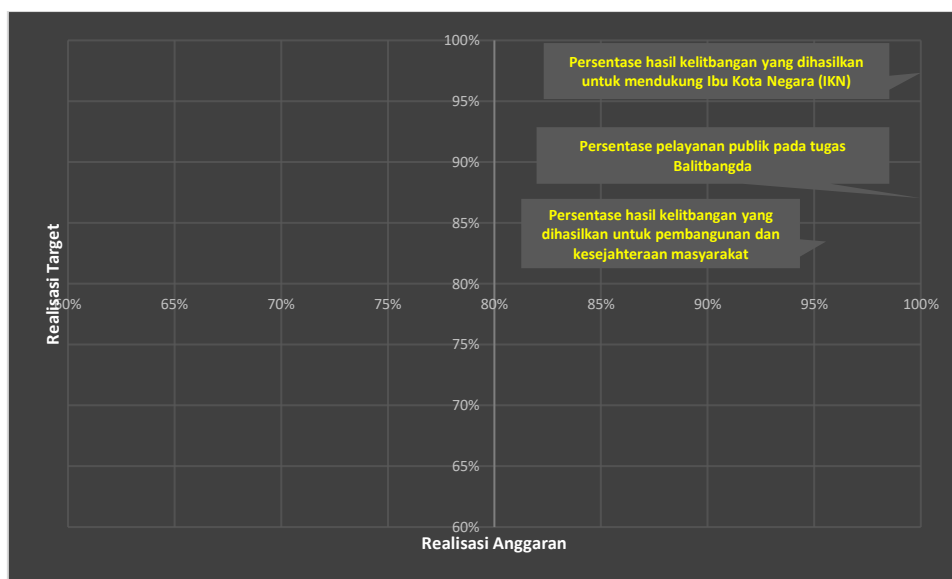
Gambar 6.4. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Pendapatan Daerah

Tabel 6.4. Realisasi target dan anggaran program Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	97,00%	57,15%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	114,69%	68,68%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	76,62%	81,07%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			96,11%	68,97%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki 2 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; b) Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN); dan c) Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda. Capaian realisasi kinerja dan anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.



Gambar 6.5. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 6.5. Realisasi target dan anggaran program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	95,56%	83,47%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100,00%	97,34%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	100,00%	87,04%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			98,52%	89,28%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

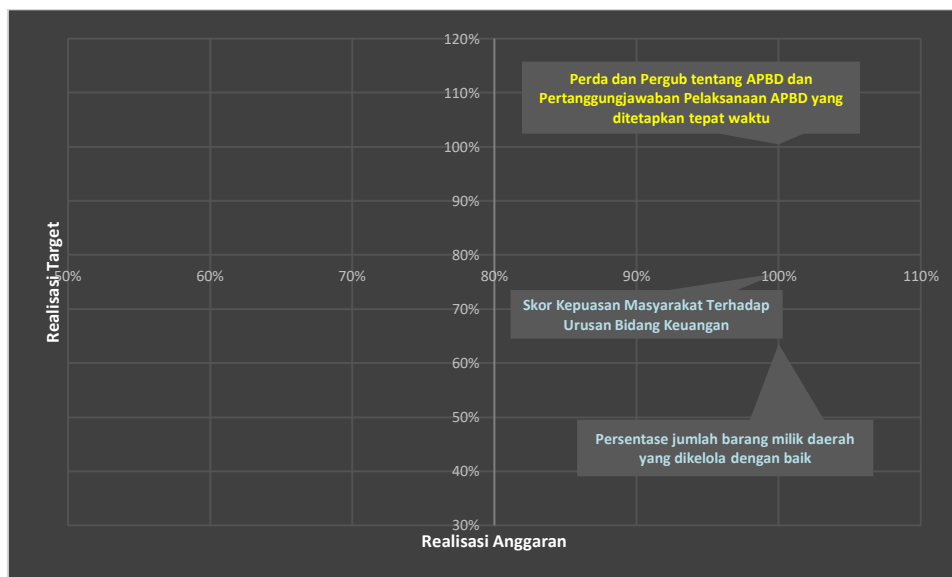
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 3 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik; b) Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu; dan c) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan. Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu menunjukkan realisasi capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara dalam hal perencanaan anggaran, meskipun cenderung dilakukan secara efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis, dan kemungkinan terdapat kekurangan anggaran.

Selanjutnya, capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun capaian realisasi anggaran menunjukkan capaian yang tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pengembalian anggaran yang sebelumnya di refocusing dan terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selain itu, capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun capaian realisasi anggaran menunjukkan capaian yang tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pengembalian anggaran yang sebelumnya di refocusing

dan terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.6. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 6.6. Realisasi target dan anggaran program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

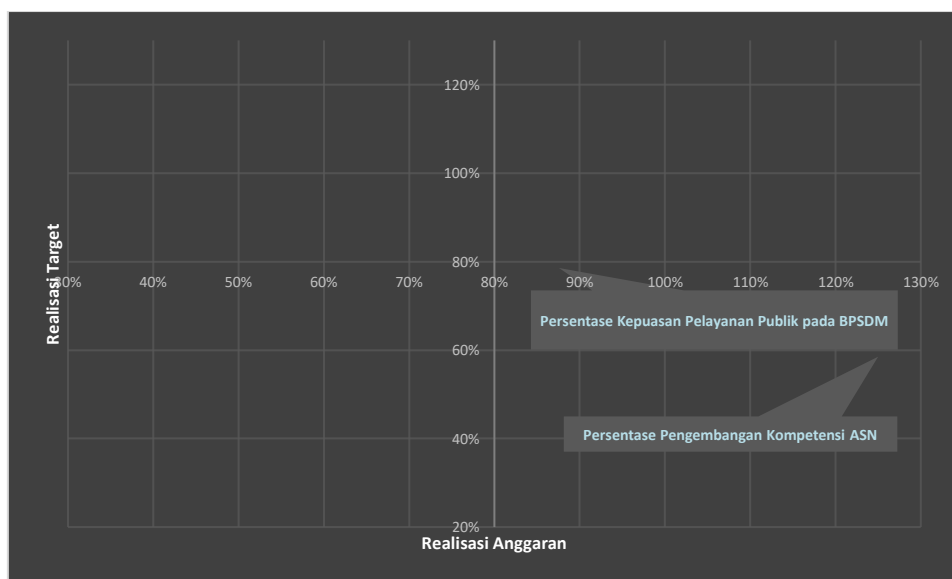
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	100,00%	63,54%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100,00%	100,46%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	100,00%	76,67%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
	Rata-Rata		100,00%	80,22%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 program dengan 2 indikator yaitu: a) Persentase Pengembangan Kompetensi ASN; dan b) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM. Capaian realisasi kinerja dan anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) namun capaian anggaran yang tidak efisien ($< 80\%$). Terhadap indikator program pengembangan kompetensi ASN, tergambar bahwa perencanaan target indikator umumnya dilakukan secara efektif meskipun terdapat kemungkinan perencanaan target indikator terlalu rendah. Sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah pandemic covid yang mengakibatkan perubahan sistem/model pelaksanaan program (sebelumnya program direncanakan diselenggarakan secara tatap muka, tetapi oleh karena pandemic covid maka kegiatan berlangsung secara daring yang pada akhirnya memberi dampak pada realisasi anggaran) dan terdapat kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selanjutnya terhadap indikator program persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM, tergambar bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif adalah ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara faktor penghambat yang membuat perencanaan anggaran tidak efisien adalah terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis serta kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.7. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 6.7. Realisasi target dan anggaran program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

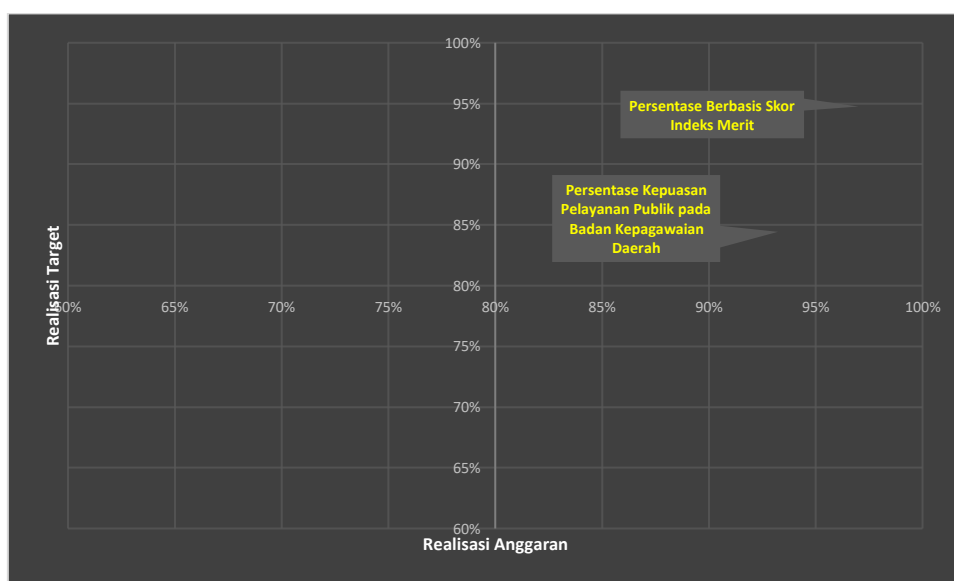
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	125,00%	58,51%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM	87,57%	78,56%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
Rata-Rata			106,29%	68,53%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

8. Badan Penghubung Provinsi

Badan Penghubung Provinsi memiliki 2 program dengan 2 indikator yaitu: a) Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung; dan b) Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi. Capaian realisasi kinerja dan

anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Terhadap persentase Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan badan penghubung, tergambar bahwa perencanaan target indikator cenderung dilakukan secara efektif walaupun terdapat kemungkinan perencanaan target indikator yang terlalu rendah. Dalam hal perencanaan anggaran, tergambar bahwa perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara efisien meskipun terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Selanjutnya terhadap indikator program persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi, tergambar bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.



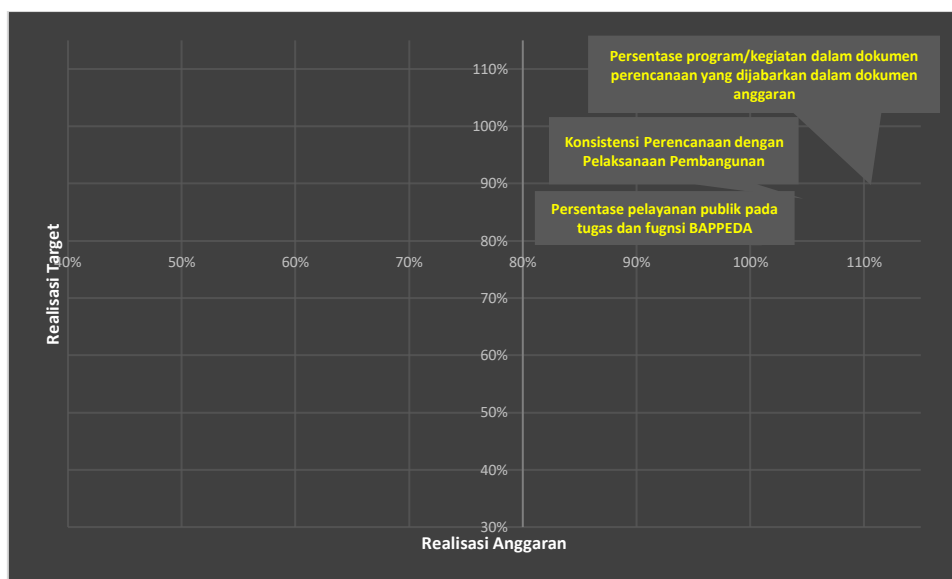
Gambar 6.8. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Penghubung Provinsi

Tabel 6.8. Realisasi target dan anggaran program Badan Penghubung Provinsi

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	118,16%	98,51%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	94,81%	88,59%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			106,49%	93,55%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 3 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran; b) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA; dan c) Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan. Capaian realisasi kinerja dan anggaran program terlihat seluruh indikator program memiliki capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Terhadap seluruh indikator program sebagaimana dimaksud, tergambar bahwa perencanaan cenderung dilakukan secara efektif meskipun terdapat kemungkinan penetapan target indikator terlalu rendah. Sementara dalam hal anggaran, tergambar bahwa perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara efisien meskipun terdapat kemungkinan penetapan anggaran kurang realistis dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.9. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

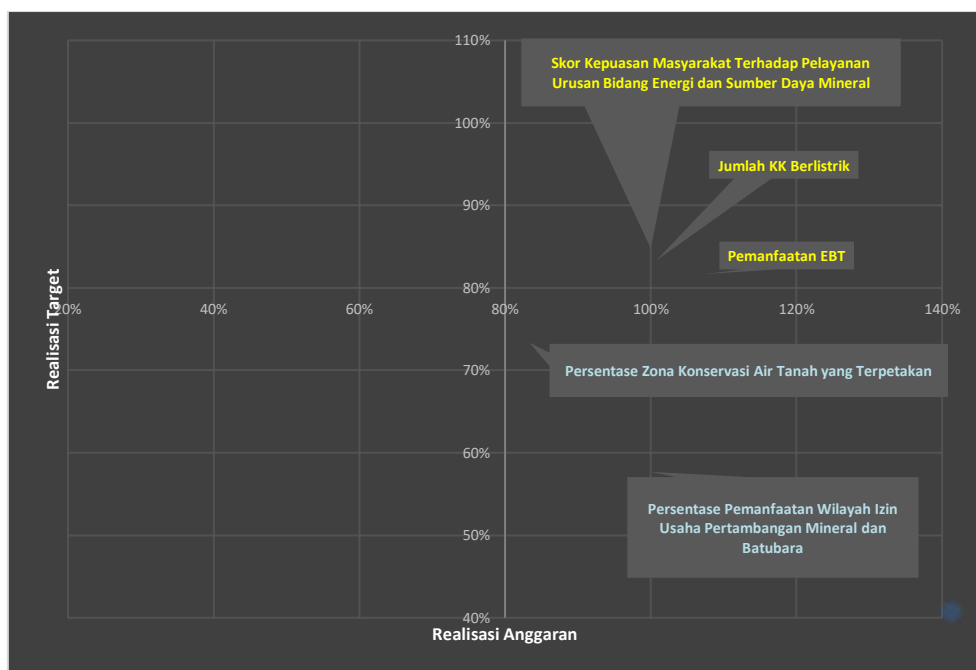
Tabel 6.9. Realisasi target dan anggaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	110,61%	89,74%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA	101,01%	80,01%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	104,67%	87,35%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			105,43%	85,70%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 5 program dengan 5 indikator yaitu: a) Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan; b) Pemanfaatan EBT; c) Jumlah KK Berlistrik; d) Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan e) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Pemanfaatan EBT; jumlah KK Berlistrik; dan Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Terhadap indikator program pemanfaatan EBT dan jumlah KK berlistrik, tergambar bahwa perencanaan cenderung dilakukan secara efektif meskipun terdapat kemungkinan penetapan target indikator terlalu rendah. Sementara dalam hal anggaran, tergambar bahwa perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara efisien meskipun terdapat kemungkinan penetapan anggaran kurang realistis dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Terhadap indikator program skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang energi dan sumber daya mineral, tergambar bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.

Selanjutnya, capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan dan indikator persentase pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun capaian realisasi anggaran menunjukkan capaian yang tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilaksanakan secara efektif karena ketepatan dalam penentuan target indikator. Sementara dalam hal anggaran, tergambar bahwa perencanaan tidak dilaksanakan secara efisien karena terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.10. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 6.10. Realisasi target dan anggaran program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan	83,33%	73,36%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	107,40%	81,67%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	100,75%	83,32%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	100,00%	57,69%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00%	84,78%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata		98,30%		76,16%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

11. Dinas Kehutanan

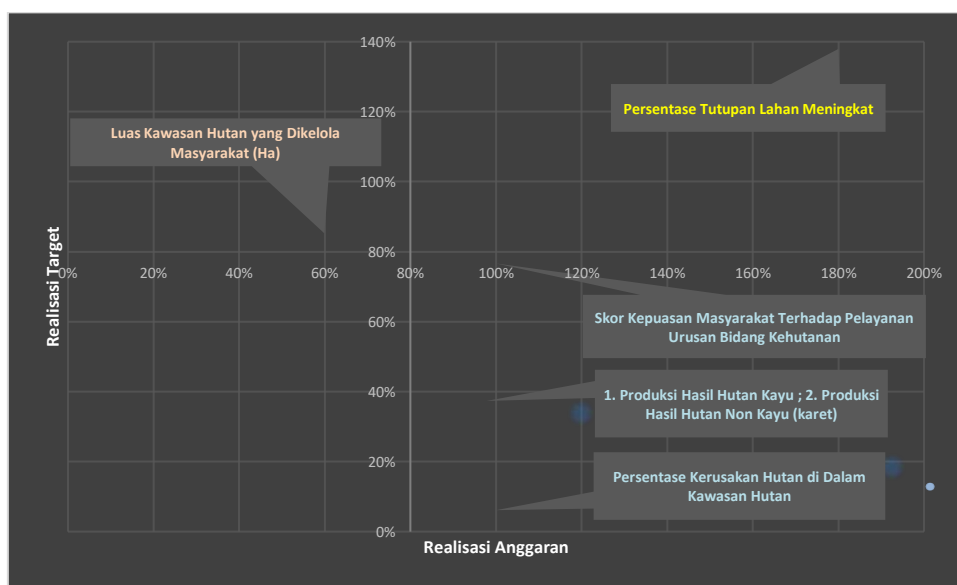
Dinas Kehutanan memiliki 5 program dengan 5 indikator yaitu: 1) Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan; 2) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha); 3) Persentase Tutupan Lahan Meningkatkan; 4) a. Produksi Hasil Hutan Kayu; b. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (karet); dan 5) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan.

Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase Kerusakan Hutan di dalam Kawasan Hutan; indikator program a. Produksi Hasil Hutan Kayu; b. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (karet); dan indikator program Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan menunjukkan realisasi capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun realisasi capaian anggaran tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target dan anggaran pada program ini dilakukan secara efektif, namun dalam perencanaan anggaran tidak efisien atau kurang realistis.

Selanjutnya, capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha) menunjukkan realisasi capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun capaian anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator tidak efektif. Kemungkinan adalah penetapan target indikator terlalu tinggi. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun dianggap efisien akan tetapi ada kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan/atau kemungkinan kekurangan anggaran.

Selain itu, capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator program Persentase Tutupan Lahan Meningkatkan menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$)

dan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perencanaan target indikator program ini dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator. Faktor pendorong lainnya adalah adanya kerjasama dengan multi pihak dalam pencapaian realisasi penanaman sehingga target program tercapai.



Gambar 6.11. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Kehutanan

Tabel 6.11. Realisasi target dan anggaran program Dinas Kehutanan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	100,00%	6,12%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	59,93%	85,20%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	180,00%	137,94%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
4	Program Pengelolaan Hutan (Apbd + Dbh-Dr)	1. Produksi Hasil Hutan Kayu ; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (karet)	97,79%		Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	100,00%	76,63%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
Rata-Rata			107,55%	68,65%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

12. Dinas Kelautan Dan Perikanan

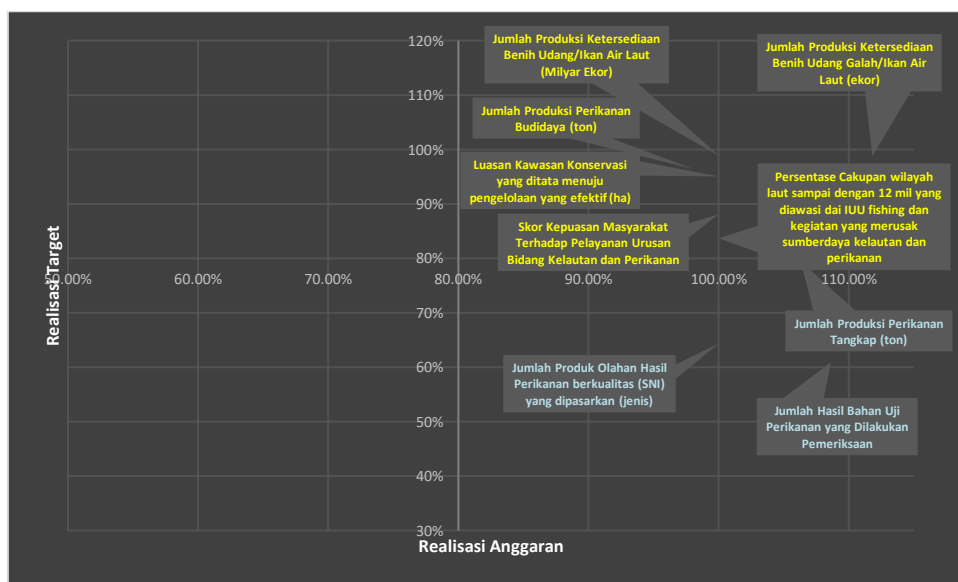
Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 6 program dengan 9 indikator yaitu: (1) Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (ha); (3) Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (ekor); (4) Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor); (5) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton); (6) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton); (7) Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan; (8) Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis); dan (9) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Capaian realisasi kinerja dan anggaran pada indikator Persentase Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (ha); Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor); Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton); dan Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$) dan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perencanaan target indikator program ini dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan

target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Selanjutnya Capaian realisasi kinerja dan perencanaan anggaran pada Indikator Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dan Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (ekor) menunjukkan capaian target yang efektif dan efisien ($\geq 80\%$). Meskipun perencanaan target indikator cenderung dilakukan secara efektif namun terdapat kemungkinan perencanaan target indikator yang terlalu rendah. Serupa dalam hal perencanaan anggaran, tergambar bahwa perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara efisien, namun terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan/atau kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Adapun capaian hasil pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton); Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan; dan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis) menunjukkan hasil realisasi kinerja yang efektif ($\geq 80\%$), namun pada perencanaan anggaran tidak mencapai hasil yang efisien ($< 80\%$). Capaian hasil demikian dapat disebabkan oleh Perencanaan target indikator terlalu rendah, Perencanaan anggaran sangat tidak realistis dan/atau kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.12. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tabel 6.12. Realisasi target dan anggaran program Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	100,02%	83,68%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (ha)	100,00%	95,04%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (ekor)	111,81%	98,75%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)	100,00%	98,89%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	98,06%	96,40%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	106,31%	79,47%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	108,64%	60,91%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis)	100,00%	64,36%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	100,00%	88,09%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			102,76%	85,07%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

13. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

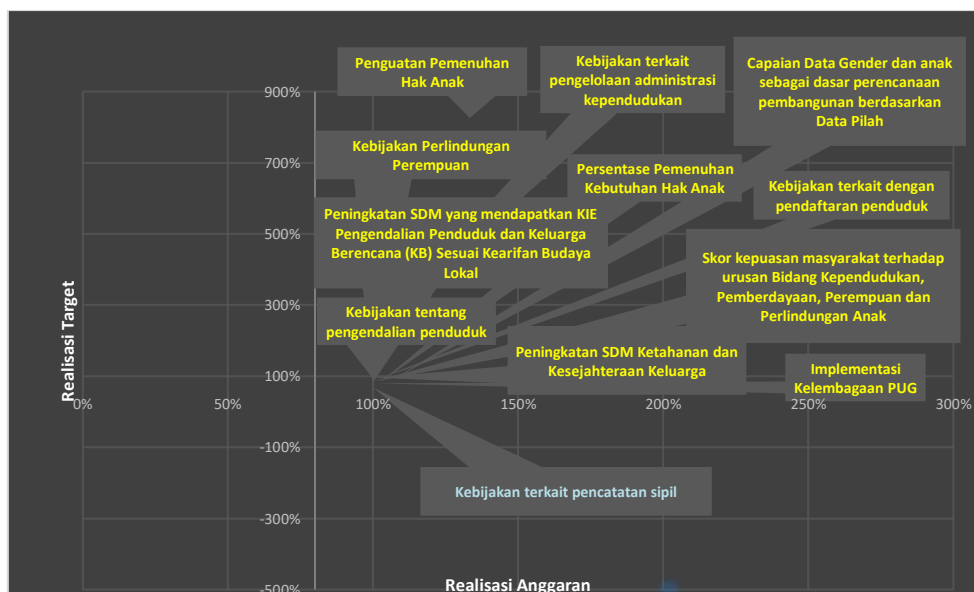
Dinas Dukcapil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdapat 12 Program dan 12 Indikator. Kebijakan terkait beberapa indikator, seperti Pendaftaran penduduk; Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak; Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; dan Kebijakan tentang pengendalian penduduk menunjukkan capaian Perencanaan target indikator efektif (> 80 %) dan Perencanaan anggaran efisien (> 80 %). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Selanjutnya terhadap beberapa indikator, misalnya Penguatan Pemenuhan Hak Anak; Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan; dan Kebijakan Perlindungan Perempuan, perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaian target melebihi 100%, dan Perencanaan anggaran kurang realistis yaitu mencapai 825,70%. Kemungkinan terdapat kelebihan/kekurangan anggaran)

Pada Indikator Kebijakan terkait pencatatan sipil; dan Implementasi Kelembagaan PUG (Perencanaan target indikator efektif (>80%)), namun Perencanaan anggaran kurang realistis, yaitu (< 80 %). Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Namun faktor penghambat utamanya adalah. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dilembaga legislatif dilihat dari rasio keterwakilan perempuan diparlemen; OPD belum

menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan; Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.

Adapun Indikator Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah; dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak, Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaian target melampaui angka >100%, dan Perencanaan anggaran kurang realistis meskipun capaiannya >80%. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.13. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 6.13. Realisasi target dan anggaran program Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	133,33%	825,70%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Pencatatan Sipil	Kebijakan Terkait Pencatatan Sipil	100,00%	67,86%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
3	Program Pendaftaran Penduduk	Kebijakan Terkait Dengan Pendaftaran Penduduk	100,00%	86,97%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi Kelembagaan Pug	100,00%	79,90%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kebijakan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	100,00%	228,23%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Capaian Data Gender Dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Data Pilah	107,69%	95,41%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan Dan Perlindungan Anak	100,00%	84,68%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	102,27%	81,87%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
9	Program Perlindungan Perempuan	Kebijakan Perlindungan Perempuan	100,00%	105,28%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Peningkatan Sdm Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	100,00%	96,09%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Peningkatan Sdm Yang Mendapatkan Kie Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00%	82,53%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
12	Program Pengendalian Penduduk	Kebijakan Tentang Pengendalian Penduduk	100,00%	92,66%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			103,61%	160,60%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

14. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan terdapat 5 Program dengan 14 indikator. Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota; dan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso), mengindikasikan perencanaan target indikator efektif ($\geq 80\%$) dan Perencanaan anggaran efisien ($\geq 80\%$). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Pada indikator lainnya seperti Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS; dan Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS) pencapaian target indikator efektif ($\geq 80\%$), namun capaian anggaran tidak efisien ($<80\%$). Penyebab capaian yang tidak efisien ini karena Perencanaan anggaran kurang realistis dan/atau Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

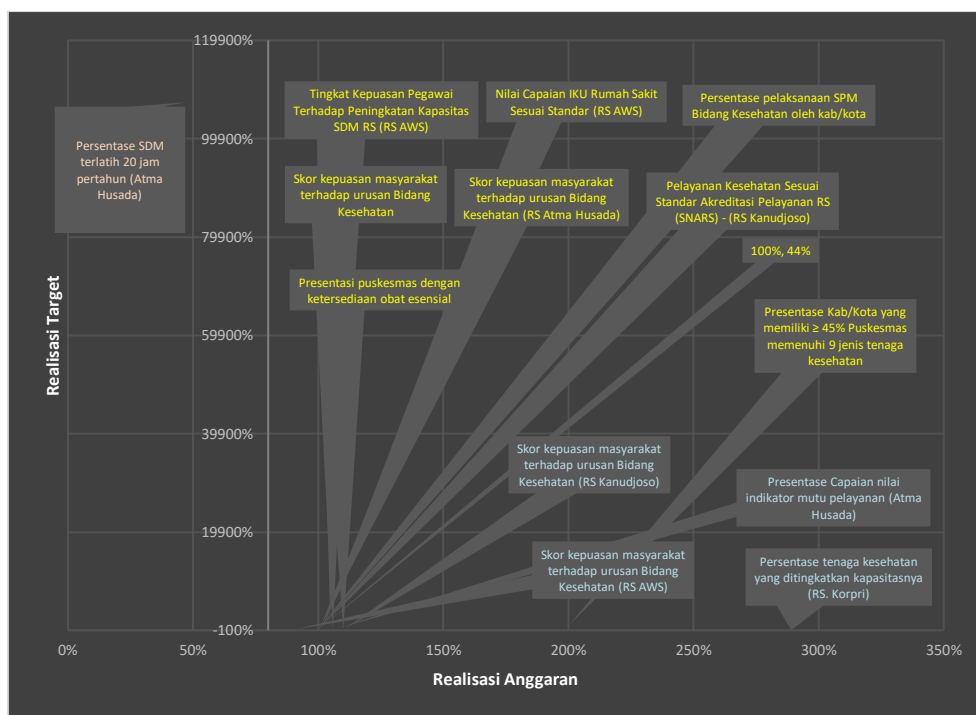
Selanjutnya pada indikator Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS); dan resensi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaiannya sangat tinggi, yaitu $>100\%$, meskipun capaian target perencanaan anggaran efisien yaitu $>80\%$, namun Perencanaan anggaran kurang realistis. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada); Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (RS. Korpri); Skor kepuasan

masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan; Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada); Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso) (Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaian target mencapai >100%, dan realisasi perencanaan anggaran yang tidak efisien yaitu hanya mencapai target (<80%). Penyebabnya adalah Perencanaan target indikator terlalu rendah, Perencanaan anggaran sangat tidak realistis, Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran

Pada indikator Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada); Target perencanaan indikator terlalu tinggi sehingga capaian target indikatornya hanya <80% (47,19%), sementara perencanaan anggaran sangat tidak realistis, yaitu mencapai 107327,39%. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran. Faktor penghambat lain dari tidak tercapainya target indikator adalah 1. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan secara tatap muka langsung tidak dapat dilaksanakan.

Adapun Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan; dan Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS), Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaiannya melebihi/ >100%, dan Perencanaan anggaran sangat tidak realistis hingga capaiannya sampai pada angka 835,15% dan 3804,62%. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran dan target indikator terlalu tinggi, serta Perencanaan anggaran sangat tidak realistis. Namun faktor penghambat utamanya adalah Upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum optimal, masih merupakan upaya pusat dan Formasi CPNS terbatas.



Gambar 6.14. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Kesehatan

Tabel 6.14. Realisasi target dan anggaran program Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	100,00%	43,60%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100,00%	83,12%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	101,25%	95,16%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	100,00%	95,94%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

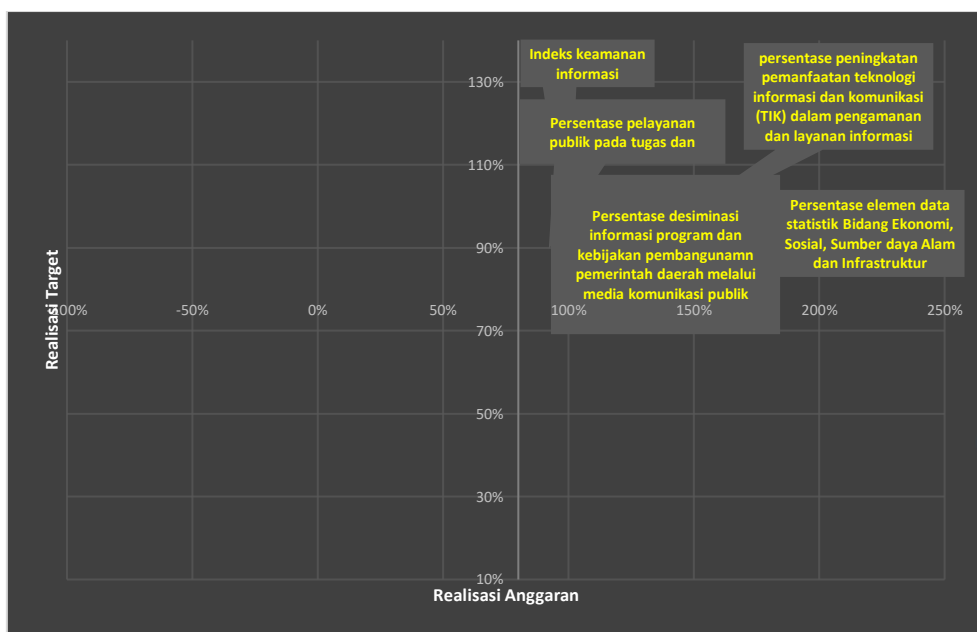
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	105,50%	29,75%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	47,19%	107327,39%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
		Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (RS. Korpri)	289,05%	0,00%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	200,00%	835,15%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	104,71%	3804,62%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	105,89%	69,32%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	100,39%	70,53%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	90,00%	26,65%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	110,13%	35,02%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	110,00%	82,04%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			118,86%	8042,74%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 program dengan 5 Indikator. Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi; Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik; dan Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur, Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaiannya > 100% (131,43%) dan Perencanaan anggaran kurang realistis. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Pada Indeks keamanan informasi; dan Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo menunjukkan bahwa Perencanaan target indikator efektif (>80%), dan Perencanaan anggaran efisien (>80%). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.



Gambar 6.15. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 6.15. Realisasi target dan anggaran program Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	131,43%	92,13%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunann pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	125,17%	93,98%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi	100,00%	89,58%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	192,54%	96,26%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	92,13%	89,60%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			128,25%	92,31%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

16. Dinas Lingkungan Hidup

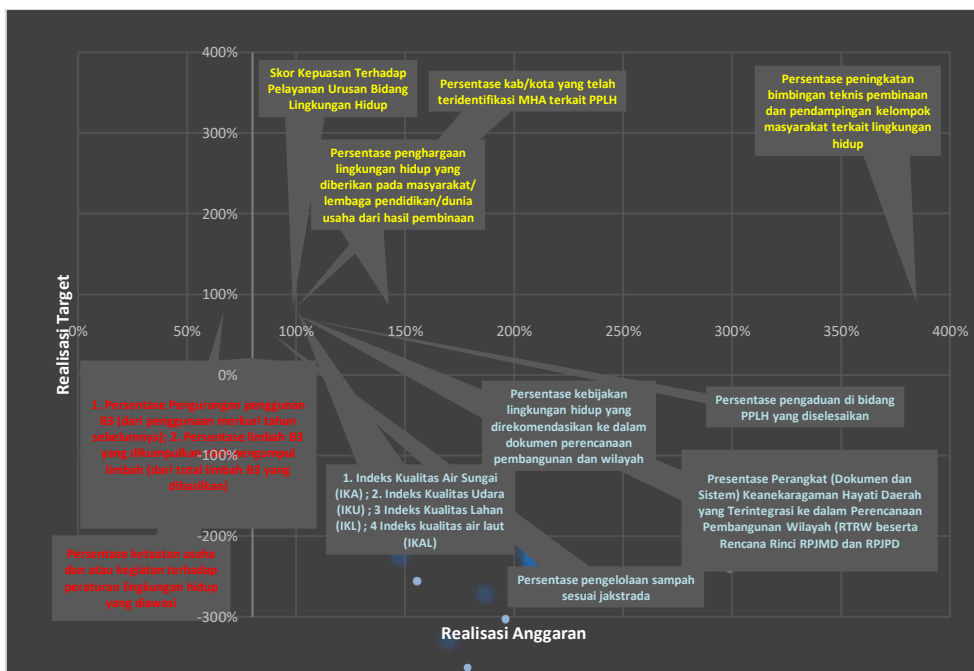
Dinas Lingkungan Hidup terdapat 11 Program dan 14 Indikator. Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi; Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya); dan Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan) (tidak efektif dan tidak efisien) masing-masing capaian target indikator (< 80%) dan realisasi anggaran (<80%). Penyebabnya adalah Perencanaan target indikator terlalu tinggi, dan Perencanaan anggaran kurang realistis, Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran.

Pada Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan; Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci RPJMD dan RPJPD; Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada; dan Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah. Data ini menunjukkan bahwa Perencanaan target indikator efektif (> 80%), dan Perencanaan anggaran kurang realistis/tidak efisien (< 80%). Penyebabnya adalah Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran, dan faktor utama lainnya adalah adanya perubahan jadwal dan belum tertatanya laporan kegiatan

program pengelolaan Kehati menyebabkan pelaksanaannya belum final; belum terbitnya dokumen RPPLH Nasional, yang menjadi acuan Provinsi; dokumen review RPPLH Provinsi masih berupa draft menunggu arahan RPPLH Nasional terbit; terdapat 7 (tujuh) Kab/Kota di Provinsi Kaltim belum memiliki dokumen RPPLH adanya kendala teknis administrasi (seperti keterlambatan SK tim).

Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH berlangsung secara efektif, yaitu realisasi target (>80%) dan perencanaan anggaran mencapai target yang efisien dimana realisasi anggaran >80%). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Adapun Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; Indeks Kualitas Udara (IKU) ; Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; dan Indeks kualitas air laut (IKAL) Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga mencapai target Realisasi target (>100%) dan Perencanaan anggaran sangat tidak realistis, yaitu (<80%). Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Namun faktor penghambat utamanya adalah perubahan metode perhitungan IKLH dan validasi nilai IKLH; kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan kabupaten/kota terkait data lingkungan; tidak Sinkronya data antara OPD terkait; minimnya pendanaan untuk program kegiatan prioritas; panjangnya alur proses mekanisme dalam pemulihan kerusakan lingkungan; dan adanya aturan yang tidak selaras.



Gambar 6.16. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6.16. Realisasi target dan anggaran program Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Usaha Dan Atau Kegiatan Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Yang Diawasi	66,67%	77,95%	Perencanaan target indikator tidak efektif, dan perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Di Bidang Pplh Yang Diselesaikan	100,00%	71,40%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Kab/Kota Yang Telah Teridentifikasi Mha Terkait Pplh	100,00%	83,37%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Perangkat (Dokumen Dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah Yang Terintegrasi Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (Rtrw Beserta Rencana Rinci Rpjmd Dan Rpjpd	100,00%	75,09%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	[Program] Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Sesuai Jakstrada	88,16%	52,96%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Pengurangan Penggunaan B3 (Dari Penggunaan Merkuri Tahun Sebelumnya); 2. Persentase Limbah B3 Yang Dikumpulkan Oleh Pengumpul Limbah (Dari Total Limbah B3 Yang Dihasilkan)	78,90%	20,98%	Perencanaan target indikator tidak efektif, dan perencanaan anggaran tidak efisien
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air Sungai (Ika) ; 2. Indeks Kualitas Udara (Iku) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (Ikl) ; 4 Indeks Kualitas Air Laut (Ikal)	100,38%	79,39%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan Pada Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/Dunia Usaha Dari Hasil Pembinaan	142,51%	86,29%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Bimbingan Teknis Pembinaan Dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup	384,62%	89,65%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Kebijakan Lingkungan Hidup Yang Direkomendasikan Ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Wilayah	100,00%	74,87%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	98,57%	82,77%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			123,62%	72,25%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

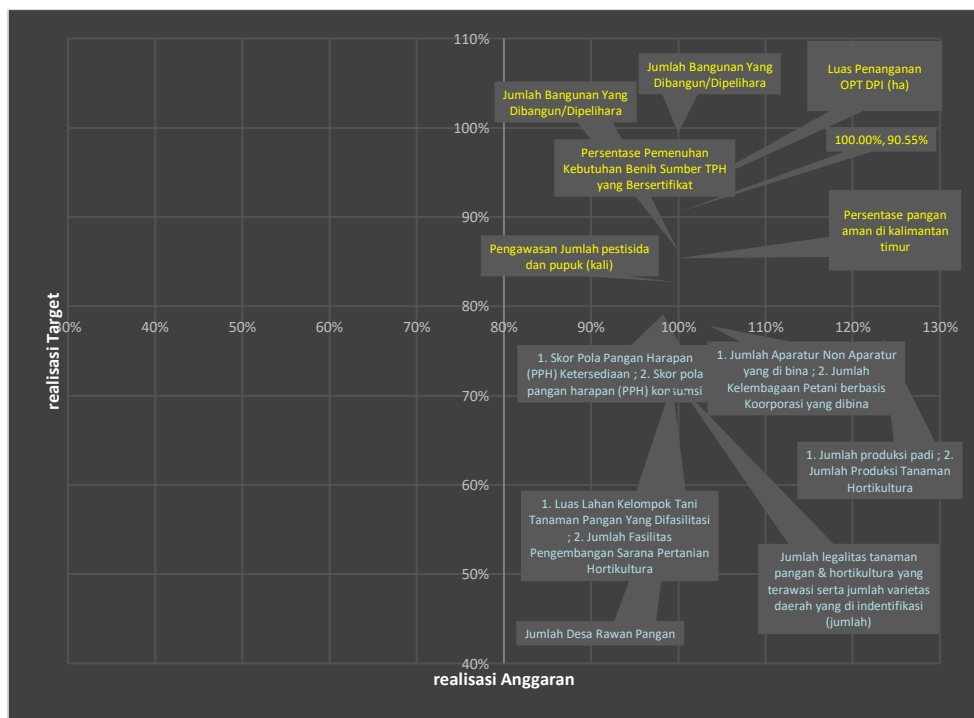
17. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 8 Program 16 Indikator. Masing-masing indikator Jumlah Desa Rawan Pangan; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi; Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura; Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (jumlah), Perencanaan target indikator efektif yaitu terealisasi (>80%), dan Perencanaan anggaran kurang realistis, yaitu (<80%). Faktor penyebab target perencanaan anggaran tidak efisien karena beberapa faktor, al: Alokasi bantuan benih padi rawa kegiatan PEN sebesar 4.750 ha dan target tanam Okmar bersamaan dengan alokasi di APBD; adanya alokasi bantuan benih padi dr murni masing-masing kab dan aspirasi kabupaten sehingga kabupaten kewalahan dalam mengidentifikasi CPCL nya; alokasi bantuan benih padi rawa kegiatan PEN sebesar 4.750 ha dan target tanam Okmar bersamaan dengan alokasi di APBD; Kurangnya bahan baku dan informasi menu olahan pangan local non beras, non terigu untuk konsumsi sehari-hari; masih tingginya ketergantungan karbohidrat dari beras dan terigu; kurangnya pengetahuan akan gizi seimbang; Masih terbatasnya anggaran renovasi bangunan mengimbangi 35 Ha lahan yang harus dipelihara; Luasnya lahan yang ditangani sebesar

35 ha; kurangnya tenaga kerja dan kapasitas SDM masih rendah dan sarana dan Prasarana masih terbatas.

Pada Persentase pangan aman di Kalimantan Timur; Luas Penanganan OPT DPI (ha); Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara; Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya; Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat; Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (kali); Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian berlangsung secara efektif, yaitu (>80%) dan perencanaan anggaran terealisasi secara efisien, yaitu >80%.

Jumlah produksi padi; Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura; Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ; dan Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibina, capaian Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga terealisasi >100 sementara Perencanaan anggaran sangat tidak realistis dan tidak efisien. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran



Gambar 6.17. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tabel 6.17. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	100,00%	64,11%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman di Kalimantan Timur	100,00%	85,38%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Penanganan OPT DPI (ha)	100,00%	92,46%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; 2. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	98,26%	79,12%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	99,30%	71,32%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	100,00%	99,37%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya	100,00%	86,22%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

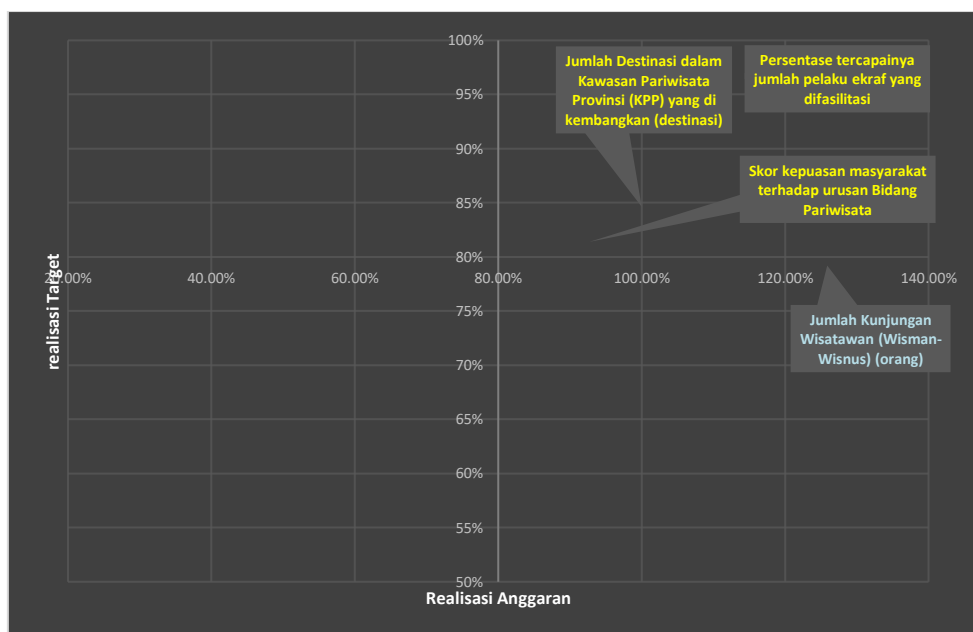
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	123,43%	76,44%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	100,00%	98,45%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (jumlah)	100,00%	71,31%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (kali)	100,00%	82,69%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
7	Program Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	103,53%	77,85%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	100,00%	90,55%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			101,89%	82,71%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

18. Dinas Pariwisata

Pada Dinas Pariwisata, terdapat 4 Program dengan 4 Indikator. Masing-masing indikator Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi); dan Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata realisasi Perencanaan target indikator berlangsung secara efektif (> 80%) dan Perencanaan anggaran juga berlangsung secara efisien(> 80%). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Pada Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus) (orang) Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga realisasi target indikator mencapai >100%, sementara Perencanaan anggaran sangat tidak realistis dan tidak efisien, mencapai target <80%). Faktor penghambat dari tidak efisiensinya dalam pencapaian perencanaan anggaran adalah adanya Arahkan refocussing anggaran pada bulan April yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal; Himbauan PPKM di beberapa daerah, sehingga beberapa kegiatan yang terjadwal pada triwulan 2 dan 3 kemudian tertunda pelaksanaannya; Pengembalian dana refocussing pada akhir September, menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena sempitnya waktu pengerjaan dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara lain Penyusunan NESPARDA

Adapun Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi Perencanaan target indikator terlalu rendah, dan Perencanaan anggaran kurang realistis. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target indikator tidak efisien karena target realisasi indikator >100% dan tidak efektif karena realisasi anggaran >80%).



Gambar 6.18. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pariwisata

Tabel 6.18. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pemas Aran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus) (orang)	125,87%	79,21%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	118,36%	96,45%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi)	100,00%	84,64%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	92,68%	81,39%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			109,23%	85,42%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
					anggaran efisien

19. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pada DPUPR terdapat 15 Program dan 15 Indikator. Masing-masing indikator Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (orang); Penyelenggaraan infrastruktur permukiman; Capaian akses penanganan sampah domestik; Bangunan gedung yang tertata (%). Realisasi target (>80%) dan realisasi anggaran (<80%). Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan target indikator efektif, sementara Perencanaan anggaran kurang realistis. Penyebabnya adalah Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. batasan kewenangan pelaksanaan kegiatan

Pada indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit); Capaian akses limbah domestik layak; Penyelenggaraan PSU permukiman; Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Indeks); Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab); Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata (%), realisasi target (>80%) dan realisasi anggaran (>80%). Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan target indikator berlangsung secara efektif, dan Perencanaan anggaran juga berlangsung secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Indikator Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter) mengindikasikan Perencanaan target indikator terlalu tinggi sehingga capaian target hanya 78,28 % (80%), dan Perencanaan anggaran kurang realistis, yaitu hanya mencapai 42,33%. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran.

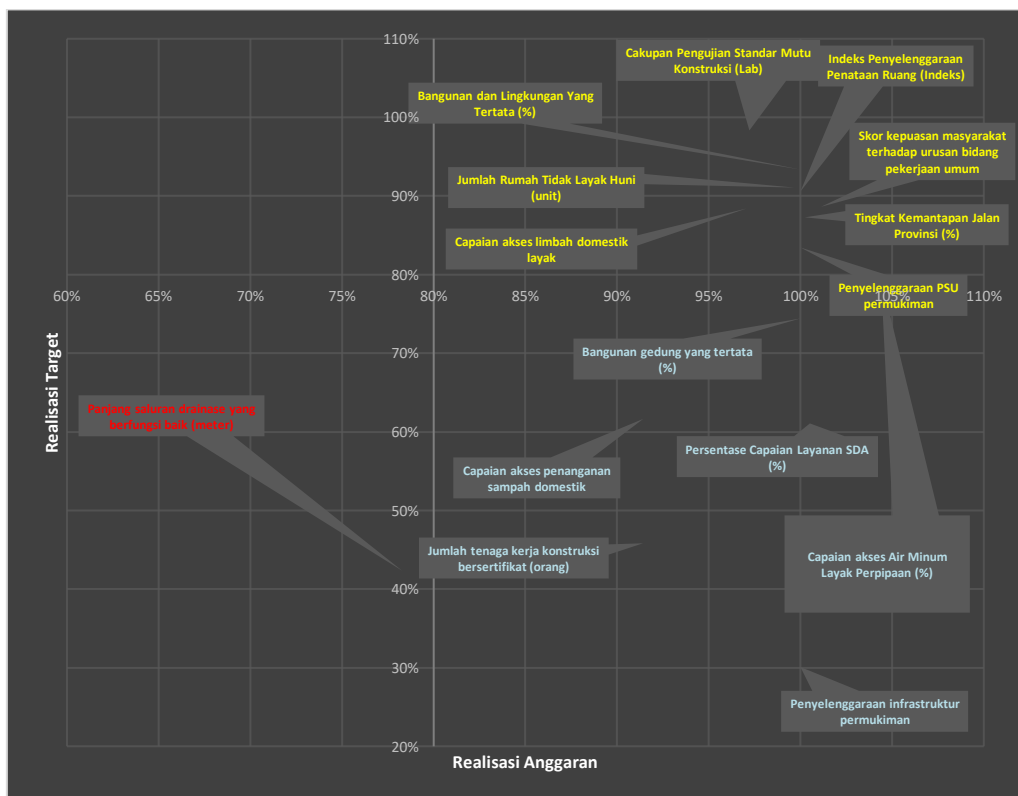
Capaian akses Air Minum Layak Perpipaian (%); dan Persentase Capaian Layanan SDA (%), menunjukkan bahwa Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga capaiannya >80% dan perencanaan anggaran sangat tidak realistis. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.

Pada indikator Penyelenggaraan infrastruktur permukiman; Capaian akses penanganan sampah domestik; dan Bangunan gedung yang tertata (%). Perencanaan

target indikator berlangsung secara efektif (>80%) namun Perencanaan anggaran kurang realistis dan tidak efisien (< 80%). Hal ini Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Faktor penghambat utamanya adalah batasan kewenangan pelaksanaan kegiatan dan Pelaksanaan konstruksi bersamaan dengan proses perencanaan (DED)

Sementara indikator Penyelenggaraan PSU permukiman; Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Indeks); Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab); dan Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata (%). Perencanaan target indikator berlangsung secara efektif (>80%), dan Perencanaan anggaran juga berlangsung secara efisien, yaitu mencapai >80%. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Adapun Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%); dan Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum. Perencanaan target indikator terlalu rendah sehingga mencapai target >100%, dan Perencanaan anggaran kurang realistis. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran.



Gambar 6.19. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Tabel 6.19. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat (Orang)	91,42%	45,82%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	99,68%	91,07%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Limbah Domestik Layak	97,07%	88,42%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik (Meter)	78,28%	42,33%	Perencanaan target indikator tidak efektif, dan perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	104,39%	79,56%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Capaian Layanan Sda (%)	100,52%	61,07%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
7	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	100,00%	30,08%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
9	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	91,43%	61,65%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

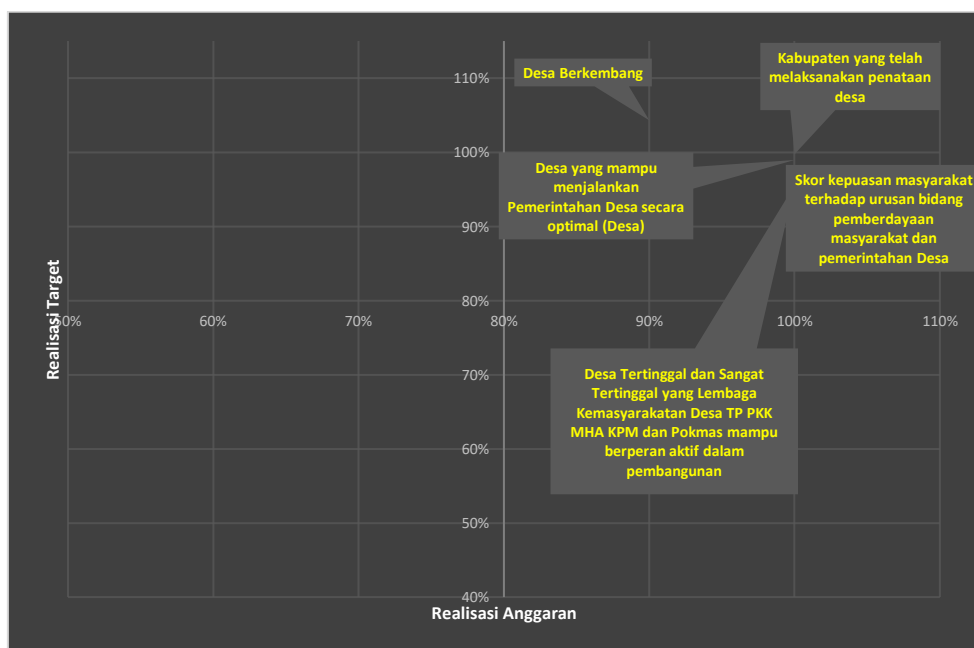
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Penyelenggaraan Psu Permukiman	100,00%	83,45%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	100,24%	87,28%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Indeks)	100,00%	90,57%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	97,22%	98,33%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
14	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata (%)	100,00%	93,36%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Yang Tertata (%)	100,00%	74,42%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	101,12%	88,63%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			97,42%	74,40%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdapat 5 program dengan 5 indikator. Masing-masing target indikator Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa); Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK MHA KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan; Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa

dan Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa Perencanaan target indikator berlangsung secara efektif (>80%), dan Perencanaan anggaran berlangsung secara efisien (>80%). Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan kesesuaian antara penentuan rencana anggaran dengan target indikator.

Adapun indikator Desa Berkembang, Perencanaan target indikator cenderung efektif, yaitu >80% namun Perencanaan anggaran kurang realistis, yaitu mencapai target >100% . Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran. Faktor penghambat sehingga capaiannya tidak efisien adalah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi sedikit terhambat karena Pandemi Covid-19 maka Pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); Pembatalan Refocusing mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu; Adanya desa blankspot menjadikan keterlambatan informasi yang disampaikan; dan kurangnya perhatian serta peran dari pihak ketiga (CSR, dsb).



Gambar 6.20. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Tabel 6.20. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Yang Mampu Menjalankan Pemerintahan Desa Secara Optimal (Desa)	100,00%	98,95%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal Yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tp Pkk Mha Kpm Dan Pokmas Mampu Berperan Aktif Dalam Pembangunan	100,00%	95,55%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penataan Desa	Kabupaten Yang Telah Melaksanakan Penataan Desa	100,00%	99,73%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Berkembang	90,00%	104,31%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	100,00%	90,70%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			98,00%	97,85%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

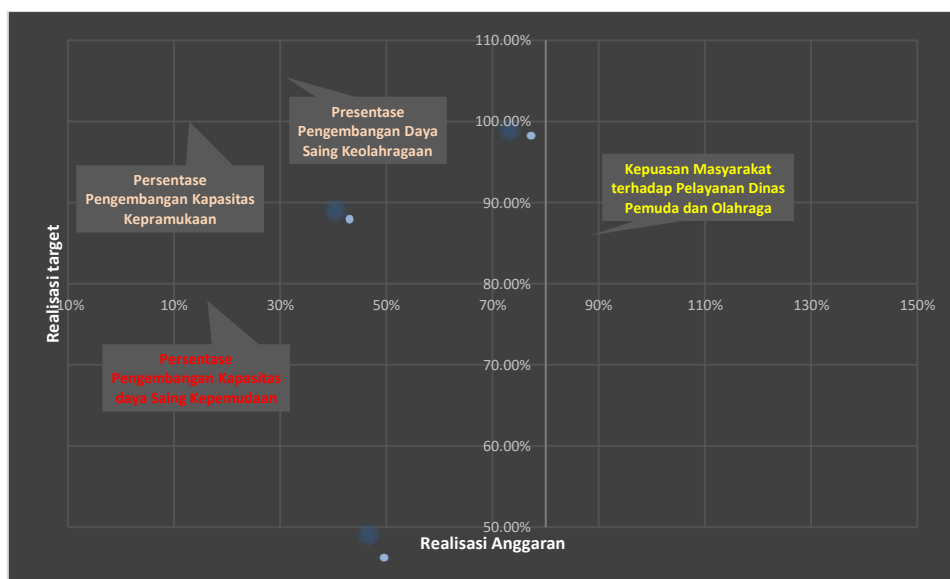
21. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga memiliki 4 program dengan 4 indikator yaitu: a) Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; b) Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan; c) Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; d) Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahrag. Terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut adalah Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut mempengaruhi adalah sistem Informasi yang sudah mulai terintegrasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).

Selain itu, juga terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain: a) Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; b) Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran. Faktor yang menghambat pelaksanaan indikator program ini adalah pelaksanaan kegiatan keolahragaan berskala Nasional yang dibatalkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena kondisi Pandemi Covid-19, dan Pengembalian anggaran hasil refocusing pada triwulan ke IV.

Namun terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut adalah Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang mempengaruhi perencanaan target indikator tidak efektif sekaligus perencanaan anggaran tidak efisien adalah : Pelaksanaan kegiatan kepemudaan berskala Nasional yang dibatalkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena kondisi Pandemi Covid-19, Pengembalian anggaran hasil refocusing pada triwulan ke IV, jumlah atlet yang meraih medali rendah dibanding atlet yang dikirim, dan adanya tambahan dana dari BTT (biaya tak terduga) karena ada poparnas.



Gambar 6.21. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel 6.21. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	30,92%	105,49%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	16,25%	77,94%	Perencanaan target indikator tidak efektif, dan perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	12,85%	100,00%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga	88,39%	85,96%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			37,10%	92,35%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien

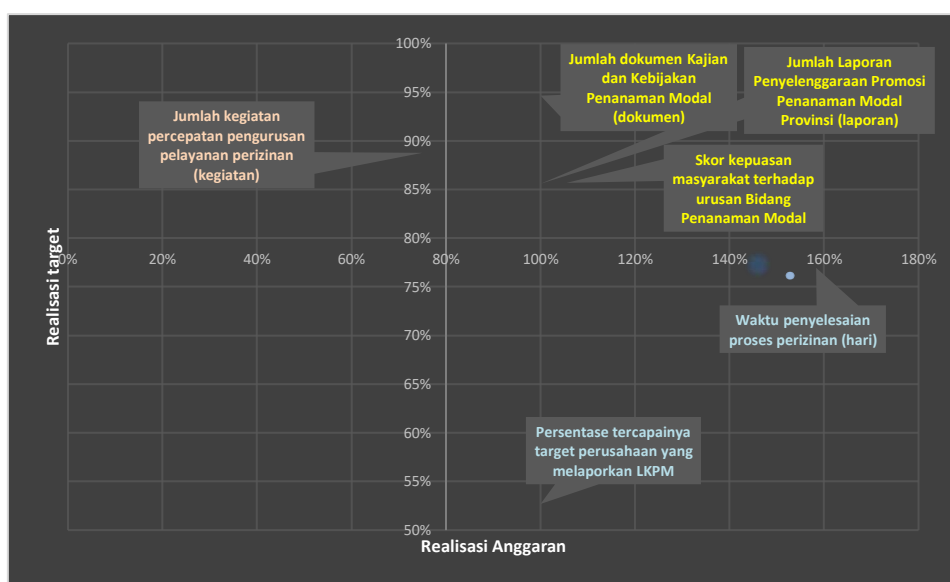
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 6 program dengan 6 indikator yaitu: a) Waktu penyelesaian proses perizinan (hari); b) Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan (kegiatan); c) Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal (dokumen); d) Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM; e) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi (laporan); f) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal. Terdapat 3 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal (dokumen); b) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi (laporan); c) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, infratrstruktur dan gedung standar untuk pelayanan, serta kemudahan dalam permohonan perizinan di daerah yang berbasis elektronik.

Selain itu, terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan (kegiatan). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran.

Namun terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut

antara lain : a) Waktu penyelesaian proses perizinan (hari); b) Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah refocusing anggaran.



Gambar 6.22. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 6.22. Realisasi target dan anggaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (Hari)	158,33%	76,95%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Percepatan Pengurusan Pelayanan Perizinan (Kegiatan)	75,00%	88,76%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien

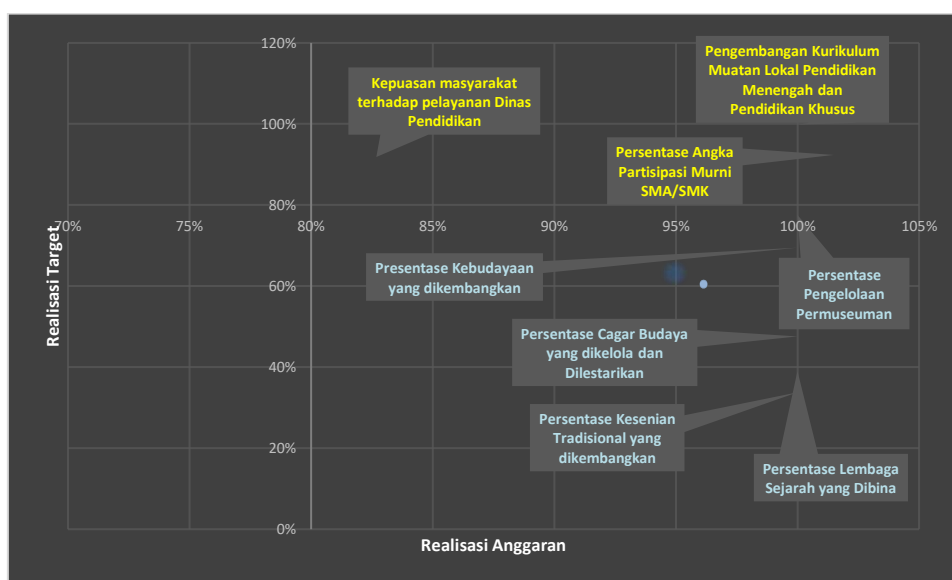
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Dan Kebijakan Penanaman Modal (Dokumen)	100,00%	94,64%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Tercapainya Target Perusahaan Yang Melaporkan Lkpm	100,00%	52,69%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Laporan)	100,00%	85,58%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	105,52%	85,68%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			106,48%	80,72%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

23. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 9 program dengan 9 indikator yaitu: a) Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan; b) Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina; c) Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana; d) Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK; e) Persentase Pengelolaan Permuseuman; f) Presentase Kebudayaan yang dikembangkan; g) Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan; h) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; i) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan. Terdapat 3 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK; b) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; c) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator

efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut mempengaruhi adalah program pengembangan kesenian dan program pelestarian serta pembinaan sejarah, yang dilaksanakan melalui media daring, sehingga lebih irit anggaran.

Selain itu, terdapat 5 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan; b) Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina; c) Persentase Pengelolaan Permuseuman; d) Presentase Kebudayaan yang dikembangkan; e) Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Sedangkan 1 indikator program lainnya, tidak dapat dilaksanakan, yakni Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan program ini adalah aplikasi Pengajuan Anggaran yang selalu berubah – ubah (SIMDA menjadi SIPD dan sebaliknya).



Gambar 6.23. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

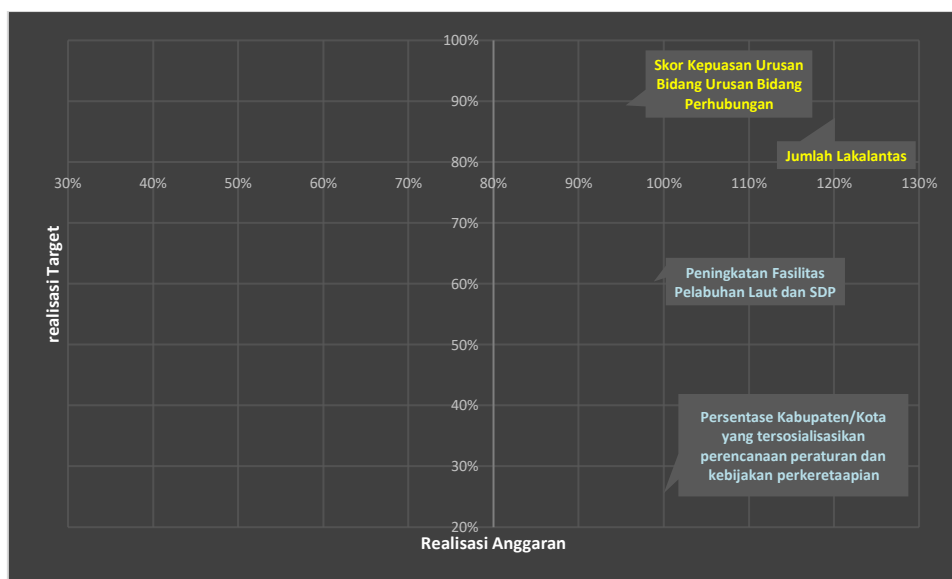
Tabel 6.23. Realisasi target dan anggaran program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Dan Dilestarikan	100,00%	47,57%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Lembaga Sejarah Yang Dibina	100,00%	39,04%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni Sma/Smk	101,49%	92,36%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	100,00%	77,56%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	100,00%	69,47%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	100,00%	33,77%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
8	Program Pengembangan Kurikulum	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	100,00%	99,82%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan	82,68%	91,84%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			98,02%	68,93%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

24. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki 4 program dengan 4 indikator yaitu: a) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP; b) Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian; c) Jumlah Lakalantas; d) Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan. Terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Jumlah Lakalantas; b) Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah dicabutnya kebijakan PPKM sehingga berdampak terhadap meningkatnya arus penumpang dan barang, dan administrasi pencatatan yang dilakukan disetiap pelabuhan secara tertib.

Selain itu, juga terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP; b) Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah adanya wanprestasi, penawaran nilai proyek dibawah pagu anggaran yang ditetapkan, belum tersedianya masterplan, masalah refocusing anggaran.



Gambar 6.24. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Perhubungan

Tabel 6.24. Realisasi target dan anggaran program Dinas Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Dan Sdp	98,82%	60,37%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kabupaten/Kota Yang Tersosialisasikan Perencanaan Peraturan Dan Kebijakan Perkeretaapian	100,00%	25,59%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Jumlah Lakalantas	120,12%	87,28%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	95,52%	89,32%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			103,62%	65,64%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

25. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, memiliki 15 program dengan 18 indikator yaitu: a) Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara; b) Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran; c) Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA; d) Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK); e) Persentase stabilitas harga bapokting (%); f) persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi; g) persentase capaian target sertifikat mutu barang (%); h) Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya; i) Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata; j) Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industry; k) Jumlah Koperasi berkualitas (koperasi); l) Persentase tercapainya target UKM naik kelas; m) Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (unit); n) Jumlah Koperasi dan UKM yang terlatih (DAK); o) Persentase tercapainya target Koperasi sehat; p) Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital; q) Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an; r) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

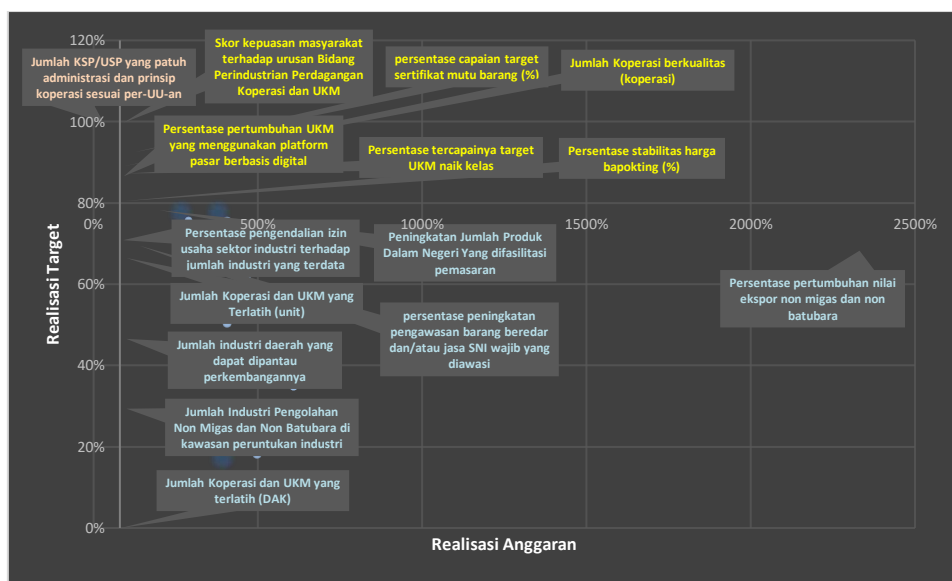
Terdapat 6 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase stabilitas harga bapokting (%); b) persentase capaian target sertifikat mutu barang (%); c) Jumlah Koperasi berkualitas (koperasi); d) Persentase tercapainya target UKM naik kelas; e) Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital; f) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.

Selain itu, juga terdapat 7 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara; b)

Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran; c) persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi; d) Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya; e) Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata; f) Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industry; g) Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (unit). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien.

Namun terdapat juga 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut adalah Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran.

Sedangkan 3 indikator program lainnya, tidak dilaksanakan, antara lain : a) Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA; b) Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK); c) Persentase tercapainya target Koperasi sehat. Dan 1 indikator program lainnya memiliki capaian realisasi kinerjanya yang efektif ($\geq 80\%$), namun tidak memiliki data capaian realisasi anggaran (pagu anggaran kosong), yakni Jumlah Koperasi dan UKM yang terlatih (DAK). Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan indikator program ini adalah program pengelolaan sistem yang anggarannya tidak maksimal dipergunakan akibat pandemic Covid-19, sehingga hanya bisa terlaksana di 3 daerah, yakni Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur.



Gambar 6.25. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 6.25. Realisasi target dan anggaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Dan Non Batubara	2331,20%	68,25%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang Difasilitasi Pemasaran	200,00%	78,24%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Bapakting (%)	92,25%	80,45%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Sni Wajib Yang Diawasi	140,33%	69,47%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Persentase Capaian Target Sertifikat Mutu Barang (%)	123,08%	92,45%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri Daerah Yang Dapat Dipantau Perkembangannya	100,00%	46,55%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Izin Usaha Sektor Industri Terhadap Jumlah Industri Yang Terdata	90,00%	70,84%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas Dan Non Batubara Di Kawasan Peruntukan Industri	100,00%	29,37%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
8	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas (Koperasi)	90,00%	89,01%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Tercapainya Target Ukm Naik Kelas	100,00%	87,26%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
10	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Dan Ukm Yang Terlatih (Unit)	100,00%	66,46%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
11	Program Pengembangan Umkm	Persentase Pertumbuhan Ukm Yang Menggunakan Platform Pasar Berbasis Digital	91,67%	99,76%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
12	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah Ksp/Usp Yang Patuh Administrasi Dan Prinsip Koperasi Sesuai Per-Uu-An	30,00%	99,74%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	92,07%	86,57%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			262,90%	76,03%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

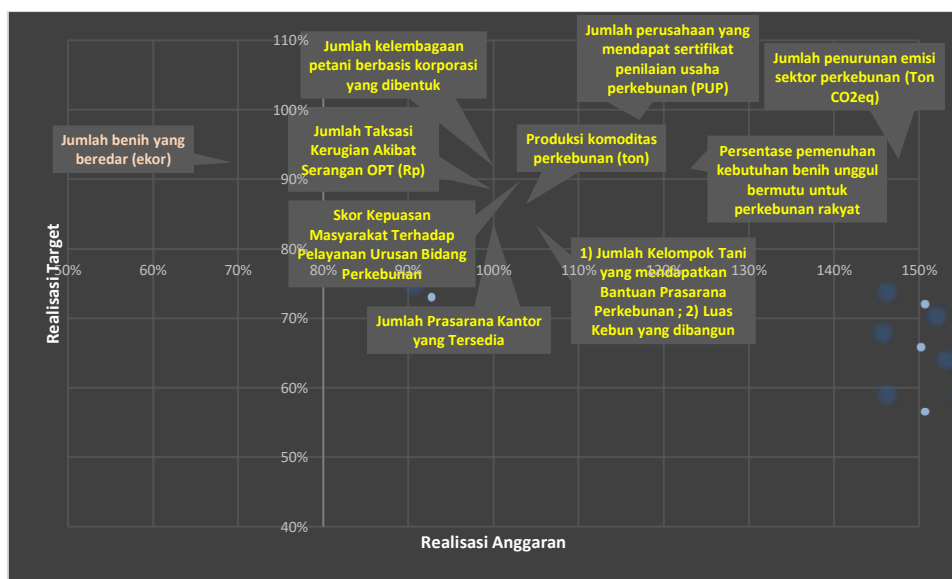
26. Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan memiliki 6 program dengan 10 indikator yaitu: a) Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Ton CO₂eq); b) Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp); c) 1). Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan dan 2) Luas Kebun yang dibangun; d) Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia; e) Jumlah benih yang beredar (ekor); f) Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat; g) Produksi komoditas perkebunan (ton); h) Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk; i) Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP); j) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan.

Terdapat 9 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Ton CO₂eq); b) Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp); c) 1). Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan dan 2) Luas Kebun yang dibangun; d) Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia; e) Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat; f) Produksi komoditas perkebunan (ton); g) Jumlah kelembagaan

petani berbasis korporasi yang dibentuk; h) Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP); i) Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya gejolak harga internasional dan akses pasar, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mencapai Rp. 3000,-/kg, termasuk lada dan lain-lain.

Selain itu, terdapat juga 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut adalah Jumlah benih yang beredar (ekor). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator tidak efektif namun perencanaan anggaran justru efisien adalah ketersediaan prasarana dan sarana perbenihan yang masih kurang, antara lain : jalan yang tersedia belum memadai, belum tersedianya greenhouse, perlunya pengembangan kebun induk dan sarana pendukungnya.



Gambar 6.26. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Perkebunan

Tabel 6.26. Realisasi target dan anggaran program Dinas Perkebunan

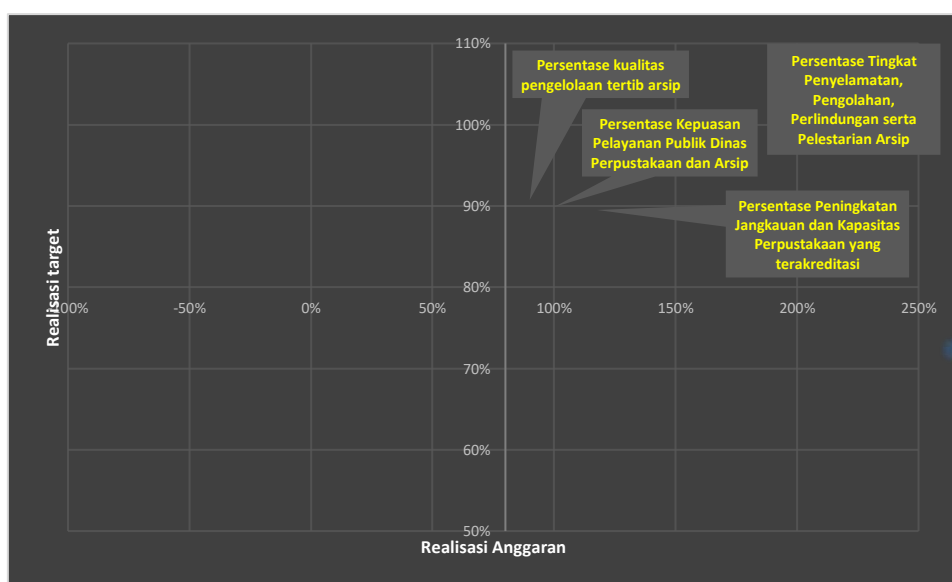
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Ton Co2eq)	147,59%	92,89%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	99,78%	88,56%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun Yang Dibangun	104,88%	83,54%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Jumlah Prasarana Kantor Yang Tersedia	100,00%	83,64%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Benih Yang Beredar (Ekor)	69,31%	92,42%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul Bermutu Untuk Perkebunan Rakyat	123,09%	91,57%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	103,83%	86,43%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi Yang Dibentuk	100,00%	91,88%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (Pup)	117,14%	98,57%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	103,27%	89,92%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			106,89%	89,94%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memiliki 4 program dengan 4 indikator yaitu: a) Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi; b) Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip; c) Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip; d) Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip. Capaian realisasi kinerja dan anggaran dari 4 indikator program ini menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target

indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Meskipun capaian target efektif dan realisasi anggaran efisien, namun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, yakni : pandemi Covid-19, refocusing anggaran, dan penyerapan anggaran yang rendah akibat gagalnya kegiatan pengadaan buku.



Gambar 6.27. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Tabel 6.27. Realisasi target dan anggaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	117,56%	89,51%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100,00%	89,87%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

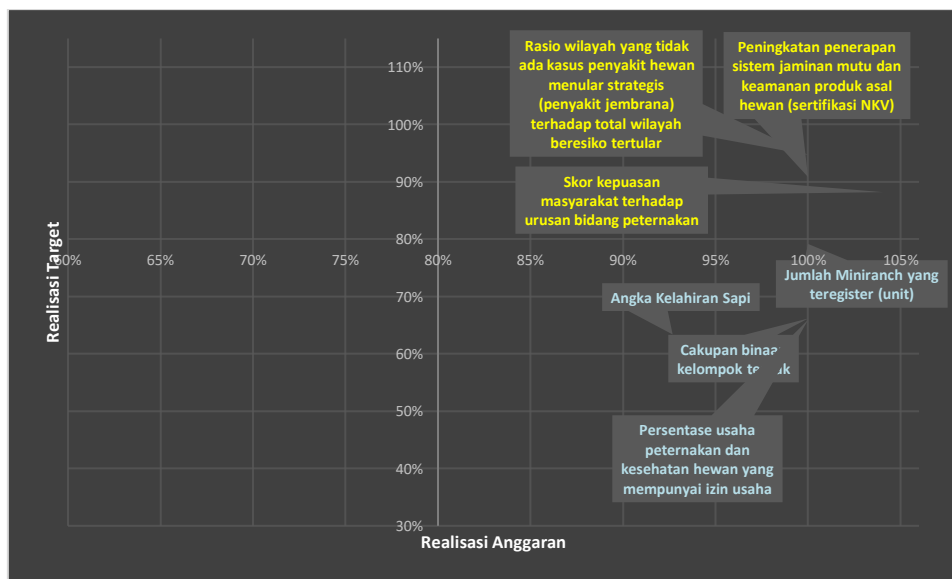
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90,00%	90,75%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	200,00%	99,69%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			126,89%	92,46%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 6 program dengan 7 indikator yaitu: a) Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV); b) Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular; c) Jumlah Miniranch yang teregister (unit); d) Angka Kelahiran Sapi; e) Cakupan binaan kelompok ternak; f) Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha; g) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan. Terdapat 3 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV); b) Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular; c) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang mempengaruhi adalah adanya dukungan dana APBD dan APBN untuk peningkatan

produksi dan produktivitas ternak, serta tingginya minat petani/peternak untuk mengembangkan ternak.

Selain itu, juga terdapat 4 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Jumlah Miniranch yang teregister (unit); b) Angka Kelahiran Sapi; c) Cakupan binaan kelompok ternak; d) Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah tingginya penjualan Sapi Betina Produktif, masih adanya Pematangan Sapi Betina Produktif, tingginya angka kematian pedet, dan kurangnya pelaporan petani ke petugas jika adanya kelahiran.



Gambar 6.28. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

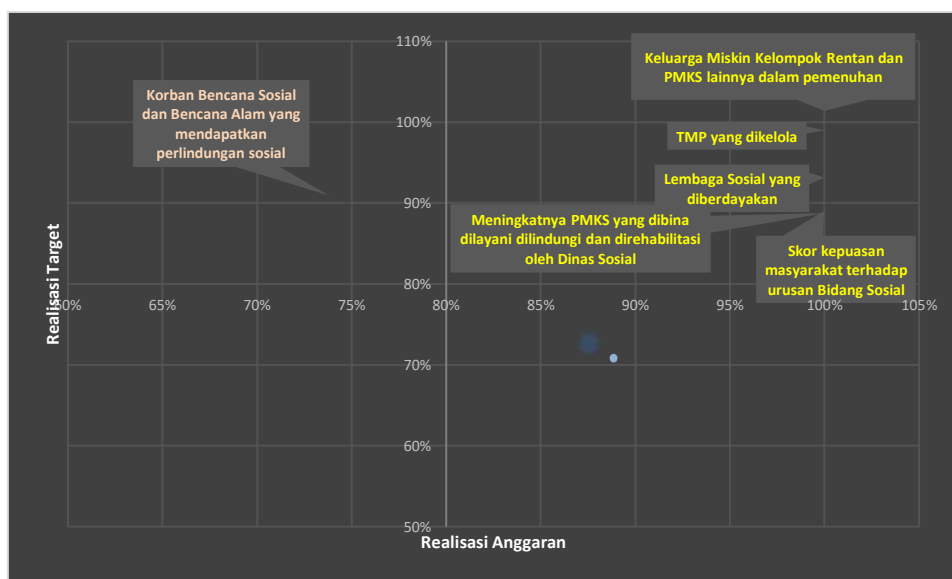
Tabel 6.28. Realisasi target dan anggaran program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	100,00%	90,83%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	100,00%	94,69%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	100,00%	79,17%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	92,68%	63,37%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
4	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan binaan kelompok ternak	100,00%	66,15%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	100,00%	65,92%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	104,05%	88,20%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			99,53%	78,33%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

29. Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki 6 program dengan 6 indikator yaitu: a) Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial; b) TMP yang dikelola; c) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial; d) Keluarga Miskin Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar; e) Meningkatnya PMKS yang dibina dilayani dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial; f) Lembaga Sosial yang diberdayakan. Terdapat 5 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) TMP yang dikelola; b) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial; c) Keluarga Miskin Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar; d) Meningkatnya PMKS yang dibina dilayani dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial; e) Lembaga Sosial yang diberdayakan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut mempengaruhi adalah tersedianya dukungan Dana penanggunggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, serta progres realisasi anggaran seusai target.

Selain itu, juga terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang tidak efektif ($< 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut adalah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara tidak efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Dalam hal perencanaan anggaran, meskipun umumnya dapat dikatakan efisien tetapi terdapat kemungkinan perencanaan anggaran kurang realistis dan terdapat kemungkinan kekurangan anggaran. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator tidak efektif namun perencanaan anggaran justru efisien adalah refocusing anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Akibat pandemi Covid-19.



Gambar 6.29. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Sosial

Tabel 6.29. Realisasi target dan anggaran program Dinas Sosial

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Penanganan Bencana	Korban Bencana Sosial Dan Bencana Alam Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	73,78%	90,95%	Perencanaan target indikator tidak efektif, namun perencanaan anggaran efisien
2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tmp Yang Dikelola	100,00%	98,99%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Sosial	100,00%	89,05%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Keluarga Miskin Kelompok Rentan Dan Pmks Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100,00%	101,39%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pmks Yang Dibina Dilayani Dilindungi Dan Direhabilitasi Oleh Dinas Sosial	100,00%	88,75%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
6	Program Pemberdayaan Sosial	Lembaga Sosial Yang Diberdayakan	100,00%	93,14%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			95,63%	93,71%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

30. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

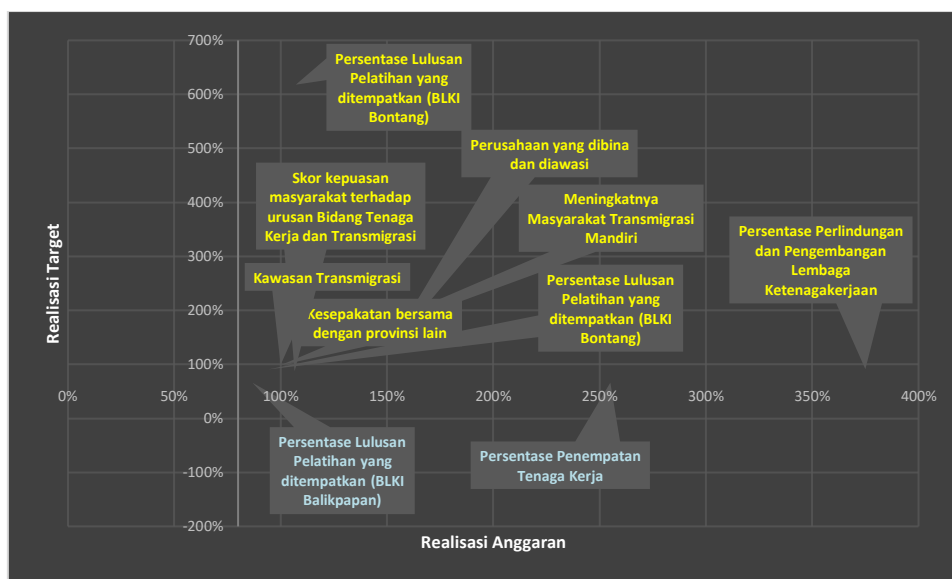
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 8 program dengan 10 indikator yaitu: a) Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; b) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan); c) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang); d) Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja; e) Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri; f) Persentase Penempatan Tenaga Kerja; g) Perusahaan yang dibina dan diawasi; h) Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan); i) Kesepakatan bersama dengan provinsi lain; j) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; k) Kawasan Transmigrasi; l) Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Terdapat 8 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; b) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang); c) Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja; d) Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri; e) Perusahaan yang dibina dan diawasi; f) Kesepakatan bersama dengan provinsi lain; g) Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; h) Kawasan Transmigrasi. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut

mempengaruhi adalah kemampuan kabupaten dalam menyiapkan sarana dan prasarana RTJK warga transmigrasi.

Selain itu, juga terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan); b) Persentase Penempatan Tenaga Kerja. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa Kabupaten/Kota yang diberlakukan pemerintah setempat, sehingga perusahaan membatasi untuk menerima peserta magang diperusahaannya, adanya Refocusing Tahap 1 dan 2 yang mana refocusing tersebut dibatalkan dan masuk pada triwulan IV sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan kegiatan, dan keterbatasan Anggaran pada kegiatan sehingga tidak semua daerah atau Kab/Kota terlaksana.

Sedangkan 2 indikator program lainnya, tidak dilaksanakan, antara lain : a) Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan); b) Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja. Faktor penghambat tidak dilaksanakannya indikator program ini adalah jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kuantitas jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang ada (Rasio pengawas 1 orang: 60 perusahaan), serta pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan (lock down).



Gambar 6.30. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 6.30. Realisasi target dan anggaran program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

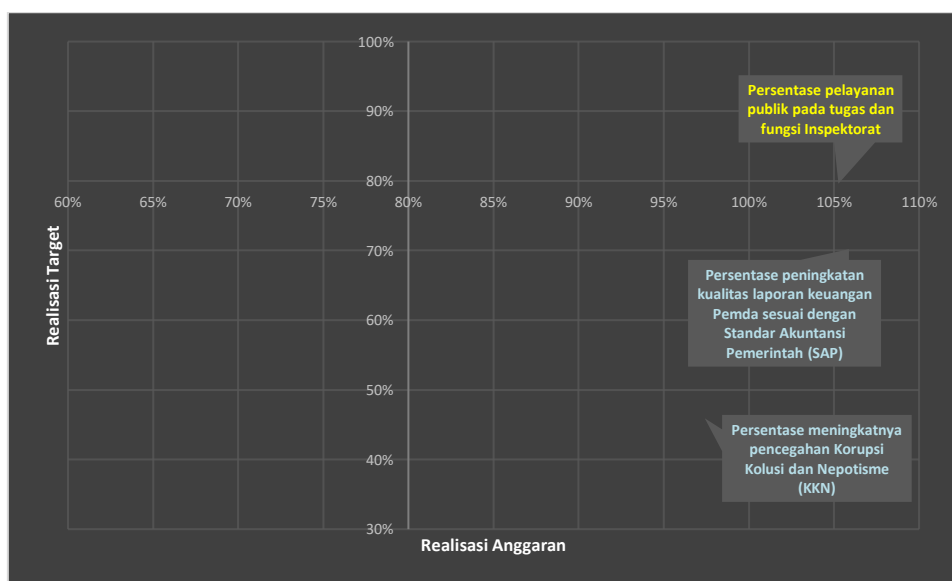
No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	375,00%	91,17%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	86,76%	66,09%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	94,12%	90,70%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	107,14%	618,01%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	100,00%	94,43%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	255,06%	66,27%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang dibina dan diawasi	149,33%	120,46%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	100,00%	98,64%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106,58%	87,25%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
8	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	100,00%	99,22%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			147,40%	143,23%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

31. Inspektorat

Inspektorat memiliki 3 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat; b) Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); c) Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Capaian realisasi kinerja dan anggaran dari 3 indikator program ini, menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah keterbatasan dukungan anggaran dan sarana

prasarana untuk peningkatan SDM APIP, serta pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap refocusing anggaran.



Gambar 6.31. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Inspektorat

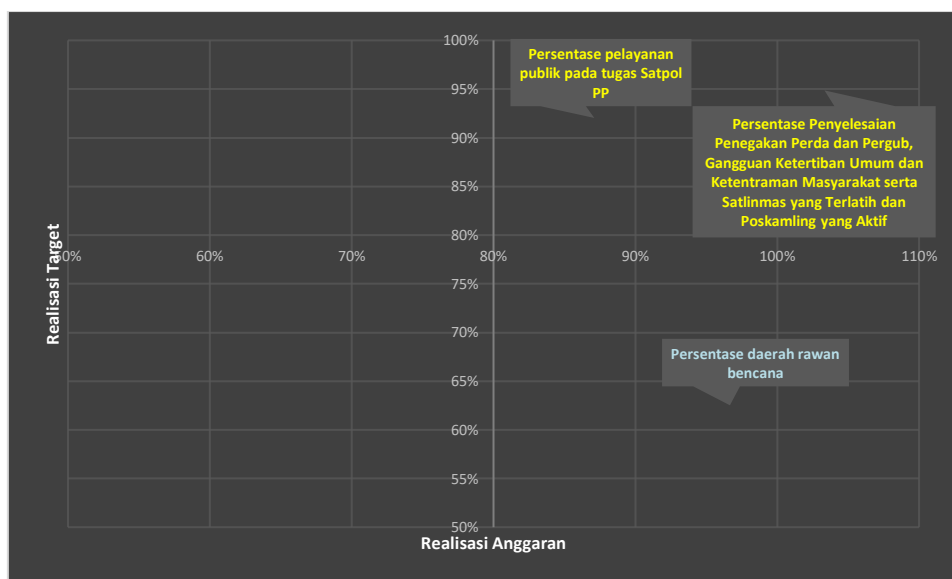
Tabel 6.31. Realisasi target dan anggaran program Inspektorat

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	105,26%	79,60%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	105,88%	70,21%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	97,41%	45,92%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
Rata-Rata			102,85%	65,24%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

32. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 3 program dengan 3 indikator yaitu: a) Persentase daerah rawan bencana; b) Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif; c) Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP. Terdapat 2 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif; b) Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator.

Selain itu, juga terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut adalah Persentase daerah rawan bencana. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah adanya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap terhadap kebijakan refocusing anggaran, termasuk berdampak kepada HUT Damkar yang tidak dilaksanakan akibat Covid-19 tersebut.



Gambar 6.32. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 6.32. Realisasi target dan anggaran program Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase daerah rawan bencana	96,67%	62,52%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	103,33%	94,86%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	87,11%	92,03%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Rata-Rata	95,70%	83,14%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

33. Sekretariat Daerah

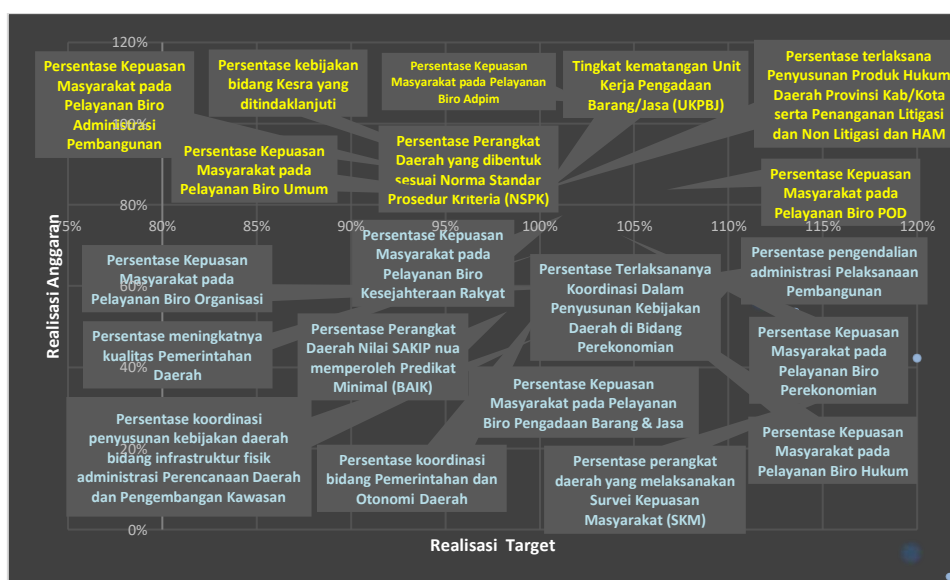
Sekretariat Daerah memiliki 8 program dengan 20 indikator yaitu: a) Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan; b) Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan; c) Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); d) Persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum; e) Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM; f) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti; g) Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; h) Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah; i) Persentase Pengendalian Penerapan SPM; j) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK); k) Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK); l) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); m) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim; n) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum; o) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi; p) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD; q) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat; r) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian; s) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan; t) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa; u) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum; v) Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian.

Terdapat 9 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); b) Persentase

terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM; c) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti; d) Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK); e) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim; f) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD; g) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat; h) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan; i) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui Local Value Chain (LVC) dan Peta Jalan/Roadmap Pengendalian Inflasi yang menjadi pedoman dalam pengendalian inflasi daerah, Optimisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait/stakeholder melalui integrasi program yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi, serta adanya dukungan regulasi melalui Penetapan Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah terkait dengan pengembangan BUMD Kalimantan Timur di berbagai sektor.

Selain itu, juga terdapat 11 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut antara lain : a) Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan; b) Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan; c) Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; d) Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah; e) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK); f) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); g) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum; h) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi; i) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian; j) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa; k)

Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Sedangkan 1 indikator program lainnya, tidak dilaksanakan, yakni Persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan indikator program kegiatan ini adalah kondisi Pandemi Covid-19 sepanjang Tahun 2020-2021 yang menyebabkan Pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan anggaran kurang maksimal, SOTK Sekretariat Daerah yang sesuai dengan PMDN 56/2019 belum ditetapkan sementara kegiatan/sub kegiatan di APBD 2021 sudah berubah sesuai PMDN 90/2019 sehingga pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan baru masih tertunda karena perubahan tupoksi, serta regulasi Perencanaan dan Penganggaran yang sering berubah-ubah.



Gambar 6.33. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Sekretariat Daerah

Tabel 6.33. Realisasi target dan anggaran program Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	107,14%	63,07%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100,00%	47,52%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	100,00%	82,06%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
3	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100,00%	83,46%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100,00%	82,36%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
5	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00%	54,06%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	100,00%	68,03%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
6	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	98,27%	53,73%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	100,00%	91,47%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	117,52%	36,45%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	102,70%	105,11%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

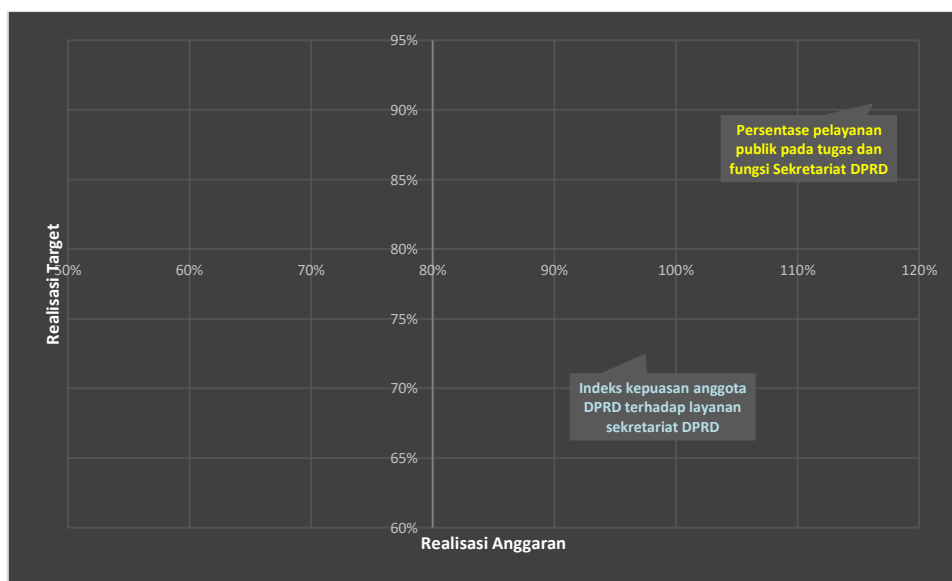
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA TAHUN 2021

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum	103,66%	61,63%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	103,15%	59,84%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD	106,73%	83,76%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	101,22%	77,43%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	104,27%	72,62%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	93,90%	88,25%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	100,09%	24,14%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	97,33%	82,23%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	111,11%	64,59%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
Rata-Rata			102,35%	69,09%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien

34. Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah memiliki 2 program dengan 2 indikator yaitu: a) Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD; b) Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), sekaligus menunjukkan capaian realisasi anggaran yang efisien ($\geq 80\%$). Indikator program tersebut adalah persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif dan perencanaan anggaran dilakukan secara efisien. Faktor pendorong yang membuat perencanaan target indikator efektif dan perencanaan anggaran efisien adalah ketepatan dalam penentuan target indikator dan ketepatan dalam penentuan rencana anggaran terhadap target indikator. Factor lain yang turut mempengaruhi adalah semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan, terutama dalam hal fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Selain itu, juga terdapat 1 indikator program yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya menunjukkan capaian target yang efektif ($\geq 80\%$), namun menunjukkan capaian realisasi anggaran yang justru tidak efisien ($< 80\%$). Indikator program tersebut adalah Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan target indikator dilakukan secara efektif sementara perencanaan anggaran dilakukan secara tidak efisien. Faktor penghambat yang membuat perencanaan target indikator efektif namun perencanaan anggaran justru tidak efisien adalah adanya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap terhadap kebijakan refocusing anggaran.



Gambar 6.34. Efektivitas dan efisiensi pada indikator program Sekretariat DPRD

Tabel 6.34. Realisasi target dan anggaran program DPRD

No	Program	Indikator	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	97,50%	72,51%	Perencanaan target indikator efektif, namun perencanaan anggaran tidak efisien
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	116,25%	90,49%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien
Rata-Rata			106,88%	81,50%	Perencanaan target indikator efektif, dan perencanaan anggaran efisien

BAB VII. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

7.1. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan di RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 : Misi 1

Delapan perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 1 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan penyandang Disabilitas	Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing dengan indikator indeks pembangunan manusia	[SASARAN] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program 	<p>Faktor penghambat Sasaran 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program dan kegiatan untuk pengembangan sekolah kejuruan tidak terlaksana sehingga tidak bias dilakukan evaluasi. 2. Sekolah pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut. 3. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud. 4. Diperlukan waktu untuk melakukan review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam setiap pembayaran tahapan kegiatan. 5. Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pembangunan yang direncanakan</p> <p>5. Penyusunan Program Perencanaan Pencapaian Misi 1 disesuaikan dengan disesuaikan dengan program perencanaan nasional</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM 3. Penetapan lokasi di Kaltim sebagai wilayah IKN yang mendorong kebijakan 	<p>mengikuti pelatihan peningkatan Kompetensi PTK.</p> <p>6. Organisasi pelaksana program terlambat menerima pelimpahan kewenangan formal untuk melaksanakan program sehingga berakibat keterlambatan dalam melaksanakan program tersebut (Badan pengelola beasiswa baru menerima penunjukan pada bulan Juli 2019).</p> <p>7. Program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak terlaksana.</p> <p>8. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud.</p> <p>9. Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pengembangan SDM di Kaltim mendapatkan support dari RPJMN</p>	<p>Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan.</p> <p>10. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak.</p> <p>11. Masih kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p> <p>12. Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
				jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai.
		[SASARAN] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan		Faktor penghambat pencapaian sasaran 5: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gagalnya keterlibatan Kaltim dalam event dan multi event yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10-18 Oktober oleh karna pembatalan tuan rumah Papua. 2. Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu 3. Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai. 4. Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecapan hidup pemuda tidak terlaksana.
		[SASARAN] 1.3 Meningkatnya pemerataan		Faktor penghambat pencapaian sasaran 3:

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		ketahanan kesehatan masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai. 3. Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial. 4. Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN.
		[SASARAN] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan		<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pendampingan bagi pelaku usaha dalam fasilitasi akses pasar, pemupukan modal dan pengembangan kreatifitas untuk peningkatan daya saing usaha ekonomi produktif yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
				<p>dikelola oleh kelompok perempuan</p> <p>2. Program dan kegiatan terkait penguatan kelembagaan perempuan dan anak tidak terlaksana.</p> <p>3. Belum adanya <i>base data</i> masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan yang menyebabkan realisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan social dan pembinaan penyandang cacat dan trauma yang menyebabkan pencapaian program tidak sesuai dengan target yang diprogramkan</p>
	[TUJUAN] 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	[SASARAN] 2.1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <p>1. Orientasi Misi dan Visi Pemerintah Provinsi yang mengarah pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan ;</p>	<p>Faktor penghambat Sasaran 8:</p> <p>1. Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum ada penentuan kriteria lembaga ekonomi usaha desa, system pengelolaan hingga produksi dari</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat pedesaan di daerah;</p> <p>3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yaitu meningkatkan keberdayaan pedesaan;</p> <p>4. Tersedianya SDM pendamping pedesaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat pedesaan;</p> <p>5. Program penguatan kelembagaan di desa sebagai upaya mendukung kemandirian pemerintahan di desa</p>	<p>lembaga ekonomi desa yang akan diberdayakan tersebut;</p> <p>2. Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar;</p> <p>3. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian;</p> <p>4. Minimnya sarana dan prasarana system informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan</p> <p>5. Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas</p> <p>6. Geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur yang masih sangat luas</p> <p>7. Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan pedesaan secara nasional 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan program untuk penguatan daerah tertinggal, terluar dan terjauh (3T) dari pemerintah pusat 3. Kondusifitas daerah yang menyebabkan program pembangunan pedesaan bisa diterima oleh masyarakat 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur berbasis sektor pedesaan 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur 9. Minimnya sarana dan prasarana sistem informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan berbasis masyarakat (belum terbangun program korporasi berbasis petani yang berkelanjutan dan mandiri)

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam</p> <p>6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat mendukung dalam proses pembangunan secara berkelanjutan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal</p>	
		[SASARAN] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja		<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 6 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja 2. Belum ada penyusunan desain data dan mapping (peta jalan) peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja di Kaltim (<i>link and match</i> SDM dan DUDI) 3. Keterbatasan perangkat lunak dalam mendukung pelatihan/pendidikan vokasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
				<p>yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja (contoh : desain kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi)</p> <p>4. Keterbatasan perangkat (keras/ sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan / pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>5. Perangkat daerah “terkesan” menjalankan program masing-masing (tanpa terkoordinasi dalam pencapaian misi 1)</p>

7.2. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan di RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 : Misi 2

Terkait misi 2, terdapat 10 SKPD yang terlibat pada misi 2 ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa; Dinas Pariwisata ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan; dan Badan Pendapatan Daerah. Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 2 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
[MISI] 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	[TUJUAN] 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	[SASARAN] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai salah satu program pembangunan daerah yang strategis dikarenakan terkait dengan pendanaan pembangunan daerah 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah; 3. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD pendapatan daerah yang memiliki kompetensi untuk mendukung pencapaian program; 4. Pelimpahan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi UU Nomor 23 tahun 2014; <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah 	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 17 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim 2. Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah 3. Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah 4. Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan sebagai potensi penerimaan daerah;</p> <p>2. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat menjadikan adanya penambahan transfer dana pembangunan bagi Kaltim</p> <p>3. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam sebagai bagian dari pendapatan daerah;</p> <p>4. Potensi keanekaragaman hayati dan keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi menjadikan potensi sebagai sumber pendapatan daerah</p>	<p>5. Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih sedikit.</p> <p>6. Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal</p> <p>7. Program menemukan sumber pendapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.</p> <p>8. Faktor kekurangan SDM di UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal.</p> <p>1. Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur.</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			5. Adanya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur dengan cara melakukan pembayaran pajak daerah.	
		[SASARAN] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah provinsi untuk mempercepat proses pemberian izin investasi agar mendukung pembangunan ekonomi daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku investasi dengan program promosi dan keterbukaan informasi terhadap potensi sumber daya alam di daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan 	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sinkronisasi terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah terkait perizinan (perizinan masih ada yang bersifat dikelola daerah dan ada juga yang dikelola pemerintah pusat), pengawasan dan pengendalian system investasi di daerah (system pengawasan dan pengendalian ada yang dikelola pusat misalnya terkait dengan investasi yang melibatkan modal asing) 2. Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit;</p> <p>4. Sudah terbangun mekanisme komunikasidan koordinasi terhadap perangkat daerah sebagai pengelola sentra produksi dengan Dinas Penanaman Modal agar mendorong iklim invetasi di Kaltim;</p> <p>5. Program pengembangan konektivitas kawasan produksi sebagai salah satu program prioritas</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <p>1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan invetasi nasional dalam memperlancar perizinan investasi di daerah</p> <p>2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam mempermudah investasi di daerah melalui PP No.24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan</p>	<p>3. Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah</p> <p>4. Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri</p> <p>5. Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkoneksi sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan.</p> <p>6. Keberadaan UU CK (Omnibus Law) yang mengambil alih kewenangan pemerintah daerah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>Kemudahan Investasi di daerah</p> <p>3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur</p> <p>4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur</p> <p>5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan investasi dalam dunia industri</p> <p>6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan industri di Kalimantan Timur</p>	
		[SASARAN] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <p>1. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian</p>	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 10 :</p> <p>1. Belum adanya regulasi dan kebijakan dalam sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		Migas dan Batubara	<p>pembangunan perindustrian di Kaltim;</p> <p>2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku industri dalam pembangunan ekonomi daerah;</p> <p>3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan kawasan industri provinsi sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit yaitu Kawasan Industri Balikpapan dan Kawasan Industri Maloy;</p> <p>4. Program pengembangan industri yang berdasarkan jalur transportasi udara dan laut yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional;</p> <p>5. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim yang mengarahkan pengembangan</p>	<p>2. Belum adanya program pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku</p> <p>3. Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri</p> <p>4. Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim</p> <p>5. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim</p> <p>6. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di Kalimantan Timur</p> <p>7. Masih rendahnya dukungan pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>dan dukungan terhadap pembangunan industri dikarenakan keberadaan sumber daya alam Kaltim yang besar;</p> <p>6. Perencanaan terhadap konektivitas infrastruktur antara sentra produksi dengan kawasan industri.</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan industri di Indonesia di arahkan ke luar Pulau Jawa salah satunya ke Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Belum ada mapping dan data base produksi bahan baku yang bisa menjadi suplai bagi industri 9. Program pembangunan wilayah dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas 10. Masih terdapat sektor penting yang belum masuk ke dalam program prioritas, salah satunya sektor perdagangan dan pengendaliannya 11. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian (wasdal) tata niaga produksi dan pemasaran di Kalimantan Timur

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pengembangan ekonomi ke arah <i>economic green</i></p> <p>3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur</p> <p>4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur</p> <p>5. Keberadaan jalur laut (ALKI II) dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam</p> <p>6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan industri di Kalimantan Timur sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat</p>	
		[SASARAN] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <p>1. Sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi</p>	Faktor penghambat pencapaian sasaran 12 :

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		Pertanian (dalam arti luas)	<p>yang diunggulkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kaltim;</p> <p>2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor tanaman pangan dan hortikultura di kaltim berkembang;</p> <p>3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit;</p> <p>4. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang mendukung pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kaltim;</p> <p>5. Keberadaan UPTD Pembenihan padi lokal dan tanaman hortikultura berbasis tanaman lokal</p>	<p>1. Belum terkonektivitasnya sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan</p> <p>2. Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW</p> <p>3. Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian</p> <p>4. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian sistem tata niaga pertanian di Kalimantan Timur</p> <p>5. Belum adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian misalnya keterkaitan pembangunan irigasi dengan kawasan sentra produksi dan program pengembangan industri hilir tidak disertai dengan data produksi dari daerah bahan baku</p> <p>6. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian.</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembanguann pertanian nasional yang ditujukan di luar pulau jawa yaitu Kalimantan Timur; 2. Keadaan geografi dan topografi lahan di kaltim yang mendukung pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura ; 3. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam sektor pertanian tanaman pangan dan hortikulturayang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah <i>economic green</i> 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Belum adanya Optimalisasi lahan yang sudah ditetapkan di RTRWP Kaltim 8. Lemahnya peran UPTD dalam mendorong peningkatan ketersediaan benih dan produktivitas padi dan tanaman hortikultura. 9. Belum adanya optimalisasi terhadap peran pertanian sistem berladang (padi ladang) padahal sistem ini merupakan unsur kearifan lokal di Kalimantan Timur. 10. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian (wasdal) tata niaga produksi dan pemasaran di Kalimantan Timur

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam upaya pemenuhan masyarakat di ibu kota</p> <p>5. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan pertanian secara berkelanjutan</p>	
		[SASARAN] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <p>6. Dukungan pemerintah provinsi untuk mempercepat proses pemberian izin investasi agar mendukung pembangunan ekonomi daerah;</p> <p>7. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku investasi</p>	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 11:</p> <p>7. Belum adanya sinkronisasi terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah terkait perizinan (perizinan masih ada yang bersifat dikelola daerah dan ada juga yang dikelola pemerintah pusat), pengawasan dan pengendalian system investasi di daerah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>dengan program promosi dan keterbukaan informasi terhadap potensi sumber daya alam di daerah;</p> <p>8. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit;</p> <p>9. Sudah terbangun mekanisme komunikasi dan koordinasi terhadap perangkat daerah sebagai pengelola sentra produksi dengan Dinas Penanaman Modal agar mendorong iklim investasi di Kaltim;</p> <p>10. Program pengembangan konektivitas kawasan produksi sebagai salah satu program prioritas</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p>	<p>(system pengawasan dan pengendalian ada yang dikelola pusat misalnya terkait dengan investasi yang melibatkan modal asing)</p> <p>8. Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap</p> <p>9. Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah</p> <p>10. Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri</p> <p>11. Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkoneksi sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan.</p> <p>12. Keberadaan UU CK (Omnibus Law) yang mengambil alih kewenangan pemerintah daerah</p> <p>13.</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>7. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan investasi nasional dalam memperlancar perizinan investasi di daerah</p> <p>8. Dukungan Pemerintah Pusat dalam mempermudah investasi di daerah melalui PP No.24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah</p> <p>9. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur</p> <p>10. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur</p> <p>11. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan investasi dalam dunia industri</p>	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			12. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan industri di Kalimantan Timur	
		[SASARAN] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan 	<p>Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refocusing anggaran dampak pandemic Covid 19, program prioritas menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang berdampak perubahan target dan capaian kinerja dari perangkat daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit;</p> <p>4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya;</p> <p>5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2;</p> <p>6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah;</p> <p>7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan</p>	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik;</p> <p>8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan industri daerah yang salah satunya mendorong usaha kecil dan menengah dalam mendukung ekonomi masyarakat sebagai bagian pembangunan ekonomi di Kaltim</p> <p>9. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD Kaltim terkoreksi kecil sehingga masih mampu mendukung pencapaian program prioritas di RPJMD</p> <p>10. Orientasi Misi dan Visi Pemerintah Provinsi yang mengarah pembangunan</p>	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan</p> <p>11. Komoditi SDA Kaltim yang mampu mengangkat nilai perekonomian daerah (PDRB) dan perekonomian masyarakat</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan menjadi bahan 	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>baku usaha kecil dan menengah</p> <p>3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur</p> <p>4. Trend usaha kecil dan menengah yang lagi bertumbuh di Kalimantan Timur</p> <p>5. Keberadaan jalur transportasi yang lengkap di Kota-kota besar Kalimantan Timur</p> <p>6. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah</p> <p>7. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan usaha kecil dan menengah</p>	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>8. Masuknya wilayah Kaltim sebagai IKN mendukung pembangunan daerah</p> <p>9. Kesesuaian program dan kebijakan perencanaan Pusat dalam pembangunan daerah di Kaltim</p>	
		<p>[SASARAN] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah</p>	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusunnya Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadikan pembangunan pariwisata sudah terencana; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor pariwisata sebagai sektor unggulan agar mendukung pembangunan ekonomi masyarakat; 3. Sudah terbangun mekanisme system jaringan pengelolaan pariwisata antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Swasta dan 	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih sedikit, belum terampil dan tersertifikasi untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan. 2. Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan 3. Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata. 4. Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>masyarakat melalui kalender event pariwisata Kaltim;</p> <p>4. Program perencanaan pengembangan pariwisata terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur sehingga konektivitas pariwisata bisa terbangun dengan baik</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional dengan kebijakan pariwisata provinsi 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki obyek dan destinasi wisata yang sangat banyak 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang besar di Kalimantan Timur 	<p>5. Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang profesional</p> <p>6. Masih belum adanya jaminan keamanan di destinasi pariwisata</p> <p>7. Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah)</p> <p>8. Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>4. Ketersediaan Bandar Udara di Balikpapan dan Samarinda yang menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan</p> <p>5. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan pariwisata secara berkelanjutan</p> <p>6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur</p>	

7.3. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan di RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 : Misi 3

Terkait misi 3, Tiga perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat, serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 3 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
[MISI] 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	[TUJUAN] 4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar.	[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program peningkatan aksesibilitas wilayah di Kaltim; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong konektivitas antar wilayah terutama untuk menyikapi akses terjauh, terluar dan tertinggal (3T); 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan peningkatan aksesibilitas wilayah yang telah direncanakan setiap periodik; 	<p>Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografi dan topografi Kaltim yang luas dan bervariasi 2. Masih kecilnya dana pembangunan (APBD) Kaltim sehingga belum optimalnya peningkatan aksesibilitas wilayah 3. Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang menyebabkan akses 4. Sarana dan prasarana pembangunan aksesibilitas daerah terkendala dengan harga bahan baku yang mengikuti keberadaan lokasi daerah pembangunan sehingga biaya pembangunan menjadi mahal ; 5. Disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalur transportasi misalnya pelabuhan dan bandara

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>4. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pembangunan daerah dengan berdasarkan tingkat aksesibilitas dan konektivitas pengembangan kawasan di Kaltim;</p> <p>5. Program sosialisasi pemerintah provinsi terhadap penggunaan sarana dan prasarana transportasi umum</p> <p>6. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD Kaltim terkoreksi kecil sehingga masih mampu mendukung pencapaian program prioritas di RPJMD</p> <p>7. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pembangunan daerah dengan menghubungkan kawasan produksi dan pusat pengembangan ekonomi baik aksesibilitas, infrastruktur hingga sistem komunikasi secara merata di Kaltim</p>	<p>6. Refocusing anggaran dampak pandemic Covid 19, program prioritas menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang berdampak perubahan target dan capaian kinerja dari perangkat daerah</p> <p>7. Keadaan geografi dan luasnya wilayah Kaltim yang menyebabkan pembangunan sistem komunikasi di daerah belum merata (menara komunikasi dan internet)</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>8. Dukungan dan keberadaan kearifan lokal masyarakat di kaltim dalam mendukung konektivitas aksesibilitas</p> <p>9. Kesesuaian Program perencanaan Kaltim yang mengarah Sustainability Development</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dari Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah 3T (terluar, terjauh dan tertinggal) 2. Angkutan sungai merupakan salah satu angkutan yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Kaltim 	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>3. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat yang melekat terhadap keberadaan sungai</p> <p>4. Masuknya wilayah Kaltim sebagai IKN mendukung pembangunan konektivitas di Kaltim</p> <p>5. Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung konektivitas dan pemerataan aksesibilitas di Kaltim</p> <p>6. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap investasi swasta di Kaltim membantu membuka dan menjadikan pemerataan pembangunan aksesibilitas bagi masyarakat</p>	
		[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <p>1. Kaltim sangat kaya dengan potensi produksi sumber daya alam yang merupakan produk dari kawasan;</p>	<p>Faktor penghambat Sasaran 4.1:</p> <p>1. Program dan kegiatan untuk konektivitas antar kawasan harus bisa disinkronkan dengan perangkat daerah yang lain sebagai pengelola kawasan produksi</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		berbasis tata ruang/kewilayah an	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pembangunan dan konektivitas antar kawasan untuk meningkatkan nilai PDRB daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan konektivitas antar kawasan sebagai program strategis; 4. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim; 5. Sebagai program prioritas didukung dengan alokasi pendanaan dari APBD <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masih terdapat disharmoni regulasi kebijakan antar pengelola kawasan sentra produksi sehingga belum terbangun konektivitas; 3. Aktivitas kawasan produksi yang relatif bergerak secara parsial-parsial; 4. Topografi dan geografi Kaltim yang sangat luas 5. Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan antar kawasan dari kabupaten/kota di Kaltim 6. Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi dan masih berorientasi pelaksanaan tugas (<i>business as usual</i>) 7. Keberadaan UU CK (Omnibus Law) yang mengurangi peran dan kewenangan daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan secara nasional 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi ke arah <i>economic green</i> 3. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam di kawasan-kawasan produksi 4. Peran masyarakat di pelosok yang mendukung pembangunan pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam 	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>proses pembangunan secara berkelanjutan agar meningkatkan pemerataan pembangunan di Kaltim;</p> <p>5. Sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan (<i>SDGs programme</i>)</p>	
		<p>[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayah an</p>	<p>Faktor Pendorong secara Internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program prioritas yang mendapatkan dukungan alokasi pendanaan dari APBD; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pemerataan infrastruktur air bersih ke masyarakat Kaltim; 3. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan antar kawasan yang disertai dengan penyediaan infrastruktur air bersih 4. Upaya untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi wilayah 	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran 4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengimplementasian program menjadi ke arah penanganan banjir sehingga menjadi program kurang tepat sasaran. 2. Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi 3. Keterbatasan lahan pembangunan infrastruktur sumber daya air 4. Masih kentalnya budaya masyarakat di Kaltim yang memanfaatkan air sungai, danau dan rawa secara langsung

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>maka program ini menjadi program pendukung yang memiliki daya ungkit pencapaian misi.</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global (SDGs) terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat 2. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat yang bermukim di sepanjang pesisir sungai dan laut; 3. Kondisi alam di Kaltim yang di dominasi dengan sungai, rawa dan danau sehingga sangat potensi sebagai penyediaan sumber air bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat 6. Pelaksanaan operasi pemeliharaan yang belum optimal terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada. 7. Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi
		[SASARAN] 4.1 Meningkatnya	Faktor Pendorong secara Internal meliputi :	Faktor penghambat pencapaian sasaran 4.1 :

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayah an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai program prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berdasar pada ekonomi berkelanjutan; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong menurunkan kawasan kumuh di kota; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis; 4. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam upaya menata kawasan kumuh perkotaan yang direncanakan setiap periodik; <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim 2. Belum adanya peran kesadaran masyarakat dalam menata pemukiman 3. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong penataan pemukiman di kota agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh. 4. Pembangunan dan penataan kawasan pemukiman akan beriringan dengan tingkat ekonomi masyarakat 5. Belum ada <i>mapping</i> dan desain road map penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang berkelanjutan (SDGs) 2. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 3 kota besar sehingga penanganan kawasan kumuh perkotaan masih dapat cepat teratasi 3. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pembangunan kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. 	
		[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayah an	Faktor Pendorong secara Internal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai program prioritas dalam upaya Kaltim mandiri dan berdaulat terhadap energi dan energi terbarukan; 2. Sinkronisasi antgar perangkat daerah Kaltim dalam mendorong pengelolaan energi terbarukan 	Faktor penghambat pencapaian sasaran 4.1: <ol style="list-style-type: none"> 1. Disharmoni kebijakan antara pemerintah daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim 2. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis;</p> <p>4. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung program pengembangan energy terbarukan di Kaltim;</p> <p>5. Ketersediaan regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi (<i>renewable energy</i>) di Kaltim</p> <p>6. Potensi ketersediaan yang besar <i>renewable energy</i> dari sektor Perkebunan Kelapa sawit</p> <p>Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:</p>	<p>masih agak sulit menembus di daerah pedalaman;</p> <p>3. Belum adanya regulasi baik di secara nasional maupin di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan pemanfaatan energi secara berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan potensi produksi sumber energi terbarukan 3. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pembangunan energi (<i>renewable energy and non renewable energy</i>) di Kalimantan Timur 4. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan energi yang sangat besar; 5. Ketersediaan energi terbarukan yang sangat besar dari limbah kelapa sawit yang 	

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			dikelola oleh Pabrik kelapa sawit di Kaltim. 6. Sungai Mahakam sebagai salah satu sungai terbesar di Indonesia yang memiliki potensi sebagai sumber energi yang potensial	

7.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan di RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 : Misi 4

Misi 4, terdapat Tiga perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup, Badan penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pembangunan misi 4 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini:

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
[MISI] 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	[TUJUAN] 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	[SASARAN] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi program pemerintah Provinsi yang <i>concern</i> dalam mendukung keberadaan lingkungan secara berkelanjutan (menjadi salah satu program prioritas) 2. Adanya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berdaulat 3. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, terutama adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Dukungan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 5. Penurunan kualitas lingkungan hidup terutama perubahan iklim menjadi isu global yang menjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam 3. Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran 5. Keberadaan UU CK (Omnibus Law) yang menyebabkan tumpang tindihnya peran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di beberapa sektor 6. Belum adanya Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawab DLH 7. Belum ada mapping dan data base terhadap program pengawasan pengendalian Lingkungan Hidup di kawasan produksi dan dampak

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>perhatian internasional maupun nasional.</p> <p>6. Adanya peluang bantuan pusat maupun internasional dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)</p> <p>7. Adanya kesadaran dan sinergitas pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, swasta, akademisi, pemerhati dan komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup</p> <p>8. Dukungan stakeholder (masyarakat dan Industri) di kaltim dalam membangun lingkungan yang lestari dan berkelanjutan</p> <p>9. Ketersediaan dukungan dari lembaga organisasi non pemerintahan, peneliti, akademisi dan industri dalam menyelenggarakan kebijakan</p>	<p>aktivitas produksi oleh perangkat daerah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pengawasan dan pengendalian LH terutama dalam emisi Gas CO2 dan deforestasi</p> <p>10. Program dan Kebijakan Nasional yang menjadikan Kaltim sebagai daerah percontohan penguran emisi gas CO2</p>	
		<p>[SASARAN] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana</p>	<p>1. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>2. Adanya kemitraan antar <i>stakeholders</i> baik pemerintah, dunia usaha, lembaga usaha masyarakat, Forum Kaltim Peduli Bencana, dan kemitraan dari luar negeri dalam penanggulangan bencana</p> <p>3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Lembaga Legislatif dalam penanggulangan bencana</p> <p>4. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan</p>	<p>1. Refocusing anggaran dampak pandemic Covid 19, program prioritas menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang berdampak perubahan target dan capaian kinerja dari perangkat daerah</p> <p>2. Lemahnya Koordinasi baik internal dan eksternal di lingkungan SKPD termasuknya adanya ego sektoral</p> <p>3. Belum lengkapnya standar operasional prosedur termasuk dalam pelaksanaannya</p> <p>4. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			5. Merencanakan pembangunan Program Desa Tangguh Bencana	<p>5. Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana</p> <p>6. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana, masih terdapat basis data yang tidak mutakhir dan reguler, tidak akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca panen, terbatasnya peta wilayah dalam menganalisa kerusakan parsial, dan alokasi pendanaan yang terbatas</p> <p>7. Rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>8. Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat dalam merencanakan dan mencegah resiko bencana serta kesiapan dalam penanganan bencana</p>

7.5. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan di RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 : Misi 5

Misi 5, terdapat Empat perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pada misi 5 yakni Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pembangunan misi 5 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini:

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
[MISI] 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	[TUJUAN] 6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	[SASARAN] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<p>Faktor internal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam penentuan program, kegiatan serta indikatornya. Pada prinsipnya hampir seluruh program, kegiatan dan indikator pada misi 5 memiliki korelasi dengan ketercapaian sasaran tujuan dan misi pembangunan. Dalam satu perhitungan, diketahui bahwa ketepatan dalam menentukan suatu perhitungan pada akhirnya akan mendorong ketercapaian dari suatu tujuan yang hendak dicapai sepanjang program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 2. Ketersedian dana. Anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan membuat tidak ada alasan bagi OPD terkait untuk merealisasikan capaian kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dijabarkan secara komprehensif apa yang menjadi penghambat kenapa masih cukup banyak SOP perangkat daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Belum tersosialisasi dokumen pelayanan public yang ada di setiap perangkat daerah 3. Setiap perangkat daerah mengadakan server dan membangun data center sendiri. 4. Belum tersedianya perangkat lunak untuk MOD ini yang tidak dikembangkan lagi. 5. Beberapa perangkat daerah melakukan Hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center. 6. Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai.

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>pembangunan misi 5. Hal ini membuat ketersediaan dana menjadi faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia profesional yang tersedia di setiap perangkat daerah terkait; dan</p> <p>4. Struktur organisasi yang proporsional di setiap perangkat daerah terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Ketersediaan anggaran (APBD) yang mendukung program perencanaan pembangunan walaupun dikondisi dampak pandemic Covid 19</p> <p>6. Adanya program revisi RPJMD dalam upaya penyesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat (RPJMN)</p>	<p>7. Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API.</p> <p>8. Terdapat 2 kab/kota yang belum dapat menghadiri pelaksanaan asesmen penilaian.</p> <p>9. Pada fase pembuatan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang menguasai teknologi <i>framework</i>, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan <i>stakeholder</i> mengenai penggunaan aplikasi. Pada fase pengembangan kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadap basis data aplikasi.</p> <p>10. Masih terdapat instansi pemerintah yang menggunakan subdomain kaltimprov.go.id. namun informasi yang dikelola pada website instansi tidak dilakukan up dating</p>
		[SASARAN] 6.2 Terwujudnya	<p>7. Penerapan sistem dan fungsi pengawasan dan pengendalian</p>	<p>1. Sistem Evaluasi Intern Perangkat Daerah Belum Berjalan.</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		Birokrasi yang efektif dan efisien	<p>perangkat daerah oleh Pimpinan Daerah yang bersifat digital</p> <p>8. Sistem pengawasan penyerapan anggaran yang bersifat mobile dan aplikatif</p> <p>9. Proporsionalitas struktur organisasi perangkat daerah dan manajemen aparatur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Faktor eksternal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:</p> <p>1. Kesedian instrumen-instrumen hukum yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan. Diantara instrumen hukum sebagaimana dimaksud yakni:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara</p>	<p>2. Sebagian Besar Perangkat Daerah Belum menyusun Cascading Kinerja.</p> <p>3. Indikator Program dan Kegiatan belum inline dengan sasaran Renstra/ RPJMD</p> <p>4. Masih dilakukan asistensi dan Evaluasi terhadap perangkat daerah.</p> <p>5. Program perencanaan daerah belum diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019</p> <p>6. Perangkat Daerah masih menerapkan perencanaan berbasis “rutinitas” sehingga orientasi untuk program pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terlihat sangat jelas</p> <p>7. Ketersediaan Grand design Reformasi Birokrasi secara nasional yang selaras dengan Program di daerah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		[SASARAN] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<p>yang Bersih dan Bebas dari KKN.</p> <p>b. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun</p>	<p>1. Dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas.</p> <p>2. Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi</p> <p>3. Kesiadaan instrumen-instrumen hukum dan perangkat kebijakan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</p>	<p>daerah yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan</p> <p>4. Program dan Kebijakan Nasional yang mendukung keselarasan Pembangunan daerah dan Pusat</p> <p>5. Kerjasama dan koordinasi Perangkat Kerja Pengawasan dan pengendalian (Pusat dan daerah) Kinerja terhadap Program Perangkat daerah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<p>2. Partisipasi publik (masyarakat). Bagaimanapun, keterlibatan publik tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tidak sedikit kini instrumen hukum yang memberi ruang bagi publik (masyarakat) untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari keberhasilan kerja-kerja pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. Hal inilah yang seyogyanya harus disikapi secara bijak untuk kemudian mampu dikonversi sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal untuk mencapai kinerja pembangunan misi 5.</p>	

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Rekomendasi Tindak Lanjut RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Hasil Evaluasi Tahun Ketiga.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Ketiga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SKPD dalam pelaksanaan RPJMD sebagai upaya pencapaian misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

8.1.1. Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 1.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 1 “Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas” adalah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan penyandang Disabilitas	[TUJUAN] 1. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	[SASARAN] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1. Menyusun peta jalan akselerasi kualitas layanan pendidikan umum dan vokasi yang berorientasi pada prinsip link and match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada dunia industri/dunia usaha

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>2. Membentuk gugus tugas yang bekerja secara kolaboratif antar pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan peta jalan pengembangan pendidikan yang berorientasi peningkatan daya saing SDM, mengingat persoalan peningkatan daya saing SDM adalah permasalahan yang bersifat multidimensional.</p> <p>3. Perluasan dan peningkatan layanan pelatihan vokasi yang berorientasi permintaan pasar tenaga kerja</p> <p>4. Menambah kuota tenaga pendidik yang tersertifikasi serta mengajar sesuai keahlian yang dimiliki</p> <p>5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang belajar seperti penambahan fasilitas jaringan internet di sekolah, mengupdate bahan ajar/buku pelajaran yang terbaru dan layak pakai berbasis <i>e-learning system</i></p> <p>6. Melakukan kerjasama dengan instansi Komunikasi dan Informasi dalam menyusun peta jalan pembangunan sekolah dengan sistem pembelajaran jarak jauh</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
		[SASARAN] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan menyusun Program yang mengarah pada penguatan kelembagaan pemuda 2. Meningkatkan program yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi aktif sosial dan politik bagi pemuda di Kalimantan Timur 3. Menyusun Program Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
		[SASARAN] 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas dalam upaya pemenuhan tenaga kependidikan dengan membuka jalur Pendidikan dan Penempatan Nakes 2. Perluasan penemuan & pengobatan penyakit dengan membangun berbasis pelayanan kesehatan bergerak 3. Membangun peta jalan Surveilans penyakit terpadu, real time dan berbasis laboratorium 4. Membangun penguatan promotif-preventif Pusekemas yang ada di Kab/Kota sesuai dengan aturan yang berlaku
		[SASARAN] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program yang berbasis memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>dengan pelatihan untuk perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun system kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender 3. Menyusun dan merencanakan program penyediaan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan program yang bertujuan memberikan peningkatan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan
	<p>[TUJUAN] 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>[SASARAN] 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program yang berorientasi pada meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi , contohnya Pelatihan Teknologi Tepat Guna 2. Membangun program dengan capaian peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan seperti pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa 3. Membangun kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>4. Mendorong pembentukan desa mandiri ekonomi dengan melibatkan lintas instansi seperti Instansi Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian.</p>
		<p>[SASARAN] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja lembaga pendidikan umum dan vokasi sebagai penyedia (<i>supplier</i>) Tenaga Kerja (TK); 2. Menyusun road map kebutuhan jumlah dan spesifikasi kebutuhan Tenaga Kerja dari DIDU yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur untuk mendapatkan gambaran aktual dinamika permintaan – penawaran Tenaga Kerja 3. Melakukan perluasan dan peningkatan layanan pelatihan vokasi yang berorientasi permintaan pasar tenaga kerja; 4. Merencanakan Program pemagangan pada perusahaan/lembaga mitra; 5. Meningkatkan program dan layanan perluasan dan peningkatan layanan sertifikasi bagi tenaga kerja

8.1.2. Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 2.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 2 “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” adalah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
[MISI] 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	[TUJUAN] 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	[SASARAN] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan menjalankan program Peningkatan kinerja perangkat daerah pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan penerimaan daerah. 2. Melakukan upaya perluasan sumber pendapatan daerah. 3. Menuntut perubahan komposisi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) 4. Peningkatan peran dan kapasitas UPTD pada perangkat daerah sebagai unit pengawasan dan pengendalian produksi dan tata niaga hasil produksi kawasan melalui pembenahan terhadap tata kelola perangkat daerah 5. Pembentukan titik kendali dan kontrol dalam bidang pengawasan dan pengendalian aktivitas tata niaga hasil produksi kawasan di daerah.
		[SASARAN] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi komoditas yang berorientasi ekspor. 2. Valuasi terhadap produktifitas Kawasan yang berpotensi sebagai produk komersial bernilai ekspor untuk melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sehingga bisa

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>diperdagangkan secara nasional dan internasional</p> <p>3. Sinkronisasi kinerja perangkat daerah dengan perangkat daerah lain pada sektor-sektor strategis yang memiliki produksi bernilai jual ke luar daerah dan negeri untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan penerimaan daerah.</p>
		<p>[SASARAN] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara</p>	<p>1. Mempercepat proses hilirisasi terhadap produk Kawasan di Kalimantan Timur.</p> <p>2. Meningkatkan produksi industri hilirisasi makanan dan minuman.</p> <p>3. Membangun sistem koordinasi yang intensif antara perangkat daerah pengendali produksi bahan baku dengan DISPERINDAGKOP.</p> <p>4. Diperlukan dibuat produk hukum daerah dan kebijakan tentang Pengelolaan sumberdaya kawasan mulai tahapan perencanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemasaran produk kawasan.</p>
		<p>[SASARAN] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)</p>	<p>1. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.</p> <p>2. Program Perencanaan pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMD memperhitungkan kemampuan produksi dan kemampuan ekonomi kawasan yang telah ditetapkan di dalam RTRWP untuk mencapai target pencapaian pembangunan ekonomi yang terukur dan terkendali.</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan peran dan kapasitas UPTD pada perangkat daerah sebagai unit pengawasan dan pengendalian produksi dan tata niaga hasil produksi kawasan melalui pembenahan terhadap tata kelola perangkat daerah 4. Penguatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan program berbasis kemampuan wilayah seperti geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi terutama kesesuaian dalam pencapaian program prioritas RPJMD 5. Perlunya regulasi di daerah untuk melakukan “audit produksi kawasan sumberdaya alam”, pengawasan dan pengendalian produksi dan produktifitas hasil-hasil sumberdaya alam .
		<p>[SASARAN] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan realisasi investasi pada sektor pertanian sebagai sektor yang mendorong sektor industri pengolahan. 2. Pengembangan pusat informasi dan promosi potensi produksi non migas dan non batubara daerah (sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan) 3. Pusat pengembangan usaha kecil (UKM dan UMKM) di daerah untuk mendorong investasi 4. Program pengembangan Pusat penelitian produk daerah kerjasama litbang Pemerintah daerah dengan instansi penelitian lain

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			5. Mendorong program perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah
		[SASARAN] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka program dan peluang serta permintaan terhadap produk-produk Koperasi dan UMKM daerah (Kalimantan Timur) dengan cara mendukung dan membantu penjualan secara online dan membuat regulasi agar perusahaan aplikasi dari dalam negeri maupun luar negeri turut mempromosikan dan menjual produk koperasi dan UMKM dari Kalimantan Timur yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah. 2. Menyusun program penyediaan teknologi dan sarana pendukung, untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif. 3. Melakukan program pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UKM seperti pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli 4. Peningkatan program akses perizinan dan Pembinaan UMKM serta membangun pola kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
		[SASARAN] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana prasarana objek wisata 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah dan destinasi.

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Membangun program kemitraan pemasaran yang luas di kalangan pelaku pariwisata skala nasional dan internasional 4. Membangun Sistem pariwisata yang dapat menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam dengan lintas perangkat daerah maupun dengan pemerintah Kabupaten /Kota 5. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah dengan multipihak 6. Program peningkatan mutu SDM kepariwisataan 7. Mendorong kebijakan dan regulasi yang bersifat multisektor dalam mendukung kepariwisataan Kalimantan Timur

8.1.3. Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 3

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Ketiga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SKPD dalam pelaksanaan RPJMD sebagai upaya pencapaian misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 3 “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan” adalah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
[MISI] 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	[TUJUAN] 4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar.	[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah 2. Program perencanaan kawasan yang dikelola oleh perangkat daerah harus berbasis geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi sehingga peningkatan aksesibilitas antar wilayah kawasan terintegrasi dengan baik. 3. Program perencanaan kawasan yang dikelola oleh perangkat daerah harus berbasis pengembangan wilayah dalam upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah kawasan 4. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah 5. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja antar perangkat daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>terutama yang berbasis kawasan agar terjadi konektivitas perencanaan pembangunan di kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelaraskan kembali indikator sasaran, program dan komponen kegiatan yang dilaksanakan agar membantu dalam pencapaian Visi dan Misi 7. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan sesuai sasaran. 8. Adanya harmonisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan sebagai dasar pemenuhan infrastruktur wilayah; 9. Harmonisasi kebijakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menurunkan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan 10. Penyelarasan dan penguatan peran pemerintah provinsi dengan PLN dalam mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di Kaltim 11. Pembuatan regulasi kebijakan pemanfaatan energi terbarukan pada sektor limbah kelapa sawit yang sangat besar di Kaltim 12. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja antar perangkat daerah terutama yang berbasis

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			kawasan agar terjadi konektivitas perencanaan pembangunan di kawasan. 13. Penyelarasan dan penguatan peran pemerintah provinsi dengan Pemerintah Pusat dan BUMN dalam mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di Kaltim

8.1.4. Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 4

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Ketiga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SKPD dalam pelaksanaan RPJMD sebagai upaya pencapaian misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 4 “Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan” adalah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
[MISI] 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	[TUJUAN] 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	[SASARAN] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1. Program penyediaan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan lingkungan sosial dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 3. Dalam menerapkan analisis ujia kualitas lingkungan hidup melakukan sampling yang terukur, valid dan realable 4. Membangun sistem operasional prosedur yang terpublish terkait dengan pengukuran kualitas lingkungan hidup sehingga masyarakat bisa mengetahui lokasi sampling yang akan dijadikan sampel pengukuran uji kualiatas lingkungan hidup 5. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan upaya penurunan emisi pencemaran udara, sehingga tidak meninggalkan bahwa kerja penurunan emisi hanya Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi melibatkan semua instansi
		<p>[SASARAN] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim 2. Menrancang program Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>mendorong membangun Ketangguhan Masyarakat</p> <p>3. Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manajemen bencana</p> <p>4. Menyusun Dokumen peta Resiko Bencana Kalimantan Timur dan Peta Evakuasi Bencana di Kalimantan Timur sebagai bagian dari metadadada kebencanaan daerah</p>

8.1.5 Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 5

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Ketiga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SKPD dalam pelaksanaan RPJMD sebagai upaya pencapaian misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 5 “Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan publik” adalah

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
<p>[MISI] 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</p>	<p>[TUJUAN] 6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</p>	<p>[SASARAN] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan melalui peningkatan <i>service quality</i> meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy, hasil observasi dan tindak lanjut dari Survei Kepuasan Masyarakat 2. Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan teknologi on-line, banyak proses yang dapat dilakukan dalam format digital, hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas (<i>paperwork</i>), sehingga proses akan menjadi lebih efisien, efektif dan transparan. 3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan (<i>Total Quality Management/ TQM</i>) 4. Mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka, sehingga ada pembagian peran dan kerjasama antara unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. 5. Peningkatan kualitas pelayanan: layanan publik 24 jam, dapat dikases dimana saja (<i>e-government, e-sign</i>) dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			pemberian pelayanan publik
		[SASARAN] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeragaman dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup perangkat daerah pemerintaha Provinsi Kalimantan Timur. 2. Penerapan secara tegas terhadap perangkat daerah dalam memberikan pelayanan public dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur yang disesuaikan dengan Permenpan RB No.35 Tahun 2012 terhadap pedoman penyusunan standar pelayanan publik. 3. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi serta menggunakan pola PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) 4. Dibutuhkan program bimbingan teknis dan atau workshop terhadap bidang perencanaan berbasis pengembangan wilayah terutama kesesuaian dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>pencapaian program prioritas RPJMD dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar tidak bersifat <i>Business As Usual</i> (BAU) dan Prinsip “sekedar menyelesaikan tugas” tanpa memberikan dampak bagi pembangunan daerah</p> <p>5. Diperlukan penataan kewenangan dan penataan kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, pengaturan kebijakan kemitraan antara pemerintah dan swasta (<i>public-private-society partnership</i>), serta pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi rigiditas birokrasi yang dapat dilakukan dengan debirokratitasi maupun deregulasi.</p> <p>6. Diperlukan penguatan pemahaman terhadap aparatur sipil negara terhadap program perencanaan di perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan daerah sesuai dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<p>[SASARAN] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tindakan KKN (karena terbatasnya pelayanan yang bersifat tatap muka) 2. Diperlukan pembentukan zona integrasi di perangkat daerah sebagai bagian dari birokrasi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas yang bersih dan bebas KKN. 3. Diperlukan pembentukan Wilayah Bebas Korupsi pada perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik. 4. Perlunya penguatan pemahaman manajemen perencanaan dan pengelolaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah 5. Dibutuhkan suatu program yang dapat mengembangkan sistem akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian secara terintegrasi. 6. Perlu menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan (baik melalui kotak pengaduan, sms

Misi	Tujuan	Sasaran	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti/ ditanggapi oleh petugas.</p> <p>Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu menyediakan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) dan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik.</p>

8.2. Kesimpulan Hasil Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun Kedua terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di atas, maka berikut disampaikan beberapa kesimpulan :

1. Dalam rangka verifikasi kesesuaian antara data dan dokumen pendukungnya, maka dalam "*website evaluasi dokumen perencanaan*" perlu ditambahkan fasilitas "*upload dokumen*" yang wajib diisi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, sehingga data yang disampaikan bersifat official dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Masih ditemuinya elemen birokrasi pemerintah daerah yang belum memahami esensi perencanaan, serta sekaligus memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam proses perencanaan.
3. Masih ditemukannya pola tradisional antara lembaga perencana kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan yaitu memiliki gap karena ketergantungan

dengan pihak lain. Sebagai contoh pada beberapa program pengentasan kemiskinan untuk menentukan sasaran program diperlukan data dan informasi dari instansi diluar pemerintah daerah.

4. Terdapatnya Keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya yang akan mempengaruhi perumusan kebijakan pada perangkat daerah sehingga perencana belum memahami mana saja yang perlu diprioritaskan atau didahulukan
5. Masih ditemukan pola belum efektif dan efisien penggunaan anggaran, hal ini berkaitan dalam penyusunan APBD, pada saat perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai pagu indikatif. Pada posisi pagu indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah terbatas dan selektif karena proses teknokratis menuntut seperti itu. Namun pada proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah (kepastian DAU, DAK dan Dana Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Perangkat Daerah pelaksana teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak eksternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan
7. Dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran terutama dalam prioritas RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sering terdapat ketidak konsistenan. Konsistensi terendah biasanya pada keterkaitan dokumen RKPD dan APBD, karena tidak selamanya proses teknokratis sejalan dengan proses politisnya.
8. Proses perencanaan Program/kegiatan di dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan terpisah dari penganggaran, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi besaran anggaran. Implikasi dari hal tersebut adalah para aktor yang terlibat didalam proses perencanaan seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar kemungkinan usulan yang disetujui juga semakin banyak. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat memerankan perannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi.

9. Mempercepat adaptasi terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019, sehingga proses penggolongan, pemberian kode, serta daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dapat dilakukan secara rapi dan sistematis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
10. Melakukan evaluasi dan penataan terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya menyangkut informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara paralel dan saling terhubung, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik dan ketersediaan akses data dan informasi bagi masyarakat luas.
11. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPJMD ke RKPD dan APBD tetap perlu dijaga pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana mandat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
12. Harus ada kesamaan sumber data yang digunakan oleh masing-masing organisasi perangkat dalam, dalam melaporkan indikator kinerja dan capaian masing-masing program prioritas dalam RPJMD. Termasuk untuk menghindari data ganda yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat, maka sumber data hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah dan seluruh organisasi perangkat daerah, berada satu pintu di tangan Biro Organisasi Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
13. 38 *Dedicated Program* harus diintegrasikan ke dalam program prioritas RPJMD pada tahun-tahun berikutnya, yang disertai dengan upaya evaluasi secara regular untuk mengukur capaiannya .
14. Dalam rangka menguatkan kapasitas kelembagaan, organisasi perangkat daerah harus membuat analisis kelembagaan, terutama yang berkaitan erat dengan kemampuan dan kelemahan, serta faktor pendorong dan penghambat organisasi dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan RPJMD (notes : pilihan metode diusulkan oleh Bappeda. Bisa SWOT, Fishbone analysis, ROCCUPI, atau regulatory impact assestment). Dengan demikian, maka faktor pendorong dan penghambat masing-masing organisasi perangkat daerah, dapat diidentifikasi sekaligus diantisipasi sejak awal.

15. Dalam rangka keterpaduan dokumen, maka hasil evaluasi RPJMD ini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi ditingkat rencana strategis masing-masing organisasi perangkat daerah.
16. Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka evaluasi terhadap hasil RPJMD ini supaya ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
17. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPJMD ke RKPD dan APBD tetap perlu dijaga pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dengan menggunakan SIPD.
18. Rencana strategis masing-masing organisasi perangkat daerah, perlu segera diubah dengan memprioritaskan beberapa aspek penting, yakni : *Pertama*, penyesuaian terhadap perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. *Kedua*, kelanjutan program penanganan sekaligus pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19. *Ketiga*, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memberikan kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat. *Keempat*, dukungan atas pencapaian 38 dedicated program yang merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Dan *Kelima*, mendukung prioritas kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan proyek pemindahan Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
19. Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergitas, baik dengan sesama organisasi pemerintah secara vertikal dan horizontal, maupun dengan pihak di luar pemerintah.
20. Jaringan data dan informasi hukum daerah, perlu dirapikan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, khususnya mengenai regulasi yang menopang pelaksanaan program-program RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
21. Perlu dilakukan pengetatan terhadap mekanisme pengaduan (*whistle blowing system*) sehingga memudahkan masyarakat untuk memberikan kritik, masukan, serta laporan terhadap kinerja serta dugaan perbuatan melanggar hukum dilingkungan organisasi perangkat daerah.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BEKERJASAMA DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2022**

